

“Demi Keadaban”

(Fragmen Gagasan Politik)



Marianus Mantovanny Tapung, lahir di Waso Ruteng Manggarai Flores NTT, 27 Oktober 1974. Bersekolah di SDK Ruteng II, SDK Reo III, SMP (1991) dan SMA (1994) Seminari Pius XII Kisol, STFK Ledalero (2000), Program S2 IPS Kanjuruhan Malang (2008). Tahun 2015 mengambil program doktor di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Agustus 2018 mempertahankan disertasinya berjudul: *Model Emancipatory Learning (Juergen Habermas) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis (EL-KBK)*

Siswa SMP dalam Menangani Permasalahan Sosial pada Pembelajaran IPS (Studi Pengembangan pada SMP/MTs di Kota Ruteng dengan yudisium predikat cum laude. Penulis berminat dalam bidang kajian dan diskusi filsafat politik, pendidikan kritis, dan sosial kemasyarakatan. Buku yang pernah diterbitkan: Kumpulan Drama Teater *We Have a Dream* Vol. I-II (1999-2000; Seminari Tinggi Ritapiret), *Dialektika Filsafat dan Pendidikan: Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan* (2013-2014, empat edisi; Pharresia Institute Jakarta), Kumpulan Drama Teater *Pastoral Panggung* (2014; Pharresia Institute Jakarta). Aktif terlibat dalam menulis artikel di beberapa seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Indonesia St. Paulus Ruteng dan kampus lainnya, serta menulis opini di Media Indonesia, Kupang Pos, Flores Pos serta beberapa media online nasional, regional dan lokal. Saat promosi doktor, meluncurkan terbitan buku ke-4 berjudul: *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*. Buku *Demi Keadaban (Fragmen Pemikiran Politik)* adalah buku ke-5 yang disusun selama masa post-doktoral dan sebagai dosen. Saat ini menjadi dosen pada Fakultas Kesehatan dan Pertanian Unika Indonesia St. Paulus Ruteng. Selain dosen, penulis menjadi Editor in chief pada Online Journal System “*Perennial Pedagog*” (platform LIPI); sekretaris eksekutif Perennial Institute (lembaga yang bergerak pada riset dan kajian pendidikan, sosial kemasyarakatan), sekeretaris jenderal Vox Populi Institute (Vox Point) Manggarai (lembaga kajian dan kaderisasi awam Katolik), dan Ketua Anak Waso Community (Awas.com) (Lembaga sosial kemasyarakatan lokal dalam bidang konservasi hutan dan lingkungan).

 PERENNIAL INSTITUTE
Jln. Teratai Bilas, Kel. Waso,
Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai-Flores- NTT.
Email: perennialinstitute2017@gmail.com



“Demi Keadaban”

Dr. Marianus Mantovanny Tapung

Dr. Marianus Mantovanny Tapung

“Demi Keadaban”

(Fragmen Gagasan Politik)

Prolog:
Dr. Marsel R. Payong, M. Pd.





Dr. Marianus Mantovanny Tapung

“Demi Keadaban”

(Fragmen Gagasan Politik)

Prolog: Dr. Marsel R. Payong, M. Pd.



Penerbit : PERENNIAL INSTITUTE

“Demi Keadaban”

(Fragmen Gagasan Politik)

Copyright © 2019 - Marianus Mantovanny Tapung

ISBN 978-623-91557-0-4

Penulis : Dr. Marianus Mantovanny Tapung

Editor : Ambros Leonangung Edu

Penata Letak : Yuris

Cetakan Pertama, September 2019

Diterbitkan oleh **PERENNIAL INSTITUTE**

Jln. Teratai Bilas, RT 013 RW 003,

Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai-Flores- NTT.

Email: perennialinstitute2017@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis an hak penerbitan pada PERENNIAL INSTITUTE. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kupersembahkan untuk:

Theresia Evarista Risa yang selalu setia
dan selalu berusaha menjadi isteri yang
terbaik, tiga srikandiku yang cantik nan
manis: Samantha, Audy dan Laura;
Oma Rene, Oma Ros dan Opa Darius yang
senantiasa setia berdoa demi keberhasilan
pekerjaan saya.

Kroni Perennial Institute, Anak Waso
Community (Awas.com),
dan Klub Buku Bacapetra.co



Pengantar Penulis

Buku yang berjudul “Demi Keadaban (Fragmen Pemikiran Politik)” ini merupakan sekumpulan serpihan lepas dalam bentuk opini yang telah dimuat di beberapa koran nasional dan regional lokal. Sebagai penggalan pemikiran, buku ini memiliki tujuan untuk meliterasi pemahaman politik masyarakat pembaca yang memiliki idealisme pemikiran politik. Namun saya perlu menyadari bahwa buku ini tentu tidak menjanjikan pemikiran politik yang brilian. Keyakinan sebagai seorang literat, beberapa pemikiran dalam buku ini bisa menjadi semacam pelecut untuk bisa terjun dalam diskursus yang lebih substansial-akademik dan sistematis mengenai tema politik berikut turunan elaboratifnya.

Yang menjadi semangat dasar buku ini adalah “ikhtiar membangun keadaban publik”. Menurut saya, semakin banyak orang yang menggaungkan pentingnya keadaban publik dengan caranya masing-masing, termasuk dengan membangun pemikiran politik adalah suatu keniscayaan dan bahkan kemendesakan. Tentu, ikhtiar yang eksistensial bertolak dari keseriusan dan komitmen untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Berdasarkan semangat inilah, sungguh saya tidak pernah berpretensi untuk menjadikan buku sebagai rujukan untuk berpikir, diskusi dan tulisan ilmiah. Namun, saya yakin dengan berbagai elaborasi pemikiran di dalamnya dapat memberikan stimulasi untuk pembaca agar bisa berpikir dan berwacana pada status dan level yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, kepuasan saya sebagai penulis terletak pada tanggapan kritis, dialektis, konstruktif dan inovatif dari pembaca. Karena hanya dengan itulah buku ini akan dihargai dan dipromosi, sembari mendapat tempatnya di masyarakat.

Saya perlu berterima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Para kroni di Perennial Institute, Dr. Marsel Payong sebagai Direktur Eksekutif, rekan-rekan perennial: Redy Jaya, Theo Ndorang, Fredy Daar, Supar Jelahut, dan Ambros Edu. Salut akan gagasan bersama untuk menjadikan buku ini sebagai satu dari tiga buku perdana yang diterbitkan di lembaga Perennial Institute ini. Harapannya, terbitnya buku bisa menjadi model dan titik pijak bagi penerbitan

buku-buku yang lain. Mari, tetap rapatkan barisan. Terima kasih juga dukungan teman-teman dosen di Unika Indonesia St. Paulus Ruteng, khusus di Fakultas Kesehatan dan Pertanian. Lebih khusus lagi dua srikandi di satu ruangan kerja UPM, Ibu Farry Dewi dan Ibu June Demang. Terima kasih untuk kebersamaan selama setahun. Teman-teman diskusi di klub buku Bacapetra.co di bawah pimpinan kandidat doktor, dr. Ronald Susilo. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari rapatkan tekad untuk membangun keadaban yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Merdeka Agustus 2019,

Mantovanny Tapung



Prolog: “Literasi Politik Demi Keadaban”

Oleh: Dr. Marsel R. Payong, M.Pd.
(Direktur Eksekutif Perennial Institute;
Dosen Unika Indonesia St. Paulus Ruteng)

Setelah mendalami lembar demi lembar buku ini, saya menyadari bahwa politik tidak semata-mata berbicara tentang kekuasaan (*power oriented*), kehendak berkuasa (*will to power*) atau taktik-taktik memperoleh kekuasaan dan cara-cara menggegamnya dengan erat (*how to gain and maintain the power*). Politik merupakan *kata kerja*, yaitu aktivitas untuk

‘memperjuangkan’ atau mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Yah, antara lain, memperjuangkan keadaban yang lebih baik. Siapa saja yang terlibat di dalam ruang politik memiliki tugas dan tanggung jawab (*gabe und aufgabe*) untuk memperjuangkan keadaban yang bermartabat. Politik pun menjadi sebuah panggilan bagi mereka yang ingin mengabdikan diri pada ‘perjuangan’ kemaslahatan hajat hidup orang banyak.

Politik baru mendapat *legacy* pemaknaan dan pengembangan pengertian, ketika dikontekstualisasi dan direlevansi dengan perjuangan martabat kehidupan manusia. Dengan demikian, politik menjadi sangat bionik dan organik. Ia menjadi lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong kehidupan manusia. Tanpa lokomotif tersebut, gerbong-gerbong itu mengalami ‘stagnasi’ dalam drama kehidupan manusia.

Dalam pengertian ini, politik mengatasi ruang dan waktu, melampui sekat-sekat teknis prosedural. Politik tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diperuntukkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia selalu ada dalam pemaknaan relasional dengan bidang-bidang kehidupan manusia yang lain. Ia adalah entitas terbuka dan berdimensi kreatif untuk membangun diskursus baru. Kita mengenal, misalnya, politik pendidikan, pendidikan politik, politik ekonomi, ekonomi politik, politik sosial, sosial politik, politik agama, agama politik, dll. Dalam politik demokrasi modern, diskursus mengenai politik sudah merambah seluruh bidang kehidupan. Semua ranah kehidupan manusia hampir pasti berhubungan secara berkelindan dengan

politik dalam artian yang sejati, yakni memperjuangkan keadaban dan kesejahteraan masyarakat negara bangsa.

Kelindan antara Politik dan Pendidikan

Sebagai pendidik, saya justru menyadari bahwa politik dan pendidikan tidak ada batasannya sama sekali. Pendidikan ada karena ada politik, begitu juga sebaliknya. Kegiatan pendidikan merupakan hasil konsensus politik mulai dari kurikulum hingga anggaran pendidikan. Demikianlah proses pendidikan pada gilirannya membangun kehidupan politik bernegara yang lebih baik. Jadi, banyak hal yang ada dalam domain pendidik bahkan dijiwai oleh spirit perjuangan politik, baik pada level filosofis konseptual maupun praksis kebijakan strategis dalam pembelajaran di sekolah atau kelas. Sementara pada pihak lain, politik tanpa pendidikan akan cenderung mengalami wanprestasi atau malpraktik. Banyak kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia politik disebabkan karena *core* pendidikannya tidak inheren. Nilai-nilai pendidikan seharusnya terintegrasi secara komprehensif dan holistik pada narasi dan praksis perpolitikan di mana dan kapan saja.

Relasi erat antara politik dan pendidikan menjadi keniscayaan pada abad 21. Saling mendukung yang elaboratif dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang lateral, kompeten dan berpikir kritis, serta memiliki daya saing yang tinggi, menjadikan politik dan pendidikan seumpama dua sisi dari satu mata uang. Elaborasi yang dialektis antara keduanya akan semakin memiliki daya ungkit bila berada dalam *platform* yang lebih progresif nan

visioner. *Platform* progresif-visioner ini merupakan bagian dari tuntutan, bahwa kompleksitas permasalahan yang sedang dan akan terjadi di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan hanya cara pandang pendidikan yang lazim dan konvensional.

Elaborasi antara politik dan pendidikan dengan sendirinya akan memberangus tendensi yang memaksa pendidikan sekadar untuk diabdikan pada kebutuhan pasar dan kepentingan ideologi-ideologi tertentu. Politik pendidikan mesti terus ‘dimandikan’ agar bersih dari upaya penjajahan terselubung dari kelompok, golongan dan rezim budaya, yang secara laten telah mereduksi makna dan nilai luhur pendidikan. Saya sangat setuju bila negara memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen untuk melestarikan ideologi pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan, persatuan dan kesatuan negara bangsa. Namun, saya sangat tidak merasa nyaman bila negara membiarkan pendidikan dijadikan sebagai ajang melancarkan proyek-proyek ekonomi dengan menggusur program-program kemanusiaan yang merupakan substansi pendidikan. Pengadaan fasilitas pendidikan seperti buku pelajaran, alat tulis, sarana prasarana teknologi, perangkat evaluasi nasional, dana operasional sekolah, dana untuk siswa dan guru, menjadi sasaran dan target proyek ekonomi dari tingkat pusat sampai daerah. Pada titik tertentu proyek ekonomi ini akan menggeser substansi makna pendidikan ketika tidak dikontrol dan diawasi dengan ketat dalam pelaksanaannya. Beberapa penyimpangan yang pernah terjadi dalam menjalankan proyek-proyek ini telah mencoreng makna sejati dari tujuan pendidikan nasional.

Kemendesakan Politik Pendidikan yang Visioner

Dalam sudut pandang pedagogik visioner, kemauan dan kehendak politik yang baik dari para pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat) sangat menentukan kemajuan pendidikan. Kehendak politik ini bukan saja pada skala kebijakan kurikulum dan perangkat-perangkat turunannya, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan pendidikan. Keadilan dan pemerataan pendidikan, selain pada distribusi dan alokasi, juga berkorelasi dengan rasionalitas tingkat kesejahteraan para pendidiknya. Rasio kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta di daerah terpencil menjadi agenda yang belum terselesaikan oleh pemerintah sampai saat ini. Sudah pasti ketika berbicara tentang kesadaran visioner, maka kita akan beririsan dengan kesadaran material (kesejahteraan) para pendidik. Kesadaran visioner tidak muncul begitu saja tanpa dibangun di atas kesadaran material yang matang dan mapan. Kesadaran visioner ini akan terbangun dengan sendirinya bila pemerintah bisa menyudahi urusan-urusan material para pendidik secara adil dan merata. Pada negara-negara yang sudah maju peradaban pendidikannya, kesadaran visioner ini bertumbuh dengan baik ketika urusan-urusan material pendidiknya sudah diselesaikan secara tuntas.

Penutup

Buku karya Dr. Mantovanny Tapung ini memiliki tujuan, urgensi, *state of the art* dan bahkan *state of investigation* untuk memberi pencerahan inspiratif terkait berbagai

upaya memperjuangkan kesejahteraan negara bangsa, dari tingkat lokal sampai nasional. Makna dialektika perjuangan mungkin agak samar dan abstrak dalam pembahasan pada berbagai penggalan, tetapi jika diselami secara mendalam, makna tersebut dapat ditemukan. Dalam hubungan dengan itu, penulis menyadari, sebagai bagian dari idealitas pemikiran politik, buku ini tentu tidak menjanjikan sesuatu yang cermerlang. Namun sebagai gerakan literasi dalam ranah politik, ia menjadi semacam pemicu (*trigger*) untuk masuk pada diskusi yang lebih substansial-akademik dan terstruktur tentang tema politik.

Meskipun secara instruksional buku ini tidak bertujuan membuat pembaca langsung memahami politik, tetapi secara nurturan, pembaca bisa menyelami sejauhmana politik dapat dikaitkan dengan berbagai isu kehidupan manusia, dan mungkin mendapatkan sejumlah inspirasi mengapa politik dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan publik . Selamat berselancar dengan berbagai fragmen pemikiran politik! Selamat dan sukses buat Sdr. Dr. Mantovanny Tapung yang hadir sebagai akademisi yang literat dalam konsep dan praksis politik, baik pada konteks nasional, regional maupun lokal.



Daftar Isi

Judul-----	i
Persembahan -----	iii
Pengantar Penulis -----	v
Prolog -----	ix
Daftar Isi -----	xv
Isi Buku	
Bayangan Paternalisme Politik Lokal-----	1
Stagnasi Dramaturgi Politik Daerah-----	7
Politik Unitas Gereja Pasca Pemilu 2019 -----	15
Hantu Golput dari Milenials -----	23
Mengadministrasi Demokrasi Substantif di NTT -----	29
Pragmatisme Politik Teror -----	35

“Demi Keadaban” (Fragmen Gagasan Politik)

Bahasa Kampanye di Pemilu 2019 -----	43
Radikalisme dan Keruntuhan Rasionalitas -----	49
<i>Nation State Approach</i> , Tengahi Masalah Komodo-----	57
Politik Ekologi di Kota Sampah -----	65
Revolusi Pengetahuan yang Tercecer -----	73
Sebaiknya Agama dan Pengetahuan Tetap Sejalan-----	81
Politik Kreatif dan Dekonstruksi Sosial-----	89
Cegah Jebakan Populisme Peyoratif!-----	97
Menjaga Pilar Bangsa -----	105
Rancang Lagi Kesadaran Berbangsa -----	113
Membangun Optimisme dalam Bernegara Bangsa -----	121
Pilih Nekrokrasi atau Biokrasi?-----	129
Terapeutik Konstruksi Sosial: Memerangi Radikalisme ---	137
Interaksi Simbolik dalam Berpolitik Bangsa -----	145
Menyoal Metanarasi Visi/Misi Calon Kepala Daerah ----	153
Masyarakat NTT dan Kesadaran Politik Emansipatoris---	159
Politik NTT: Premis Negatif vs Rasionalitas Nilai -----	167
Pilkada 2015 - Pilgub 2018: NTT Terpolar Pragmatisme Politik-----	173
Redupnya Rasionalitas Berbangsa -----	179

Merekonstruksi <i>Driving Forces</i> Pembangunan Bangsa -----	187
Integrasi Nasional: Tolak Fatalisme, Perkuat Etika Kebangsaan -----	195
Kritik Fenomenologi terhadap Karakter Politik Artifisial -----	203
<i>National Self Determination</i> dan Literasi Politik -----	211
Pilkada, Kehendak Berkuasa dan Kepercayaan Publik-----	219
Mencermati <i>Hate Speech</i> dalam Pilkada-----	227
Tantangan “GG” 2030 bagi NTT -----	233
Mengenal Dimensi-Dimensi Revolusi Mental-----	239
Cerdas dan Etis dalam Pilkada -----	245
Mahar Politik: Pertarungan Uang dan Kualitas Diri-----	251
Kapasitas, Popularitas dan Elektabilitas dalam Pilkada Serentak -----	261
Melawan Terorisme dengan <i>Social Critical Skills</i> -----	267
‘Ancaman’ Mental Mekanik Pejabat bagi Kepala Daerah--	273
Politik Kesehatan dan Problem yang Belum Usai -----	279
Politik Pendidikan yang Visioner di Abad 21 -----	287
Literasi Marxis, Lawan Pemberangusan!-----	305

“Demi Keadaban” (*Fragmen Gagasan Politik*)



Bayangan Paternalisme

Politik Lokal¹

Tak dapat dipungkiri, resonansi paternalisme politik mulai simultan bertumbuh di negara berkembang seperti Indonesia. Selama ini, terminologi ‘paternalisme’ mungkin hanya familiar dalam konteks diskursus sosial budaya, sejalan dengan pemaknaan yang negatif dan deviatifnya, ketika dipertentangkan dengan perspektif peradaban modern. Lantas, terminologi ini secara konseptual dan bahkan praksis, dipahami sebagai salah satu bentuk resistensi dari perjuangan kesetaraan, keadilan, partisipasi, kontestasi dan demokrasi. Para pejuang kesetaraan dan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan menjadikan isu paternalisme ini sebagai komoditas untuk membangkitkan sejumlah emosi dan militansi perjuangannya. Dalam perkembangan peradaban politik di negara-negara berkembang, isu paternalisme

¹ Harian Umum Pos Kupang, 05/07/2019

ini juga menjadi semacam gandengan seksi demi menggairahkan semangat jiwa saat mengadvokasi kesetaraan dan keadilan berdemokrasi (Christopher, 2012). Bagi kaum idealis, unsur-unsur negatif dalam tubuh paternalisme dijadikan sebagai hal-hal potensial dalam rangka melawan dan melabrak konsep dan praksis politik paternalistik yang lagi akut belakangan ini.

Dalam pemikiran yang progresif-visioner, paternalisme politik telah diyakini sebagai bentuk negasi dan momok pada sebuah peradaban demokrasi berkeadilan. Keyakinan itu muncul ketika mendalami beberapa ciri khasnya, seperti: (1) Mengakarnya pola monolitik dan singularistik, yang berdampak pada *framing* pikiran dan sikap politik dari masyarakat. Pola monolitik dan singularistik ini merambah sampai pada hal yang paling mendasar dalam pilihan politik masyarakat. Masyarakat kerap dihadapkan hanya pada satu atau dua pilihan politik saja, sementara alternatif lain sangat tidak dimungkinkan. Turunannya, selain terjadi linearitas yang jenuh dan tidak terbukanya ruang dinamika dalam kontestasi, satu atau dua pilihan politik ini memberangus upaya tumbuh kembang kader-kader atau generasi-generasi baru sebagai pemimpin. (2) Dengan demikian, terkonstruksi skema berpikir kebanyakan masyarakat bahwa yang bisa terlibat dalam kontestasi politik hanyalah orang-orang yang lahir dari lembaga-lembaga politik, atau orang-orang punya akses dan diusung oleh partai politik. Dalam tataran kandidasi, persepsi politik seperti ini sangat wajar dan natural. Namun ketika berbicara pada level demokrasi berkeadilan, semua orang tentu memiliki akses dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tentu dengan catatan, terpenuhi syarat dasar (*baseline*) sebagai pemimpin

seperti memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas. (3) Ciri khas lain dari paternalisme politik adalah rendahnya partisipasi dan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses regenerasi dan kandidasi pemimpin. Masyarakat sudah terpola dengan perilaku berpikir bahwa proses regenerasi dan kandidasi politik merupakan tugas dan tanggung jawab partai politik dan lembaga-lembaga terkait. Masyarakat merasa, baru akan terlibat waktu aktivitas pemilihan saja (*election event*). Padahal, dalam konteks demokrasi partisipatif dan berkeadaban, peran masyarakat sangat holistik dan imparial, di mana mereka seharusnya terlibat aktif dalam keseluruhan prosesi kandidasi, dari memunculkan calon pemimpin sampai pada saat memimpin. (4) Kentalnya paternalisme politik ini sudah pasti memberangus upaya kesukarelawan (*volutarisme*), yang sebenarnya menjadi semangat dari *platform* politik modern. Paternalisme menjadi sangat alergi dengan *volutarisme* karena jiwa dan semangatnya begitu kontradiktoris. Paternalisme sangat menghendaki hirarkisme politik yang ajeg, mapan, tegak lurus, dan monologis; sementara *valutarisme* sangat terbuka pada dialog, mengedepankan dialektika, inklusivitas, konektivitas dan sinergisitas simpul-simpul kekuatan masyarakat. Bila paternalisme memunculkan pemimpin sebagai titisan yang ‘sudah jadi’ alias pakem, sementara *valutarisme* melahirkan pemimpin dalam konstruksi ‘sedang menjadi’, di mana ada proses pemunculan, pembentukan, pematangan dan kemudian penguatan. Dari sudut pandang *voluntaristik*, kepemimpinan bukan satu proses sekali jadi, tetapi berada dalam dinamika dan fluktuasi yang berkepanjangan dan

alot. Selain itu, dalam kaca mata volutarisme, politik merupakan suatu aktivitas pembelajaran dalam merajut peradaban sejati, yang memungkinkan setiap masyarakat merasa memiliki kehidupan dan masa depannya.

Fenomena paternalisme politik dan karakteristiknya, secara simultan-faktual sudah menjalar sampai ke daerah. Konsep dan praksis paternalisme ini semacam menjadi bagian dari langgam politik daerah yang begitu kental. Ada beberapa variabel yang melanggengkan langgam paternalisme politik, seperti minimnya literasi, edukasi dan kesadaran politik pada tingkat akar rumput masyarakat, yang berdampak pada terkuaknya konvensionalisme, ortodoksionisme dan primordialisme pandangan politik. Beberapa daerah di Indonesia yang persis memiliki basis geo-kultural paternalistik, pandangan politik yang konvensional, primordial, dan ortodoks seperti ini justru semakin mendapat tempat. Misalnya, ada pandangan bahwa yang bisa jadi pemimpin daerah hanyalah kaum patriaki, kaum borjuis (bermodal), kaum darah biru (ningrat), kaum intelektual, dll. Rendahnya literasi, edukasi dan kesadaran politik ini berdampak pula pada pandangan yang parsial dan fragmentaris tentangnya. Politik dianggap sebagai kawasan asing nan kramat, yang hanya bisa dimasuki oleh para pihak yang berkepentingan; di sisi lain, masyarakat awam merasa rendah diri dan menganggap diri tidak bisa terlibat dalam konstelasi politik. Pada kasus paternalisme yang sengaja didesain, masyarakat bahkan sengaja tidak dilibatkan dan diberi akses dalam kancah pembangunan peradaban politik.

Paternalisme politik semakin menjadi akut dan mewabah, ketika oligarki mengambil alih dramaturgi politik di daerah. Peran dari para aktor sekaligus komprador politik dengan berbagai pertarungan kepentingan di dalamnya, turut mengafirmasi bahwa politik di daerah sangat paternalistik, berikutan oligarkis. Peran komprador politik dengan manifestasi berbagai kepentingan, baik ideologis atau pragmatis, justru memperlebar disparitas peran politik. Masyarakat semakin merasa inferior, sementara para aktor ini semakin superior untuk menyutradarai permainan politik di daerah. Masyarakat menjadi komoditas wayang politik dan para komprador menjadi dalang yang mengatur arah pergerakan politik, sesuai dengan kepentingan dan pesanan. Dengan demikian, bagi segelintir kaum idealis yang memiliki ideologi politik yang progresif-visioner, akan tetap menjadi sekedar figuran dalam peta konstelasi perpolitikan di daerah. Berdasar kajian kualitatif ini, tentu pesimisme akan menghantui setiap kali ada upaya pergerakan politik yang inovatif dan kreatif, *out of the box* dan anti *mainstream* dari kaum idealis. Pada level yang menggurita, jika kaum idealis politik tidak mampu bertahan, sudah pasti akan termakan dan tenggelam oleh infiltrasi kepentingan pragmatis dari para komprador politik paternalistik.

Dengan demikian, paternalisme politik nasional tidak berdiri sendiri atau berkembang dalam jalurnya sendiri, tetapi merupakan akumulasi dan eskalasi dari fragmen-fragmen budaya paternalisme politik lokal. Bila fragmen-fragmen ini kuat dan terus mengakar, sudah pasti akan membangun model pakem piramida paternalisme politik nasional. Selanjutnya, piramida paternalisme politik

nasional ini menjadi bangunan yang menghalangi segala bentuk upaya inovasi dan kreasi politik di negara bangsa ini. Rupanya, selagi piramida paternalisme politik ini tegak berdiri, ruang bagi kaum idealis-visioner tidak akan mendapat tempat untuk berinovasi dan berkreasi.

Bahan Bacaan:

Beal, Christopher, 2012. “John Stuart et Le Paternalisme Liberal” (terjem. John Stuart dan Paternalisme Liberal), *Espri*. (Paris, France: 1932). Doi: 10.3917/espri/1307.0016.

Suseno, Franz Magnis, 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Hariantanti, Runi, 2003. “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II, No. 1.

Adian, Donny Gahral. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*.: Yogyakarta: Jalasutra.

Bev S. Jennie, “John Stuart Mill: Utilitarianisme, Kebahagiaan dan Feminisme”, *Basis, Philosophy*, 17 April 2012.



Stagnasi Dramaturgi

Politik Daerah²

Dramaturgi politik senantiasa membutuhkan rangkaian geliat yang ekspresif dan impresif. Dengan berbagai bentuk cara, para politisi atau pemimpin politik dari pusat sampai daerah, berusaha mengkarakterisasi bermacam pesan politiknya dalam kanal yang impresif ketika berinteraksi dengan masyarakat. Berjamak upaya demi merangkul kesan di ruang hati masyarakat merupakan bagian dari tujuan utama skema dramaturgis. Dalam perspektif pendidikan politik kritis, sebagai irisan dari pola dramaturgis, politik sebaiknya tidak hanya memainkan peran lama dan datar yang minim inovasi dan penuh dengan perspektif lawas, dengan pesan-pesan kadaluwarsa. Kalau

² *Harian Umum Pos Kupang*, 31/07/2019

tidak, hal tersebut tentu akan menimbulkan kejenuhan yang mendalam bagi masyarakat. Padahal kejenuhan tersebut bisa diminimalisasi ketika berbagai properti sumber daya yang sangat potensial di masyarakat, dieksplorasi dan dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam peran-peran politik nyata. Pemanfaatan yang baik dan cerdas terhadap properti sumber daya tersebut seyogyanya bisa menjembatani jurang antara ideologi politik dan faktualitas kemasyarakatan.

Karena adanya fakta kejenuhan dan minimnya eksplorasi mengenai faktualitas kemasyarakatan, akhirnya memunculkan gagasan imperatif mengenai pentingnya ikhtiar menyesuaikan dan menghubungkan antara apa yang terjadi di panggung depan politik dan panggung belakang kehidupan nyata masyarakat. Panggung depan (*front stage*) diwajibkan merepresentasi fakta dan kebutuhan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan bukanlah ajang hanya untuk mengakomodasi *platform* kepentingan politik kelompok. Panggung depan harus menjadi kanal simbolik untuk membahasakan secara lebih terstruktur, lugas dan sistematis tentang fakta dunia panggung belakang, yang kerap bersifat diferensiatif, polarisatif dan sulit diidentifikasi. Seturut fatwa etika politik, meskipun diferensiasi dan polarisasi senantiasa menjadi bagian dari fakta panggung belakang, *conditio sine qua non*, disuarakan di panggung depan oleh para pemimpin politik. Berbagai bentuk inisiasi, mediasi, kolaborasi, dialog, diskursus, kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak bisa menjadi panggung tengah (*middle stage*) untuk menghubungkan jarak antara panggung depan dan panggung belakang.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik Erving Gofman, kepaiawaian memainkan peran yang berbeda antara panggung depan dan panggung belakang pada pemimpin politik disebut sebagai fenomena manipulasi diri. Dalam bukunya, *The Presentation of Self in Every Day Life* (1959), Gofman mengurai fenomena ini sebagai sintesis dari gaya (*manner*) dan penampilan (*appearance*) dari seorang pemeran. Gaya dan penampilan para pemimpin politik antara panggung depan dan panggung belakang merupakan bagian dari manipulasi diri. Gaya dan penampilannya dipoles dan dikemas sedemikian rupa untuk memperlancar penyampaian pesan-pesan politik. Sudah pasti pesan-pesan ini tidak terlepas dari titipan politik yang menyutradarainya. Manipulasi diri ini terungkap ke permukaan manakala permainan panggung depan sangat berbeda dengan situasi panggung belakang yang riil, orisinal, bermoral, manusiawi, apa adanya, terbuka, dan lugas. Menurut George Ritzer (2012), manipulasi diri di panggung depan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen kesan (*impression management*) ketika para pemimpin politik menggunakan taktik tertentu untuk memelihara kesan ‘seolah-olah’ mereka bisa mengatasi berbagai masalah pada masyarakat.

Selanjutnya, dalam konsep dramaturgi, politik sebagai praksis maupun konsepsi, mesti dipahami secara dinamis. Pemahaman dinamis ini sudah pasti akan membuat politik memiliki daya tarik, daya saing, daya ungkit dan daya tahan bila bertarung pada level gagasan berikut praksisnya di masyarakat. Dramaturgi politik yang dinamis, fluktuatif

dan bahkan gejolak membuat daya tarik tersendiri. Pada momen-momen tertentu, baik pada peristiwa politik tingkat dunia, nasional maupun lokal, politik menghipnotis atensi dari berbagai kalangan dan media. Karena seksinya ini, gunjang-ganjing politik bersaing begitu ketat bila disandingkan dengan diskursus mengenai ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, agama bahkan mengalahkan isu-isu besar terkait masalah paling krusial seperti pelanggaran HAM, penjualan manusia, krisis lingkungan, masalah derajat kesehatan, krisis moral dan identitas, kelaparan dan kehausan. dll. Politik juga berdaya ungkit yang besar dan menjadi ordinasi dari bidang-bidang lain. Dia menjadi semacam lokomotif untuk merangsang isu tentang bidang lain, sehingga membuncahlah berjenis konsepsi mengenai politik ekonomi, politik pendidikan, politik sosial-budaya, politik keamanan, politik agama, politik kesehatan, politik kemanusiaan, bahkan sampai pada ide tentang politik ideologi dan politik gagasan. Diskusi mengenai bidang-bidang kehidupan masyarakat, rasanya belum komplit bila tidak direlevansi dan dikorelasi dengan politik. Tentu, koefisien dari relevansi dan korelasinya sangat tergantung pada sejauh mana politik berdampak positif dan negatif terhadap bidang-bidang yang diungkitnya. Karena memiliki daya tarik yang seksi, didukung dengan daya ungkit yang besar serta daya saing yang kuat, maka politik pun sering bertahan menjadi *trending topic* pembicaraan masyarakat dan pemberitaan media cetak/daring.

Selain penuh dinamika dan warna-warni, dramaturgi politik juga kerap menampilkan sisi linear dan normatif. Sisi linear dan normatif ini justru bisa ditarikan dari adanya koefisien relevansi dan korelasi politik terhadap bidang-bidang yang terkait hajat hidup manusia di negara-negara digdaya maupun berkembang. Kofisiensi inilah yang kemudian bisa memunculkan asumsi tentang patron hirarki politik. Patron hirarki tampak pada garis lurus politik global dengan politik nasional, yang meski tidak kasat mata, tetapi mencuat melalui hubungan pengaruh dan sebab akibat. Misalnya, kebijakan politik negara-negara digdaya berpengaruh secara signifikan juga pada kebijakan politik dalam negeri dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Begitu juga yang terjadi dalam negeri. Platform politik nasional sangat mempengaruhi politik di daerah. Perkembangan politik daerah berkelindan dengan konstelasi perpolitik nasional. Kebijakan dan kepentingan politik di daerah sebagian besar tidak bisa terlepas dari kebijakan dan kepentingan politik nasional. Jadi ada semacam garis hirarki patron politik yang tidak terhindarkan dari kancah politik dunia menuju politik nasional dan berikuk politik daerah.

Di daerah, asumsi hirarki patron politik ini juga semakin tampak pada pola relasi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin politiknya. Begitu kuatnya hirarki patron politik di daerah, sehingga sering kali para pemimpin politik tidak mampu keluar dari linearitas dan normativitas. Kondisi ini yang menyebabkan politik di daerah menjadi sangat stagnan dan *status quo*. Jika dipelihara, hirarki patron

politik ini bisa mengembosi kreasi dan inovasi politik, dan membuatnya menjadi datar sekaligus hanya bagian pemanis bibir pada termin kampanye demi mengumpan elektoralitas. Hakul yakin, keadaan stagnasi dan *status quo* politik berdampak besar pada kebijakan roda pemerintahan (birokrasi) dan luaran lain seperti kebijakan strategis pembangunan. Pada titik kulminatif, keadaan ini membuat masyarakat jengah sekaligus bosan yang luar biasa, sehingga berujung pada sikap fatalistik dan indiferen. Masyarakat menganggap politik hanyalah panggung manipulatif dari para pemerannya untuk menitipkan pesan kepentingan kelompok. Masyarakat menilai para pemimpin acapkali menampilkan peran-peran manipulatif yang berbeda jauh dengan realitas kebutuhan masyarakat yang dipimpinya. Nah, bila pemimpin politik tidak cerdas dan kritis dalam menyikapi dominasi dan determinasi hirarki patron politik ini, maka bisa terjebak pada peran panggung politik stagnan, bahkan sarat tipu daya.

Moralitas politik menghendaki adanya kecocokan dan kesesuaian antara apa yang terjadi di panggung depan dan panggung belakang. Dalam konteks politik kedaerahan, kecocokan dan kesesuaian ini sangat penting, karena masyarakat di daerah masih terbilang polos nan lugu dalam memahami politik. Sebagian besar dari mereka masih terkategori lurus dan jujur dalam memahami realitas, termasuk pentingnya politik bagi pengembangan kehidupannya. Karenanya, para pemimpin daerah sebaiknya menghargai kelurusan dan kejujuran masyarakat

daerah ini, dan tidak menjadikannya sebagai peluang bereksplotasi pada permainan panggung depan politiknya. Karenanya, bermain peran yang realistis dan keluar dari jebakan hirarki patron politik akan membuat pemimpin politik menjadi lebih inspiratif dan kreatif. Peran-peran kepemimpinan politik akan menjadi lebih bermakna bila membahasakan secara lugas dan terus terang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun hanya dalam bentuk simbol saat membawakan perannya, setiap pemimpin harus tetap komit dan konsisten dalam merepresentasikan realitas yang terjadi dalam tubuh masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi disparitas antara kejadian di panggung depan politik dan panggung belakang kehidupan riil masyarakat. Dan peran yang dimainkan tidak stagnan dan bebas dari manipulasi.

Bahan Bacaan:

- Erving Goffman, 1959. *The Presentation of Self in Every Day Life*, Doubleday Anchor: Garden City, New York.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2012. *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern* (terjem.) Bantul: Kreasi Wacana.
- Sri Sunike dan Handoyo, 2012. “Paradigma Teori Dramaturgi dalam Kehidupan Sosial”, *Civis*. FPIPS IKIP PGRI Semarang. No. 2 II. 1.

Nichols, Ray L., 1979. *Treason, Tradition and The Intellectual: Julien Benda and Political Discourse*.

Suseno, Franz Magnis, 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Hariantanti, Runi, 2003. “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II, No. 1.



Politik Unitas Gereja Pasca Pemilu 2019³

Politik Gereja universal berikut Gereja lokal di Indonesia adalah persatuan. Politik persatuan ini didasarkan pada semangat dasar: ‘Supaya mereka semua menjadi satu (*Ut Omnes Unum Sint; That they all may be one*). Semangat dasar ini dipenggal dari frasa ayat mengenai amanat perpisahan Yesus Kristus dengan murid-murid-Nya: “Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku” (Yoh. 17:12). Politik persatuan Gereja ini selaras dengan prinsip dasar ideologi politik negara bangsa,

³ Matakatolik.com, 19/07/2019

yakni persatuan Indonesia. Ideologi politik persatuan ini secara mendasar juga telah dielaborasi dengan lugas dalam empat pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Persatuan menjadi isu yang sangat mengemuka pada saat kontestasi Pemilu 17 April 2019. Segregasi dan konflik yang mengarah pada pemikiran separatis dan desintegrasi cukup mengental, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kerusuhan 21-22 Mei 2019 sudah cukup menarasikan adanya itikad mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Syukur, kerusuhan tersebut dapat diatasi dengan sigap oleh aparat keamanan (Polri dan TNI) (Tempo.co., 23/05/2109). Terlepas dari apa yang menjadi maksud dan tujuan dari gerakan-gerakan tersebut serta siapa orang/kelompok yang menjadi dalang, satu hal yang perlu diantisipasi adalah senantiasa menguatnya potensi embrional untuk memecah belah NKRI (Kompas.com, 5/07/2019). Tetap diproyeksi, pasca pemilu dan bahkan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Jokowi dan Mar’uf Amin (27/06/2019) dan pertemuan Jokowi dan Prabowo (13/07/2019), potensi itu tetap menyeruak. Potensi ini termanifestasi dalam bentuk gerakan senyap dari kelompok-kelompok yang alergi dengan gagasan persatuan (CNNIndonesia, 17/07/2019, “Pertemuan Jokowi-Prabowo dinilai sudutkan kelompok radikal”). Berbagai basis gerakan senyap ini, suatu saat terimpuls secara eskalatif ketika ada pemicu destruksinya. Pemicu destruksinya bisa saja bersumber pada pelatuk masalah politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dll.

Bila merujuk pada fase kontinual dan gradual, bangsa Indonesia sepertinya masih dalam proses transisi menuju peradaban politik matang. Dalam proses pematangan tersebut, masyarakat berkemah pada bermacam identitas sosial, yang tentu berimplikasi pada wawasan kebangsaannya. Menurut Fromm dalam buku ‘Masyarakat yang Sehat’ (1995), pada suatu bangsa yang sedang bertransformasi peradaban politiknya, terdapat minimal tiga tipikalitas masyarakat: (1) Pecinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cita-cita, optimisme, menjaga kelangsungan perkembangan kehidupan dalam segala cara dan bentuk. Pada masyarakat ini, jarang terjadi destruksi, konflik, dan friksi sosial. Masyarakat ini kerap menjalin kerja sama, solidaritas dan toleransi dengan penuh cinta dan penghargaan. Mereka secara bertanggung jawab merajut ikatan-ikatan persaudaraan dan selalu membangun pengertian tentang diri, sesama dan lingkungan. Masyarakat bersifat komunitarian humanistik, di mana setiap orang dengan latar belakang berbeda, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia seutuhnya. Popper pada *The Open Society and Its Enemies* (2008), menyebut jenis ini sebagai masyarakat terbuka (*open society*), di mana perbedaan individu dan keputusan-keputusan personalnya sangat dihargai seperti orang-orang beragama menjunjung firman-firman dalam kitab sucinya. (2) Non-destruktif tapi agresif dan progresif. Masyarakat ini memandang agresivitas, progresivitas dan destruksi merupakan hal wajar dalam kehidupannya. Situasi masyarakat ini penuh dengan kompetisi dengan manuver dan strategi untuk mempertahankan hidup. Persaingan tidak mengarah pada konflik karena masih bisa dikelola

dengan baik. Masyarakat model ini sebagian besar terdiri dari anggota yang individualistik, eksklusif dan tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Mereka berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan dan menjaga kelangsungan hidup. (3) Destruktif. Karakter sosialnya adalah merusak, brutal, berprasangka buruk, intoleran, penuh dengan dendam, pengkhianatan dan permusuhan. Pada masyarakat ini sering terjadi persaingan dan dapat berujung pada perpecahan. Perang dalam segala bentuk bagi mereka adalah kelaziman dan dibenarkan menurut cara pandang tertentu. Bias dari tipikalitas masyarakat ini adalah kuatnya sikap dan rasa pesimis yang dominan terhadap bangsa. Pada fase akut, mereka kerap mengapitalisasi bangsa sebagai ruang dan tempat pengekspresian bentuk-bentuk protes, rasa penyesalan, putus asa dan tindakan-tindakan fatalistik. Banyaknya kritik vulgar yang mengundang friksi dan konflik, demonstrasi dan protes yang ekstrim, sporadis dalam memberitakan informasi, serta ancaman separatis dan desintegrasi, merupakan bentuk tantangan yang mesti dihadapi dan dikelola secara serius oleh negara (juga termasuk Gereja). Popper mengisyarat, masyarakat jenis ini cenderung semakin tertutup (*closed society*), isolatif, eksklusif dan fundamentalistik bila tidak ada upaya ‘terbuka’, baik yang diusahakan oleh internal masyarakatnya, maupun gerakan normalisasi oleh negara melalui berbagai bentuk diskursus atau literasi.

Ancaman internal bangsa Indonesia saat ini adalah fenomena menguaknya tipikalitas masyarakat destruktif. Dari perspektif tata kelola konflik, salah satu indikator

negara yang kuat adalah ketika mampu mengatasi berbagai bentuk gejala destruktif, dan mengonversi gejala tersebut menjadi kekuatan perekat soliditas berbangsa. Ada banyak negara bangsa yang hari ini tetap berdiri tegak dan bahkan menjadi besar, justru karena telah cerdas melewati berbagai tantangan internal bangsanya. Kecerdasan tersebut mungkin terletak pada asas bahwa negara tidak boleh kalah! Dan cara menatanya adalah tetap mengedepankan prinsip yang keras, tetapi bijak dalam cara penyelesaiannya (*fortiter in re, suaviter in modo*). Penyelesaian berbagai gejala destruksi mesti mempertimbangkan berbagai pendekatan seperti kemanusiaan, kultural, sosio politik, sosio-ekonomi, dll., sehingga masyarakat merasakan perhatian dan keadilan. Pengelolaan dan penyelesaian konflik mesti tetap berbingkai pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai bagian dari rumah Indonesia, Gereja punya tugas dan tanggung jawab untuk selalu menggagas literasi dan diskursus persatuan. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Gereja sebagai lembaga sosial untuk terus mengejawantahkan keberadaannya dalam membawa keselamatan ‘sekarang’ dan ‘di sini’ (*hic et nunc*). Sebagaimana Yesus telah hadir di dunia dengan politik keberpihakan pada persatuan, keadilan, dan kedamaian, maka Gereja lokal mau tidak mau, juga berikhtiar menjadi representasi keberpihakan tersebut pada kehidupan masyarakat di Indonesia (Rosariyanto, 2014). Imperatifnya, gereja perlu senantiasa mengafirmasi kembali status hakekatnya sebagai garam dan terang di dunia, dengan terus terlibat aktif menggagas dan memelihara persatuan dan kesatuan

negara bangsa Indonesia. Signifikansi keterlibatan Gereja dalam permasalahan aktual dan kontekstual akan semakin menggaungnya proklamasi keselamatan pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Literasi dan diskursus persatuan bangsa adalah bagian integral dari upaya mengamankan Indonesia dari berbagai manifestasi rongrongan destruktif. Literasi dan diskursus persatuan yang intensif dan berkelanjutan, bisa menjadi pintu masuk bagi Gereja untuk mentransformasi tipologi masyarakat destruktif menuju pada masyarakat yang mencintai persatuan. Seturut konteks praksis gerejani, literasi dan diskursus persatuan yang berkelanjutan akan mengembangkan beberapa ‘buah roh’ kebaikan, seperti: (1) Keterhubungan. Kebaikan muncul ketika Gereja dan umatnya berani keluar dari *ghetto* egosentrisme dan *status quo*, serta berani membaur dengan agama lain dalam suasana cinta, persaudaraan, perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pengertian. Dalam hal ini, gereja dan umatnya harus tetap menjalin konektivitas, sinergisitas dan kolegialitas dengan pihak/agama lain; (2). Keberakaran. Kebaikan bisa menyata ketika Gereja sepeenuh hati memenuhi kebutuhan dasar rohaniah umat sehingga membuatnya nyaman, bahagia, serta kreatif dalam mengembangkan diri. Keberakaran gerejani mesti didasarkan pada soliditas dan solidaritas yang kuat dengan umat; mengerti dan paham secara detail apa yang menjadi kebutuhan umat; (3) Menjadi pencipta dan pemelihara. Kebaikan yang muncul ketika gereja dan umat menyadari diri dan lingkungan, serta mengusahakan kelestarian kehidupan. Di satu sisi, Gereja berupaya ‘mengada’ dengan mencipta dan membangun,

dan berjuang mengatasi keterbatasan dan kekurangan hidup umat, tetapi di sisi lain, dia harus berupaya menjaga dan memelihara keutuhan ciptaanNya. Kesetaraan kegiatan mencipta dan memelihara menjadi penting demi keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan di kosmos; (4) Kesatuan. Kebaikan ini akan tersemai ketika Gereja/umat selalu berikhtiar menyatukan dan mengidentifikasi diri dengan sesama dan lingkungan hidup. Keduanya mampu berbagi cinta dan kebahagiaan kepada orang lain melalui berbagai kegiatan yang produktif dan konstruktif, termasuk menghargai perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khas dari orang atau komunitas tertentu. (5) Identitas. Kebaikan akan terajut juga ketika Gereja memampukan umat agar mandiri, mengontrol nasib sendiri, membuat keputusan, dan percaya diri sebagai pemilik kehidupan, serta bebas dari segala tekanan, ketergantungan dan parasitas yang merusak.

Bahan Bacaan:

Oentoro, Jimmy 2010. *Gereja Impian: Menjadi Gereja Yang Berpengaruh*. Jakarta: Gramedia.

Prastowo, Yustinus, 2017. “Teologi Pembebasan, Marxisme, dan Ajaran Sosial Gereja (Sebuah Rekonstruksi Historis)”. *Diskusi Meja Bundar: Saling Silang Cerita Dua Daratan*. LIFEs.

Singgih, Emmanuel Gerrit, 2004. *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Singgih, Emmanuel Gerrit, 2000. *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Fromm, Eric, 1995. *Masyarakat yang Sehat* (terjem.). Jakarta: Obor Indonesia.

Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.

Tempo.co., 23/05/2109

Kompas.com, 5/07/2019.

CNNIndonesia, 17/07/2019



Hantu Golput dari Milenials⁴

Rabu, 17 April 2019 merupakan pemilu ke-12 sejak tahun 1955 dengan skema pemilihan serentak (*concurrent election*). Pada pemilu kali ini, posisi milenials sangat strategis sekaligus determinan. Gambaran kuantitatifnya, 80 juta (35-40 %) dari 185.732.093 pemilih adalah pemilih milenial dengan rentang umur 17-35 tahun (LIPI, 11/12/2018). Gambaran kualitatifnya, selain berpengaruh pada *legacy* dan legitimasi proses, pemilih milenial juga merupakan penanda berlangsungnya keberdemokrasian yang cerdas, beradab dan bermartabat. Dalam bingkai pembangunan negara bangsa, milenials akan membawa transformasi demokrasi Indonesia yang bermakna. Kehadiran mereka pada pentas kontestasi,

⁴ Media Indonesia, 14/03/2019

akan merubah persepsi publik bahwa pemilu tidak hanya sekedar rutinitas elektoral lima tahunan dengan tarian bernarasi ‘kedemokrasian’, tetapi lebih dari itu, adanya kebangkitan kesadaran moral ‘keberdemokrasian’; melalui partisipasi aktif dalam memilih pemimpin nasional, para wakil rakyat dan senator.

Namun rupanya, gambaran kuantitatif dan kualitatif ini tidak berbanding lurus dengan fenomena golput di kalangan milenials. Berdasarkan data DPP Fisipol UGM (Kompas, 26/02/2019), 27 Januari-19 Februari 2019 melalui media daring dan media sosial terdapat 2.840 percakapan tentang golput, dan ada sekitar 269 percakapan berisi ajakan untuk golput. Sementara intensitas percakapan golput di media daring per wilayah di Indonesia: Jawa Barat; 21,60%; DKI Jakarta; 14,94%; Jawa Timur; 14,64%; Jawa Tengah dan Yogyakarta; 9%; dan Daerah lain: 1%. Dapat disimpulkan, 75-80% yang terlibat aktif dalam produksi konsep golput dan intens membicarakannya adalah milenials. Kesimpulan ini juga merujuk data BPS pada bagian Statistik Pemuda 2016, di mana 88,35% milenials mengakses internet untuk bermedia sosial dan 75,02% untuk mendapatkan informasi/berita. Data ini diperkuat survei CSIS (Agustus 2018): 81,7% milenials berselancar dengan *facebook*, 70,3% *whatsapp* dan 54,7% *instagram*.

Mengapa penetrasi golput ini semakin masif, khususnya di kalangan milenials? Jawabannya, karena ada paradoks! Paradoks ini muncul secara kasat mata ketika indikator kematangan demokrasi muncul berbarengan dengan tumbuhnya kontra-indikator, terkait dengan luaran dan dampak penyelenggaraan demokrasi.

Rupanya beberapa indikator kematangan ini tidak diikuti oleh luaran dan dampaknya. Ada beberapa kontra-indikator bila ditilik dari sisi luaran dan dampaknya: (1) Capaian kompetensi penyelenggaraan pemilu belum menyentuh substansinya, yakni peningkatan kesejahteraan. Kontestan masih bermain di zona pertarungan elektoral *ansich*; dan belum bergerak untuk mengkreasi ruang kesadaran partisipatif. (2) Pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang terpilih, *de facto* tidak aspiratif dan hanya memperjuangkan kepentingan diri, kelompok (oligarki). (3) Banyak kasus korupsi/moral yang menyeret para pemimpin/wakil rakyat yang merupakan produk langsung pemilu. (4) Sering terjadinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan pihak penyelenggara dan para pihak yang memiliki ‘*will to power*’ oriented. (5) Biaya politik yang mahal ‘memaksa’ para politisi untuk berafiliasi dengan para pemilik modal. (6) Di beberapa daerah, muncul konflik sosial yang mengakibatkan kerugian nyawa dan benda karena pertarungan politik yang tidak sehat, jujur dan adil. (7) Rendahnya gerakan animasi dan literasi politik terhadap generasi muda dan minimnya pemberdayaan politik kepada lapisan masyarakat. (8) Sistem pemilihan yang dianggap rumit dan kerap berubah, serta kurangnya pendidikan dan sosialisasi ke tengah masyarakat. (9) Pemilu dianggap membawa petaka sosial karena setiap hajatan pemilu banyak terjadi gesekan (segregasi) sosial akibat maraknya kampanye hitam, menyeruaknya politik identitas, hoaks, semburan kebencian berbirama SARA.

Langsung atau tidak langsung, beberapa kontra-indikator ini dapat memengaruhi partisipasi milenials. Merujuk pada konsep mengenai karakter sosio-politiknya, milenials memiliki jaringan luas, bebas dan tanpa batasan,

termasuk aksesibilitas terhadap informasi perkembangan politik, dan isu-isu aktual lain yang merambah di ruang publik. Sementara dalam mengemban hak politiknya, mereka memiliki tipikalitas: (1) Tidak memiliki kepatuhan ideologi dan instruksi politik tertentu. (2) Berubah-ubah dalam preferensi politik; penuh pertimbangan memilih partai politik, caleg atau calon pemimpin yang dapat menyalurkan kepentingan kemudaannya. (3) Tidak mudah percaya pada elite politik yang memiliki rekam jejak buruk, terjerat korupsi/kasus moral, doyan berkampanye hitam, penuh demagogi, berpolitik identitas, bermain isu negatif, dan membuat hoaks serta menyembur kebencian berbau SARA.

Bila bias kontra-indikator ini lebih dominan merambah milenials, maka tidak heran merebaknya tendensi golput, dan bisa secara signifikan memengaruhi preferensi politiknya. Hasil riset *Institute of Public Policy Atma Jaya* (Gani, 2017) menemukan bahwa lebih dari 60% kaum muda urban memandang demokrasi (pemilu) belum membawa perubahan berarti bagi kehidupannya. Mereka menjadi pesimis dan apatis dalam berdemokrasi karena aspirasi tidak diakomodasi dan tidak terciptanya ruang optimis, prospektif, kreatif, inovatif, dan pengembangan diri, dll. Bias kontra-indikator pada tendensi golput, tidak saja memapar milenials nasional, tetapi juga bisa saja menjalar ke milenials lokal.

Perihal politik, pemilih milenial berada dalam kelompok kategori rasional-kritis (Tapung, 2018). Tentu varian rasionalitasnya berbeda, tergantung pada persepsi dan konsepsi politiknya. Pertama, rasional-ideologis. Kelompok ini tanggap terhadap isu politik; aktivis organisasi politik,

aktif sebagai *influencer* dan *volunter* politik. Mereka berpotensi menjadi pemilih ideologis. Kedua, rasional-oportunis: Kelompok ini kurang tertarik dengan politik tetapi tetap menggunakan hak pilih pada menit-menit terakhir. Banyak pertimbangan; tergantung pada isu dan pengaruh apa yang paling kuat dan menguntungkan untuknya. Mereka ini berpeluang menjadi *swing voters* atau *undecided voters*. Ketiga, rasional-Apatis. Kelompok ini alergi, ignoran dan menutup diri terhadap akses informasi politik, tidak percaya pada politisi serta skeptis pada kerja lembaga politik dan pemerintahan dalam memperbaiki kehidupannya. Mereka berpotensi golput pada setiap pemilu.

Bagaimana dengan target tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 sebesar 77,5%? Apakah tidak cukup ambisius di tengah masifnya penetrasi gerakan golput di kalangan milenials? Saya kira belum terlambat. Perlu ada ikhtiar konkret dalam meningkatkan partisipasi milenial dengan: (1) Penyelenggara pemilu, pemerintah, sekolah/PT memfasilitasi proses registrasi yang sederhana dan terjangkau bagi milenials untuk menjadi pemilih tetap; (2) Lembaga pendidikan formal perlu mendidik milenials tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab moralnya dalam pemilu. Bekerjasama dengan Penyelenggara pemilu mengintegrasikan pengetahuan tentang pemilu pada proses pembelajaran dan pembinaan. (3) Keluarga, masyarakat dan lembaga agama mesti menjadi tempat pendidikan demokrasi untuk milenials dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta meracik semangatnya untuk membangun bangsa dengan cara berpartisipasi aktif dalam pemilu. (4) Animasi dan literasi politik melalui media main stream dan media digital demi mencerahkan milenials tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.

(5) Mengampanyekan ‘antigolput’ pada semua tingkatan wilayah, melibatkan sebanyak mungkin milenials dengan memanfaatkan berbagai bentuk media.

Bahan Bacaan:

Sobari, Wawan, 2013. “Elektabilitas Mitos Pemilih Rasional: Debat Hasil-Hasil Riset Opini Menjelang Pemilu 2014”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1, Juni.

Sutisna, Agung. 2018. “Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstekstual” www.Academia.edu.

Satibi, Iswanda, 2018. “Memahami Literasi Politik yang Mengelitik”. www.Academia.edu.

Tapung, Marianus Mantovanny, 2018. *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*. Bandung: Cendikia.

Tapung, Marianus, et.al, 2018 “Improving students’ Critical Thinking Skills in Controlling Social Problems Through The Development of The Emancipatory Learning Model for Junior High School Social Studies in Manggarai” *Journal of Social Studies Education Research*, Article, September 2018 DOI: 10.17499/jsser.23826;

Jaya, Petrus Redy & Ambros Leonangung Edu, 2018. “Media Literacy and Critical Ability of Students at Manggarai Regency”, *International Proceeding*, UNJ.

Kompas, 26/02/2019



Mengadministrasi Demokrasi Substantif di NTT⁵

Tim seleksi calon komisioner KPU Kabupaten/ Kota di Propinsi NTT dibentuk berdasarkan keputusan KPU RI No. 1485/PP.06/Kpt/05/KPU/X/ 2018 dengan nomor pengumuman 1336/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018. Keputusan ini berpayung pada UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, PKPU (PKPU) RI No. 27/2018, KKPU RI No. 252/PP.06.kpt/05/KPU/III/2018, PKPU (PKPU) RI No. 7/2018 tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota. Tugas utama pembentukan tim seleksi ini adalah memilih secara bertanggung jawab para calon komisioner KPU kabupaten/kota yang berkualitas.

⁵ Harian Umum Pos Kupang, 14/12/2018

Komposisi tim merupakan keterwakilan anasir-anasir seperti jurnalis, aktivis LSM, akademisi dan birokrat. Bila merujuk pada kompetensi, kualifikasi, basis kerja dan pengalaman, tim ini diharapkan mampu memilih calon komisioner, yang *de jure* dan *de facto*, memiliki kualifikasi, kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Komisioner terpilih diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTT sebagai pengguna utama dari jasa kerja para penyelenggara pemilu tersebut.

Secara umum, keterlibatan intensif timsel bergerak mulai dari proses penjangkaran calon, penelitian berkas portofolio (dokumen administrasi), seperti makalah, kualifikasi pendidikan dan pengalaman berorganisasi, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan profil diri dan keberadaannya sebagai anggota masyarakat, *Computer Assisted Test* (CAT), psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Merujuk pada tata cara seleksi, ketika mengakhiri setiap tahapan, timsel selalu melakukan pleno. Pleno merupakan ruang pertimbangan untuk memutuskan dan menetapkan luaran utamanya. Timsel pastikan, semua keputusan dan penetapan diambil berdasarkan data-data obyektif tentang calon, yang dikonstruksi secara musyawarah mufakat. Dalam pleno, timsel senantiasa berpreferensi pada prinsip hukum dan aturan yang berlaku, dan sedapat mungkin menghindari intervensi subyektif berikut konflik kepentingan. Kami yakin, proses dan jadwal sudah berada dalam sistem yang *standardized*, akuntabel dan transparan. Dengan demikian, bisa asumsikan, timsel sudah bekerja dengan ‘sehat’ berdasarkan sistem yang *ajeg*, dikelola secara profesional, transparan, akuntabel dan penuh integritas. Imperatif moral kerja timsel, hasil tidak mengkhianati proses dan sebaliknya juga proses tidak menciderai hasil!

Demi memperkuat sistem yang ada, timsel juga menyepakati perangkat-perangkat non-normatif yang dipandang perlu untuk mendukung sistem seleksi. Perangkat non-normatif ini dirancang semata-mata bertujuan agar calon merupakan ‘*right man on the right place*’. Perangkat non-normatifnya, antara lain: 1) Calon bebas dari afiliasi ideologi partai politik, calon legislatif atau paslon tertentu, yang dinilai akan mengganggu independensi, integritas dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu. (2) Calon tidak memiliki jejak digital (digital footprint) yang negatif di ragam media sosial, mainstream, maupun cetak. Telusuran jejak digital untuk mendapat sebanyak-banyaknya informasi mengenai profil calon ketika berinteraksi dalam masyarakat. Dari jejak digital juga akan dilihat sejauh mana keterlibatan calon dalam isu politik identitas, politik intoleran, politik separatis, mengumbar ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan berpendapat rasialis atau berbias gender. (3) Calon tidak memiliki jejak moral personal dan sosial yang buruk; tidak tersangkut masalah kejahatan seksual, KDRT, narkoba, korupsi, dll).

Selain mengacu pada sistem dan aturan, dalam membuat keputusan timsel juga menggunakan beberapa perspektif, antara lain: (1) Sustainability, regenerasi dan keadilan. Perspektif sustainability ini berhubungan dengan keberlanjutan kerja kelembagaan KPU dengan rentang pendek jadwal pemilu 2019. Perspektif regenerasi lebih bertalian dengan ‘kehendak baik’ untuk memberi kesempatan kepada generasi muda dan ‘kemampuan memanfaatkan peluang’ dari orang muda dalam mengurus dan mengelola negara. Perspektif regenerasi juga dibarengi dengan pertimbangan azas keadilan dan pemerataan. Semua orang memiliki hak untuk menduduki jabatan

sebagai komisioner, tetapi pertimbangan keadilan dan pemerataan akan membatasi hak tersebut. (2) Dalam memilih calon, tim juga mengacu pada konsep dan praksis afirmasi gender, disabilitas, inklusivitas, representasi komunitas dan multikulturalitas. Berbagai preferensi ini penting untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang selama ini ‘kurang dihiraukan’ dalam bangunan demokrasi, serta bagian dari upaya meningkatkan partisipasi berbagai elemen dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, dalam setiap tahapan test, materi mengenai wawasan demokrasi, pemilihan dan negara bangsa selalu mengedepan demi menakar komprehensivitas dan holisitas pengetahuan dan pemahaman calon. Misalnya, dalam sesi wawancara, timsel mengekstrapolasi wawasan tentang pilar-pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika), pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan lembaga penyelenggara Pemilu. Diharapkan dalam proses ekstrapolasi, para calon dapat bermigrasi dari hanya sekedar konsep abstrak, menuju pada praksis, aplikasi dan implementasi. Selain ini itu timsel juga melakukan pendalaman terhadap: (1) Materi dan strategi pengawasan Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; (2) Integritas diri, komitmen, dan motivasi; (3) Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim; (4) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi; (5) Pengetahuan muatan lokal, dan (6) Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai bentuk kanal.

Timsel memiliki ekspektasi agar demokrasi di NTT memiliki citra positif. Ekspektasi ini mesti tergambar dalam dua hal: (1) adanya pengadministrasian demokrasi secara

baik dan benar dan kepatuhan pada undang-undang, peraturan, sistem dan norma-norma (*regula sunt servanda*). Bila tidak, tentu akan menciptakan bias dan polarisasi. Biasanya perilaku tidak patuh muncul ketika terjebak dalam *conflict of interests*, *abuse of power*, partisan, dan tidak independen dalam bertugas. Keterjebakan bisa saja ini terajut ketika mulai merambahnya kepentingan pragmatis-instrumental. Keterjebakan ini perlu dihindari agar tidak terjadi bias yang memicu konflik. Bersikap etis, jujur dan terbuka, inklusif dan menjunjung kultur kolektif kolegiat adalah keutamaan-keutamaan moral etis organisatoris. Bila keutamaan-keutamaan ini dikembangkan dengan baik, tentu akan dapat mendukung administrasi demokrasi yang berkeadaban.

Kedua, kerja timsel dan calon komisioner, memiliki satu fitrah: adanya hijrah demokrasi prosedural-rutinistik kepada demokrasi substantif. Demokrasi prosedural-rutinistik kerap ditandai dengan masalah instrumental-artifisial seperti pendanaan, alat peraga kampanye, perhitungan dan pembagian suara, payung hukum, dll., serta adanya dominasi-determinasi pihak elitis. Situasi ini kerap menganggangi partisipasi masyarakat yang berimplikasi pada tumbuhnya sikap ignoran dan indiferen masyarakat terhadap kegiatan politik (Wood, 2011). Sementara demokrasi substantif lebih berkuat mengenai tujuan dan manfaat demokrasi bagi *bonum commune*. Dalam demokrasi substantif, masyarakat memiliki kesadaran kritis dalam memilih wakil rakyat, senator dan pemimpin lokal dan nasional yang terbaik. Tentu, upaya berkelanjutan mengradasi kesadaran mesti diikuti dengan intensnya sosialisasi, promosi, edukasi, dan advokasi, antara lain untuk mengurangi prevalensi pemilih tradisional-emosional

menjadi lebih rasional-ideologis. Kesadaran kritis perlu dibangun demi menghindari intoleransi politik, politik identitas dan politik ‘dagang sapi’ (Bandingkan: Katalog BPS, Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi NTT tahun 2010-214). Selain peran mengadministrasi demokrasi substantif tugas timsel dan calon komisioner, berupaya menumbuhkembangkan *sense of belonging and responsibility* masyarakat terhadap demokrasi. Bila tingkat partisipasi masyarakat berada di bawah ambang batas, maka hal tersebut bisa menjadi narasi impresif mengenai kegagalan para penyelenggara, dan tentu kegagalan timsel juga ‘kan?!

Bahan Bacaan:

Wood, Philip A., 2011. *Transforming Education Policy Shaping a Democratic Future*. London: The Policy Press.

Keputusan KPU RI No. 1485/PP.06/Kpt/05/KPU/X/2018 dengan nomor pengumuman 1336/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018.

UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, PKPU (PKPU) RI No. 27/2018, KKPU RI No. 252/PP.06.kpt/05/KPU/III/2018, PKPU (PKPU) RI No. 7/2018 tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota.

Katalog BPS, *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi NTT tahun 2010-214*.



Pragmatisme Politik Teror⁶

Sebagai kecenderungan yang menganggangi politik demokrasi negara bangsa, pragmatisme politik wajib hukumnya untuk dihindari. Namun, kita tidak bisa menafikan, pragmatisme politik justru semakin mengental pada momentum kandidasi politik di pemilu 2019. Pragmatisme tentu tidak lahir dan berdiri sendiri. Dia bersifat relasional-korelatif. Pragmatisme politik bisa saja muncul ketika berrelasi dan berkorelasi dengan ‘beban psikologis’ kegagalan dalam pertarungan politik; bisa juga karena adanya keinginan berkuasa yang sangat

⁶ Jurnalflores.com, 30/06/2019

tinggi dari seseorang atau sekelompok orang. Variabel lain yang dapat menambah muatan relasional-korelatif dari tumbuhnya pragmatisme politik adalah dukungan sumber daya material, seperti uang dan infrastruktur politik lainnya. Namun glorifikasi terhadap sumber daya material yang besar tentu belum bisa menggaransi kesuksesan dalam dramaturgi politik, jika tidak didukung oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (suprastruktur). Pragmatisme politik semakin masif, ketika di satu pihak, adanya disparitas yang besar antara kuatnya modal politik dengan rendahnya elektoralitas kontestan; pada pihak lain, munculnya keinginan berkuasa yang tak terkontrol.

Rejim Politik Teror

Ketika politik dikonstruksi dari kehendak kuat untuk berkuasa, maka lambat tapi pasti, mulai terajut kerejiman. Bila kemudian rejim politik ini dicapai melalui cara menebar ketakutan dan intimidasi, maka terbangunlah rejimitas politik teror. Tipikalitas dari rejimitas politik teror ini, yakni: (1) Mendompleng secara parsial dan simplistis data-data empiris demi menguatkan gagasan dan ide yang hendak dikomunikasikan kepada publik. Rencana capaiannya jelas, supaya publik yakin dan percaya terhadap gagasan dan ide tersebut; (2) Menangkap secara parsial-artifisial berbagai informasi, lalu memodifikasi untuk kembali ‘dilempar’ secara sporadis kepada publik, tanpa prosedur kritis seperti menyerap, mengolah dan baru kemudian menyebarkanluaskannya. (3) Cenderung memonopoli kebenaran dengan bermanuver dalam kancah perspektivisme dan subyektivisme, bahkan dengan semena-

mena menjajah obyektivitas dan faktualitas. Karenanya, rejim ini kerap terjebak pada *confirmation bias*, di mana muncul pretensi fanatik dengan kebenaran yang dimiliki dan menganggap tidak ada kebenaran lain lagi di luar dirinya.

(4) Menggunakan berbagai kanal untuk mendiseminasi dan mengamplifikasi berbagai kebenaran secara repetitif. Pendapat dan pandangan diulang dan dibahas terus menerus agar publik lalu mengamininya sebagai kebenaran.

(5) Berorientasi pada *motivated reasoning*. Rejim politik teror berusaha mengontruksi bermacam argumentasi melalui penalaran yang terkesan logis dan rasional. Penalaran dibuat semata-mata untuk melegitimasi pikiran atau tindakan yang sudah dilakukan. *Motivated reasoning* dimanfaatkan untuk membela sekaligus menyerang ide atau gagasan dari para pihak, tanpa suatu niat baik mencari esensi kebenaran yang jelas dan terang (*clara et distincta*).

(6) Dalam mendiseminasi ideologi, rejim politik teror terpola menggunakan dialektika skema ofensif dan defensif. Dialektika dua skema ini acapkali dijalankan secara progresif sehingga kadang memproduksi keriuhan dan kekisruhan. Pada tingkat yang lebih ekskalatif, untuk menambah daya letupnya, campuran dua skema ini diikuti oleh gimik serta diksi-diksi mengancam dan mencela. Hal ini menimbulkan perasaan tidak nyaman, takut, dan cemas pada masyarakat. Ramuan dua skema ini juga menjadi rujukan bagi rejim dalam membangkitkan militansi, semangat berjibaku (*fighting spirit*), dan komitmen dari anggotanya.

Klaim Kebenaran

Nietzsche (1844-1900) berujar, salah satu keinginan dasar manusia yang tak terbantahkan adalah kehendak berkuasa (*The will to power*). Bila menyitasi pada gagasan ‘kehendak berkuasa’ ini, maka politik teror menjadi bagian yang paling negatif dan destruktif. Salah satu sisi negatif dan destruktif politik teror yang sering menguak, yakni kerasnya klaim dan monopoli kebenaran. Klaim atau monopoli kebenaran seringkali menjadi lokomotif untuk menggerak gerbong perspektivisme, subyektivisme dan oligarkisme kebenaran. Lokomotif beserta gerbong-gerbong ini dieksploitasi rejim politik teror untuk ‘memuliakan’ kebenaran yang dianutnya. Mereka bukan hanya memiliki stempel kebenaran, tetapi juga menganggap mereka pemilik, sekaligus pembuat stempel kebenaran tersebut. Bagaimana dengan orang lain? Atau kebenaran lain? Mereka bersikap ignoran terhadapnya, dan membuat mekanisme pembelaan diri yang kuat demi mempertahankan keyakinan kebenarannya. Mereka menolak ragam perspektif, alergi terhadap obyektivitas, dan menampik diskursus. Mereka jelas menafikan kebenaran relasional, serta menolak adagium: “Kebenaran tak mungkin akan ada dan tidak hadir karena dirinya sendiri”.

Hakekatnya, klaim kebenaran sangat menodai kebenaran yang bersifat universal dan imparisial. Ketika ada klaim ekstrim atas kebenaran dan kemudian berjuang keras menebarkan, justru akhirnya bisa meracuni kebenaran

yang dimiliki pihak lain (*Quod veritas naliis, aliis est acre venenum*). Hal ini mengamini cuitan Nietzsche bahwa politik kekuasaan memiliki kecenderungan mengonstruksi kebenaran yang merupakan produk serangkaian intese ideologis dari seseorang atau sekelompok orang. Tujuannya, menguasai dan menjadikan pihak lain sebagai budak dari produk kebenarannya. Mereka berasumsi, bila sudah kuat memprivatisasi kebenaran, maka dengan sendirinya sendi-sendi kehidupan masyarakat dapat digiring untuk diabdikan pada berbagai muatan kepentingan.

Padahal, bila bijak menelaah, narasi besar ‘kehendak berkuasa’ menjadi bagian dari esensi eksistensi manusia. Esensi eksistensi menarasikan tentang bagaimana manusia harus berjuang (*survive*) dan bertahan (*struggle*) dan berfitrah menemukan makna terdalam dari kehidupan. Zarathustra mengafirmasinya: “Di mana saya menemukan hidup, di sana saya menemukan kehendak untuk berkuasa” (Z II:12). Kemudian Nietzsche menimpali: “Kehendak untuk berkuasa merupakan kehendak hidup”. Jadi pada galibnya, manusia dengan kapasitas dan kapabilitas rasionalnya berikhtiar mengurai kekuatan-kekuatan yang membelenggu dan menindas kehidupan. Dia harus berkuasa atas belenggu-belenggu tersebut dan membebaskan diri dari berbagai kukungan yang memenjara. Manusia harus berkuasa atas hidup dan mampu mengatasi keduniawian dengan bertransformasi dari sekedar ‘manusia’ (*homo*) kepada ‘manusiawi’ (*human*), dan kemudian melahirkan ‘*homo yang human*’. Dia harus menguasai kebatilan dan nafsu

dalam diri, yang sering menjadi penghalang utama dalam menaklukkan dunia. Banyak manusia gagal dalam hidup karena motivasi menguasai dunia didasarkan pada nafsu dan kebatilan. Mereka bahkan membelokan ‘kekuasaan’ pada berbagai bentuk dan manifestasi kejahatan. Mereka tidak menyadari, akar dari kejahatan adalah nafsu (*Radix malorum est cupiditas*).

Politik Teror dan Terorisme

Meskipun tindakan-tindakan politik teror tidak sungguh identik dengan terorisme, tetapi bila dilihat dari *modus* dan *focus*-nya, politik teror ini mengadaptasi, mereproduksi sekaligus mereplikasi perwajahan terorisme. Saya mengelaborasi pemikiran Viotti dan Kauppi dalam *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity* (2007:276), yang mengemukakan bahwa terorisme merupakan suatu *modus* tindakan kekerasan bermotif politik, dengan *focus* untuk menciptakan dampak kekisruhan pada masyarakat dan pemerintah. Dampak ikutannya, terjadi ‘khaos’ dan para kaum pencipta teror kemudian bisa hadir sebagai penyelamat atau ‘pemadam kebakaran’ (*firehouse at falsehood*). Luaran utama dari modus ini, menciptakan delegitimasi, dekredibilitas, dan *distrust* terhadap pemerintah, dan mendulang simpati-empati masyarakat. Simpati-empati menjadi modal sosial politik untuk merancang pikiran dan tindakan mengambil alih kekuasaan (*coup de tat*).

Sejatinya, politik teror adalah bagian dari upaya mendapatkan kekuasaan politik melalui intimidasi atau kekerasan, baik secara manifest maupun laten. Tindakan-tindakan teror ini secara simultan merefleksikan ideologi-ideologi tersembunyi (*hidden ideologies*) dari pihak tertentu, yang antara lain salah satu motifnya, yaitu: membalas dendam atas pengalaman kekalahan atau kerugian ketika menjadi kontestan pada pentas kandidasi politik. Sejalan dengan terorisme, politik teror merupakan resultansi dari sebuah bangunan skenario untuk menyebar rasa takut dalam diri masyarakat. Rasa takut ini kemudian dikapitalisasi untuk kepentingan ideologi politik tertentu. Rasa takut kolektif masyarakat diesploitasi demi menginfiltrasi berbagai kepentingan ideologi politik, termasuk menawarkan perubahan sistem pemerintahan; atau paling ekstrim, mewacanakan pergantian pemerintahan sebelum waktunya. Tentu, kita semua tidak berharap, hal ini terjadi pada negara bangsa kita jelang pemilu 2019.

Bahan Bacaan:

- Deleuze, Gilles, 2002. *Fislafat Nietzsche*. Ikon Teralitera: Yogyakarta.
- Sunardi, St. 1996. *Nietzsche*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Nietzsche, Freiderich. 1885. “Maka Berbicaralah Zarathustra” (terjem.Dami N. Toda). Ernst Schmeitzner, Germany.
- Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.

Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern* (terjem.) Bantul: Kreasi Wacana.

Adian, Donny Gahral. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif.*: Yogyakarta: Jalasutra.



Bahasa Kampanye di Pemilu 2019⁷

Filsuf bahasa Ludwig Wittgenstein (1889-1951) menasbihkan betapa sentralnya permainan bahasa (language games) dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan piranti vital dalam interaksi dan komunikasi, di mana manusia dapat saling memahami dan memberi arti. Sebagai *zoon politicon*, manusia memanfaatkan bahasa (lisan dan tulisan), selain untuk saling memberi arti, tetapi juga saling memengaruhi satu dengan yang lain. Pikiran, ide, gagasan, dan bahkan ideologi sekalipun, niscaya selalu disampaikan dengan dan melalui bahasa. Tujuan utamanya, supaya orang atau masyarakat lain bisa memahami dan mengikuti alur pikiran, ide, gagasan, ideologi dari para pemiliknya.

⁷ Media Indonesia, 03/01/2019

Sebagai salah satu bagian dari seni untuk memengaruhi orang lain, tentu saja politik tidak bisa terlepas dari konstelasi permainan bahasa. Bahkan bahasa seolah-olah menjadi instrumen penting dalam mengekstrapolasi isu, pikiran, gagasan dan ideologi yang ada dalam diri calon atau partai tertentu. Orang yang gagap politik sekalipun, bisa dengan mudah mengetahui pikiran dari seseorang atau partai kontestan, ketika melihat dan membaca rangkaian bahasa yang tertera pada alat peraga kampanye (APK) seperti, baliho, leaflet, dan stiker, atau pada iklan yang dimuat di media elektronik, media cetak atau media sosial.

Ruang Monologis vs Ruang Dialogis

Ada dua ruang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk bahasa pada momentum pemilu 2019. Ruang pertama adalah ruang monologis. Dalam ruang monologis ini, para calon atau partai peserta pemilu aktif berbahasa kepada konstituen/masyarakat umum dengan memakai berbagai kanal. Dalam ruang monologis ini, bahasa bisa dimanifestasi dalam dua bentuk tujuan kegiatan, yakni: (1) Menginformasikan profil diri seseorang atau partai, disertai dengan penyampaian program-program (baru) yang hendak dijalankan pada masa-masa mendatang. Kegiatan informasi monologis ini dominan dilakukan oleh para pendatang baru dengan tujuan agar mereka dikenal oleh konstituen/masyarakat pemilih. (2) Mengafirmasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh seseorang atau partai tertentu. Dalam kegiatan ini, diksi-diksi yang kerap muncul antara lain; ‘terbukti’, ‘lanjutkan’, ‘akan ditingkatkan’, dll. Lumrahnya, rangkaian bahasa afirmatif ini banyak ditemukan pada media kampanye dari para petahana atau partai rezim.

Ruang kedua adalah ruang dialogis. Ruang dialogis mengandaikan adanya interaksi langsung antara para calon/partai dengan konstituen/masyarakat. Ruang dialogis ini dilakukan dengan tatap muka, diskusi dan debat. Dalam ruang dialogis ini, bahasa dapat diramu dalam dua bentuk tujuan kegiatan: (1) Mengkonfirmasi berbagai bentuk program yang akan dibuat seorang calon baru, atau meminta tanggapan konstituen/masyarakat mengenai segala hal yang sudah dijalankan oleh para petahana. Tujuan kegiatan ini bisa tercapai bila ada ruang dialog untuk mendiskusikan tentang apakah programnya sudah mengena atau menjawab kebutuhan masyarakat pemilih atau belum. (2) Mengelaborasi program dengan kebutuhan atau kepentingan riil masyarakat konstituen. Kegiatan elaborasi ini bisa dijalankan bila para calon bertemu langsung atau berdialog dengan masyarakat pemilih. Tujuan kegiatan ini akan tercapai secara efektif bila dilakukan dari pintu ke pintu, dari satu basis ke basis masyarakat yang lain demi menangkap secara komprehensif dan holistik kemauan dan kebutuhannya.

Bila dilihat dari sisi demokrasi substantif, kegiatan konfirmasi dan elaborasi menjadi kegiatan penting, sebab masyarakat ditempatkan sebagai subyek dari visi, misi dan program yang hendak ditawarkan atau dijalankan. Pada galibnya, kegiatan konfirmasi dan elaborasi menjadi strategis ketika masyarakat konstituen dilibatkan, dan akhirnya bisa berdampak pada gradasi partisipasi dalam pemilu. Sedangkan kalau para calon hanya mengandalkan ruang monologis, maka akan mereduksi posisi masyarakat dari subyek menjadi obyek saja dalam demokrasi. Pada kegiatan informasi dan afirmasi ada kecenderungan untuk mengeksploitasi bahasa dengan lepas dan minus arti, dan

masyarakat konstituen dibiarkan untuk memaknai secara mandiri dan bebas. Imbasnya, masyarakat pemilih kurang menangkap isi substantif, arti dan makna dari berbagai bentuk bahasa yang sudah dan akan menyeruak pada bermacam media kampanye.

Klaim Atas Nama Konstituen

Dilihat dari irisan semantika dan gramatika, konstruksi bahasa dalam berbagai media kampanye bisa bermakna langsung atau sebenarnya (denotatif) dan bisa pula bermakna tidak langsung, kiasan, metafora atau simbolik (konotatif). Makna denotatif ditemukan dalam rumusan bahasa seperti ‘2019 ganti presiden’, ‘coblos nomor 1 (atau 2) pasti memperjuangkan keinginan rakyat’, ‘partai kami konsisten anti KKN’, ‘siap memperjuangkan nasib rakyat’, dll. Sementara makna konotatif seperti yang ditemukan dalam rumusan bahasa, seperti: ‘Bumi boleh berputar, tapi janji politik saya tidak akan berputar-putar membohongi rakyat’, ‘kalau mobil lama masih bagus, *ngapaian* pilih mobil baru’, ‘Pilih baju baru di tahun 2019, biar masyarakat nyaman’, dll.

Entahkah pola makna denotatif atau konotatif yang dominan muncul, namun kecenderungan lazim, bahasa yang dipakai dalam etalase kampanye selalu berpretensi mengatasmakan kepentingan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Dalam setiap konstruksi bahasa, masyarakat senantiasa dipakai sebagai komunitas sasar atau sebagai subyeknya. Kecenderungan ini disebut sebagai populisme peyoratif. Para calon/partai dengan sadar dan sengaja mengurat bahasa-bahasa tersebut, seolah-olah bahasa-bahasa itu sudah lazim dipahami, bahkan diasumsikan mewakili isi hati masyarakat pemilih. Penempatan bahasa tertentu seakan-

akan mengartikulasi berikut mengamplifikasi suara nurani masyarakat pemilih. Padahal, bila diuji-petik pada masyarakat konstituen, bunyi berbagai bahasa tersebut terlihat buntung tak berujung, sebab sebenarnya belum merepresentasi isi hati terdalam masyarakat. Klaim parsial bernada populis peyoratif ini, seperti terlihat pada ragam penggunaan bahasa di media kampanye, tentunya sangat mereduksi dan menyimplifikasi demokrasi pada hanya sebatas dramaturgi berbahasa. Banyak bahasa berseliweran dan menguak bagai pepesan kosong, gamang, tanpa makna dan bahkan lepas begitu saja. Hal ini mengemuka, karena para calon/party kontestan tidak memiliki *political will* dalam mengkreasi ruang dialogis demi sekedar melakukan studi kebutuhan (need assesment). Padahal, ruang dialogis ini penting sebagai wahana untuk melakukan aktivitas konfirmasi dan elaborasi visi, misi dan program. Bila didalami, ada banyak bentuk bahasa yang dilelang ke publik, justru menciptakan alienasi dan distansi antara kontestan dengan konstituennya. Berbagai seruan, slogan, *tagline* yang melintas di media kampanye, secara faktual masih jauh dari keinginan dan kebutuhan masyarakat pemilih, dan dalam level tertentu bisa menjadi pemanis bibir (lip service), berikut menjadi buih dari kebohongan politik (politics lies).

Diferensiasi Sosial

Dalam opini ‘Dalam Rihunya Karnaval Kelisanan’ (Kompas, 7/12/2018), Damhuri Muhamad menggambarkan, penggunaan kata-kata dalam konteks pemilu saat ini bisa mengacu pada tiga pola: (1) pola ofensif untuk menyampaikan isu, pikiran atau gagasan baru dari calon atau partai; (2) pola defensif untuk menyerang pihak lawan dengan menyebarkan isu, pikiran atau gagasan baru atau hasil modifikasi; (3)

pola alegori atau satir untuk menciptakan keriang, mengusir kejenuhan dan mencairkan suasana ‘tegang’ akibat determinannya dua pola terdahulu. Andai dijajal melalui perspektif sosiologis; jika pola pertama dan pola kedua semakin vulgar dan ekskalatif dalam penyampaiannya, maka akan menjadi pratanda menguatnya diferensiasi dan polarisasi sosial. Dengan banyaknya kanal informasi dan kemudahan mengakses, tentu dua pola ini begitu mudah ‘dilahap’ dan ‘dicerna’ oleh publik. Bias jamaknya adalah timbul resistensi, provokasi dan bahkan agitasi, yang bukan tidak mungkin membuka ruang konflik dan friksi horizontal. Karena itu, hendaknya para kontestan dan tim suksesnya, wajib bijak dan santun dalam mengelola dua corak berbahasa ini, demi menghindari terjadinya kemerosotan demokrasi (democratic decay). Kita perlu memperbanyak kualitas pola ketiga. Jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang penuh keriang dengan memproduksi bahasa-bahasa yang mengundang senyum dan tawa.

Bahan Bacaan:

Monk, Ray. 1990. *Ludwig Wittgenstein the Duty of Genius*. Jonathan Cape.

Bertens, K. 1981. *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia.

Sutrisno, Mudji dan F. Budi Hardiman, 2005. *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Thahjadi, S.P.L., 2004. *Pertualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius.

Adian, Donny Gahral. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.

Kompas, 7/12/2018



Radikalisme dan Keruntuhan Rasionalitas⁸

Hasil penyelidikan polisi Philipina mengungkapkan, serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral *Our Lady of Mount Carmel* di Jolo Provinsi Sulu-Philipina (27/01/2019) yang menewaskan 23 umat dan melukai 102 orang, pelakunya adalah pasangan suami isteri berwarga negara Indonesia (Tempo.co, 23/07/2019, CNNIndonesia, 25/07/2019). Dari hasil penyelidikan ini ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni: *Pertama*, kelompok teroris patriat Indonesia, seperti sedang membuat migrasi, atau lebih tepat mengekspansi wilayah kegiatan. Ekspansi dan migrasi ini bisa disebabkan semakin meluas dan simultannya jaringan

yang dikelola. Mungkin lebih dari itu, mereka hendak memproklamasikan kepada dunia bahwa siapa saja, dari negara apa saja, bisa melakukan tindakan-tindakan teror di mana saja, termasuk di negara lain. Bacaan lain dari hal ini, munculnya upaya memaklumkan kepada publik bahwa kelompok militan-fundamentalis radikal ini berdiaspora dengan bangunan sistem dan struktur jaringan yang sudah sangat kuat dan jelimet. *Kedua*, kemungkinan lain, adanya fakta di mana kaum ini sudah tidak mendapat tempat atau merasa tidak nyaman berada di dalam negeri. Dengan terkoordinasinya kebijakan keamanan dalam negeri yang lebih antisipatif dan mitigatif, pemerintah Indonesia *casu quo* Polri dan TNI telah membuat fragmentasi ruang gerak komunitas radikal ini. Dengan fragmentasi, mereka tidak lagi leluasa dalam merakit berbagai modus rangkaian teror. *Ketiga*, variabel faktorial yang cukup esensial dalam melakukan gerakan bom bunuh diri adalah kehilangan dan kevakuman identitas rasional sebagai manusia. Ketika doktrin jihad dan mati syahid sudah mendeterminasi, lalu menafikan rasionalitas dan humanitas, seseorang bisa saja melakukan bom bunuh diri tanpa harus mempertimbangkan waktu, tempat, dan metode eksekusi. *Keempat*, mengakarnya trans-holisitas, soliditas, solidaritas, kolegalitas, bahkan necessituditas (ikatan keluarga), pada pola pikir dan sikap dari komunitas radikal ini. Tentu transisme yang kuat ini berkembang pada aras sistem dan struktur ideologi keagamaan berbasis fundamentalis sporadik, sehingga eksekusi gerakan tidak lagi sebatas tali pertemanan atau

persaudaraan saja, tetapi sudah merambah pada ikatan keluarga (*family ties*). Keterlibatan kolektif suami, isteri dan anak-anak dan saudara sudah menjadi *trendsetter* modus dari beberapa gerakan. Pertalian keluarga sudah berhasil dijebak pada pusaran solidaristik yang naif dan konyol, dan dengan gampang menciderai rumus kemanusiaan dan kejatian ciptaan Allah. Keluarga yang sebenarnya bisa merupakan komunitas basis rasional, terdegradasi oleh manipulasi radikalisme yang digawangi bentuk-bentuk irasionalisme.

Poin ketiga dan keempat di atas perlu menjadi konsern kajian akademik. Peristiwa bunuh diri adalah kejadian panggung depan. Sementara yang paling dasar dari peristiwa bunuh diri ada di panggung belakang kemanusiaan, yaitu pertarungan riil antara rasionalitas yang mewakili identitas kemanusiaan; dengan irasionalitas yang mewakili radikalisme dan berbagai tindakan teror lainnya. Ketika rasionalitas dikalahkan pada pertarungan panggung belakang kemanusiaan oleh irasionalitas, maka salah satu bentuk adegan yang muncul pada panggung depan adalah bom bunuh diri dan tindakan-tindakan teror serumpun. Ditelisik seturut peta perkembangan pengetahuan, radikalisme dalam segala manifestasinya merupakan penampakan lain dari irasionalitas. Ada beberapa ciri dari radikalisme yang menggambarkan tentang kecenderungan irasional tersebut, antara lain: (1) Paranoid dengan dialektika pemikiran kritis. Radikalisme ditumbuhkembangkan oleh kaum radikal yang sangat eksklusif dalam pemikiran dan tindakan. Mereka tidak

terbuka pada kritik dan mengultuskan pemikirannya sendiri dan pribadi-pribadi tertentu sebagai rujukan utama. Dominasi permainan emosi merupakan hasil dari proses ‘cuci otak’ yang efektif. (2) Sangat defensif berikut ofensif untuk menyatakan klaim ‘ghetto’ kebenaran dan menganggap pihak lain tidak memiliki akses dan kompetensi kebenaran. Mereka berasumsi, di luar kelompok dan keyakinannya tidak ada kebenaran. (3) Dalam upaya menemukan kebenaran rasional, kaum radikal menggunakan metode dan pendekatan yang tidak lazim dan tidak sah secara saintifik. Meskipun demikian, kaum radikal ini sangat menyakini bahwa metode dan pendekatan yang mereka gunakan sangat benar dalam meraih kebenaran. Mereka menyakini kebenaran baru yang mereka miliki dapat meruntuhkan dalil kebenaran lama (*post truth*), yang sebenarnya merupakan hasil temuan dari metode dan pendekatan yang sudah sah secara saintifik. Kaum radikal menafikan hal-hal empirik dan evidensial, dan lebih mengamini adanya peran ‘invisible’ dalam pembuktian kebenarannya. (4) Secara sosial, kaum radikal cenderung mengisolasi diri dan memiliki relasi eksklusif-elitis. Mereka selalu berada dalam ‘ketakutan’ bergaul dengan orang lain karena menganggap orang lain akan membawa pencemaran dan penistaan terhadap diri dan lingkungannya. Orang lain, di luar kaumnya adalah sumber petaka. Karena itu, pada titik yang paling ekstrim, ada upaya untuk menghilangkan atau menyingkirkan eksistensi orang lain tersebut dengan cara-cara yang tidak manusiawi sekalipun.

Jelas, musuh dari radikalisme adalah rasionalitas. Sebab bila merujuk pada konsep dan praksisnya, radikalisme sangat kontradiktoris dengan rasionalitas. Rasionalitas merupakan suatu sikap kesediaan untuk mendengarkan argumen-argumen kritis dan belajar dari pengalaman. Popper (1999), menyebutkan rasionalitas secara fundamental merupakan sikap yang mengakui bahwa ‘saya mungkin salah dan anda mungkin benar, dan dengan suatu ikhtiar, kita mungkin mendekati kebenaran’. Rasionalitas merupakan suatu bentuk perilaku optimis bahwa lewat argumentasi dan observasi yang cermat, orang bisa mencapai suatu kesepakatan pada masalah-masalah penting; sekalipun ketika kepentingan dan tuntutan mereka berbenturan. Komunitas rasional berada dalam kultur diskursus tentang berbagai tuntutan dan proposal sampai menemukan kesepakatan ‘kebenaran’ yang obyektif dan valid. Pendeknya, sikap seorang rasional adalah kemasuk-akalan (*reasonableness*), ilmiah akademik, konfidensial dalam pencaharian kebenaran. Di pandang dari sisi sosiologis, rasionalitas lebih mempertimbangkan argumen-argumen yang sifatnya interaktif-dialogis. Selain isinya, dialetika dalam berargumentasi juga dinilai memiliki nilai yang penting dalam pencaharian kebenaran. Setiap orang yang berkomunikasi menjadi sumber argumentasi yang potensial dan sekaligus menjadi informan yang baik bagi semua orang. Dialektika argumen-argumen akan menjadi ‘persatuan rasional umat manusia’. Hal ini sangat mempertegas apa yang diungkapkan oleh Hegel (1770-1831), bahwa sebenarnya akal sehat merupakan

suatu produk sosial dan merupakan suatu jenis bagian tak terpisahkan dari jiwa masyarakat. Bahkan bila berpengaruh baik, akan ini menjadi penentu perubahan peradaban dalam masyarakat. Nilai kebenaran yang dimiliki oleh individu merupakan hasil dari bentuk kolektivitas dalam masyarakat, yang adalah pemilik dari semua nilai.

Dalam hubungannya dengan manusia lain di muka bumi ini, manusia dilahirkan sebagai yang berakal budi (*animal rationale*). Sebagai penegasan, Plato (427-347 SM) menyamakan akal sehat sebagai pengetahuan. Untuk mencapai pengetahuan sejati, manusia perlu mengandalkan akal budi, yang sebut sebagai Ide Abadi. Sementara Descartes (1596-1650) mengatakan, agar mencapai pengetahuan yang benar dan sejati tentang realitas, manusia harus mengandalkan akal budi. Kegiatan untuk menangkap realitas dengan mengandalkan akal budi disebut proses berpikir. Menurut Descartes, ketika manusia berpikir, maka manusia itu ada (*cogito ergo sum*). Kegiatan berpikir mengafirmasi keberadaan manusia sebagai kebenaran pasti dan tak terbantahkan, yang menjadi landasan bagi pemikiran dan pengetahuan manusia. Karenanya, kegiatan berpikir dengan mengandalkan akal budi merupakan unsur yang paling kokoh dan pokok dari pengetahuan manusia. Segala sesuatu yang dapat diterima akal budi dalam proses berpikir menjadi pengetahuan yang benar dan sejati.

Dalam konteks inilah, maka radikalisme dan rasionalitas tidak pernah bisa didamaikan. Mayoritas kaum irasional dikuasai oleh emosi-emosi dan nafsu-nafsu ketimbang berdasarkan akal. Karena itu, mereka tidak pernah menjadi manusia akal (*men of reason*). Kaum radikal-

irasional hidup dari insting-insting dan impuls-impuls yang bisa mematikan kreativitas, inovasi dan respon positif terhadap perubahan, serta pengenalan yang utuh akan dirinya sendiri. Kaum ini begitu alergi dengan diskursus. Padahal diskursus adalah dasar dari kemasukakalan. Akal, seperti halnya ilmu pengetahuan, berkembang melalui wacana mutual. Diskursus merupakan jalan yang bisa dimanfaatkan dalam ‘merancang’ pertumbuhan akal dengan menumbuhkembangkan berbagai perangkat yang melindungi kemerdekaan berpikir. Selanjutnya, rasionalitas sejati dalam konsep Sokrates (469 SM - 399 SM), adalah rasionalitas kesadaran. Kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan diri dan kerendahan hati intelektual untuk mengetahui betapa seringnya seseorang khilaf, dan betapa pentingnya bangkit dari kekhilafan itu. Semua ini adalah alur pembentukan kesadaran pengetahuan manusiawi. Rasionalitas merupakan kesadaran bahwa individu tidak boleh terlalu fanatik pada akalnya sendiri. Dengan terbuka saat berinteraksi dengan orang lain, akal seseorang semakin lebih jelas dan terang (*clara et distincta*) dalam menyikapi berbagai diorama tuntutan dan permasalahan kehidupan di dunia.

Bahan Bacaan:

Yqodir, Zuly. 2012. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin Fananie, dkk. 2015. *Radikalisme dan Perubahan Sosial*. Kerjasama dengan The Asian Foundation.

Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.

Suseno, Franz Magnis, 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta, Kanisius.

Adian, Donny Gahral. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalsutra.



Tengahi Masalah Komodo⁹

Dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan RI ke-74, Pemda Manggarai Barat cq Badan Kebangsaan dan Politik, mengadakan sarasehan bertajuk: “Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholders dalam Mendukung Manggarai Barat Maju, Pariwisata Unggul”. Sarasehan berlangsung pada hari Jumat, 9/08/2019, di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, dengan menghadirkan pakar budaya, RD Dr. Inosensius Sutam (Dosen Sosial Budaya Unika Indonesia St. Paulus Ruteng). Sementara saya sendiri berperan memoderasi alur diskursusnya. Pada kegiatan ini, sejumlah pemangku kepentingan seperti pelaku usaha,

⁹ Harian Umum Pos Kupang, 21/08/2019

organisasi perangkat daerah (OPD), pendidik, LSM, tokoh masyarakat, tokoh muda, politisi, media massa, hadir dan terlibat dalam diskursus terkait isu pengembangan dan penguatan kepariwisataan.

Salah satu hal isu penting dalam diskursus tersebut adalah ‘penutupan sementara’ Taman Nasional Komodo (TNK) dalam rangka proses rehabilitasi, yang dijadwalkan pada awal tahun 2020 (Tempo.Co, 18/07/2019). Tujuan utama rehabilitasi, antara lain memulihkan kawasan dan mendesain ulang konservasi TNK. Isu penutupan menjadi aktual sekaligus kontekstual di tengah euforia segmentasi pariwisata Jabar yang sudah di-*upgrade* statusnya menjadi “premium” oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Labuan Bajo (Media Indonesia, 11/07/2019). Bertalian dengan segmentasi premium, pemerintah Jabar juga telah menargetkan kunjungan wisatawan sejumlah 500 ribu di tahun 2019, dan proyeksi target akan meningkat di tahun mendatang (<https://humas.manggarai Baratkab.go.id>). *The state of investigation* yang mengemuka dalam diskursus: apakah kebijakan penutupan sementara tersebut, tidak kontra produktif dengan segmentasi “premium” dan target kunjungan 500 ribu wisatawan? Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan berjamak aspek lain selain kepariwisataan, seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik?

Sebelum mendalami dua pertanyaan di atas, perlu disadari, bahwa lumrahnya, sebuah kebijakan yang bertalian dengan hajat hidup publik, acapkali mengundang pro dan kontra. Kebijakan penutupan sementara telah mendapat resistensi dari sebagian masyarakat Manggarai Barat, tentu

dengan mengemukakan beberapa dalil yang tidak bisa dianggap remeh, di antaranya terkait dengan suistainabilitas kehidupan masyarakat setempat dan sekitarnya (Pos Kupang.com., 22/07/2019. “Tolak Penutupan Pulau Komodo, Warga Mengadu ke DPRD Mangarai Barat”). Sementara tidak sedikit pula para pihak non pemerintah yang mendukung upaya rehabilitasi, konservasi dan pemulihan demi peningkatan kualitas performansi dan apealitas dari TNK (Pos Kupang.com., 15/07/019 “Dukung Rencana Tutup Sementara Wisatawan Ke Pulau Komodo, Pelaku Pariwisata Minta Sosialisasi”).

Demi menghindari polemik berkepanjangan yang dapat menghambat upaya pengembangan dan penguatan kepariwisataan di Mabar, maka sarasehan memunculkan beberapa model pendekatan untuk menengahnya. Salah satu pendekatan yang mengedepan, yakni pendekatan kenegara-bangsaan (*nation-state approach*). Pendekatan ini didasarkan pada beberapa perspektif kajian esensial: (1) Permasalahan penutupan sementara Komodo, tidak bisa dilepaspisahkan dari posisi Indonesia sebagai salah satu negara berindustri perdagangan jasa terbesar di Asia pasifik. Secara geososial mapun geopolitik pariwisata, posisi ini berikut permasalahan ‘penutupan sementara’, hakul yakin berkelindan dengan kepentingan negara-negara pemasok wisatawan. Ketika pulau dan binatang purba Komodo dinobatkan sebagai salah satu bentuk keajaiban baru di dunia (*new7wonders of nature*) , maka secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi hubungan tali temali kepariwisataan dengan negara-negara lain. Berpijak padanya, seyogyanya rencana kebijakan penutupan, juga

mempertimbangkan *trickle up effect* terhadap kenyamanan relasi kepariwisataan dengan beberapa negara pemasok, dan tetap terkondisinya persepsi positif wisatawan terhadap upaya pengembangan pariwisata di Jabar. Referensi kajian ini mengarah pada konsep rancangan pilihan skema kebijakan penutupan yang secara imperatif harus tetap mempertimbangkan kesinambungan aksesibilitas dan mobilisasi wisatawan; (2) Rencana penutupan juga mesti ditelisik dalam konteks *trickle down effect*-nya bagi keseimbangan ekosistem kehidupan di kawasan pulau Komodo, dan sekitarnya. Upaya rehabilitasi, konservasi dan pemulihan menjadi sangat penting dan mendesak, jika bertolak dari berbagai evaluasi terhadap rendahnya mutu tata kelola kawasan pariwisata, termasuk menjaga kelestarian binatang Komodo. Namun, kebijakan tersebut harus juga menghiraukan sisi kemanusiaan, kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Kebijakan rehabilitasi, konservasi dan pemulihan sudah pasti turunannya pada kemungkinan relokasi dan migrasi masyarakat setempat. Untuk itu, format kebijakan relokasi dan migrasi perlu dikonstruksi sedemikian rupa, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar sosial budaya dan ekonominya. Hal yang perlu diantisipasi, terjadinya gejolak sosial yang muncul dari masyarakat setempat sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mungkin saja dikonstruksi secara non-populis. (3) Sinergisitas, sinkronisitas dan konektivitas menjadi indikator utama dari luaran kebijakan (*policing outcomes*) penutupan. Antara kebijakan nasional, regional dan lokal mesti memiliki pertalian piramidal-hirarkis, yang mesti kuat dan berkesinambungan, demi menghindari salah kaprah dan salah

tafsir dalam mengelola kebijakan di daerah. Harmonisasi kata dan pemahaman para pemimpin pusat sampai daerah mengenai kebijakan ini, menjadi indikasi ukuran kesiapan, kematangan dan urgensinya. Sinergisitas, sinkronisitas dan konektivitas kebijakan pusat sampai daerah, nantinya akan teruji serta terukur saat implementasinya, apakah *on the track* atau tidak. Hal ini akan menekan kemungkinan terjadinya polarisasi dan konflik sosial, yang sering kali muncul karena delik perbedaan pandangan dari para pembuat kebijakan (decision maker). Konsep paling ideal agar suatu kebijakan bisa diterima dan diamini, maka perlu melibatkan para pihak terkait, seperti masyarakat, pelaku usaha, investor, LSM dan media massa, pada saat sosialisasi, promosi dan diseminasi.

Selanjutnya dalam *nation-state approach* ada dua dimensi yang menjadi titik aksentuatifnya. Pertama, dimensi negara (state). Dimensi ini menekankan kehadiran negara yang memiliki otoritas politik dan hukum dalam menelorkan kebijakan pembangunan pariwisata. Dan, sejauh ini yang menjadi otoritas kebijakan kepariwisataan merujuk pada UU No. 10/2009 dan beberapa Keputusan dan Peraturan Menteri di lima tahun terakhir. Dalam konteks pendekatan kenegaraan, UU No. 10/2009 mengamanatkan, Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab atas empat tonggak utama pariwisata, yaitu; perencanaan daerah atau kawasan, pembangunan fasilitas utama dan pendukung, pengeluaran kebijakan, dan pembuatan/penegakan regulasi. Keempat tonggak sudah terangkum dalam strategi tata kelola pariwisata yang baik dan benar. Dengan demikian, dalam hal kebijakan penutupan sementara oleh pemerintah, mesti dilihat dari kaca mata otoritas hukum dan politik

yang melekat dalam dirinya. Namun di pihak lain perlu menyadari, negara mempunyai masyarakat yang berstatus pemilik tunggal negara. Meski menyandang otoritas hukum dan politik penuh dalam mengembangkan pariwisata, negara perlu memperhatikan aspek yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, seperti: konservasi lingkungan, sejarah dan budaya, kearifan lokal, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia. Otoritas serupa, juga berhubungan dengan produk regulasi penetrasi dunia usaha dalam mengembangkan amenitas, seperti destinasi, atraksi, akomodasi, transportasi, toko souvenir, dan industri pariwisata atau pameran, atau berbagai bentuk festival, dll. Otoritas negara pulalah yang bisa mendeterminasi kepariwisataan sebagai *leading sector* atau *prime mover sector* di dunia industri perdagangan jasa, dan menjadi lokomotif vital dalam mengendors gerbong ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dll.

Kedua, dimensi bangsa (*nation*). Bangsa terbentuk dari berbagai komunitas manusia dengan latar belakang budaya, bahasa, suku dan agama. Komunitas manusia yang berbeda latar belakang memiliki kesamaan kesadaran dan komitmen kolektif dalam membangun bangsa. Humanitas, (multi) kulturalitas dan sosialitas menjadi payung besar dari pendekatan kebangsaan. Perspektif kebangsaan menjadi garansi dalam menjaga keutuhan identitas kemanusiaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dari manusia-manusianya. Dengan perspektif kebangsaan, otoritas apa pun, termasuk hukum dan politik, tidak bisa semena-mena mensubordinasi atau menjajah entitas kemanusiaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Kewenangan kenegaraan baru bermakna,

bila adanya pengakuan seimbang dan serius terhadap beberapa entitas kebangsaan. Sebaliknya, kebangsaan menjadi sangat kuat dan mapan, bila otoritas kenegaraan menjadi tiang-tiang penyangga utama.

Dalam konteks pendekatan kebangsaan, UU No. 10/2009 mengimperasi, salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta integrasi antar pemangku kepentingan. Dalam pendekatan kebangsaan, secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan mesti berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*), yaitu memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama kepariwisataan melalui berbagai bentuk pemberdayaan dan penguatan. Pemberdayaan dan penguatan bertujuan agar kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya dipersembahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama pengembangan dan penguatan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap mempedulikan nilai-nilai dan aset kemanusiaan, kebudayaan dan sosialitasnya. Pariwisata boleh saja dimuliakan, tetapi tidak berarti menafikan masyarakatnya. Masyarakat sejauh dapat, tidak boleh dipinggirkan atau dikorbankan hanya karena kepentingan pengembangan industri jasa pariwisata saja. Martabat dan kemuliaan masyarakat di pulau Komodo harus tetap menjadi perhatian utama pada ikhtiar pengembangan kepariwisataan yang

produktif, komprehensif dan holistik.

Bahan Bacaan:

Ardiwidjaja, Roby, 2018. *Adventure Tourism: Alat Percepatan Pembangunan Parwisata Indonesia*. Jakarta: Deepublish.

Zambrano, 2010. “Social and environmental effects of ecotourism in the Osa Peninsula of Costa Rica: the Lapa Rios case”, *Journal of Ecotourism*, 9 (1), p. 62-83.

Sedarmayanti (2014). *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Parwisata (Bunga Rampai Tulisan Parwisata)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*. 05. Hlm. 9-16

UU Kepariwisataan No. 10 tahun 2009

Tempo.Co, 18/07/2019

Media Indonesia, 11/07/2019.

<https://humas.manggaraibaratkab.go.id>.

Pos Kupang.com., 22/07/2019

Pos Kupang.com., 15/07/019



Politik Ekologi di Kota Sampah¹⁰

Satu permasalahan kental yang *men-downgrade* lingkungan hidup Indonesia adalah sampah. Sekitar 55-60% permasalahan memburuknya kualitas lingkungan alam dan lingkungan sosial, justru muncul dari bejibunya sampah di berbagai belahan nusantara. Besarnya volume sampah, tentu tidak pernah terlepas dari masalah gaya hidup (*life style*) yang instan dan tingkat konsumsi yang tinggi dari penduduknya. Masyarakat Indonesia sudah terjebak pada hegemoni konsumeristik-pragmatis. Masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, bahkan sudah terjebak pada pola-pola konsumsi untuk memenuhi

¹⁰ Harian Umum Pos Kupang, 26/01/2019

kebutuhan yang keliru (false needs) dan bukan memenuhi kebutuhan real (real needs). Domain ‘keinginan’ menjadi determinan dibandingkan dengan domain ‘kebutuhan’. Tak terkontrolnya gaya konsumsi dan pemakaian barang-barang fabrikatif, tentu berkontribusi pada semakin banyaknya produksi sampah di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Lebih dari itu, penggunaan wadah berunsur plastik dan anasir lain yang sulit diurai, saat berbelanja di pasar atau mall, menjadi segmen perilaku deviatif terbesar dalam menambah ekskalasi sampah di Indonesia.

Hasil riset Jenna R. Jambeck, dkk (www.sciencemag.org 12/02/2015) mengungkapkan, Indonesia berada di posisi ke-2 penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Menurut LSM *Riset Greeneration* yang 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun (*Kompas*, 23/01/2016). Sementara, riset terbaru *Sustainable Waste Indonesia* (SWI), dari 65 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia tiap hari, sekitar 15 juta ton sangat mengotori, berikut mengganggu ekosistem dan lingkungan alam sosial. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah organik (60%), plastik (14%), kertas (9%), metal (4,3%), kaca, kayu dan bahan lainnya (12,7%). Lembaga riset ini kemudian menemukan fakta, sebanyak 24% sampah di Indonesia belum dikelola secara baik; 7 % didaur ulang dan 69 % berakhir di Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) (CNN Indonesia, Rabu 25/04/2018). Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK-2018) menyebut, 48% sampah muncul dari sektor rumah tangga, pasar tradisional sebesar 24%, dan jalan 7%.

Untuk sementara, hampir semua wilayah di Indonesia, sampah menjadi persoalan pelik dan rumit. Karena itu, butuh perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak agar tidak larut dalam mengganggu keamanan hidup manusia (*human security*), keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), dan keamanan sosial (*social security*) (Rivai Ras, 2018). Selain, menjadi biang (*pathogen*) dari bakteri, virus, protozoa, dan cacing yang menyebabkan diare, disentri, kolera, tifus, hepatitis dan penyakit lainnya, sampah juga menimbulkan bau yang mengganggu pernapasan, serta merusak kenyamanan dalam beraktivitas. Sampah yang dibuang di sungai/got tentu akan menimbulkan pencemaran dan luapan air yang menyebabkan banjir. Banjir dalam skala kecil dan besar, berpeluang menciptakan masalah fisiologis seperti kehilangan rumah dan sumber makanan; dan masalah sosial seperti disparitas, diskrepansi, kriminalitas, dll.; serta masalah psikologis, seperti trauma, depresi, dll. Faktualnya, masalah-masalah ini bersifat sistemik dan berdampak negatif pada pembangunan bangsa. Dari perspektif pembangunan pariwisata, sampah sudah diklaim sebagai ‘virus’ yang turut mengurangi animo para wisatawan untuk berkunjung ke suatu wilayah.

Hal ini sebenarnya mempertegas adagium kondisional dalam dunia *tourisme*: “Bila ingin memajukan pariwisata, bersihkan dulu sampahmu!”. Bahkan ada yang secara ekstrim menggambarkan pribadi seseorang atau keadaan suatu negara dari kondisi persampahannya (“Siapa engkau dan negaramu, tergantung dari seberapa banyak sampahmu”)

Bila Kupang, Ruteng dan Bajawa masuk dalam kategori kota terkotor di Indonesia berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2018), maka bisa menarasikan beberapa hal: (1) Kesadaran individual mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat belum mengalami peningkatan yang berarti. Perilaku ini tentu berdampak pada minimnya tindakan-tindakan higienik keseharian masyarakat. Salah satunya, tindakan higienik dalam mengelola sampah rumah tangga. (2) Kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan belum menyentuh ambang batas, bahkan masih bergerak di titik nadir. Rendahnya kesadaran kolektif ini berpengaruh juga terhadap cara pandang tentang dimensi-dimensi lain dari kehidupan manusia, seperti masih melihat kesehatan sebagai *the second bussines*, perilaku konsumtif yang *uncontrolled*, dan masih melekatnya keyakinan-keyakinan irasional (mitis magis, perdukunan) dalam mendalami dan menangani masalah kesehatan. (3) Belum sinergi dan simultannya

niat baik (good will) dari *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, komunitas akademik, LSM, dll) di setiap daerah, dalam mengelola lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia. Kehendak baik untuk mengurus keseimbangan lingkungan hidup, tentu tidak hadir begitu saja. Menurut saya, perlu ada perhatian terhadap beberapa hal: *Pertama*, adanya penegasan tentang pilihan dasar (*optio fundamentalis*) tentang keseimbangan lingkungan alam dengan mengintegrasikannya pada narasi konsep dan praksis pembangunan, dari pusat sampai ke daerah; dari hulu ke hilir. *Kedua*, adanya transformasi dari hanya sekedar kepemilikan narasi besar (visi-misi-program) tentang ekologi menuju pada kemauan politik (*political will*), serta komitmen untuk mengejawantahkannya. *Ketiga*, bekerjasama dengan berbagai lintas komunitas dalam hal promosi dan prevensi kesehatan dalam menyiapkan berbagai perangkat kebijakan (Perda, Perdes, peraturan RT/RW, dll). Perlu dipastikan, perangkat-perangkat kebijakan ini mesti berplatform ‘politik ekologi’ dan ‘politik kesehatan lingkungan’.

Pemerintah pusat sudah menyiapkan beberapa instrumen hukum dalam menangani sampah, seperti Undang-Undang No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perpres No.97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) mengenai Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menurut saya, payung-payung hukum ini mesti diderivasi dan diterjemahkan secara lebih komprehensif dan holistik dalam konteks riil kedaerahan. Karena itu, tugas dari otoritas daerah adalah memprogramkan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai detail operasional berbagai perangkat hukum ini, agar masyarakat terinformasi dan teredukasi secara baik dan benar. Dalam hal ini, otoritas daerah wajib menyadari bahwa sampah bukan hanya masalah parsial dan tanggung jawab pihak tertentu saja, tetapi musuh bersama (*common enemy*). Karenanya, intervensinya membutuhkan partisipasi elaboratif dari para pihak. Proaksi, kolaborasi dan inovasi sangat dibutuhkan dalam penanganannya, baik dari segi penyediaan infrastruktur pengolahan, sampai pada optimalisasi pelayanan sampah pada tingkat unit sosial terkecil, yaitu keluarga.

Politik ekologi adalah sebuah pilihan. Sebagai sebuah pilihan, politik ini menysasar pada upaya membangun kesadaran kritis dalam diri masyarakat. Dasar dari pilihan ini adalah terjaganya relasi asimetris, antar sesama umat manusia, dan antar manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks permasalahan sampah ini, politik ekologi terarah pada konstruksi kesadaran kritis kolektif masyarakat tentang pentingnya prinsip sustainabilitas dan ekuilibritas. Prinsip sustainabilitas berhubungan dengan keberlanjutan kehidupan masa-

masa mendatang bagi *better life of next generation*. Sedangkan prinsip ekuilibritas berkaitan dengan keseimbangan ekosistem dan rantai kehidupan yang menjadi dasar dalam membangun kenyamanan dan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Dalam kaitan dengan sampah, dua prinsip ini bisa dipraksiskan dalam beberapa kegiatan kecil, tapi fundamental, yakni mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*). Kegiatan-kegiatan kecil ini untuk mendukung target nasional tahun 2025: 30% pengurangan sampah dan 70% penanganannya.

Bahan Bacaan:

- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.
- Bryant, L. Rayond, dan Sinead Bailey. 2000. *Third World Political Ecology*. Routledge: London.
- Forsyth T. 2003. *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge: London.
- Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Today*. London: Addison-Wesley Publishing Company.
- Marsh, Colin, 2008. *Studies of Social and Environment*. Pearson: Practice Hall.
- Supriatna, N. (2016). *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH),

Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

Perpres No.97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional (Jakstranas) mengenai Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga



Revolusi Pengetahuan yang tercecce¹¹

Thomas Kuhn (1922-1996) dalam *The Structure of Scientific Revolution* (1962) memperkenalkan tentang terminologi “pergeseran paradigma” dengan menekankan pada pentingnya pembentukan peradaban masyarakat melalui suatu proses ‘pengalaman perubahan pengetahuan’ yang radikal demi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Meskipun terminologi ini kental di dunia akademik, tetapi menurut saya, sangat sinergik, relevan dan implikatif bagi masyarakat yang sedang memiliki ‘kewajiban alamiah’ untuk migrasi

¹¹ SKH Pos Kupang, 15/02/2017

dari peradaban pramodern ke modern dan selanjutnya ke postmodern. Menurut Kuhn proses ‘pengalaman perubahan pengetahuan’ yang radikal ini menjadi suatu keharusan dalam membentuk, membangun dan memberdayakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat demi kepentingan kehidupan yang lebih beradab. Adanya kesadaran dan pengetahuan yang saling elaboratif bisa menjadi tonggak-tonggak penting dalam menenun jejak-jejak ‘paradigma’ peradaban ke kualitas yang lebih tinggi. Demi mendukung terajutnya fase-fase peradaban dan menguatkan tonggak-tonggaknya, maka prasyarat dasar adalah adanya inklusivitas, rasionalitas, kritisitas dan curiositas, serta manifestasi sikap-sikap ilmiah lainnya, yang pada setiap tahapan perubahan pasti memiliki tuntutan standar kualitas yang berbeda.

Kuhn menyebut proses perubahan ini sebagai ‘revolusi pengetahuan’, yang dapat dipahami melalui empat struktur fase. Pertama, ‘Pra-paradigma’ sebagai fase ilmu pengetahuan yang belum matang, di mana penelitian-penelitian keilmuan dilakukan tanpa arah dan tujuan tertentu. Dan, muncullah berbagai macam aliran pemikiran yang saling bersaing dan meniadakan satu sama lain dan memiliki konsepsi dan teori yang berbeda dalam menyikapi berbagai masalah. Belum ditemukannya suatu paradigma tunggal untuk menjadi referensi praktek keilmiah, membuat masyarakat terkantung-kantung dengan berbagai masalah yang tidak terselesaikan.

Kedua, ‘Sains Normal’ sebagai fase konsensus dan

komitmen bersama kaum ilmuwan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mendera masyarakat dengan menetapkan standar-standar praktek keilmiah. Mereka cukup berhasil menentukan satu paradigma yang dijadikan sebagai rujukan pemecahan ‘teka teki masalah’ di dalam masyarakat. Namun, karena hanya berdasarkan konsensus dan komitmen, maka sebenarnya paradigma yang digunakan tidak cukup kuat dan kerap muncul upaya-upaya kritis untuk mengoyahkannya dan mengganti dengan paradigma baru.

Ketiga, ‘Anomali’ sebagai fase krisis kredibilitas terhadap ilmu pengetahuan dan paradigma yang mendukungnya, karena tidak lagi relevan dan kompatibel untuk mengurai persoalan yang muncul. Keadaan ini menimbulkan kekacauan, kebingungan, dan sikap skeptik terhadap berbagai bentuk kajian ilmiah. Keadaan ini mendorong lahirnya bermacam komunitas ilmiah dengan kelompok-kelompok ilmuwan yang saling bersaing dalam membentuk paham/mazhab keilmuannya. Dialektika yang serius, kritis dan rasional antara kelompok ilmuwan justru kemudian menjadi embrio bagi munculnya paradigma baru.

Keempat, ‘Paradigma baru’ sebagai fase klimaks, di mana ilmu pengetahuan yang luar biasa dan baru (*extraordinary and novelty science*) muncul sebagai hasil kompetisi yang ketat dari para ilmuwan dalam membangun paradigma-paradigma baru, yang kemudian bisa menjadi patokan bagi berkembangnya konsepsi dan teori baru.

Fase ini ditandai dengan semakin menguatnya sebuah aliran pemikiran yang sah, kompatibel dan relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, konsep dan teori baru dalam membahas kebutuhan dan persoalan dalam masyarakat. Perubahan ini menjadi puncak dari sebuah revolusi ilmu pengetahuan, di mana sebuah paradigma baru muncul dan menjadi rujukan bagi penerapan berbagai metode, prinsip teoritis, asumsi, kebijakan dan standar evaluasi dalam memecahkan berbagai masalah. Melalui proses edukasi dan internalisasi, paradigma baru ini kemudian berperan dalam merubah cara pandang dunia, pola pikir dan pola laku, baik dari para ilmuwan dalam aktivitas keilmiahannya maupun dari masyarakat dalam seluruh prosesi kehidupannya.

Indonesia sudah dan akan bergerak dalam lintasan revolusi pengetahuan ini. Sebagai bangsa yang memiliki modal besar dari segi sumber daya manusia dan alamnya, momentum revolusi pengetahuan dalam segala bentuk penampakan dan modelnya mesti direspon dan diberdayakan secara optimal. Bila tidak, kita akan tetap tercecceh pada stagnasi kelamaan peradaban, yang menyebabkan tersendatnya pembangunan bangsa di segala bidang. Pendapat saya, ada tiga hal yang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam merespon dan memberdayakan revolusi pengetahuan ini. Pertama, sikap dan berpikir yang masih eksklusivistik, fundamentalistik dan radikalistik sering menjadi resistensi ketika mau bergerak

pada paradigma yang lebih tinggi. Sikap dan pikiran ini sangat berpengaruh pada rendahnya indeks responsivitas dan aksesibilitas akan perubahan dan perkembangan. Karenanya, agar bisa bergerak dari ‘praparadigma’ ke ‘paradigma baru’ diperlukan proses dialektis yang lama, di mana masyarakat mesti berada dalam kondisi terbuka, rasional dan kritis. Slogan “Indonesia Hebat, Bergerak dan Bersaing”, “Indonesia Kuasa Kawasan”, “Indonesia Go Internasional”, dan “Think and Act Globally”, sudah pasti menuntut inklusivitas, rasionalitas dan krisitas masyarakat terhadap perubahan dan perkembangan, sehingga benar-benar mendapat ruang dan tempat untuk menegaskan eksistensi di dunia.

Kedua, klaim-klaim pengetahuan berbasis pendapat, opini dan pemikiran non ilmiah yang mewakili pribadi dan golongan tertentu begitu mengetengah dewasa ini. Ketika pendapat, opini dan pemikiran non ilmiah itu sering kali tidak melalui kajian, riset dan metode keilmiah yang valid dan adequate, maka akan berujung pada keadaan anomali dan kekacauan referensi dalam masyarakat. Masyarakat digiring pada sikap ambigu, impulsif dan skeptik saat mau menyelesaikan masalah hidupnya. Ironisnya, ketika tingkat kecerdasan dan keterdidikan masyarakat belum memenuhi standar, maka yang kerap terjadi adalah keterjebakan pada keterarahan primordial, fasistik fatalistic, utopis, dll. Konsideransi keilmiah yang seharusnya menjadi ‘optio fundamentalis’ dalam konstruksi kehidupan masyarakat modern, disubordinasi dan digagalkan oleh otoritas non ilmiah, yang entah

karena factor lain, justru lebih mendapat tempatnya di hati dan pikiran masyarakat. Karenanya, jangan heran bila pada kondisi tertentu, sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih mengikuti kewenangan non ilmiah tersebut dalam memecahkan persoalan hidupnya. Hal ini tentu menjadi penghambat karena standar-standar pembangunan berikut pemecahan berbagai persoalannya, sudah pasti berbasis kajian dan riset yang mendalam dengan menggunakan pendekatan dan metode keilmuan yang terukur. Faktanya, bangsa-bangsa yang akseleratif, inovatif dan sejahtera pembangunannya, justru karena konsisten merujuk pada riset dan kajian ilmiah yang sudah terstandar.

Ketiga, peran para kaum intelektual (ilmuwan) belum optimal dalam konstelasi revolusi pengetahuan pada masyarakat Indonesia. Ada dua hal yang menyebabkannya: (1) Kaum intelektual belum diberi cukup ruang untuk berperan oleh negara dan masyarakat. Bila rejim pemerintah (pusat dan daerah) tersegmentasi pada kepentingan ideologinya dengan hanya memanfaatkan tenaga dari intelektual tertentu yang ‘senafas’, maka yang berbeda nafas akan ‘ditelantarkan’ kemampuan dan kepakarannya. Padahal, bila pemerintah melibatkan sebanyak-banyaknya pakar akan terjadi kompetisi pemikiran dan kajian yang dialektis, kritis, paradigmatis, dan noveltik sehingga berkontribusi bagi penguatan pembangunan bangsa yang lebih integrative, komprehensif dan holistik. (2) Pada sisi lain, sebagian intelektual kerap terkooptasi oleh kepentingan-

kepentingan sesaat dalam bidang social, politik, agama dan ekonomi. Mereka diduga menggadaikan kredibilitas dan kapabilitas keilmuannya untuk dihambakan pada keperluan afirmasi diri, kelompok dan golongannya. Pada kondisi yang paling miris, ada kaum intelektual yang menggunakan otoritas keilmuan untuk menciptakan inovasi pada bidang tertentu yang bahkan bertujuan merusak kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, tanpa ‘rasa salah intelektual’, mereka ‘menggoreng’ kapasitas dan pendapat pribadinya untuk mengagitasi dan memprovokasi kesadaran dan emosi masyarakat agar melakukan hal-hal negative-destruktif, yang secara kasat mata telah melanggar norma/nilai universal dan nasional, serta mengancam stabilitas kehidupan berbangsa. Beberapa keresahan social yang berskala nasional maupun local, ternyata merupakan hasil eksploitasi dan kapitalisasi ketidaktahuan masyarakat oleh kaum intelektual tertentu demi kepentingan pragmatis dan sektariannya.

Bahan Bacaan:

Kuhn, Thomas, 1966. *The Structure of Scientific Revolution 3rd*. Chicago: University Chicago.

Marcus, James A. 2005. *Thomas Kuhn Revolution: An Historical Philosophy of Science*. London: Continuum.

Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Today*s. London: Addison-Wesley Publishing Company.

- Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Philosophy*, (terjem.) .
Colombus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Magee, B. 2005. *Memoar Seorang Filsuf: Pengembaraan di
Belantara Filsafat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Marsh, Colin, 2008. *Studies of Social and Environment*. Pearson:
Practice Hall.



Sebaiknya Agama dan Pengetahuan Tetap Sejalan

Fenomena kebangkitan gerakan-gerakan yang bersayap keagamaan di Indonesia memberi signal bahwa masyarakat masih memiliki orientasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agama yang dianutnya. Faktualitas ini menjadi sangat positif dan perlu dihargai, ketika dibandingkan dengan masyarakat bangsa barat yang pada umumnya mengalami disorientasi dalam hidup berkeagamaan. Disorientasi tersebut bisa saja disebabkan kencangnya hembusan paham-paham seperti rasionalisme, sekularisme, liberalisme, pragmatisme, dll yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan

masyarakatnya. Sementara dalam konteks kehidupan Indonesia yang plural/multikultural, entitas keagamaan telah memberi nilai lebih dalam mendukung kerukunan dan kedamaian hidup masyarakatnya (peaceful co-existence). Bahkan bila menoleh pada sejarah awal perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia, agama telah menjadi basis spiritual-religius dan sosial yang begitu diperhitungkan ketika melawan segala bentuk imperialitas, dominasi dan determinasi dari luar maupun dari dalam, yang mengancam integrasi bangsa. Agama sebagai lembaga spiritual-religius dan sosial telah membuktikan diri sebagai salah satu tameng dan pilar kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Institusi agama dan para ulamanya telah berperan sangat sentral dalam mengarahkan dan memberdayakan umatnya untuk senantiasa memelihara kerukunan dan kedamaian negara bangsa. Karenanya, agama-agama harus tetap bertahan dan perlu mengembangkan diri agar selalu dapat mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pertanyaan muncul, mengapa agama masih bisa bertahan dan menjadi salah satu lembaga yang dapat memberi garansi bagi keberlangsungan hidup manusia? Saya coba menjawab dan mendalami pertanyaan ini dari perspektif hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Saya ambil contoh kasus sejarah perkembangan gereja. Munculnya Revolusi Pengetahuan Kopernikus (1473-1543) dengan gerbong heliosentrismenya telah

mengoreksi secara mendasar paham geosentrisme yang dikembangkan berabad-abad lamanya oleh otoritas Gereja. Koreksi yang besar ini membidani lahirnya berbagai dampak reformasi dan transformasi pemikiran, di mana gereja mulai terbuka pada diskursus, penalaran bebas dan cara pandang alternatif serta merespon secara positif perkembangan ilmu dan teknologi. Pengakuan mengenai ‘adanya keselamatan di luar gereja’ dan ‘gereja harus senantiasa merubah dirinya’ serta ‘gereja menjaga keseimbangan antara iman dan pengetahuan’, menjadi tiga hal mendasar yang menandai perubahan dan keterbukaan dalam tubuh Gereja.

Momentum perubahan dan keterbukaan ini dilanjutkan spiritnya dalam konsili Vatikan II (1962-1965), di mana dalam beberapa segmennya telah membuat evaluasi terhadap isi dogma dan tradisi gereja yang dinilai tidak relevan, aktual dan kontekstual lagi. Evaluasi ini tentunya merujuk pada elaborasi konstruktif antara ilmu pengetahuan, filsafat dan teologi yang pada saat itu sudah berkembang pesat. Gagasan dan bahasan yang substantif, relevan, aktual dan kontekstual pada berbagai ensikliknya dalam konsili itu, memberi gambaran terang bahwa Gereja sudah semakin responsif dan akomodatif pada kebaruan dan kekinian, baik dalam cara pandang, sikap hidup, dan maupun cara menanggapi perubahan dan perkembangan. Karenanya, mengemukanya gagasan tentang keseimbangan pengembangan iman dan pengetahuan menjadi alasan yang paling masuk akal

tentang mengapa Gereja tetap ‘berada’ dan ‘mengada’ secara baik sampai saat ini. Gagasan inilah yang kemudian membuat Gereja bertumbuh dan berkembang, diterima dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia. Menyadari hal ini, tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada dunia karena telah lama resisten terhadap perkembangan pengetahuan dan terlibat dalam konspirasi ‘membunuh’ Galileo Galilei (1564-1633); seorang ‘santo’ dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, kesadaran ini diafirmasi kembali dalam pidato Paus Benediktus XVI, 21 Desember 2008 mengenai rehabilitasi nama Galileo Galilei sebagai ilmuwan dunia. Masyarakat dunia pada umumnya merespek dan mengapresiasi secara baik permintaan maaf dari dua pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma ini.

Selanjutnya, pandangan dan sikap gereja terhadap perkembangan dan masalah dunia berikut berbagai penyelesaian, tidak pernah terlepas dari kajian-kajian kritis-analitis dan solutif, yang merupakan kompetensi inti dari ilmu pengetahuan. Adanya ruang untuk mengaktualisasikan dan mengkontestualisasikan ajaran-ajaran social gereja dengan realitas hidup masyarakat, serta kesempatan untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran tersebut dengan keseharian hidup masyarakat, menyebabkan gereja semakin mendapat tempatnya di dunia. Dampak lain dari

keterbukaan ini, muncul para pemikir (teolog, filosof, ilmuwan) yang dengan kritis-konstruktif memberi masukan kepada Gereja ketika menyikapi berbagai perkembangan dan perubahan di masyarakat. Bertolak dari masukan tersebut, Gereja selalu dapat merubah dirinya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, serta tetap menjadi lembaga yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam mengadvokasi, mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan dan harapan umat ketika berrelasinya dengan Tuhan dan sesama. Gereja jadinya harus selalu eksis sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia dan senantiasa membawa keselamatan dan perdamaian di muka bumi.

Fisikawan Einstein ([1879-1955](#)) menegaskan ‘ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta’ dan ‘agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh’. Penegasannya, agama yang tidak berbasiskan pengetahuan akan cenderung mengalami ‘kebutaan’ dan rentan terjebak dalam alur spiritualisme, mitisisme, fasisme, radikalisme, eksklusivisme dan fundamentalisme. Ekstrim-ekstrim ini kerap kali menjajah rasionalitas dan intelektualitas sehingga dengan mudah menggiring umatnya pada praktik-praktik keagamaan yang tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Karena tidak adanya saringan kritis, umat mudah digiring pada penghayatan yang ekstrim, kaku, tidak manusiawi, intoleran, berprasangka, berujar dan bertindak kebencian. Sebaliknya juga, bila iman disubordinasi oleh intelektualitas, maka ada kecenderungan glorifikasi

berlebihan kepada pengetahuan (intelektualisme). Intelektualisme akan menjadikan masyarakat terkurung pada penghayatan dan penyelesaian masalah hidup secara positivistik dan rasionalistik semata, dan pada akhirnya membentuk sikap absurd, gamang, agnotis, indifferen dan ateis. Sementara ada banyak hal di muka bumi ini yang tidak dapat diselesaikan dengan pengetahuan manusia semata, kecuali mengandalkan keyakinan pada sang Pemberi kehidupan. Ada banyak peristiwa miris kerusakan dan degradasi manusia di dunia ini, justru karena kaum intelektual terlalu memaksa diri untuk menyelesaikan proyek-proyek duniawinya hanya dengan bertumpu pada pengetahuan dan lupa akan keterbatasannya.

Sintesis yang dialogis antara agama dan pengetahuan akan melahirkan kecerdasan intelektual dan spiritual yang dapat membantu manusia agar bijak dalam menyikapi fenomena hidup kesehariannya. Agama menjadi penting dalam diri seorang intelektual demi membantu membangun kesadaran reflektif tentang keunggulan dan keterbatasan. Seorang intelektual perlu menyadari keunggulan agar semakin percaya diri dalam mengembangkan intelektualitasnya bagi kepentingan sesama dan keberlangsungan alam dunia. Namun, ia juga harus menyadari keterbatasannya, rendah hati dan bersyukur atas karunia intelektualitasnya itu sehingga ia semakin dicintai oleh Tuhan pemberi kemampuan tersebut.

Sementara itu, pengetahuan memberi landasan rasional terhadap penghayatan dan gerakan iman dalam

agama. Pengetahuan membantu penganut agama untuk menjalankan iman secara kritis, dialogis dan inklusif dalam membangun hubungannya dengan sesama dan Tuhan, agar terhindar dari kesesatan berpikir dan godaan kepentingan-kepentingan sesaat. Jika rasionalitas dan kritisitas diremehkan oleh institusi agama dan penganutnya, maka akan berujung pada dua sisi negatif. Sisi negatif pertama, bisa saja institusi agama dan penganutnya menjadi sangat fasis, eksklusif, sektarian, radikal dan fundamental, yang bisa meresahkan dan mengganggu kenyamanan toleransi hidup beragama dan integrasi bangsa. Atau pada sisi negatif lainnya, bisa juga agama dan penganutnya menjadi sangat sekular, pragmatis, instan dan artifisial semata, yang kemudian dengan mudah terjerembab dalam konflik kepentingan, baik ekonomi, politik maupun ideologi sekular-pragmatis tertentu. Kita tidak mengharapkan dua sisi negatif membiak dan menjadi jamak, kemudian bisa mengancam kerukunan hidup beragama dan kesatuan bangsa yang sudah dipelihara dengan susah payah selama ini.

Bahan Bacaan:

- Pals, L. Daniel, 1996. *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tjjuh Teori Agama* (terjem. Inyiaik R. Muzir, dkk). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mohanty, J. N. 1982. *Edmund Husserl's Theory of Meaning*. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Kincheloe, J.L. 2008. *Knowledge and Critical Pedagogy. An Introduction*. 3rd. Springer Science and Business Media B.V.
- Kant, Immanuel, 2005. *Critique of Practical Reason, 1965* (*Kritik Atas Akal Budi Praktis* (terjem. Nurhadi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, Budi F., 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, Budi F., 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Watloly Aholiab, 2001. *Tanggung Jawab Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius.



Politik kreatif Dan Dekonstruksi sosial¹²

Dalam satu bab dari buku *Of Grammatology* (1976) Jacques Derrida menyatakan: *The end of the book is the beginning of writing*, yang secara lurus diterjemahkan: “Akhir dari (membaca) sebuah buku adalah awal dari (membuat) sebuah tulisan”. Derrida menjelaskan serangkaian makna bahwa seseorang dalam hidupnya tidak saja membahas tentang apa yang pernah dihasilkan, tetapi membeberkan juga kemungkinan untuk membuat sesuatu pada masa yang akan datang. Agar seseorang dapat menghasilkan sesuatu pada masa yang akan datang berdasarkan pada apa yang pernah ‘dibaca’ pada masa lalu, maka sangat

12 SKH Pos Kupang, 20/04/2017.

dibutuhkan kreativitas. Dalam hal ini, kreativitas adalah bentuk keterbukaan untuk ‘membongkar’ yang sudah lama, dan kemudian menyusun dan membentuk kembali sesuatu yang baru berdasarkan pemaknaan yang baru pula. Pembentukan dan pemaknaan baru ini tidak menghilangkan ‘esensi’ dari yang lama, tetapi diperbaharui sesuai dengan tuntutan perubahan. Upaya kreatif untuk membentuk dan memaknai secara baru ini, diistilahkan Derrida sebagai proses dekonstruksi sosial.

Dekonstruksi sosial merupakan suatu kegiatan kreatif untuk membongkar klaim-klaim kemapanan yang sudah lama, tidak relevan dan kontekstual lagi, dan mencoba menatanya kembali pada posisi berbeda (transposisi), yang lebih positif dan konstruktif bagi kehidupan di dunia. Sudah pasti kegiatan kreatif untuk membongkar ini tidak menghilangkan sama sekali hakekat dari realitas yang ada. Hakekat dari realitas tetap dipertahankan, tetapi diberi makna baru sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan. Dalam perspektif sosial politik, dekonstruksi sosial menjadi salah satu upaya alternatif dalam membangun kehidupan yang lebih baik; yang ketika menggagas dan mengimplementasikannya, sangat membutuhkan kreativitas para pelakunya. Kreativitas dalam berpolitik merupakan bagian penting dari proses dekonstruksi karena berkaitan dengan upaya meruntuhkan tatanan lama yang telah merusak, dan kemudian menata tatanan kehidupan yang lebih baru dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari dekonstruksi yang kreatif, kegiatan politik menysasar

pada kesejahteraan dan keterarahan masyarakat pada prospek yang lebih bagus.

Ketika politik menjadi salah satu aktivitas potensial untuk bisa membangun masyarakat maka mereka yang terlibat dalam politik harus memiliki komitmen, totalitas dan opsi yang besar pada kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga mesti kreatif dalam menangkap dan mengakomodasi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat. Para pelaku politik dan institusi politik (partai) yang memiliki komitmen, totalitas, dan opsi ini yang besar pada kepentingan umum sudah pasti akan mendulang kepercayaan masyarakat. Karenanya, ekspektasi masyarakat pada para pelaku politik yang kreatif sangatlah besar. Harapan muncul selain karena adanya desakan akselerasi dan signifikansi pembangunan, juga karena masyarakat semakin menyadari bahwa perubahan yang begitu cepat, *sudden shift*, *unlinear* dan sporadik, hanya bisa diantisipasi melalui model pendekatan politik yang kreatif, dialektis, dan progresif. Konsekuensinya, untuk mendukung kreativitas, dialektika, dan progresivitas ini, para pelaku politik juga harus memiliki keutamaan-keutamaan penting seperti berperilaku fleksibel, dinamis, berwawasan luas, berani keluar dari zona nyaman, dan tidak takut mengambil resiko.

Selanjutnya, kreativitas, dialektika, dan progresivitas dapat dibentuk dan dikembangkan dengan tidak henti-hentinya membuka diri untuk melihat (*watching*) kondisi dan situasi faktual masyarakat; kemudian menganalisis (*analyzing*) dan menafsirkannya (*interpreting*); dan

selanjutnya merenungkan (reflecting); serta yang terakhir adalah berpikir untuk melakukan sesuatu (thinking for doing) untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Terobosan-terobosan politik yang positif dan konstruktif akan membuka ruang dan peluang bagi pengembangan pemikiran dalam bidang politik yang dapat berdampak baik pada bidang-bidang kehidupan lain. Dengan munculnya berbagai inovasi, maka diharapkan dapat membongkar segala bentuk kebijakan-kebijakan yang membelenggu, yang selama ini mungkin tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Inovasi dan kreativitas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan kritis, akan membuat demokrasi semakin berkualitas dan menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Bila belajar dari negara yang berkembang dalam demokrasinya, politik masih menjadi aktivitas yang efektif dan ‘berkekuatan’ dalam membangun sebuah negara bangsa. Dalam hal ini, aktivitas politik yang dikembangkan senantiasa mengarah pada perubahan dan perkembangan masyarakat, dan sedapat mungkin menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat personal maupun institusional. Dan untuk negara-negara yang masih berusaha mematangkan politik demokrasi, perlu berada dalam proses belajar sehingga benar-benar memahami substansi berpolitik, berikut tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan negara bangsa. Adapun munculnya berbagai konflik, friksi dan mungkin mengarah pada perpecahan, mesti dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dramaturgi politik demokrasi. Karenanya, para pelaku

politik harus mampu mengelolanya secara kreatif dan inovatif, sehingga konflik dan friksi tersebut dapat diarahkan pada kematangan dan penguatan karakter berdemokrasi. Sehingga, sekalipun muncul berbagai macam fluktuasi politik yang berat dan kasar, namun hal tersebut tidak sampai menyebabkan runtuhnya tonggak-tonggak demokrasi. Bahkan jika dilihat dari perspektif dialektika, keadaan tersebut akan semakin memantapkan dan memperkuat sendi-sendi bangunan demokrasi.

Politik sebagai salah satu aktivitas untuk mendekonstruksi kehidupan sosial sudah pasti berangkat dari pemahaman yang mendalam tentang keadaan dan situasi sosial masyarakat. Agar dekonstruksi berjalan dengan efektif dan berdaya guna, ada beberapa hal ini yang perlu diperhatikan: (1) Kreativitas untuk melihat kehidupan sosial berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang ada dalam masyarakat. Usaha melihat kebutuhan dari perspektif masyarakat akan sangat membantu membentuk kreativitas dalam berpolitik. Sebab kompleksitas kebutuhan masyarakat sudah pasti akan menuntut kreativitas dalam melakukan pendekatan pelayanan dan perumusan kebijakan-kebijakan yang strategis. (2) Segala bentuk pendekatan dan kebijakan politik mestinya selalu bertolak dari nilai-nilai yang sedang bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan dengan kreatif mengembangkan nilai-nilai tersebut untuk membantu menguatkan tonggak-tonggak kehidupan masyarakat. Dengan memberdayakan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut, aktivitas politik akan mendapatkan bobot yang lebih kuat dan berarti. Dengan

berbasis pada nilai lokal, pendekatan dan kebijakan politik dapat lebih menghampiri kebutuhan masyarakat, dan menjadi harapan dalam memecahkan berbagai masalah yang menerpanya di kemudian hari. (3) Membuat wacana dan diskursus tentang prospek dan masa depan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat perlu dibawa dan digiring untuk keluar dari masalah yang melandanya dan mengarahkan mereka agar untuk berani menatap masa depannya. Aktivitas politik juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memecahkan masalah-masalah keseharian hidupnya.

(4) Membuat jaringan kerjasama dengan pihak terkait dalam membahas berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam kehidupan masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Selain untuk untuk menghindari cara berpolitik yang *mainstream*, rutin, statis, dan linear, kerjasama juga perlu dibentuk untuk merekatkan hubungan relasional antara elemen-elemen masyarakat dalam memanfaatkan kekuatan/peluang dan menghindari/mencegah kelemahan/ancaman. Membangun persahabatan politik dengan pihak lain akan sangat membantu mendapatkan berbagai masukan yang lebih tepat dan akurat tentang situasi dan keadaan masyarakat. Studi relevansi, kontekstual dan korelasional tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadikan aktivitas politik menjadi lebih responsif dan representatif. (5) Menambah bacaan/referensi ilmiah dan empirik akan sangat membantu mengembangkan wawasan untuk berpolitik secara kreatif. Karenanya, para pelaku politik perlu bergumul dengan berbagai bacaan/referensi agar

semakin memiliki perspektif yang luas, baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran empirik. Bila memungkinkan, para pelaku bisa mengutarakan gagasan dan manifesto politiknya melalui tulisan yang dapat dipublikasi pada berbagai media sebagai bentuk kegiatan edukasi dan literasi terhadap masyarakat.

Bahan Bacaan:

- Asyhadie, Nuruddin, 2004. *Hampanan Gramatologi Derrida*. Jakarta: LKiS.
- Pals, L. Daniel, 1996. *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujub Teori Agama* (terjem. Inyik R. Muzir, dkk). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Blackburn, Simon. 2013. *Kamus Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gergen, Kenneth J., 2001. *Social Construction in Context*. London: Sage Publication.
- Hamersma, Herry, 1980. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, Budi F., 2007. *Filsafat Modern; dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia.



Cegah Jebakan Populisme Peyoratif!

Dalam sejarahnya, solidaritas kelas telah membidani lahirnya populisme. Populisme yang lahir dari solidaritas kelas cenderung kiri dengan selalu menggunakan retorika perjuangan kelas. Biasanya sikap ekstrim kiri dipicu karena protes terhadap perlakuan tidak adil dan distribusi kebijakan kesejahteraan yang tidak merata. Populisme ekstrim kiri bisa saja berpotensi menciptakan konflik antara kelas (*conflict of class*). Konflik kelas yang diciptakan populisme kiri muncul dari slogan dikotomis ‘kelas atas menguasai kelas bawah’ atau ‘negara lebih berpihak pada satu golongan dan menelantarkan golongan lain’ (Samuel,

2016). Dalam bacaan sejarah, konflik kelas yang lahir dari rahim populisme kiri, antara lain yang dipimpin Luiz I.L da Solva (Brazil), Hugo Chavez (Venezuela), Aung San Suu Kyi (Myanmar), dan Nelson Mandela (Afrika Selatan). Dalam sejarah Indonesia, sampai saat ini belum pernah terjadi letusan gerakan dari populisme kiri ini. Salah satu sebabnya, cukup cukup responsif dalam mengidentifikasi dan mengelola kecenderungan-kecenderungan tersebut. Negara telah menggunakan instrumen-instrumen secara efektif dalam menanganinya, sehingga tidak menjadi ancaman yang berarti bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan bernegara.

Pasca populisme kiri yang berbasis solidaritas kelas, kemudian muncul pula populisme kanan yang bertolak dari klaim solidaritas publik. Klaim solidaritas publik ini membawa isu-isu yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat umum. Mereka cenderung mengatasnamakan gerakan-gerakan pada kepentingan mayoritas yang ada dalam negara. Dengan demikian, gerakan-gerakan dilakukan sering kali mengkomodifikasi atribut-atribut yang berbau nasionalisme, patriotisme atau bahkan mayorisme suku, ras, golongan atau agama. Berkat menggandeng atribut-atribut ini mereka menyakini bahwa segala bentuk dan manifestasi kegiatannya sangat legitim, legal dan didukung oleh negara. Pada fase normal pembangunan negara bangsa, kehadiran gerakan populisme kanan ini justru sangat dibutuhkan untuk menambah konsolidasi kekuatan-kekuatan sosial politik ketika berhadapan dengan ancaman negara-negara

lain. Cukup banyak bangsa yang mengandalkan berbagai gerakan kekuatan-kekuatan sosial politik populisme kanan untuk mempertegas identitas kebangsaan dan kekuatan politik bilateral dan multilateral.

Kecemasan yang Muncul

Namun, ketika gerakan populisme radikal kanan ini mencoba menyaingi kekuatan negara atau mengalahkan otoritas bangsa maka sudah pasti menimbulkan kecemasan kolektif. Tentu kecemasan muncul saat pergerakannya dilakukan dengan sporadis dan fasis, diikuti dengan tindakan verbal dan non-verbal untuk melecehkan, menghina dan merendahkan orang, kelompok atau golongan tertentu. Bila hal ini terjadi, dalam perspektif makna kebahasaan, gerakan-gerakan populis kanan ini memiliki keterarahan peyoratif. Mereka menggunakan dalil-dalil kebahasaan tertentu guna menghina, merendahkan dan mencemooh orang, kelompok dan golongan lain. Bila keterarahan ini lebih dominan dan determinan maka kekuatan-kekuatan sosial ini tidak lagi secara positif mendukung sendi-sendi bangsa, namun bisa menjadi bumerang bagi tegaknya kehidupan berbangsa. Kecemasan yang paling akut, bila gerakan populisme radikal kanan ini akan diasumsikan sebagai gerakan kebangsaan. Sebab dengan adanya militansi yang dibangun secara sistematis, terstruktur dan masif membuat pergerakan ini dapat menggiring persepsi dan sikap publik untuk mengakuinya secara langsung atau pun tidak langsung. Selanjutnya, pada titik krusial tertentu

negara bisa saja takluk, tunduk dan frigid pada kendali gerakan-gerakan populisme kanan yang peyoratif ini.

Menurut saya, adanya gerakan populisme radikal kanan yang peyoratif ini dapat memunculkan pencitraan negatif dan kegamangan dalam berbangsa. Bila negara berikut otoritasnya tidak dapat memperbaiki pencitraan negatif ini dan mengurai kegamangan berbangsa, maka dampak yang paling dini akan membenihkan disorientasi berbangsa. Disorientasi bertunas karena adanya penggiringan dan *framing* ideologi negara pada kepentingan pergerakan populis peyoratif tersebut. Bila negara tidak kuat untuk membendung dan bertindak tegas kepada gerakan-gerakan ini, tentu akan berlanjut pada munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat kepada negara. Ketidakpercayaan ini tentunya akan menumbuhkembangkan bentuk-bentuk ketidakpatuhan (*disobedience*) dan ketidakloyalan (*disloyalty*) masyarakat terhadap negara. Selanjutnya, ketidakpatuhan dan ketidakloyalan ini menjadi embrio utama dalam menciptakan pemisahan atau perpecahan (*disintegration*). Bila ditelisik lebih dalam dari perspektif politik ideologi, sebenarnya intensi dan atensi gerakan-gerakan ini tidak murni memperjuangkan ideologi dari wadahnya, tetapi lebih bermaksud untuk menimbulkan situasi dan kondisi kacau (*chaos*) dalam tubuh bangsa. Targetnya, bila bangsa dalam keadaan kacau maka terbuka kemungkinan adanya proses sosial politik baru, di mana akan memberi ruang bagi mereka untuk bereksistensi dan bisa jadi mengambil alih kendali kekuasaan sosial politik.

Penyembuhan Konstruksi Sosial

Sudah barang tentu negara dan masyarakat harus berupaya untuk menetralkan dan membebaskan diri dari jebakan populisme dalam segala bentuknya. Upaya ini menjadi sangat urgen dan mendesak, agar tidak terlanjur berakibat sistemik pada kehidupan masyarakat. Ada negara yang sudah mulai bebas dari ancaman, gangguan dan hambatan populisme radikal karena telah membahas dan menyelesaikannya melalui kajian dan perspektif terapeutik konstruksi sosial. Gergen (2001) mengatakan, terapeutik berbasis konstruksi sosial ini sangat mendasar ketika permasalahan sosial, termasuk radikalisme dan populisme menjadi ancaman bagi tatanan bangsa. Terapeutik tersebut berangkat dari diagnosa terhadap sebab dan akar dari munculnya gerakan populisme radikal tersebut. Selanjutnya, terapeutik disertai dengan perangkat-perangkat untuk melakukan studi dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terlantar, potret ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam beberapa bidang kehidupan, ketidaktersediaan lapangan kerja dan lahan ekonomi, dekadensi moral etis dan diskrepansi sosial sebagai akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menerima lajunya perkembangan, serta degradasi lingkungan sosial dan alam sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kepentingan ekonomi global. Studi dan analisis menjadi bagian integral dalam proses terapeutik berbasis konstruksi sosial karena bersamaan negara dan masyarakat akan mengetahui secara persis dan detail tentang penyebab, dampak dan solusi dari masalah populisme radikal kanan yang peyoratif ini.

Manfaat lain dari penyembuhan berbasis konstruksi sosial dengan mengintegrasikan studi dan analisis ini adalah membangun kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat dalam mengatasi berbagai pergerakan radikal. Kesadaran kolektif menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Kesadaran kolektif ini juga berhubungan dengan merancang dan menyusun langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan demi mengatasi sekaligus mencegah tumbuh-kembangnya paham-paham radikal, termasuk di dalamnya kesepakatan tentang sistem informasi keamanan, hak dan kewajiban, perlindungan serta kenyamanan sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan kesadaran kolektifnya, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk ‘berani terlibat’ dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak perubahan dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju dinamisitas dan fleksibilitas; berubah dari hanya sekedar kesadaran diri menuju kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Langkah-langkah penyembuhan berbasis konstruksi sosial sebenarnya sangat strategis, potensial dan relevan dalam konteks Indonesia karena mempertimbangkan: (1) Sudah mendarahdagingnya dasar-dasar penghargaan

terhadap sesama yang beragam, sejak saat warga negara mulai bersosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. (2) Pranata dan norma sosial yang ada dalam budaya dan adat istiadat sudah bersudut pandang multikultural, sehingga berbagai persoalan berbasis SARA sebetulnya tidak lagi menjadi diskusi yang membebankan secara sosial maupun akademik. (3) Literasi kebhinekaan dan multikultural sudah *correlated and integrated* dalam sistem dan praksis kurikulum pendidikan, sehingga secara pengetahuan, sikap, dan praksis, masyarakat didik sudah memiliki kesadaran kuat menjalankan praktik-praktik pluralis. Harapannya, masyarakat akademik bisa mempengaruhi pemahaman dan pengertian masyarakat umum tentang realitas dan kompleksitas kemajemukan. (4) Negara dan instrumen hukumnya telah menjamin kebebasan individu, kelompok, dan masyarakat dalam berpendapat dan berorganisasi dengan prinsip dasar: Tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan umum dan tidak melanggar/melawan hukum!

Bahan Bacaan:

Gergen, Kenneth J., 2001. *Social Construction in Context*. London: Sage Publication.

Schroyer, Trent, 1973. *The Critique of Domination*. Boston: Beacon.

Parker, Walter and John Jarolimek, 1984. *Citizenship and The Critical Role of The Social Studies*. Washington DC: National Council for The Social Studies.

Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post-Modern* (terjem.) Bantul: Kreasi Wacana.

Supardan, Dadang, 2015. *Manusia, Kekerasaan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*. Bandung: Rizqi.

Winarno, Budi. 2001. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.



Menjaga Pilar Bangsa¹³

Demi merespon munculnya radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme yang bahkan telah merambah sampai tingkat PT, maka sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26/04/2017 di kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh telah mendeklarasikan beberapa hal ini: (1) Bertekad bulat menjadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. (2) Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak

¹³ Harian Pos Kupang, 16 Mei 2017

bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI. (3) Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa. (4) Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN. (5) Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945 dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Respon ini perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral, politik dan sosial dari PT terhadap keutuhan NKRI. Sebenarnya, dengan munculnya gerakan-gerakan radikal anti demokrasi ini, memberi peringatan kepada negara untuk segera melakukan langkah-langkah strategis ‘penyelamatan’ sekaligus tindakan-tindakan tegas untuk memberangus kehadiran berbagai bentuk organisasi yang dinilai mengancam pluralitas dan multikulturalitas. Radikalisme tentunya tidak bisa terlepas dari semakin menggemanya isu transnasionalisme. Transnasionalisme merupakan gerakan sistematis yang berupaya mereduksi dan menyeragamkan masyarakat dari berbagai bangsa menjadi satu bangsa dunia dengan satu ideologi politik tertentu, sudah pasti akan menjadi ancaman nyata bagi ideologi keberagaman dan multikultural, persis seperti yang melekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme sudah pasti menjadi ancaman nyata, serius dan krusial, yang pada tingkat paling kronis akan memporakporandakan demokrasi Pancasila. Gerakan-gerakan dengan berpola destruksi yang

sangat masif dan sistematis, selain berideologi ekstrim, intoleran dan tidak manusiawi, juga memiliki militansisme dan heroisme yang kuat dari para pengganggu, berikut pengikutnya.

Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya gerakan-gerakan ini, antara lain: (1) Pendidikan demokrasi belum mengalami transformasi yang cukup berarti dalam menyadarkan, mencerdaskan dan membentuk wawasan kebangsaan masyarakat. Meskipun negara sudah mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan, struktur kurikulum dan materi ajar, namun ketika demokrasi hanya pada tataran kognitif saja, dan tidak masuk ranah pengamalan/penghayatan, maka hanya menjadi sekedar label/slogan yang tidak menggambarkan realitas kebangsaan. Bila pendidikan demokrasi tidak diberdayakan dalam diri masyarakat umum dan masyarakat sekolah sampai pada tahap penghayatan/pengamalan, maka akan memudahkan ideologi lain merasuk kehidupannya; (2) Tingkat literasi demokrasi Indonesia dinilai masih belum bisa menyamai negara-negara lain yang sudah maju demokrasinya. Realitas yang dapat mengafirmasi penilaian ini adalah sulitnya masyarakat membedakan secara jelas (*distingsi*) antara urusan negara dengan urusan agama. Padahal sejak awal berdirinya, secara ideologi politik sudah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara beragama, bukan negara agama. Suatu kecelakaan berat bagi suatu negara demokrasi bila urusan negara diintervensi dan bahkan disubordinasi oleh urusan-urusan agama yang secara ideologis menganut paham teokratisme. Dalam catatan sejarah, paham teokrasi ini kerap gagal

dalam aplikasinya, karena selain tidak relevan dengan perkembangan negara modern dan menganggangi realitas keduniawian yang menjadi bagian dari realitas kesurgawian, juga seringkali menciptakan pelanggaran/kejahatan terhadap manusia dengan mengatasnamakan Tuhan. Tuhan dan urusan surgawi sering dijadikan sebagai tameng oleh oknum radikal dan fundamental untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi;

(3) Adanya pembiaran oleh pemerintah/masyarakat terhadap berkembangnya praktik politik sektarian oleh partai politik tertentu dan berbagai organisasi sayapnya. Tentu tak bisa dipungkiri, gerbong politik menjadi salah satu kekuatan yang berpengaruh secara intensif-signifikan pemahaman masyarakat terhadap realitas kebangsaan, termasuk sikap dan perilaku dalam masyarakat. Bila masyarakat tidak cukup rasional dan kritis dalam menerima pengaruh dari ideologi politik sektarian, maka persepsi dan sikapnya mudah sekali untuk digiring oleh opini sesat dan dangkal yang sudah didesain untuk kepentingan tertentu. Parade kegagalan politik demokrasi yang terjadi belakangan ini disebabkan karena isu sektarian sangat kuat dihembus oleh golongan/partai tertentu demi tujuan kekuasaan dan eksistensi ideologinya. Masif dan sistematisnya isu-isu sektarian ini melumpuhkan wawasan dan rasa kebangsaan masyarakat yang sudah lama terbina. (4) Gagasan tentang pilar-pilar kebangsaan masih sebatas resonansi dan belum menjadi inherensi penghayatan hidup berbangsa. Selain karena sosialisasi dan edukasi yang belum holistik dan komprehensif kepada semua elemen bangsa, juga karena adanya polarisasi ideologi politik kekuasaan yang

menyebabkan pilar-pilar kebangsaan ini hanya sebatas gagasan dan ‘jualan’ ideologi politik dari rezim pemerintah. Padahal, bila negara secara tegas mengharuskan empat pilar ini menjadi platform ideologi semua partai politik maka bisa meminimalisasi kecenderungan sektarian. Bahkan partai politik bisa diberdayakan secara optimal untuk menangkal/mencegah segala manifestasi paham/gerakan radikal yang berusaha merusak ideologi Pancasila.

Negara-negara yang berdemokrasi modern sekalipun, sudah menganggap berbagai gerakan radikal menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakatnya. Berbagai kebijakan politik dan langkah-langkah strategis telah didesain untuk mencegah dan mengatasinya sehingga tidak berdampak sistemik pada kehidupan masyarakat. Dan, satu hal yang mendukung kebijakan negara dalam berhadapan dengan gerakan-gerakan radikal ini adalah sistem budaya demokrasi menyeluruh, yang dimulai sejak dini dan dibudayakan pada hampir setiap sisi kehidupan masyarakatnya. Budaya demokrasi menyeluruh ini tidak berhenti pada konsep-konsep pembelajaran di persekolahan, tetapi menjadi bagian dari praksis keseharian masyarakat. Ketika menjadi praksis keseharian, demokrasi tidak lagi sebatas ideologi politik semata, tetapi menjadi budaya yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi menjadi bagian yang sifatnya menyeluruh (holistik) dalam berbangsa, sehingga apapun kegiatan warga masyarakat, semangat demokrasi menjadi landasan utamanya. Demokrasi dianggap sangat membantu membangun kehidupan yang beradab, manusiawi, menghargai hak dan perbedaan, serta toleran terhadap keberagaman.

Dalam *Transforming Education Policy Shaping a Democratic Future* (2011), Philip A. Wood memaparkan tentang budaya demokrasi holistik yang melandasi praktik demokrasi modern. Budaya demokrasi holistik ini memiliki empat komponen penting, yakni: (1) Pemahaman menyeluruh (*holistik meaning*) akan konsep dan praksis demokrasi, yang tidak terlepas dari realitas kehidupan setempat, di mana telah memiliki tatanan sosial, hukum, norma, nilai-nilai, kearifan-kearifan lokal, bentuk relasi sosial, dan filsafat hidup. Praktik demokrasi holistik mesti ditopang oleh dimensi spiritual, kognitif, estetika, afektif, etika, maupun fisik yang sudah bertumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat bangsa. Justru dengan mempertimbangkan realitas kehidupan dan dimensi yang menopangnya, maka demokrasi akan menjadi ‘milik’ masyarakat dan enggan untuk melepaskannya dengan dalih apapun. (2) Adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*) yang rasional dan seimbang antara lembaga-lembaga formal, termasuk hak untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum. Pembagian kekuasaan yang rasional dan seimbang ini, mesti didukung oleh nilai-nilai kejujuran, keadilan, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. (3) Adanya transformasi dialog (*transforming dialogue*) yang bisa dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai perspektif agar dapat keluar dari tendensi sektarian, eksklusif dan pragmatis. Banyaknya kegiatan dialog, diskusi, dan kritik konstruktif akan menumbuhkembangkan demokrasi yang deliberatif dan partisipatif. (4) Adanya kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh (*holistic well-being*) dalam bentuk pemerataan kepemilikan sosial, keterjangkauan akses

perkembangan, pemberdayaan dan partisipasi yang aktif dalam politik demokrasi sehingga dapat mengembangkan kepercayaan diri, harapan akan kebahagiaan masa depan, dan relasi positif sebagai warga bangsa.

Bahan Bacaan:

Wood, Philip A., 2011. *Transforming Education Policy Shaping a Democratic Future*. London: The Policy Press.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Supardan, Dadang, 2015. *Manusia, Kekerasaan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*. Bandung: Rizqi.

Veeger, K.J. 1984. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.



Rancang lagi Kesadaran berbangsa^{14*}

Upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbangsa menjadi gagasan-gagasan penting akhir-akhir ini, ketika semakin maraknya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap entitas dan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan-gerakan yang berupaya memberangus keadaban berbangsa ini, bahkan sudah dipandang sangat terstruktur, sistematis, masif dan sporadis. Dan, bila tidak segera ‘digebuk’ akan sangat merusak konstruksi kebangsaan yang sudah lama

^{14*} Harian Umum Flores Pos, 28/07/2017

terpelihara. Menilik urgensinya, Pemerintah pusat sampai daerah semestinya bersikap responsif dan menjadikan isu-isu destruksi kebangsaan ini sebagai tema prioritas pada program-program kerja jangka pendek. Saya yakin, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kebijakan-kebijakan strategis dan progresif pemerintah terkait dengan upaya menangkal dan mengelola berbagai isu dan gerakan, yang dari waktu ke waktu cenderung menggugat eksistensi kedaulatan NKRI.

Usaha menumbuhkan dan membentuk kembali kesadaran berbangsa menjadi ‘*conditio sine qua non*’ untuk kondisi bangsa saat ini. Sebab bila menanggukkan atau melupakannya akan berakibat fatal bagi tatanan kebangsaan pada masa-masa mendatang. Dalam pemikiran Sejarah Filsafat Barat Modern, kesadaran menjadi kekuatan penting bagi kemajuan peradaban dan keutuhan sebuah masyarakat (bangsa). Kesadaran, baik individu maupun kelompok masyarakat, sangat menentukan arah dan gerak perjalanan suatu masyarakat bangsa. Kesadaran yang tinggi pada setiap anggota masyarakat sudah pasti berdampak pada semakin besarnya tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa. Segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berupaya menggerogoti kehidupan masyarakat bangsa, dapat diselesaikan atau tidak, sangat tergantung pada kualitas tanggung jawab dari warga masyarakatnya.

Kesadaran berbangsa tidak muncul begitu saja dalam diri warga masyarakat, tetapi membutuhkan

proses dalam menumbuhkembangkannya. Immanuel Kant (1724-1804) dalam pengantar buku *Critique of Pure Reason* menyebutkan empat pertanyaan penting yang melandasi proses merancang kesadaran manusia dalam bermasyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itu, antara lain: (1) ‘Apa yang dapat diketahui?’. Pertanyaan ini berhubungan dengan upaya memberdayakan pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu; menggunakan rasionya agar bisa membedakan yang baik dan benar, memberi sumbangan pemikiran positif terhadap berbagai persoalan kehidupan, serta mencerna segala informasi buruk yang masuk dalam dirinya. (2) ‘Apa yang harus dilakukan?’. Pertanyaan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan etis seseorang yang berdampak pada kebaikan bersama (*bonum commune*), mendukung kehidupan sosial serta mampu memperbaiki tatanan sosial yang sudah rusak; (3) ‘Apa yang dapat diharapkan?’ Pertanyaan ini bertalian dengan indahny hidup bersatu dalam keberagaman (estetika) dan cita-cita akan hidup yang lebih baik. (4) ‘Siapa itu manusia?’. Pertanyaan ini menjadi jalan bagi upaya menemukan jati diri sebagai manusia sempurna, ketika dia sudah memberdayakan pengetahuan, melakukan tindakan-tindakan etis, memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik.

Merujuk pada pemikiran Kant ini, saya menjelaskan empat hal yang perlu mendapat perhatian dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa. *Pertama*, sejatinya,

untuk merajut lagi kesadaran berbangsa, setiap warga negara mesti membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan yang mendalam tentang Indonesia, baik dari sejarah lahir dan berkembangnya saat ini, maupun berkaitan dengan keunggulan-keunggulan yang ada padanya. Pengetahuan yang integral, holistik dan komprehensif tentang bangsa akan menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme pada seseorang. Tumbuh dan berkembangnya rasa cinta pada negeri disebabkan karena mendalamnya pemahaman tentang keindonesiaan. Dalam pemikiran filosofis, kesadaran ini disebut kesadaran ontologik karena berhubungan dengan kemampuan untuk merenungkan tentang ‘ada dan mengadanya’ bangsa Indonesia. Kesadaran ontologik menjadi dasar dalam membangun kesadaran epistemologik, yaitu pengetahuan yang benar ‘apa adanya’ tentang Indonesia, baik dari sudut positif maupun negatifnya.

Kedua, pengetahuan yang benar dan adanya semangat cinta tanah air menjadi landasan berpikir untuk melakukan (thinking for doing) sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Seseorang yang dalam dirinya ada ‘rasa memiliki bangsa’ (sense of belonging for nation) yang tinggi, akan selalu berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk pertumbuhan bangsa ke arah yang lebih konstruktif. Karena itu, otot, otak dan perasaan benar-benar diabdikan untuk pembangunan bangsa (nation building). *Ketiga*, mekarnya sejumput

harapan akan Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang, merupakan resultansi dari perbuatan-perbuatan baik dan benar dari warga negara. Sejumpt harapan ini mengandung optimisme dan idealisme bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa maju lainnya di dunia. Optimisme dan idealisme ini justru semakin tertopang kuat ketika menilik besarnya potensi sumber daya alam dan keragaman suku, ras, dan agama. Karena itu, sangat naif dan konyol bila masih ada orang Indonesia yang pesimis dan kehilangan idealisme berbangsa lantaran ‘hasutan’ paham/ideologi lain, yang belum terbukti memiliki kualitas sebanding dengan ideologi Pancasila.

Keempat, kapasitas pengetahuan, tindakan-tindakan etis, dan memiliki cita rasa kebersamaan dan cita-cita akan masa depan yang lebih baik, harus menjadi tipikalitas dari seorang ‘manusia’ Indonesia. Bila dia memiliki kapasitas-kapasitas ini, maka dia menemukan kesejatan eksistensinya sebagai warga negara. Menemukan diri sebagai warga negara yang sejati merupakan bagian penting dari kesadaran etis. Kesadaran ini terekspresi dari model keadaban hidupnya sebagai warga negara. Bila kehidupannya sudah beradab, dapat dipastikan sudah terkonstruksi kesadaran etis dalam diri masyarakatnya. Manifestasi utama dari kesadaran etis adalah kebaikan dan konsistensi tindakannya sebagai warga negara. Praksisnya, bangsa yang beradab tercermin dari pemikiran

dan tindakan-tindakan etis warganya, seperti senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran, keadilan, kejujuran, menghargai perbedaan, toleransi, hak asasi manusia, hak asasi alam, dll.

Rekonstruksi kesadaran memberi manfaat yang besar dalam pembangunan bangsa terkait beberapa hal, yaitu: Sebagai dasar dalam membangun proses konstruksi kewarganegaraan (*citizenship construction*), di mana termuat di dalamnya kehendak untuk melestarikan kebudayaan, kebijakan-kebijakan, cita-cita luhur, dan nilai-nilai budaya bangsa. Warga masyarakat kembali disadarkan tentang nilai-nilai dan kebijakan lokal yang menjadi warisan tak ternilai dari nenek moyang dulu. Nilai-nilai dan kebijakan lokal tersebut telah menjadi dasar dalam menjalin kehidupan berbangsa yang erat dan kental. Selain itu, rekonstruksi kesadaran merupakan embrio dalam mengembangkan semangat patriotisme dan nasionalisme, membentuk integritas dan tanggung jawab sebagai warga Negara. Selanjutnya, upaya membentuk kembali kesadaran etis berbangsa merupakan kiat mendorong munculnya partisipasi aktif dalam berdemokrasi; kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah social. Kesadaran etis juga tampak pada penghargaan warga negara terhadap perbedaan budaya, suku, ras, maupun agama yang didukung dengan sikap toleran, inklusif dan respek.

Rekonstruksi kesadaran ini menjadi relevan untuk kekinian Indonesia karena dasar-dasar penghargaan terhadap sesama dan perbedaan yang sudah ditanamkan sejak awal ketika warga negara ada dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, pranata dan norma sosial sudah berbasis plural dan multikultural, sehingga berbagai masalah berdimensi SARA sebenarnya tidak lagi menjadi diskusi yang memberatkan, baik secara sosial maupun akademik. Upaya rancang kembali kesadaran berbangsa, juga strategis karena literasi kebhinekaan dan multikultural sudah terintegrasikan dalam sistem dan praksis kurikulum, sehingga masyarakat didik sudah memiliki kesadaran yang kuat dalam mempraktikkan keanekaragaman. Harapannya, masyarakat persekolahan mempengaruhi secara positif pengertian masyarakat umum tentang realitas kemajemukan. Upaya ini juga sudah didukung oleh negara dan kelengkapan perangkat hukumnya yang telah menjamin kebebasan individu, kelompok dan masyarakat dalam berkumpul, berpendapat dan berekspresi.

Bahan Bacaan:

Kant, Immanuel, 2005. *Critique of Practical Reason, 1965* (Kritik Atas Akal Budi Praktis (terjem. Nurhadi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fromm, Erich, 1988. *Manusia Bagi Dirinya; Suatu Telaah Psikologis-Filosofis tentang Tingkahlaku Manusia*. Jakarta: Akademika.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Supardan, Dadang, 2015. *Manusia, Kekerasaan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*. Bandung: Rizqi.



Membangun optimisme Dalam bernegara bangsa¹⁵

Pernyataaan ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto tentang bubarnya bangsa Indonesia pada tahun 2030 tentu banyak memanen polemik. Dari sisi positif, meskipun bersumber pada sebuah novel fiksi berjudul *Ghost Fleet* (2015) karya P.W. Singer dan August Cole, tetapi pernyataan ini bisa dilihat sebagai sebuah *warning* untuk tetap membenah kesadaran berbangsa. Saya melihat, pernyataan ini menjadi ungkapan alam bawa sadar dari seorang tokoh bangsa agar setiap insan tetap *concern*, solid dan bertanggung jawab dalam

¹⁵ Harian Pos Kupang, 25 Maret 2018

berbangsa. Selain itu, pernyataannya dapat juga dinilai sebagai manifestasi rasa cinta yang begitu mendalam terhadap tanah air. Pernyataan seperti ini jarang muncul dan tidak bisa diungkapkan begitu saja oleh orang yang bukan tokoh. Tentu ketika pernyataan ini diungkapkan, sudah melalui pertimbangan dan keputusan yang matang. Dan, saat menjadi viral dan tuai perdebatan, maka pernyataan ini bisa dipersepsi memiliki makna dan daya kuat (meaningful dan powerful statement) bagi ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Sementara dari sisi negatif, saya berkesimpulan bahwa pernyataan ini terlalu vulgar dalam mengumbar pesimisme. Ada dua hal yang menjadi alasan kesimpulan: *Pertama*, selama saya belajar sejarah berbangsa, pernyataan ini menjadi satu-satunya yang begitu pesimistik dan sangat imajiner. Pernyataan ini sekonyong-konyong memporakporanda optimisme dan idealisme sebagai anak bangsa yang berasal dari belahan timur Indonesia. *Kedua*, untuk mendalami pernyataan ini, saya perlu mengulas perbedaan antara pesimisme dan skeptisisme. Pesimisme adalah sebuah bentuk kecenderungan sikap subyektif, bercampur bumbu fiktif dan imajiner. Umumnya, kecenderungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dangkal, artifisial dan sensasional semata. Artikulasinya sering tidak berdasarkan pada kajian-kajian ilmiah, kerap apriori dan tidak melewati sebuah proses metodologi berpikir yang adequate (Blackburn, 2013). Pesimisme juga kadang muncul karena kesimpulan dikonstruksi tidak berangkat dari premis-premis yang masuk akal, hanya mengandalkan opini dan persepsi, serta

tidak melalui proses refleksi yang panjang. Sementara pemikiran skeptik adalah sebuah disposisi intelektual, di mana seorang memutuskan untuk ragu-ragu (*dubium*) akan sesuatu hal, atau suatu rancangan akan masa depan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dan beralasan (Bagus, 1999). Pemikiran skeptik merupakan dampak langsung dari sebuah kesimpulan sebagai hasil analisis mendalam, dan sudah pasti berdasarkan fakta dan data yang tervalidasi (*falsifikasi* dan *verifikasi*) oleh para ahli (*expert judgement*). Pemikiran skeptik menjadi salah satu sisi dari sebuah proses refleksional yang dalam terhadap tangkapan panca indera (*sensasi*) dan artifisialitas. Jelasnya, pemikiran skeptik merupakan hasil interpretasi dan pemaknaan terhadap, fenomena, fakta dan data. Nah, dari ulasan ini silahkan menilai, apakah *statement* bapak Prabowo masuk dalam kategori pemikiran skeptik atau sekadar sikap pesimistik-imaginer.

Skenario Membangun Bangsa yang Optimis

Dalam konteks matriks analisis SWOT, skeptisisme muncul ketika ancaman (*threat*) dan kelemahan (*weakness*) lebih kuat dibanding peluang (*oppurtunity*) dan kekuatan (*strength*). Biasanya SWOT merupakan salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk membuat sebuah ramalan ilmiah atau yang disebut prediksi. Sementara dalam konteks pembangunan bangsa, yang disering digunakan adalah analisis atau skenario membangun bangsa (*nation scenario building*). Untuk mendukung skenario membangun bangsa ini, yang kerap

menjadi rujukan dasar adalah kekekuatan-kekuatan penentu (*driving forces*) yang kontekstual dalam bangsa tersebut. Jika kekuatan-kekuatan penentu, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, keamanan, pendidikan, kesehatan, dll., rapuh maka bisa diprediksi atau diproyeksi mengenai pembubaran suatu bangsa. Namun, selagi faktor-faktor penentu di atas masih normal, seimbang (*equilibrium*) dan prospektif untuk mengalami peningkatan, maka sangatlah tidak beralasan untuk berpikir skeptik atau hanya sekedar bersikap pesimistik.

Bila muncul pemikiran skeptik dan sikap pesimistik pada saat kondisi bangsa normal dan bergerak maju, bisa dikategorikan sebagai sebuah ‘fenomena anomali berbangsa’. Bila fenomena pemikiran skeptik dan sikap pesimistik berusaha dikembangkan secara terstruktur, sistematis, masif; maka selain bisa dilihat sebagai sebuah kepentingan politik ideologis, tetapi juga menjadi ancaman yang akan merampok optimisme generasi bangsa. Meski demikian, pada negara-negara yang sudah matang dalam berdemokrasi, fenomena anomali berbangsa ini lumrah dan sering terjadi. Tugas negara adalah berusaha untuk menetralkan dan menjawab pemikiran skeptik dan sikap pesimistik tersebut dengan program-program nyata demi penguatan tonggak-tonggak negara bangsa, agar tidak rapuh dan goyah.

Mari Mulai Membangun Manusia

Narasi mengenai besar dan berkembangnya sebuah negara bangsa sangat tergantung pada manusianya. Adanya pesimisme, skeptisisme dan optimisme sangat tergantung pada manusianya. Bila belajar dari negara Jepang yang mengalami situasi porak poranda akibat perang dunia ke-2 dengan peristiwa Bom Nagasaki dan Hiroshima (Agustus 1945), maka kita akan menyadari betapa penting membuat prioritas pembangunan manusia. Para pemimpin Jepang begitu optimis untuk bangkit dari keterpurukan waktu itu, justru ketika mereka mengetahui secara pasti kekuatan-kekuatan penentu negara yang bisa diandalkan, antara lain manusia dan kekayaan alamnya. Sampai pada abad 21 ini, Jepang sudah menjadi salah satu negara *superpower* dalam segala bidang kehidupannya. Kemudian bisa diprediksi dan diproyeksi, apa pun bentuk ancaman dan hambatan yang akan melanda, negara ini tetapi berdiri teguh dan tak akan mungkin bubar. Bahkan mereka optimis, pada pertengahan abad ini Jepang akan menjadi satu-satunya negara berkekuatan ekonomi paling besar di dunia.

Ketika pemerintah Indonesia saat ini fokus dan berorientasi pada pembangunan fisik, mungkin lebih pada pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana dasar untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Namun, hal ini tidak berarti menafik kebutuhan akan pembentukan karakter manusia. Sebab, pada fase tertentu proyek-proyek fisik ini bisa mubazir

dan terjebak dalam ‘politik pembangunan Mercusuar’, di mana yang diandalkan adalah kehebatan fisik pembangunan, tetapi belum pasti berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Yang menjadi kebutuhan saat ini adalah model manusia yang bisa memanfaatkan dan memberdayakan sarana prasarana dengan baik dan benar. Lebih dalam dari itu, terbentuk manusia yang bisa menciptakan dan membangun sendiri. Hal ini penting demi menghindari segala bentuk ketergantungan pada sumber daya dari negara lain. Dalam konteks bonus demografi, harapan kekinian adalah manusia berkarakter kuat dalam membangun bangsa. Seandainya sekarang kita lebih fokus pada pembangunan manusia, maka pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami surplus manusia yang memiliki semangat dan jiwa inovatif, kreatif, prospektif, optimis dan memiliki rasa cinta bangsa yang tinggi. Bila hal ini menyata, maka segala bentuk pernyataan pesimisme dan pemikiran skepitisme, dengan sendirinya terbantahkan dan dianggap prematur.

Dengan majemuknya manusia yang berjiwa dan bersemangat inovatif, kreatif, optimis, prospektif, dan nasionalis, maka Indonesia tetap akan menjadi penentu utama pergerakan kemajuan. Mereka akan menegaskan bahwa Indonesia adalah milik sepenuh rakyat Indonesia. Segala bentuk determinasi dan imperialitas dari negara lain dengan mudah dibendung, hanya ketika bangsa Indonesia sendiri sudah memiliki manusia yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam membangun. Jadi, membangun manusia adalah sebuah keniscayaan dalam upaya mempertahankan bangsa. Erich

Fromm (2001) pernah berujar: “Mencintai negara tanpa mencintai (membangun) kemanusiaan sama saja dengan menyembah berhala”. Karena itu, marilah kita lebih fokus membangun manusia!

Bahan Bacaan:

Singer, P.W. & August Cole, 2015. *Ghost Fleet* . Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

George, C. Boeree. 2004. *Personality Theories*. Yogyakarta: Primasophie.

Fromm, Erich, 1988. *Manusia Bagi Dirinya; Suatu Telaah Psikologis-Filosofis tentang Tingkahlaku Manusia*. Jakarta: Akademika.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.



*Pilih Nekrokrasi atau Biokrasi?*¹⁶

Erich Fromm (1900-1980) pernah membeberkan bahwa pada fase perkembangan tertentu, entah secara kolektif ataupun individual, anggota masyarakat bisa masuk dalam dikotomi antara kelompok yang ‘mencintai kematian’ (nekrofil) dan kelompok yang ‘mencinta kehidupan’ (biofil). Masing-masing kelompok memiliki tipikalitasnya. Kelompok nekrofil umumnya terdiri dari kaum pesimistik dalam sikap dan skeptik dalam berpikir, fatalistik dalam menatap masa depan. Dari perspektif psikologi sosial, kelompok nekrofil cenderung eksklusif dalam penghayatan hidup kesehariannya dan tidak

¹⁶ Koran Nasional Media Indonesia, 23/05/2018

terbuka pada pendapat, pemikiran dan perkembangan alternatif. Kemudian, kelompok ini bisa membelah diri menjadi kelompok militan, radikal dan rigoristik dalam menjalani kehidupannya. Seandainya suatu saat mereka menguasai negara dan sistem pemerintahannya, maka secara tidak sadar terbentuklah nekrokrasi.

Nekrokrasi tidak secara kasat mata hadir sebagai sebuah sistem administrasi kenegaraan, tetapi lebih pada sistem psikologi massal yang bertumbuhkembang pada kaum nekrofil. Namun pada saatnya, sebagai sebuah sistem psikologi massal, nekrokrasi akan secara laten mempengaruhi sistem administrasi kenegaraan. Ketika kaum ini berkesempatan untuk memegang tampuk pimpinan, mereka bisa membawa negara pada bentuk otoritarian, totaliter dan fasis. Mereka biasanya militan dan masif dalam memproklamasikan suatu ideologi dengan menggandeng isu lain seperti agama, budaya, suku, dan ras. Isu-isu ideologis ini kerap digunakan untuk membungkus secara baik sistem psikologi massal ini. Segala modus bisa digunakan untuk mencapai tujuan dan maksud kelompok. Bahkan bila dipandang perlu, mereka rela mengorbankan jiwa dan material.

Sementara kelompok biofil, tentu memiliki tipikalitas yang bertolak belakang dengan kelompok nekrofil. Kelompok ini memandang kehidupannya dengan sangat optimis. Mereka bersikap inklusif dan terbuka pada pemikiran dan perkembangan baru. Kelompok ini cukup dinamis dan fleksibel dalam memandang sesuatu, sehingga kadang tidak memiliki

pegangan ideologi yang kuat. Bila kelompok ini menguasai masyarakat atau suatu sistem pemerintahan, maka yang terbentuk adalah sistem psikologi massal yang disebut biokrasi. Umumnya, mereka memandang masyarakat sebagai organisme yang terus berkembang dan tidak terpaku pada patron ideologi tertentu. Mereka respek pada demokrasi modern yang sangat menekankan penghargaan pada hak-hak asasi manusia, pluralitas dan multikulturalitas. Kaum biofili menyakini bahwa masing-masing pribadi memiliki kekhasan dalam menjalani hidupnya dan sama sekali tidak ada bergantung pada uniformitas cara berpikir dan bertindak. Bagi kaum ini, bertumbuh dan berkembangnya suatu bangsa terletak pada penghargaan terhadap kemajemukan budaya, suku, ras dan agama, dan bahkan pada kejamakan berpikir dan berpendapat. Namun, sebagai sistem psikologi massal, biokrasi cukup rentan dengan munculnya konflik dan perpecahan ketika dalam mengelolanya tidak memakai instrumen yang efektif.

Menurut Fromm (George, 2004), dengan munculnya sistem psikologi massal dalam bentuk nekrokrasi dan biokrasi ini, maka ada tiga tipikalitas masyarakat, yaitu: (1) Masyarakat pecinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cita-cita, optimisme, menjaga kelangsungan dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Pada masyarakat seperti ini, jarang terjadi destruksi, konflik, dan friksi sosial. Masyarakat ini sering menjalin kerja sama, solidaritas dan toleransi dengan penuh cinta dan penghargaan. Mereka secara bertanggung jawab merajut ikatan-ikatan

persaudaraan dan selalu membangun pengertian tentang diri, sesama dan lingkungannya. Masyarakat bersifat komunitarian humanistik, di mana setiap orang dengan latar belakang berbeda, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia seutuhnya. (2) Masyarakat non-destruktif tapi agresif dan progresif. Masyarakat ini memandang agresivitas, progresivitas dan destruksi merupakan hal wajar dalam kehidupannya. Situasi masyarakat ini penuh dengan kompetisi dengan manuver dan strategi untuk mempertahankan hidup. Persaingan tidak mengarah pada konflik karena masih bisa dikelola dengan baik. Masyarakat model ini sebagian besar terdiri dari anggota yang individualistik, eksklusif dan tidak saling mempercayai satu dengan yang lain. Mereka berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan dan menjaga kelangsungan hidupnya. (3) Masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah merusak, brutal, berprasangka buruk, intoleran, penuh dengan dendam, pengkhianatan dan permusuhan. Pada masyarakat ini sering terjadi persaingan dan dapat berujung pada perpecahan. Perang dalam segala bentuk bagi mereka adalah kelaziman dan dibenarkan menurut cara pandang tertentu. Bias dari tipikalitas masyarakat ini adalah kuatnya sikap dan rasa pesimis yang dominan terhadap bangsanya. Pada fase akut, mereka kerap menjadikan bangsa sebagai ruang dan tempat pengekspresian bentuk-bentuk protes, rasa penyesalan, putus asa dan tindakan-tindakan fatalistik. Banyaknya kritik vulgar yang mengundang friksi dan konflik, demonstrasi dan protes yang ekstrim, sporadis dalam memberitakan informasi, serta ancaman separatis

dan desintegrasi, merupakan bentuk-bentuk tantangan yang mesti dihadapi dan dikelola secara serius oleh negara.

Saya kira, tantangan internal untuk semua negara bangsa saat ini adalah fenomena menguat dan mengakarnya tipikalitas masyarakat destruktif. Dari perspektif manajemen konflik, salah satu isyarat tentang negara yang kuat adalah ketika mampu mengelola berbagai bentuk gejala destruktif, dan mengonversi gejala tersebut menjadi kekuatan untuk semakin merekatkan soliditas berbangsa. Ada banyak negara bangsa yang hari ini tetap berdiri tegak dan bahkan menjadi besar, justru karena telah cerdas melewati berbagai tantangan internal bangsanya. Kecerdasan tersebut mungkin terletak pada asas bahwa negara tidak boleh kalah! Dan cara mengelolanya tetap mengedepankan prinsip yang keras, tetapi bijak dalam cara penyelesaiannya (*fortiter in re, suaviter in modo*). Penyelesaian berbagai gejala destruksi mesti mempertimbangkan berbagai pendekatan seperti kemanusiaan, kultural, sosio politik, sosio-ekonomi, dll., sehingga masyarakat merasakan perhatian dan keadilan.

Saya punya hipotesis bahwa bernegara bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebagai sarana agar manusia mendapatkan pengakuannya. Tujuan manusia bernegara adalah untuk mendapatkan eksistensi sebagai ‘*ens politicon*’. Dalam negara seorang akan mendapatkan hak dan kebebasan sejatinya sebagai manusia. Bernegara adalah tempat dan ruang di mana manusia mampu berada dan mengada, hidup dan menghidupkan dirinya.

Bernegara bisa jadi merupakan suatu bentuk keterberian bagi masyarakat tertentu, tetapi menjadi anggota masyarakat yang sejahtera lahir dan batin merupakan suatu pilihannya. Bernegara merupakan tempat yang disediakan oleh Tuhan agar umat manusia mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera sebagai manusia.

Bila bernegara hanya sebatas sebagai tujuan, maka yang sering terjadi adalah munculnya pengingkaran terhadap hak-hak sebagai manusia. Masyarakat bahkan akan dikorbankan dan dieksploitasi hanya untuk kepentingan negara semata. Fakta sejarah membuktikan bahwa dengan adanya dalil tentang ‘masyarakat harus memberi untuk negara’ seakan melegitimasi kehendaknya untuk berkuasa. Dalil ini kemudian dipakai untuk melanggengkan hegemoninya dan membenarkan segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Ada banyak pemimpin di dunia ini melakoni kekuasaan dengan memanfaatkan dalil ini demi mempertahankan negaranya, meski dengan mengorbankan masyarakat sendiri.

Bisa jadi konsep dan pemikiran ‘bernegara sebagai tujuan’ merupakan dampak dari sikap ‘memiliki’ (having mood). Secara positif sikap ini akan memunculkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Namun, secara negatif sikap ini akan berdampak pada bentuk fasisme dan totalitarianisme. Pemimpin dan rakyatnya menganggap negaranya yang paling besar dan berjaya (uber alles), sementara negara lain menjadi subordinasi. Namun bila motivasi bernegara muncul dari sikap ‘menjadi’ (being mood), di mana setiap anggota masyarakat mendapat

ruang dan tempat untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia, maka akan terbentuk sikap patriotisme dan nasionalisme sejati. Ekspresi-ekspresi kecintaan terhadap negara justru muncul sebagai dampak dari rasa bahagia masyarakat karena diperlakukan adil oleh dari negaranya.

Dalam menghayati hidup kenegaraan yang sejati, ada beberapa konsep kebaikan dapat dikembangkan, yakni: (1) Keterhubungan. Kebaikan ini muncul ketika seseorang berani keluar dari diri sendiri dan bergabung dengan warga lain dalam suasana cinta, persaudaraan, perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pengertian. (2). Keberakaran. Kebaikan ini ada ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi sehingga membuatnya nyaman dan bahagia, serta kreatif dalam mengembangkan dirinya. (3) Menjadi pencipta. Kebaikan yang muncul ketika individu menyadari diri, sesama dan lingkungannya. Seseorang melakukan upaya pengembangan diri dengan mencipta dan membangun, dan berjuang mengatasi keterbatasan dan kekurangan hidupnya untuk menjadi lebih baik dan sejahtera. (4) Kesatuan. Kebaikan ini terlihat ketika seorang mau menyatukan dan mengidentifikasikan dirinya dengan sesama dan lingkungannya. Ia mampu berbagi cinta dan kebahagiaan kepada orang lain melalui berbagai kegiatan yang produktif dan konstruktif. (5) Identitas. Kebaikan yang terajut ketika seseorang dapat mengontrol nasibnya sendiri, menegaskan diri, membuat keputusan, dan merasa sebagai pemilik hidup seutuhnya.

Bahan Bacaan:

- Capra, Fritjof. 2009. *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan* (penerjemah: M. Thoyibi., dari *The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture*). Yogyakarta: Jejak.
- Capra, F. (2002). *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Fromm, Erich, 1988. *Manusia Bagi Dirinya; Suatu Telaah Psikologis-Filosofis tentang Tingkahlaku Manusia*. Jakarta: Akademika.



Terapeutik Konstruksi Sosial: Memerangi Radikalisme!¹⁷

Isu dan peristiwa yang terkait dengan fenomena radikalisme tidak henti-hentinya menerpa kehidupan masyarakat dunia akhir-akhir ini. Banyak negara cukup disibukan dengan urusan radikalisme ini, yang sebenarnya sudah harus selesai pada era di mana IPTEKS sudah maju dengan sangat pesat, dan perhatian lebih tercurah pada pembangunan dan kesejahteraan masa depan masyarakat. Menurut saya, kadar ‘gangguannya’ tidak hanya pada masalah penyimpangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal atau pelanggaran terhadap hukum negara saja, tetapi radikalisme juga sangat terpapar pada rusaknya

¹⁷ *Harian Umum Flores Pos*, 6 April 2017.

tatanan sosial yang sudah ada, yang berdampak pada disharmoni dan disequilibrium kehidupan masyarakat. Destruksinya tatanan sosial ini terjadi saat ‘embel-embel’ ideologis dengan maksud tertentu berusaha dipasangkan pada pakaian kebangsaan dan bergayut pada kehidupan masyarakatnya. Ketika embel-embel ideologis ini bertumbuh dan berkembang tanpa terkontrol, maka perlahan tapi pasti menggerogoti bentuk-bentuk tatanan sosial, yang pada titik kulminatif tertentu akan meruntuhkan sendi-sendinya.

Sudah barang tentu negara dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk membebaskan dan membersihkan kembali konstruksi sosial suatu bangsa pada kesejatian dan keasliannya. Upaya memurnikan dan menyembuhkan (terapeutik) dalam konteks pemikiran konstruksi sosial menjadi sangat urgen dan mendesak, agar tidak terlanjur berdampak sistemik pada kehidupan masyarakat. Ada negara yang sudah mulai bebas dari ancaman, gangguan dan hambatan radikalisme karena telah membahasnya dan menyelesaikannya dengan tindakan-tindakan praktis melalui kajian dan perspektif terapeutik konstruksi sosial. Dalam buku *Social Construction In Context*, Kenneth J. Gergen (2001) mengatakan bahwa terapeutik berbasis konstruksi sosial ini sangat mendasar ketika permasalahan sosial, termasuk radikalisme menjadi ancaman bagi tatanan masyarakat suatu bangsa. Terapeutik tersebut berangkat dari diagnosa terhadap sebab/akar dari permasalahan tersebut, karenanya studi dan analisis terhadap realitas sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Terapeutik dilengkapi dengan perangkat-perangkat untuk melakukan studi dan analisis

terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terlantar, potret ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam beberapa bidang kehidupan, ketidaktersediaan lapangan kerja dan lahan ekonomi, dekadensi moral etis dan diskrepansi sosial sebagai akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menerima lajunya perkembangan, serta degradasi lingkungan sosial dan alam sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kepentingan ekonomi global. Studi dan analisis menjadi bagian integral dalam proses terapeutik berbasis konstruksi sosial karena bersama-sama negara dan masyarakat akan mengetahui secara persis dan detail tentang penyebab, dampak dan solusi dari masalah radikalisme ini.

Tujuan lain dari terapeutik berbasis konstruksi sosial dengan mengintegrasikan studi dan analisis ini adalah membangun kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat dalam mengatasi radikalisme. Kesadaran kolektif menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Kesadaran kolektif ini juga berhubungan dengan merancang dan menyusun langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan demi mengatasi sekaligus mencegah tumbuh-kembangnya paham-paham radikal, termasuk di dalamnya kesepakatan tentang sistem informasi keamanan, hak dan kewajiban, perlindungan serta kenyamanan sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan kesadaran kolektifnya, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk ‘berani terlibat’ dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak dalam berbagai bentuk dan manifestasi pergerakan,

seperti beralih dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju kepada dinamisitas dan fleksibilitas; bergerak dari hanya sekedar kesadaran diri menuju pada kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan kerja yang luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Demi mendukung berlangsungnya proses penguatan transformasi tatanan sosial ini, Kenneth menambahkan perlu adanya ‘perubahan’ praktis dalam diri masyarakat, antara lain: (1) *From mind to discourse*; masyarakat diberdayakan untuk tidak sekedar bermain dalam ranah konsep saja, tetapi berani terlibat dalam berbagai diskursus praktis yang bertujuan untuk mengikis irasionalisme, primordialisme dan fundamentalisme. Maturitas dalam berpengetahuan menjadi garansi utama dan pertama dalam membangun kontruksi sosial yang rasional, elegan dan inklusif. (2) *From self to relationship*; masyarakat harus keluar dari ‘ghetto’ kebenaran dan narsisme diri/kelompok yang berlebihan menuju terjalannya relasi, persahabatan, dan kekeluargaan dengan orang lain/kelompok lain. Menemukan kesejatian diri dalam kebersamaan dengan orang lain menjadi seruan etis moral dalam membangun konstruksi sosial yang beradab. (3) *From singularity to polyvocality*; masyarakat harus melepaskan asas tunggal dan monolitik dari kehidupannya, menuju pada keterbukaan akan perbedaaan dan keanekaragaman. Pemaksaan pola laku dan pikir yang seragam sudah pasti mengangkangi berikut menafikan kreativitas dalam

membangun kehidupan. Keterbukaan pada pendapat dan pemikiran yang berbeda menjadikan ruang kreativitas mendapat tempatnya, yang berarti membuka atmosfer yang positif-konstruktif pada perubahan dan perkembangan.

(4) *From problems to prospects*; masyarakat perlu berada dalam kultur dan habituasi untuk senantiasa berbicara mengenai masa depan dan bukan melulu berbicara tentang masalah. Memecahkan masalah berangkat dari masalah merupakan suatu imperatif, tetapi masyarakat harus diarahkan untuk lebih banyak bergumul tentang masa depan agar lepas dari trauma dan belenggu masalah masa lalu, dan merajut harapan yang pasti akan masa depan. Masyarakat yang bermental prospektif menjadi salah satu andalan dalam mendukung akselerasi roda pembangunan bangsa. (5) *From Insight to action*. Masyarakat diberdayakan untuk tidak sebatas melihat dan memahami realitas lingkungan alam sosial yang destruktif, degradatif dan deviatif, tetapi berusaha melakukan tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan nyata ini dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat setempat, sampai kemudian menjadi tindakan-tindakan kolektif yang sinergik, simultan serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bangsa. Tindakan-tindakan kolektif ini merupakan perekat utama dalam memperkuat konstruksi sosial bangsa dan membentuk tameng dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman/gangguan ideologis yang bertujuan untuk merusak dan meruntuhkannya.

Menurut saya dalam konteks bangsa Indonesia, langkah-langkah terapeutik yang berbasis konstruksi sosial

sebenarnya sangat strategis, potensial dan relevan karena mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) Dasar-dasar penghargaan terhadap sesama dan perbedaaan yang melekat di dalamnya sudah ditanamkan sejak awal ketika warga negara Indonesia mulai bersosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. (2) Pranata dan norma sosial yang ada dalam budaya dan adat istiadat sudah berperspektif plural/multikultural, sehingga berbagai persoalan yang menyangkut SARA sebetulnya tidak lagi menjadi diskusi yang membebankan secara sosial maupun akademik. (3) Literasi kebhinekaan dan multikultural sudah *correlated and integrated* dalam sistem dan praksis kurikulum pendidikan, sehingga secara kognitif, afektif, dan psikomotor, masyarakat didik sudah memiliki kesadaran kuat menjalankan praktik-praktik keanekaragaman. Ekspektasinya, masyarakat persekolahan secara signifikan dan positif mempengaruhi pemahaman dan pengertian masyarakat umum tentang realitas dan kompleksitas kemajemukan. (4) Negara dan kelengkapan perangkat hukumnya sungguh telah menjamin kebebasan individu, kelompok, dan masyarakat dalam berpendapat dan berorganisasi dengan prinsip dasar: Tidak mengganggu kepentingan dan nyaman umum, melanggar/melawan hukum.

Program terapeutik untuk menyelesaikan masalah radikalisme secara holistik dan komprehensif sudah pasti melibatkan unsur-unsur masyarakat dari tingkat keluarga, RT/RW, pemerintah daerah sampai pusat. Eksplorasi dan identifikasi masalah mulai dari unit-unit sosial terkecil sangat membantu pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan

tindakan praktis terapeutik ini. Selain itu, melibatkan lembaga pendidikan, LSM, lembaga adat, organisasi sosial/politik, dalam menangkal fenomena radikalisme adalah keharusan. Mereka dilibatkan dan diberdayakan dalam kegiatan edukasi, sosialisasi dan advokasi terkait pentingnya kesatuan, kerukunan, penghargaan terhadap sesama, menghormati kebebasan individual dan merawat kebhinekaan.

Bahan Bacaan:

- Gergen, Kenneth J., 2001. *Social Construction in Context*. London: Sage Publication.
- Parker, Walter and John Jarolimek, 1984. *Citizenship and The Critical Role of The Social Studies*. Washington DC: National Council for The Social Studies.
- Winarno, Budi. 2001. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Veeger, K.J. 1984. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Calhoun, C., 1995. *Critical Social Theory*. Cambridge, MA: Blackwell.



Interaksi Simbolik Dalam Berpolitik Bangsa¹⁸

John Dewey (1859-1952) adalah filsuf pertama yang memperkenalkan pendekatan interaksi simbolik dalam penelitian pendidikan. Kemudian, Geroge Herbert Mead (1863-1931) dan peneliti-peneliti lainnya mengembangkannya untuk kajian yang lebih luas pada bidang sosio kultural, politik, ekonomi dari seseorang, sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Inti dari penelitian interaksi simbolik adalah upaya metodologik untuk mengungkapkan realitas perilaku personal, kelompok, maupun masyarakat dalam hubungan dengan sosio kultural, politik, ekonomi, yang terfasilitasi melalui

¹⁸ SKH Pos Kupang, 28/06/2016.

aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi menjadi variabel penting dalam interaksi simbolik, karena dengannya peneliti dapat mengeksplorasi berbagai simbol, tanda-tanda, fenomena yang bermakna untuk dijelaskan, dipahami dan diinterpretasi demi kepentingan kesimpulan yang baik. Kesimpulan ini nantinya dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya, pengembangan kehidupan masyarakat, penyusunan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan, dll.

Premis interaksi simbolik menurut Blumer (Magee, 2005) ada tiga, yaitu: Pertama, manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang muncul di hadapannya; Kedua, bermacam-macam makna muncul sebagai akibat dari interaksi sosial seorang dengan orang lain. Ketiga, bermacam makna itu perlu dijelaskan (erklaren), dimengerti (vertehen) dan diinterpretasi (hermeneutika) sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari mereka yang memiliki simbol tersebut. Selanjutnya, ketiga premis ini memunculkan tujuh prinsip dasar interaksi simbolik, yakni: (1) simbol dan interaksi tidak bisa dipisahkan; seperti fakta tidak bisa dilepaspisahkan dari konteks; (2) simbol bersifat personal, karenanya perlu ada pemahaman jati diri yang baik dari subyek-subyek yang terlibat dalam interaksi tersebut; (3) simbol pribadi selalu mesti berelasi dengan konteks sosio budaya, politik, ekonomi yang mengitarinya; (4) situasi yang menggambarkan simbol perlu direkam dan dicerna; (5) metode dalam memahami interaksi mesti merefleksikan hubungan antara bentuk

perilaku dan prosesnya; (6) upaya menangkap makna di balik fenomena sangat penting; (7) interaksi simbolik membutuhkan pemikiran dan tindakan yang fokus dan tidak berbias.

Saya mencoba meletakkan konteks politik bangsa ini dalam telusuran perspektif interaksi simbolik ini. Pemerintah, partai politik, parlemen, anggota parlemen dan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam interaksi simbolik ini. Pemerintah memiliki keharusan untuk berinteraksi dengan warga masyarakat agar segala bentuk program dan rencana-rencana pembangunan cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karenanya, komunikasi intens mesti terus mengemuka untuk menggali makna tersembunyi dari simbol-simbol kebutuhan masyarakat, yang relevan dengan konteks sosio kultural, politik dan ekonomi. Melalui pendekatan interaksi simbolik ini, simbol-simbol yang selama ini terpendam (*undercover*), dimunculkan dengan metode penjelasan, pemahaman dan interpretasi. Munculnya berbagai makna simbol kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan akan mempengaruhi rumusan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat (*option for the society needs*).

Politik pembangunan yang berbasis pada fakta dan konteks kebutuhan masyarakat akan menjauhkan pemerintah dari pola kebijakan dan program yang

minim analisis, mubazir dan mangkrak. Komunikasi dalam interaksi simbolik ini secara mendasar membuat pemerintah lebih fokus, komprehensif dan holistik, dan menghindari egosektoral serta kecenderungan sektarianistik dalam menerapkan polisi-polisi pembangunannya. Kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) serta kegiatan-kegiatan sejenisnya dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional merupakan kegiatan yang sangat ideal (*das sein*), sekurang-kurangnya menurut sudut pandang interaksi simbolik. Namun, sejauh mana kegiatan ini benar-benar menjadi aktivitas signifikansi atas kebutuhan-kebutuhan kontekstual masyarakat, baik dari segi pendekatan, metodologi, konten dan aplikasinya, sangat tergantung pada ‘*political will*’ dari pemerintah dan para pihak yang terlibat. Formalisme, rutinitas dan orientasi menghabiskan anggaran (*budget spending oriented*) akan mengkooptasi esensi dari kegiatan Musrenbang dan kegiatan sejenis lainnya, dalam menjawab apa yang seharusnya (*das sollen*) menjadi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan komunikasi dalam interaksi simbolik demi meng’cover’ makna dari simbol-simbol pada masyarakat, sangat relevan juga untuk partai politik berikut para praktisinya. Sebagai sebuah lembaga akomodatif atas berbagai simbol ideologi demokrasi kehidupan masyarakat, maka partai politik dan para anggotanya mesti senantiasa memiliki keterarahan yang berkelanjutan dalam memaknai simbol-simbol kemauan masyarakat. Bila

bercermin pada negara yang sudah maju demokrasinya, pendirian partai politik lebih besar termotivasi karena hasil penelitian interaksi simbolik tentang kebutuhan ideologi dari kelompok masyarakat tertentu. Karena berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka partai-partai politik tersebut senantiasa eksis, dan ketika menjadi partisipan dalam pemilu mereka sudah pasti memiliki tingkat kredibilitas, popularitas dan elektabilitas yang relatif stabil. Nah, di sini terjadi simbiosis mutualisma dalam membangun pilar-pilar demokrasi yang kuat dari sebuah negara bangsa. Tentunya, kondisi ini secara ideologis-politis akan mendukung berbagai kegiatan pembangunan bangsa.

Partai yang membentuk platform politiknya berdasarkan kedekatan dengan masyarakatnya, merata memiliki tingkat kepercayaan, keterkenalan, keterpilihan dan kesukaan yang tinggi dari masyarakat konstituen. Hal ini disebabkan karena manifestasi visi-misi, program kerja dan spirit partainya sudah tergambar dalam pergerakan politiknya (political movement) yang faktual dan membumi. Mereka sangat yakin dengan kontrak dan komitmen politik yang sudah dimaterai antara keduanya. Sebaliknya, bila partai politik dibentuk secara abal-abal dan pragmatis serta tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka cepat atau lambat partai tersebut akan menghilang dari peredaran politik, dikarenakan rendahnya capaian ‘Parliamentary Threshold’ (PT). Mereka akan sangat terpaksa berfusi atau berafiliasi dengan partai

politik yang kredibel untuk sekedar ‘bargaining’ dalam mempertahankan eksistensinya di dunia politik, atau berposisi tawar demi mengembalikan modal dan investasi politik yang sudah habis.

Sementara itu, lembaga parlemen (DPRD, DPR, DPD, MPR) sebagai lembaga representasi dari suara masyarakat konstituen, tidak pernah boleh menafikan perspektif interaksi simbolik ini. Spirit ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ sebenarnya merupakan ejawantah dari perilaku interaksi simbolik, bila para politisi dan politikus dapat menerapkannya pada level kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga spirit ini tidak menjadi absurd, pemanis bibir semata dan terjebak pada kamufase. Selain itu, tanggung jawab parlemen untuk menjalankan fungsi kontrol, legislasi dan penganggaran, sangat berkorelasi dengan keharusan memaknai simbol kebutuhan masyarakat. Substansi dari tiga fungsi ini adalah terrepresentasinya kehendak masyarakat, karenanya sedapat mungkin menghindari berbagai bentuk polarisasi dan konflik kepentingan, yang menyebabkan bergesernya substansi tadi.

Kegiatan reses dari para anggota parlemen menjadi sangat strategis untuk memberi penguatan terhadap interaksi simbolik ini. Dalam reses ini, anggota parlemen berhadapan dengan tantangan adanya masyarakat yang pasif, apolitis, unik, resisten, yang sebenarnya bila dilakukan komunikasi personal, intensif, dan persuasif akan membicarakan tentang banyak makna simbol dalam

kehidupan mereka. Bila anggota parlemen memiliki cukup kemampuan untuk menginterpretasikan secara lebih sistematis dan ilmiah berbagai simbol, tanda-tanda dan fenomena ini, maka akan berkekuatan intelektual, sehingga bisa diperhitungkan ketika diperdengarkan kepada pihak terkait. Ketika ‘turba’, anggota parlemen akan terpapar dengan banyaknya ‘stock of life problems’, karenanya fokus dan komit dalam mendengarkan, memfasilitasi dan menyuarakan masalah-masalah, akan sangat membantu masyarakat keluar permasalahan tersebut. Dalam aktivitas interaksi simboliknya, anggota parlemen juga bisa mengedukasi, mengadvokasi, memberi masukan yang bersifat kuratif maupun preventif terhadap realitas persoalan masyarakat. Reses yang masalistik dan formalistik, bisa menjadi salah satu penyebab tergerusnya ‘roh sebagai wakil rakyat’ dalam diri anggota parlemen. Hal ini bukan tidak mungkin dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan diri sebagai wakil rakyat, dan mungkin juga hilangnya kepercayaan masyarakat konstituen terhadap dirinya.

Bahan Bacaan:

- Magee, B. 2005. *Memoar Seorang Filsuf: Pengembaraan di Belantara Filsafat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Erving Gofman, 1959. *The Presentation of Self in Every Day Life*, Doubleday Anchor: Garden City, New York.

Sumaatmadja, Nursid. 2005. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.

Sri Sunike dan Handoyo, 2012. “Paradigma Teori Dramaturgi dalam Kehidupan Sosial”, *Civis*. FPIPS IKIP PGRI Semarang. No. 2 II. 1.



Menyoal Metanarasi Visi/misi Calon Kepala Daerah¹⁹

Dalam buku *The Postmodern Condition* (1984), Jean Francois Lyotard membuat kritik terhadap konsep/ide besar (metanarasi; *grandtheory*) yang dikemukakan banyak pemikir pada abad modern tentang gagasan membangun dunia, menyejahterakan dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan situasi dan kondisi zamannya. Pada kenyataannya, konsep/ide besar tersebut hanya sebatas jargon, kemudian gagal total, dan bahkan memberi kontribusi bagi kehancuran masyarakat di beberapa bidang kehidupannya. Pada buku *The Differend* (1988) Lyotard menilai kegagalan terjadi karena konsep/ide

¹⁹ Harian Umum Flores Pos, 20/04/2017.

besar tersebut tidak membumi dan tidak berpijak pada situasi riil dan empirik masyarakat yang sudah sangat plural, multidimensional, dan beragam. Kehidupan manusia postmodern tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai satu kesatuan organik-singular saja seperti yang dikemukakan oleh Durkheim; tidak juga dipahami hanya sebagai satu sistem fungsional yang identik saja menurut Parsons, atau tidak juga hanya dipahami sebagai kesatuan dari dua kekuatan yang saling bertentangan menurut Marx. Namun, kehidupan manusia sudah harus dipahami secara terbuka, kritis, jamak, dan detail dengan berbagai karakteristik dan tipikalitas yang berbeda, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, agama maupun geogafinya. Perbedaan karakteristik dan tipikalitas ini sudah pasti menuntut pendekatan konsep/ide yang bervariasi selaras dengan situasi dan kondisi faktual masing-masingnya. Sebab kalau tidak, maka gagasan-gagasan besar tersebut akan mengalami kegamangan dan keterasingan dan bukan tidak mungkin berujung pada kegagalan.

Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu tentang kegagalan dari beberapa metanarasi ini, Lyotard mengajak para pemikir di bidang filsafat, sosiologi, pendidikan, ekonomi, dan politik pada masa postmodern untuk mengkritisi berbagai konsep/ide yang sudah tidak relevan dan kontekstual bagi kehidupan manusia, dan berupaya membangun narasi-narasi yang lebih representatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat berikut keragaman-keragaman yang melekat padanya. Mendelegitimasi berbagai metanarasi yang absurd,

mengawang dan sangat jauh dari jawaban-jawaban pertanyaan kebutuhan masyarakat, merupakan tindakan yang ilmiah, elegan dan manusiawi demi menghindari masyarakat dari repetisi peristiwa kegagalan dan kehancuran yang pernah terjadi sebelumnya. Tentunya, upaya delegitimasi ini diikuti dengan usaha yang konstruktif dalam merancang gagasan-gagasan yang inovatif, kontekstual dan relevan dengan permintaan kebutuhan masyarakat. Mengingat meluasnya dimensionalitas dan tingginya pluralitas kehidupan masyarakat sekarang ini, maka narasi dan gagasan yang dibangun mesti berdasarkan studi dan analisis yang mendalam, akurat dan valid tentang kehidupan sehingga benar-benar memberi sumbangan dan dampak positif bagi pembangunan masyarakat dunia.

Momentum pemilihan kepala daerah merupakan ajang bagi para calon pemimpin untuk menarasikan hal-hal penting yang tereksplisitasi dalam bentuk konsep/ide pembangunan dan pengembangan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, konsep/ide ini terderivasi dalam rumusan visi/misi dan program kerja. Koherensi, konsistensi dan relevansi antara narasi-narasi besar tentang pembangunan masyarakat dengan turunannya pada visi/misi dan program kerja menjadi titik kritis untuk menilai apakah para calon masih terbelenggu dan terjebak pada metanarasi yang absurd, mengawang-awang, membius dan mengelabui masyarakat; atukah sudah bergerak pada narasi praksis dan implementatif, yang memuat sejumlah jawaban-jawaban inti tentang kebutuhan masyarakat. Pengalaman empiris menyajikan,

banyak daerah yang mengalami kegagalan pembangunan karena visi/misi dan program kerja dari kepala daerahnya tidak dijalankan sesuai dengan harapan, sebagaimana yang telah dijanjikan pada masa kampanye. Padahal, salah satu faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya pada kontestasi sebelumnya adalah visi/misi dan program kerja serta ide/konsep besar yang melatarbelakanginya.

Sejatinya, bila ada kepala daerah yang sudah terpilih, tentu saja mereka telah mendapatkan legitimasi politiknya, Namun, ketika belum atau tidak mengimplementasikan visi/misi dan program kerjanya, maka mereka dipastikan belum memiliki legitimasi etis-moral dan keilmiahan. Dalam hal ini, legitimasi etis-moral berkaitan dengan adanya pengakuan masyarakat tentang tanggung jawab dari kepala daerah terhadap harapan dan masa depan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sementara legitimasi keilmiahan berhubungan dengan pengakuan masyarakat akan adanya konsistensi, koherensi dan relevansi dari visi/misi dan program kerjanya. Dengan demikian, saat kepala daerah gagal membangun daerahnya, maka yang terjadi bukan saja delegitimasi politik, tetapi juga ikut memudarnya pengakuan etis moral dan keilmiahan masyarakat. Cikal bakal kegagalan seorang kepala daerah bisa saja merupakan akumulasi dan eskalasi dari tiga bentuk delegitimasi masyarakat ini.

Menurut saya, untuk menghindari para calon kepada daerah dari kejerembaban metanarasi yang absurd, maka beberapa hal ini perlu dipertimbangkan: (1) Menghindari

penyusunan visi/misi dan program kerja dengan berlatar belakang ide/konsep yang besar tanpa melalui studi dan analisis kebutuhan masyarakat. Studi dan analisis yang mendalam melalui survei, dialog, blusukan, menjadi kegiatan-kegiatan penting demi mengetahui secara persis dan akurat tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, pada gilirannya ide/konsep yang besar tersebut dapat dijabarkan secara praktis, aplikatif dan konkret pada rumusan visi, misi dan program kerja. (2) Melibatkan para ilmuwan/pakar, akademisi, pegiat sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dalam menyusun visi/misi dan program kerja sangatlah penting. Masukan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi bahan dasar untuk menyusun visi/misi dan program kerja yang benar-benar membumi dan menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat. (3) Menghindari adopsi dan plagiaritas visi/misi dan program kerja dari kepala daerah lain. Kegiatan adopsi dan plagiaritas ini, selain menganggangi tanggung jawab keilmiah dari calon kepala daerah yang bersangkutan, tetapi yang lebih esensial, terjadinya ‘ketidaksesuaian dan ketidakcocokan’ (*unlink and mismacth*) visi/misi dan program kerja tersebut dengan karakteristik dan tipikalitas kebutuhan masyarakat yang akan diampunya. Minimal, sang calon kepala daerah secara elegan, terbuka dan jujur dalam ‘mencontek’, tetapi tetap melakukan adaptasi dan elaborasi sesuai dengan kenyataan riil dan empirik masyarakatnya. (4) Meskipun momen debat kandidat menjadi hal yang sangat normatif dan standar dalam fase pemilihan kepala daerah, namun hal ini harus menjadi kultur dan habituasi dari konstruksi

politik rasional. Selain, sebagai bagian dari upaya cerdas untuk mempertanggungjawabkan visi/misi dan program kerja, debat juga merupakan momen penting untuk lebih awal menagih tanggung jawab moral-etis dan ilmiah dari para calon. Di beberapa negara demokrasi modern, sesi-sesi debat justru menjadi saat yang cukup strategis sekaligus krusial bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah pilihannya.

Bahan Bacaan:

Liotard, Jean Francois, 1979. *The Postmodern Condition*, www.Britania.Com/topic of politic-philosophy

Kamahi, Umar, 2017. “Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Alkitab*, Vol. III, No. 1, Juni 2017; 117-133.

Nichols, Ray L., 1979. *Treason, Tradition and The Intellectual: Julien Benda and Political Discourse*. Routledge: London.



Masyarakat NTT dan Kesadaran Politik Emansipatoris²⁰

Sudah pasti banyak harapan yang muncul dari masyarakat untuk para calon yang akan berkontestasi pada Pilgub NTT tahun 2018. Pada tingkat artifisial, harapan tersebut bisa saja terjawab melalui rumusan visi/misi dan program kerja dari para calon. Sementara pada tahap yang paling substansial, harapan tersebut nantinya bisa terjawab atau terbukti melalui implementasi dan realisasi dari visi/misi dan program kerjanya. Namun yang sudah

²⁰ Harian Umum Flores Pos, 6 Mei 2017

pasti bahwa NTT sebagai salah satu propinsi yang mendapat prediksi ‘nyaris terbelakang’ dalam beberapa bidang kehidupan masyarakatnya, butuh perubahan dan pergerakan yang lebih signifikan, pembangunan yang lebih akseleratif, dan pengembangan yang lebih progresif. Tuntutan-tuntutan untuk keluar dari zona ‘nyaris terbelakang’ ini semakin mendapat momentumnya pada peristiwa politik seperti pemilihan gubernur ini.

Menurut saya, tuntutan agar keluar dari zona keterbelakangan ini secara implisit muncul dalam beberapa fenomena berikut ini: Pertama, indikasi sudah menguatnya kesadaran politik, yang didukung oleh semakin meningkatnya indeks melek politik masyarakat. Masyarakat sudah semakin menyadari bahwa momentum politik bukan hanya sekedar kesempatan berwacana atau bermimpi tentang perubahan, tetapi lebih dari itu, kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi aktif dan nyata dalam membangun daerahnya. Masyarakat sudah sampai pada kesadaran yang cukup tinggi bahwa yang menentukan perkembangan daerah, salah satunya adalah pilihan politik. Kedua, masyarakat sudah memiliki kemampuan komparatif dimana dengan cukup detail mereka membandingkan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada propinsi-propinsi lain yang sudah maju dengan pesat. Perbandingan-perbandingan yang masyarakat buat berlandaskan pada prinsip retorik sederhana, yaitu: Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?

Meskipun ada banyak hal yang perlu didiskusikan tentang perbedaan tipikalitas dan peluang dari satu daerah dengan daerah yang lain, yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan.

Ketiga, munculnya figur-figur kepala daerah yang fenomenal berikut kinerjanya yang positif terhadap perkembangan daerah yang dipimpinnya. Mengemukanya figur-figur kepala daerah seperti ini menginspirasi masyarakat untuk menginisiasi lahirnya kepala daerah yang selevel dalam hal karakter, integritas, dan kepemimpinan. Inisiasi masyarakat untuk memunculkan model kepemimpinan yang selevel, secara sosio-politis sangat masuk akal dan tentunya harus menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam mencari figur-figur yang akan diusung pada Pilgub mendatang. Tentu hal ini relevan dan terkait dengan pertimbangan popularitas dan elektabilitas calon yang akan diusungnya. Keempat, infrastruktur-infrastruktur politik seperti partai politik dan organisasi sayapnya, dan organisasi sosial masyarakat, dinilai sudah cukup berperan sebagai wadah yang akomodatif dan aspiratif untuk menampung kepentingan politik masyarakat NTT. Sejauh ini, untuk wilayah NTT, sistem pencalonan melalui partai politik masih cukup efektif untuk mengusung calon kepala daerah. Karenanya, harapan masyarakat bersandar penuh pada tanggung jawab moral politik partai politik dalam membesut calon pemimpin yang dinilai bisa membawa perubahan dan perkembangan yang berarti bagi NTT.

Dapat disimpulkan, ketiga fenomena di atas menunjukkan bahwa masyarakat NTT sudah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan daerahnya. Dalam perspektif masyarakat rasional komunikatif Habermas (1929-2006) keterlibatan masyarakat dalam memikirkan dan menentukan arah pembangunan bangsanya adalah bentuk dari tanggung jawab moral politiknya. Menurutnya, mengedepannya tanggung jawab moral politik ini bertolak dari semakin menguatnya kesadaran emansipatoris masyarakat. Dalam masyarakat rasional komunikatif kesadaran emansipatoris ini merupakan akumulasi dari dari tiga bentuk kesadaran, yaitu: (1) Teknis. Kesadaran tentang kemampuan sekaligus keterampilan dalam mengelola lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan material hidup sehari-hari, seperti kebutuhan dasar terkait sandang, pangan dan papan. Kesadaran ini menjadi prasyarat bagi kesadaran berikutnya. Karenanya, upaya memunculkan dan memberdayakan kesadaran ini menjadi sangat berat baik bagi masyarakat itu sendiri, maupun bagi negara yang secara yuridis formal bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan lahir batin dari warga negaranya. Pemberdayaan dan pendidikan melalui kegiatan persekolahan, pelatihan, pembimbingan, advokasi, dll menjadi upaya-upaya alternatif dalam menumbuhkan kesadaran teknis ini.

(2) Praktis. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan memuat interaksi dan relasi

yang harmonis anggota masyarakat dengan lingkungan sosial dan sesamanya. Kesadaran ini mengarah kepada pemberdayaan kemampuan-kemampuan sosial untuk membangun masyarakat yang beradab dan damai. Kemampuan-kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mesti didukung oleh pola-pola relasi dan interaksi yang baik dan harmonis di antara masyarakat, sehingga terbentuk sensitivitas dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan dan keterlibatan lembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga adat, dan lembaga agama dapat menjadi ruang dan tempat untuk menumbuhkembangkan kesadaran ini. Pranata dan norma sosial yang sudah ada dalam masyarakat diberi penguatan sehingga tetap membantu pola-pola relasi dan interaksi sosial yang baik dan benar dalam masyarakat. (3) Emansipatoris. Kesadaran berkaitan dengan keterlibatan aktif warga masyarakat untuk memahami perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, dan melakukan evaluasi sekaligus refleksi kritis terhadap perubahan tersebut. Bila masyarakat sudah bisa mengevaluasi dan merefleksikan secara kritis berarti mereka sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru tentang keadaan lingkungan sosial serta tuntutan-tuntutan perubahan yang wajib dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Evaluasi dan refleksi kritis serta munculnya pengetahuan, pemahaman, perspektif dan pemaknaan baru adalah sebuah bentuk transformasi.

Jadi, kesadaran emansipatoris sangat identik dengan munculnya transformasi. Sementara itu, tanggung jawab moral politik yang tinggi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun transformasi tersebut, yang secara fundamental menasar pada kesejauharaan umum, keadilan dan pemerataan sosial.

Kesadaran emansipatoris ini menjadi basis dalam membangun komitmen dan tanggung jawab untuk membangun wilayahnya. Kesadaran emansipatoris ini juga berhubungan dengan keterlibatan dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis pembangunan bersama dengan negara. Berdasarkan kesadaran emansipatoris ini, masyarakat juga kemudian diberdayakan untuk berani mengambil bagian dalam proses penguatan transformasi tatanan sosialnya. Proses penguatan transformasi tatanan sosial ini tampak dalam berbagai bentuk dan manifestasi pergerakan, seperti beralih dari kekakuan pola pikir dan sikap menuju kepada dinamisitas dan fleksibilitas; bergerak dari hanya sekedar kesadaran diri menuju pada kesadaran kolektif; beralih dari hanya mengandalkan kerja sendiri menuju pada kolaborasi dan jaringan kerja yang luas; berubah dari hanya penghayatan nilai-nilai kehidupan parsial dan eksklusif menuju pada penghayatan nilai-nilai kehidupan yang inklusif, universal dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Dalam konteks pemilihan gubernur NTT tahun 2018, praksis kesadaran politik emansipatoris tampak pada perubahan dalam diri masyarakat, di mana mereka berani

terlibat dalam berbagai diskursus praktis yang bertujuan untuk mengurangi primordialisme dan fatalisme ketika menentukan pilihan politiknya. Dalam hal ini, kecerdasan sosial politik masyarakat merupakan garansi penting dalam menentukan arah perkembangan NTT pada masa mendatang. Pada tataran yang mendalam, masyarakat NTT harus melepaskan asas monolitik, kepentingan diri, kelompok, wilayah, menuju pada keterbukaan akan perbedaan dan keanekaragaman. Pemaksaan pola laku dan pikir yang seragam dalam berpolitik sudah pasti menafikan kreativitas dalam membangun kehidupan. Keterbukaan pada perubahan menjadikan ruang kreativitas mendapat tempatnya, yang berarti membuka atmosfer yang positif, konstruktif dan prospektif pada perkembangan. Masyarakat NTT perlu dibiasakan untuk senantiasa membahas tentang masa depan dan bukan melulu berbicara tentang masalah. Masyarakat yang bermental positif, konstruktif dan prospektif menjadi andalan dalam mendukung akselerasi roda pembangunan bangsa. Mental-mental ini menjadi perekat dalam memperkuat kesadaran politik emansipatoris, dan modal utama untuk membangun NTT yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Bahan Bacaan:

Katalog BPS, *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi NTT tahun 2010-214*.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Apple, M. 1979. *Ideology and Curriculum*, London: Routledge & Kegan Paul.

Freire, Paulo, 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (diindonesiakan oleh Sindhunata), Jakarta: Gramedia.



Politik NTT: Premis Negatif vs Rasionalitas Nilai²¹

Mungkin saya termasuk dalam kelompok orang yang sudah terjebak pesimisme ketika berhadapan dengan realitas politik lokal NTT. Pesimisme ini beralasan ketika bertolak dari lima premis negatif namun cukup faktual, terkait panorama pergerakan politik (political movement) dari satu peristiwa politik ke peristiwa politik yang lain, baik yang terjadi pada skop provinsial maupun skop distrikial. Meski demikian, saya masih optimis bahwa bangunan pilar-pilar demokrasi yang baik dan berkualitas masih berproses

²¹ SKH Pos Kupang, 15/07/2016.

dan akan tetap menjadi fundamen dasar dalam mendukung pembangunan di wilayah NTT.

Adapun lima premis negatif tersebut, yakni: *pertama*, isu-isu yang berbasis primordialisme dan sektarianisme yang kadang mengemuka, baik pada *mindset* masyarakat maupun *mindshift* dari para praktisi politik. Beberapa isu berbasis primordialisme dan sektarianisme berdampak pada masifnya bias 'fatalisme' keterwakilan golongan Kristen dan Katolik, dan representasi wilayah Flores dan Timor. Saya kira, bias ini sangat menjenuhkan berbagai pihak, yang berakibat pada mandulnya kreativitas dan inovasi dalam berpolitik. *Kedua*, payung patronase partai politik begitu berperan kental dalam pentas perpolitikan lokal. Kesempatan menjadi calon pemimpin lebih besar ada pada kader partai politik atau mereka yang berakses langsung ke partai politik. Sementara, orang luar (*outsider*) yang sebenarnya potensial untuk menjadi pemimpin, sulit diakomodasi karena tidak memiliki akses dan investasi pada partai politik. Dikotomi kader dan non kader partai, yang kadang didesain para elit politik pusat, ternyata merambah juga pada dramaturgi politik lokal.

Ketiga, politik kapitalistik masih cukup menggurita. Realitas ini bisa terkonfirmasi dari pameo yang mengatakan, 'politik itu mahal', 'politik itu harus bermodal kuat'. Kelihatannya, menjadi pemimpin lokal lebih condong pada pertimbangan modalitas kapital dibandingkan dengan modalitas sosial politik, moral dan intelektualnya. Hanya mereka yang berkemampuan membayar mahar politik atau berjejaringan kuat dengan pemilik modal, kemungkinan

besar memiliki jembatan menjadi calon pemimpin. *Keempat*, minimnya kreativitas, fenomenalitas, voluntaritas (kerelawanan) dan noveltivitas (kebaruan) dalam dunia politik lokal menyebabkan berberapa hajatan politik kurang terlihat *gereget*-nya. Mungkin saja hal ini menjadi penyebab hilangnya semangat dan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam berbagai momentum politik. Masyarakat merasa jengah dengan stagnasi atau *flat*-nya dinamika politik daerah dengan kehadiran figur yang itu-itu saja. Mirisnya, figur-figur lama tersebut tetap membawa jargon dan daya pikat (branding) politik yang sudah kadaluwarsa, irrelevan, tidak kontekstual serta tidak responsif terhadap kebutuhan vital masyarakat. Adanya kecenderungan elitis dalam berpolitik membuat masyarakat lebih berposisi sebagai obyek daripada subyek politik.

Kelima, masih belum optimalnya literasi politik masyarakat yang berimbasi pada rendahnya partisipatori dan emansipatori, baik pada level berpikir, bersikap dan maupun bertindak. Masyarakat belum sepenuhnya melek dalam memahami politik sebagai variabel penting menuju perubahan kehidupan yang lebih baik. Sikap ignoran, pasif, apolitis, indifferen menggejala dalam diri masyarakat. Ada masyarakat yang 'terpaksa' terlibat dalam proses pesta demokrasi lebih karena motivasi emosional-primordial atau karena iming-iming kebendaan. Bahkan ada yang bersikap resisten dan apriori bahwa politik itu tidak bermanfaat (*hopeless*) dan dapat mendestruksi kohesi psiko-sosial. Tampaknya, masyarakat yang benar-benar literatif, partisipatoris dan emansipatoris dalam berbagai momentum politik, jumlahnya masih relatif sedikit.

Selanjutnya, intuisi akademik saya terpanggil untuk memperlawankan premis-premis negatif ini dengan konsep Rasionalitas Nilai menurut Juergen Habermas (1929-2015). Habermas dalam Teori Kritisnya dan diskursus tentang Masyarakat Komunikatif menegaskan, bangunan demokrasi yang kuat dan bisa mendongkrak partisipatori dan emansipatori politik masyarakat mesti didasarkan pada rasionalitas. Namun pertanyaanya, rasionalitas model manakah yang bisa menyebabkan transformasi sosial, politik, kultural dan personal? Menurutnya, ada tiga manifestasi rasionalitas, yakni: *Pertama*, Rasionalitas Tindakan. Rasio teknis yang mengacu pada perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran dengan dukungan sarana teknis, teknologis, mekanis, formalistik dan birokratis. *Kedua*, Rasionalitas Tujuan. Rasio yang hanya mementingkan tujuan, menafikan proses, dan menggeser nilai-nilai mendasar dalam kesadaran manusia. *Ketiga*, Rasionalitas Nilai. Rasio yang terbentuk sebagai hasil sebuah proses berkesadaran, yang didukung oleh komitmen personal untuk berpihak pada nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Setiap rasionalitas di atas berpotensi untuk terjadinya perubahan dan transformasi. Namun, rasio model manakah yang dapat membawa perubahan dan transformasi yang berorientasi kesejahteraan masyarakat dan tegaknya fundamen demokrasi?

Menurut Habermas, sudah pasti jawabannya ada pada rasio yang terakhir, karena rasio ini memungkinkan munculnya otonomi kesadaran dan tanggung jawab berpikir dan berperilaku sebagai manusia, yang tercermin dengan menguatnya kapasitas pengetahuan kritis. Rasio

ini memerdekakan manusia untuk mengkonstruksi dirinya secara kreatif, dinamis, inovatif dan demokratis. Rasio ini mendukung berkembangnya nilai etis-moral yang senantiasa terarah pada keberpihakan nilai kesantunan, kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam bermasyarakat. Rasio ini juga membuka ruang dialog dan komunikasi yang seimbang tanpa intimidasi kapitalisme, fatalisme, primordialisme, sektarianisme, dll. Habermas menambahkan, bila mayoritas masyarakat dalam dirinya memiliki rasionalitas nilai maka negara bangsa akan terarah pada habitus berdemokrasi yang berkualitas, yang terrefleksi dalam lajunya pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya.

Dan asumsi saya, agar perpolitikan lokal NTT bisa berkembang serta kemudian dapat menjadi barometer kehidupan demokrasi di Indonesia, maka sesuatu yang tidak boleh tidak (*conditio sine qua non*) semua anasir seperti negara (pemerintah), parlemen, masyarakat, partai politik, para politisi/politikus, LSM, mahasiswa, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga adat, mesti terlibat dalam upaya pemberdayaan dan penguatan rasionalitas nilai ini. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan penguatannya secara praksis bisa dijalankan melalui ‘sekolah-sekolah demokrasi’ secara formal, informal dan non formal dalam bentuk pendidikan, pembelajaran, diskursus, dialog, renungan, kotbah, rekoleksi, pelatihan dan pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal. Tentunya, kegiatan ini dibuat secara komprehensif, integratif dan melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan demokrasi lokal.

Seperti optimisme awal saya, kematangan demokrasi sebagai pilar pendukung pembangunan di NTT masih berproses dan membutuhkan perhatian dan komitmen dari semua pihak. Untuk mendukungnya, rasionalitas nilai harus menjadi sebuah pilihan demi terbukanya ruang literasi, partisipatori dan emansipatori masyarakat dalam berdemokrasi. Rasionalitas nilai menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk melawan dan mengeliminasi premis-premis negatif yang melekat secara fatalistik berdemokrasi politik lokal. Dengan berpikir dan bertindak rasional, serta bertumpu pada nilai universal dan kearifan lokal, perwajahan politik lokal mengalami transformasi yang berkualitas. Bukan tidak mungkin, politik lokal NTT bisa menjadi ‘role model’, kiblat, atau miniatur politik bagi bangsa Indonesia.

Bahan Bacaan:

Katalog BPS, *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi NTT tahun 2010-2014*.

Hakim. Abdul, 2009. “Negara dalam Perspektif Plato” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Januari 2010, Vol. 9, No. 1, hal, 59-74.

Hasanuddin, Iqbal, 2018. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, Oktober.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.



PILKADA 2015 - PILGUB 2018: NTT Terpolar Pragmatisme Politik²²

John Dewey (1859-1952) merupakan salah satu filsuf, kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan yang menggagas filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengklaim bahwa sesuatu disebut benar dan memiliki kebenaran bila mengandung kegunaan atau manfaat secara praktis bagi seseorang atau sekelompok orang. Pragmatisme menilai, kebenaran objektif sangat tergantung sejauh mana pengetahuan, kebijakan dan

²² SKH Pos Kupang, 28/04/2016.

keputusan bermanfaat nyata bagi individu-individu dan kelompok individu yang menginginkannya. Kebenaran merupakan representasi realitas yang subyektif, bukan kebenaran obyektif yang didasarkan pada fakta-fakta umum.

Penalaran pragmatisme mengikuti gagasan Immanuel Kant (1724-1804) yang mengatakan realitas hanya pada dirinya (*das ding an sich*) dan tidak bisa diketahui. Seseorang hanya bisa mengetahui realitas melalui kacamata yang dipakainya, karenanya ada kecenderungan untuk menafikan realitas kebenaran yang obyektif. Konsekuensinya, setiap individu memiliki otoritas dan otonomi yang besar dalam memahami setiap fenomena yang dia hadapi, termasuk mengkonstruksi kebenaran, pengetahuan, ide, keputusan dan kebijakan. Konsekuensi berikutnya adalah keterarahan untuk mereduksi dan mensimplifikasi realitas hanya pada dimensi praktikalitas, manfaat, dan keuntungan yang parsial dan subyektif. Realitas terkooptasi pada asas manfaat bagi kepentingan diri sendiri dan sekelompok orang yang sifatnya ‘sesaat’, ‘sekarang’ dan ‘di sini’.

Dalam tataran praktis hidup manusia, pragmatisme sangat wajar dan beralasan. Bahkan, saat ini kehidupan (post) modern sangat diwarnai oleh gaya hidup pragmatis. Orang bekerja hari ini untuk makan hari ini, belajar untuk dapat ijazah, berpolitik untuk bisa mendapat kekuasaan, mendukung paket tertentu dalam pilkada untuk mendapat saweran proyek, ‘hari ini didukung, besok wajib mendukung’, dll. Namun, bila dikritisi secara mendalam, pragmatisme telah menggilas aspek lain dari kebenaran

yang sejati, seperti proses analisis yang mendalam dan komprehensif, keterlibatan komponen-komponen lain, dan mempertimbangkan efek gandanya (multiplier effect) terhadap kemaslahatan umum. Prinsip filosofisnya, parameter kebenaran dari suatu pengetahuan, kebijakan dan keputusan, tidak saja berhenti pada asas kegunaan dan manfaat semata, tetapi juga secara utuh dan holistik mempertimbangkan asas-asas seperti kebaikan bersama (common good), keadilan (justice), kewajaran (fairness), kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran (prosperity), kebajikan (righteousness), sikap netral (impartiality) dan ketulusan hati (probity). Dalam pragmatisme, asas-asas ini sangat dilecehkan sehingga kerap kali kaum pragmatisme sangat resisten terhadap diskusi mendalam tentang kebenaran yang sejati, obyektif, substantif dan berpihak pada kepentingan umum.

Pilkada serentak 2016 (di NTT) sudah selesai dan akan berlangsung Pilgub 2018. Namun, dalam observasi saya, berbagai polarisasi pasca pilkada tidak serta merta hilang lenyap begitu saja. Bahkan kecenderungan polarisasi itu tetap ada meskipun terlokalisasi dalam internal paket pemenang pilkada. Selanjutnya, saya berasumsi bahwa menjelang Pilgub, polarisasi akan mengekskalasi kembali. Berdasarkan asumsi ini dan dengan mengikuti nalar pragmatisme politik, saya membuat dua kajian di bawah ini.

Pertama, fakta bahwa praktik politik primordial masih sangat mengental dalam perpolitikan daerah yang dilandasi politik balas budi (politik etis) dengan semangat ‘siapa

mendukung siapa’. Kontraproduksi dengan ideologi politik, logika politik pragmatisme mengatakan kemenangan paket dalam pilkada adalah kemenangan tim sukses, konstituen, dan partai politik pendukung, bukan kemenangan masyarakat secara keseluruhan. Logika politik seperti ini secara laten terpolar pada perilaku-perilaku dan cara berpikir pragmatis yang mungkin termanifestasi dalam ruang gerak seperti kemudahan mendapat jatah proyek, mendapat jatah jabatan, kemudahan akses dengan lingkaran pemegang kekuasaan, kepastian dukungan basis pada peristiwa politik berikutnya, dll. Perilaku-perilaku tentu saja bisa berujung pada benturan kepentingan internal para tim sukses, partai politik pendukung dan konstituen. Untuk mengelola dan menyelesaikan kondisi dan situasi ini, kepala daerah harus membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Hal ini memberi gambaran, idealisme politik para kepala daerah yang sudah secara bagus diterjemahkan dalam visi dan misi, terdekonstruksi dengan sendirinya. Perilaku pragmatis dengan mudah menghancurkan bangunan ideologi politik para kepala daerah. Lebih miris lagi, bila ada kepala daerah yang sudah sejak awal terjebak dalam nalar pragmatisme ini, maka akan sangat sulit untuk keluar dari wilayah perang berbagai kepentingan (*the war zone of interests*). Kepala daerah membutuhkan dua sampai tiga tahun untuk mengatasi bias pragmatisme ini. Lantas, bila waktu sisanya (mungkin) dipersiapkan untuk pilkada periode berikutnya, lalu kapan kepala daerah memperhatikan kemaslahatan umum?

Kedua, keterjerembaban politik NTT dalam pusaran pragmatisme kembali tidak bisa terhindarkan menjelang

Pilgub 2018. Menurut saya, Pilgub 2018 adalah ajang dan momentum yang paling tepat sekaligus sangat krusial dalam mengembalikan investasi politik yang sudah ditanam pada Pilkada 2016. Disebut ‘paling tepat’ karena bupati/walikota dapat dengan mudah memanfaatkan gerbong tim sukses dan konstituen yang masih militan dan emosional terkait pilkada yang lalu. Sementara itu, disebut ‘sangat krusial’, karena pilgub itu sendiri sangat menentukan pergerakan politik kepala daerah pada masa yang akan datang. Secara siklus, kemenangan pilgub merupakan ‘kemenangan politik’ dari bupati/walikota yang mendukungnya. Sekali lagi logika politik primordial dengan spirit ‘saya memberi supaya kamu memberi’ (do ut des) tetap mengemuka. Bupati/Walikota terpaksa kembali mengorbankan ideologi politiknya untuk kepentingan kesuksesan Pilgub dari calon yang mendukungnya pada Pilkada. Menurut saya, waktu dan perhatian Bupati/Walikota bahkan semua sumber daya di masyarakat dan di pemerintah daerah akan diberdayakan (diperpedaya?) dan diarahkan secara total untuk kemenangan Pilgub.

Sementara itu, bila dikaji dari perspektif sosio-politik, dramaturgi politik di NTT telah memberangus masyarakat dalam kegaduhan horisontal. Masyarakat belum sepenuhnya mengalami titik anti-klimaks yang terendah dan menjalin rekonsiliasi hubungan yang telah tercecer akibat beda pilihan pada pilkada 2016, tiba-tiba mereka terpolar lagi dengan Pilgub 2018. Untuk beberapa tahun ke depan, masyarakat NTT tidak memiliki kesempatan untuk ‘tidur’ dan mengalami kehidupan sosial secara normal, dan berupaya mengembangkan hidupnya. Waktunya

dihabiskan untuk mengikuti arus gonjang-ganjing politik dan mengelola psiko-sosialnya. Sebagai Bupati/Walikota, apakah punya cukup waktu dan tenaga untuk menyelesaikan polarisasi akibat nalar pragmatisme politik seperti ini, berikut dampak-dampaknya bagi masyarakat? Mungkinkah kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab mengapa ada beberapa kabupaten di NTT masuk dalam kategori termiskin di Indonesia?

Bahan Bacaan:

Katalog BPS, *Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Propinsi NTT tahun 2010-2014*.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Hakim. Abdul, 2009. “Negara dalam Perspektif Plato” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Januari 2010, Vol. 9, No. 1, hal, 59-74.

Hasanuddin, Iqbal, 2018. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, Oktober.

Hasanuddin, Iqbal, 2018. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, Oktober
Fukuyama, Francis & Samuel P. Huntington, 2005. *The Future of The World Order (Masa Depan Peradaban dalam Cengkeraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme)*, Yogyakarta: IRCiSod,



Redupnya Rasionalitas Berbangsa²³

Sungguh sangat mencemaskan apabila isu-isu yang berbau suku, ras dan agama (SARA) sudah sangat laten mendeterminasi dan mendominasi alur kehidupan masyarakat Indonesia. Isu-isu ini merebak bias dan telah beredar melalui berbagai bentuk dan cara yang masif, *out of control*, kasar, brutal serta menganggangi batasan moral-etis. Mengemukanya isu ini bahkan telah menggeser jauh isu-isu lain yang sebenarnya mendesak untuk dicermati dan dibahas, seperti: korupsi, transparansi, kenaikan harga sembako, kesenjangan sosial ekonomi, pelayanan

²³ SKH Pos Kupang, 12/01/2017.

publik, kinerja kaum eksekutif, yudikatif dan legislatif, keamanan negara, dan pelaksanaan demokrasi. Sebagian masyarakat begitu mudah tergiring, terprovokasi dan teragitasi oleh isu-isu ini sampai gagal fokus pada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan vital kesehariannya. Sementara pada pihak pemerintah sebagian energinya terkuras untuk meredam potensi-potensi konflik yang bisa saja meletus selepas munculnya isu-isu berbau SARA tersebut. Pada sisi lain, sepertinya bangsa Indonesia mau dipreteli baju kebhinekaannya dan coba dikenakan dengan baju lain yang berlabel agama, tunggal, seragam, monokultur dan monolitik.

Saya menduga ada tiga hal yang dapat ditelisik sebagai pemicu potensial tentang mengemukanya isu SARA sebagai jajanan laris manis saat ini, yaitu: Pertama, isu ini muncul berkaitan dengan momentum politik Pilkada. Ada usaha dari kontestan tertentu untuk merebut simpati pemilih, meningkatkan popularitas dan elektabilitas dengan mengeksploitasi kelemahan kontestan lain. Salah satu kelemahan yang begitu mudah dijadikan komoditas politik adalah prediksi minoritas yang dimiliki oleh calon lain. Biasanya prediksi ini kerap merujuk pada dikotomi mayoritas dan minoritas yang kemudian diturunkan pada subdikotomi: jenis kelamin, suku, ras, agama dan wilayah. Begitu kuatnya sentimen dan dikotomi antara mayoritas dan minoritas menyebabkan isu SARA sangat laku, ‘mengena’ dan efektif, sehingga sulit untuk dinetralkan. Saya menilai, berbagai bentuk wacana, fatwa, diskusi dan

pendidikan politik demokratis belum cukup signifikan untuk sekedar membuat isu ini mengalami antiklimaks atau hilang dari konstelasi demokrasi di Indonesia.

Kedua, bertolak dari situasi ini kita bisa secara gamblang menilai, ternyata bingkai pluralitas/multikulturalitas yang sudah lama dibangun oleh pendiri bangsa, mulai ‘kandas’ hanya oleh secuil sentimen SARA. Muncul anomali kebangsaan, di mana pada satu pihak Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbhineka, tetapi pada pihak lain gerakan-gerakan monokulturisasi, monopolitisasi dan bahkan transnasionalisasi oleh golongan ideologis tertentu semakin menguat eksistensinya. Gerakan-gerakan ini sepertinya semakin masif, sistematis, terstruktur, sporadik, dan ada kesan negara ‘kalah’ berhadapan dengannya. Bila nanti negara benar-benar kalah oleh gerakan-gerakan ini berarti semboyan kebhinekaan akan perlahan-lahan runtuh dan kemudian hanya tinggal kenangan. Sungguh sayang, apabila karakter dan identitas ‘kemajemukan yang mempersatukan’ ini, justru pudar hanya dalam sekejap mata saja oleh kepentingan gerakan ideologi sektarian.

Ketiga, sepertinya rasionalitas kebangsaan sedang berada pada grafik tajam menuju titik nadir. Ketika bangsa lain begitu bersemangat memberdayakan segala potensi diri dan alam lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya dan mungkin kesejahteraan masyarakat bangsa lain, atau ada bangsa yang sedang memikirkan kemungkinan kehidupan di planet lain;

bangsa Indonesia masih harus berkuat dengan bisnis emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme. Mirisnya, di saat sedang berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain, justru sebagian besar energi dan modal bangsa terkuras untuk mengurus hal-hal yang sifatnya *non*-substansial, elementer, dan parodial semata. Rupanya hembusan angin postmodern dan tren revolusi pengetahuan untuk bangsa Indonesia hanya merupakan klaim artisifisial saja, sebab belum sepenuhnya dituruti dalam bentuk pola berpikir dan pola berperilaku. Sementara derajat pengetahuan yang paling tinggi sudah terekspresi jelas dalam peradaban kehidupan dan kebudayaan bangsa, di mana urusan-urusan emosional, primordial, irasional dan dikotomis tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakatnya.

Bercermin pada bangsa-bangsa yang sudah maju derajat pengetahuannya, perkara monokulturalisme, emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme ini sudah diselesaikan pada setengah abad yang lalu. Mereka sudah dengan cerdas menilai bahwa kecenderungan-kecenderungan itu sudah tidak relevan dan kontributif, bahkan dipersepsikan sebagai penghambat dalam pembangunan negara bangsa. Padahal, seturut perspektif pembangunan negara bangsa, salah satu tonggak penting dalam membangun adalah rasionalitas dan kritisitas masyarakatnya, di mana mereka dengan segenap kemampuan akal budi dan kecerdasan sosial emosionalnya membantu pemerintah

dalam merealisasikan program-program pembangunan. Kuatnya rasionalitas dan kritisitas pada masyarakat pembangun membuat mereka menanggalkan berbagai bentuk sentimen bernuasa kedaerahan, ras, suku dan agama, melepas diri dari cara berpikir parsial dan fragmentaris. Perbedaan dalam segala bentuknya sudah tidak menjadi halangan untuk menyatukan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun bangsa yang sejahtera dan beradab.

Pada gradasi kepentingan inilah saya berani bersumpah bahwa rasionalitas masih menjadi sesuatu yang ideal untuk masyarakat bangsa pembangun seperti Indonesia sekarang ini. Tentu, saya tidak berpretensi untuk menglorifikasi rasionalitas dan lantas menafikan komponen-komponen lain dalam membentuk peradaban masyarakat sehingga terjebak pada kecenderungan rasionalisme. Namun bila memahami dan menyikapi secara jernih konteks kekinian Indonesia, rasionalitas masih menjadi garansi utama dan *entry point* dalam usaha melepas masyarakat dari belenggu emosionalisme, primordialisme, irasionalisme dan dikotomisme yang dilansir sebagai menghambat kemajuan kehidupan berbangsa. Sebab, bila berpikir lebih progresif dan inklusif, Indonesia ‘das sollen’ sudah menjadi bangsa yang jauh lebih maju dan beradab dari bangsa lain, karena segala macam kekayaan yang terkandung pada manusia, alam dan lingkungan budaya multikulturalnya. Namun semua itu sudah dan akan mengalami kendala dalam

pengelolaan dan pengembangannya ketika rasionalitas belum sepenuhnya merambah secara optimal pada berbagai matra kehidupan masyarakat. Prasyaratnya, bila Indonesia tetap ingin menjadi bangsa yang berharga dan bermartabat di mata dunia dan dalam dirinya sendiri, maka *conditio sine qua non* harus tetap menegaskan tonggak-tonggak rasionalitas melalui berbagai aktivitas, antara lain: persekolahan, pemberdayaan, pelatihan, kegiatan-kegiatan literatif, dan diskursus. Khusus dalam dunia pendidikan, aktivitas-aktivitas ini sedapat mungkin dimulai sejak dini dan berkelanjutan sampai pada tingkat pendidikan yang paling tinggi.

Menurut Habermas (Suseno, 2005), salah satu karakter dari masyarakat yang beradab adalah tingginya kandungan rasionalitas yang terderivasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi kognitif-teknis dan dimensi moral-komunikatif. Dimensi kognitif-teknis berkaitan dengan kemampuan warga bangsa dalam mencermati dan menyelesaikan berbagai masalah sehingga tidak terus menerus mengganggu kehidupannya. Masalah tersebut dipecahkan dengan mendiskusikan secara bersama, mencari alternatif jalan keluar, dan menyusun program-program praksis sebagai tindak lanjutnya. Yang menjadi istimewa dari dimensi kognitif ini, ketika berdiskusi segala bentuk prasangka, stereotip, eksklusivisme, dan intoleransi dikandangkan alias tidak mendapat tempatnya. Dalam asas kesetaraan dan persamaan hak, mereka betul-betul fokus pada penyelesaian masalah untuk kepentingan hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan

berpikir logis, analitis dan etis serta sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan.

Sementara dimensi moral-komunikatif berhubungan dengan upaya-upaya mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain tentang banyak hal dalam berbangsa, dengan mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Komunikasi yang dialogis dan emansipatoris ini memungkinkan adanya saling memahami, mengerti, mendukung dan melindungi antara warga bangsa dari segala bentuk dominasi dan determinasi oleh kelompok/golongan ideologis tertentu yang berusaha merongrong sendi-sendi kehidupan bangsanya (Bertens, 2002). Untuk menangkal dan melemahkan kekuatan-kekuatan ideologis yang mengancam kedamaian dan ketenangan berbangsa tersebut, tentu yang ditonjolkan bukan lagi kekuatan otot/fisik, tetapi kemampuan dan keterampilan logis, analitis, etis dan senantiasa mengedepankan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Ayolah....saya kira belum terlalu terlambat untuk memelihara, meningkatkan dan menegakkan tonggak-tonggak rasionalitas demi mengembalikan martabat dan harga diri bangsa yang sudah mulai tercabik.

Bahan Bacaan:

Zainuddin Fananie, dkk. 2015. *Radikalisme dan Perubahan Sosial*. Kerjasama dengan The Asian Foundation.

Ygodir, Zuly. 2012. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Thahjadi, S.P.L., 2004. *Pertualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius.
- Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.
- Suseno, Franz Magnis, 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta, Kanisius.
- Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Philosophy*, (terjem.) . Columbus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.



Merekonstruksi Driving Forces Pembangunan Bangsa²⁴

Rekonstruksionisme merupakan aliran pendidikan yang dikembangkan oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930 di Amerika dan Daratan Eropa (Gandhi, 2013). Aliran ini memiliki tujuan yang sama dengan aliran perenialisme, yaitu mendidik dan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengatasi krisis kehidupan modern yang diakibatkan berbagai kecenderungan sekularisme, hedonisme, pragmatisme, dan rasisme dengan memanfaatkan potensi budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam dirinya. Menurut aliran ini kemampuan mengelola dan mengatasi

²⁴ SKH Pos Kupang, 26/01/2017.

krisis kehidupan dengan memberdayakan nilai-nilai budaya dan social yang ada dalam masyarakat, dengan mengedepankan kekuatan konsolidasi, kerja sama dan konsensus antara berbagai elemen-elemen masyarakat. Dalam perspektif rekonstruksionisme, semua elemen diedukasi dan diadvokasi untuk berusaha meraih tujuan utama hidup dengan mengatur tata kehidupan manusia pada suatu tatanan yang baru dan lebih baik.

Sebagai aliran pendidikan yang cukup berpengaruh, rekonstruksionisme kemudian mengelaborasi pandangan ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam pengembangan dan peruntukannya bagi masyarakat (Sumantri,2011).Pandangan ontologis menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi memiliki potensi ketertujuan pada yang Universal, di mana keutamaan seperti kebenaran, kebaikan, keseimbangan dan keadilan ada padaNya. Untuk mencapai yang Universal tadi, tugas dan tanggung jawab manusia adalah berusaha mengejawantahkan keutamaan-keutamaan ini lebih dahulu dalam praksis keseharian. Bila keutamaan-keutamaan ini hilang atau tidak ditumbuhkembangkan maka dengan sendirinya potensi keterarahan menuju yang Universal mengalami kegagalan sehingga dapat memperburuk kehidupan manusia.

Pandangan epistemologis mengedepankan tentang intelektualitas manusia dalam memecahkan berbagai masalah kehidupannya dengan memadukan secara proporsional antara kerja indera (pengalaman) dan rasio (akal budi); antara kesimpulan induktif dan

deduktif. Kehidupan manusia tidak hanya dikonstruksi oleh konsep-konsep teoritis belaka tetapi justru semakin mendapat penguatan maknanya lewat pengalaman-pengalaman keseharian antara manusia. Pandangan dan konsep tentang kehidupan semakin berarti ketika dialami secara nyata dalam keseharian hidup. Karenanya, permasalahan kehidupan manusia sebaiknya dipecahkan dengan mengedepankan rasionalitas dengan tanpa menafikan pengalaman-pengalaman kehidupan yang kaya akan makna dan nilai.

Sementara pandangan aksiologis menegaskan bahwa nilai sebagai kebaikan manusia sebagai manusia sangat dibutuhkan dalam setiap pola dan proses interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Nilai inilah menjadi kekuatan penentu (*driving force*) dalam menggerakkan relasi tersebut agar tetap terjalin dengan baik, bermutu dan saling menguntungkan. Tujuan utama relasi manusia adalah keterarahan pada relasi teologis dengan yang disebut Universal. Manusia tidak bisa lepas dari keterarahan pada relasi teologis ini, karena itu dia harus selalu berada dalam proses mencari dan terus mencari. Dengan potensi kebaikan dan kebenaran yang ada dalam dirinya, manusia berusaha mencapai relasi teologis tersebut melalui hubungan yang baik dengan sesama dan alam semesta. Dengan memberdayakan pengetahuannya manusia berusaha merawat relasi horisontalnya agar dapat mendukung relasi vertikalnya dengan yang Universal. Pola-pola pendidikan, pemberdayaan, pembimbingan dan pengasuhan yang benar akan memungkinkan

manusia menjaga secara seimbang relasi horisontal dan vertikalnya.

Dalam konteks kekinian bangsa Indonesia, rekonstruksi tata kehidupan dapat menjadi wacana alternative ketika secara faktual-empirik tanggung jawab untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan menjadi sangat berat akhir-akhir ini. Berbagai problem multidimensional kebangsaan telah menyasar kehidupan masyarakat yang berdampak pada disequilibrium, diskrepansi, dekadensi, disharmoni dan bahkan mengarah pada gejala desintegrasi. Saling berkorespondensinya satu persoalan dengan persoalan lain, serta berbagai cara masyarakat merespon dan menafsir persoalan-persoalan tersebut kadang turut menambah carut marutnya keadaan berbangsa. Rentetan dan deretan persoalan tersebut bukan tidak mungkin berimplikasi pada ketidaktabilan bangsa dan signifikan berdampak pada tercecernya program-program pembangunan yang seharusnya berjalan sesuai perencanaan. Agenda-agenda besar pemerintah untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan masyarakat bangsa terhalang oleh beberapa kasus nasional berikut local, yang dalam penyelesaiannya menyita sekian energi, waktu dan biaya.

Sejauh ini kita perlu mengapresiasi Pemerintah yang sudah berupaya mengelola berbagai persoalan kebangsaan sehingga tidak terlalu menjadi ancaman serius. Menurut saya, kemampuan mengelola suasana kebangsaan ini tidak bisa terlepas dari usaha merekonstruksi beberapa kekuatan penentu yang turut menjadi tonggak dalam

membangun bangsa. Adapun bentuk rekonstruksi tersebut, antara lain: Pertama, konsolidasi dan kerja sama dengan elemen masyarakat akademik-intelektual, politik, agama, adat, dan lembaga swadaya. Konsolidasi dan kerja sama dengan masyarakat akademik-intelektual tentunya berkaitan dengan informasi, perspektif, kajian-kajian ilmiah, kritis, dan kontributif dalam mencari pemecahan masalah; dengan masyarakat politik berhubungan dengan dukungan terhadap kebijakan pembangunan yang pro kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan berkeadilan social; dengan masyarakat agama berhubungan dengan komitmen kerukunan dan kedamaian inter/intra agama serta penguatan nilai kemanusiaan, sosial dan berketuhanan; dengan masyarakat adat berkaitan dengan menggali kearifan-kearifan lokal yang bisa memepererat persatuan dan kesatuan bangsa; dan dengan lembaga swadaya bertalian dengan isu-isu stragegis, aktual dan kontekstual yang terjadi dalam masyarakat dan kajian tentang relevansi dan *link and mach*-nya program dan kebijakan pemerintah. Konsolidasi dan kerjasama dengan para pihak ini merupakan salah satu kekuatan penentu yang seyogyanya dirancang secara permanen dan berkelanjutan demi penyelesaian masalah yang integratif, komprehensif dan holistik.

Kedua, sejarah pengalaman bangsa adalah sejarah ‘keberagaman yang mempersatukan’ (diversity in unity) yang tergambar dalam lambang Pancasila. Sejarah pengalaman ini menjadi salah satu kekuatan penentu karena Pancasila mampu menyatukan kurang lebih 1.340 suku bangsa, 736 bahasa daerah, dan 6 agama. Karena

itu, kebhinekaan ini harus selalu dirawat baik melalui konsep dan implementasi kurikulum pendidikan formal, informal dan nonformal pada setiap jenjangnya, juga melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila senantiasa direvitalisasi dan dikontekstualisasikan agar tetap menjadi tameng yang valid dan *adequat* ketika berhadapan dengan ancaman perpecahan dan keretakan. Revitalisasi dan kontekstualisasi ini mesti diikuti dengan pengafirmasian anasir-anasir plural/multikultural pada hampir setiap lini kehidupan masyarakat, demi menetralkan berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan dikotomi sosial yang kerap menjadi ‘sumbu pendek’ keresahan berbangsa.

Ketiga, identitas dan karakter kebangsaan yang tetap mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan dan gotong royong menjadi nilai-nilai utama (*core values*) pada masyarakat Indonesia, yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Nilai-nilai tersebut sudah sering menjadi garansi dan rujukan dalam memecahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Saya kira banyak konsep kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan program-program pemberdayaan di lembaga pemerintah dan *non*-pemerintah memposisikan nilai-nilai ini sebagai muatan inti untuk melandasi berbagai bentuk implementasinya. Bukan hanya itu, banyak pula organisasi massa dan partai politik yang meletakkan nilai kekeluargaan dan gotong royong sebagai *platform* dan semangat kerjanya. Karenanya, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap komit dan konsisten

dalam mengeksplorasi dan mengkonservasi nilai-nilai ini sebagai sebuah kekuatan penentu untuk mendukung pembangunan bangsa.

Tekad merekonstruksi tiga kekuatan penentu ini mesti terus digalakan pada berbagai momentum kehidupan masyarakat. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menyusun secara apik dan teratur lagi tatanan kehidupan berbangsa yang mungkin sudah terporak-poranda oleh berbagai desakan modernisme, sekularisme, radikalisme/fundamentalisme, sektarianisme, trans-nasionalisme dan pragmatisme. Pada galibnya, upaya merekonstruksi beberapa kekuatan penentu di atas didasarkan pada urgensi untuk mengatasi krisis, pergolakan, konflik dan berusaha mencapai konsensus dan kerja sama demi membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik tersebut dimengerti dan dipahami sebagai hasil proses transformasi dan akumulasi dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum.

Bahan Bacaan:

- Rिताudin, M. Sidi, 2012. "Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 6, No.1, Juni 2012.
- Setiawan, Beni, 2004. "Rekonstruksi Bangsa Menuju Masa Depan Indonesia", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. V, No. 2, hal. 115-129.

Kant, Immanuel, 2005. *Critique of Practical Reason, 1965*
(*Kritik Atas Akal Budi Praktis* (terjem. Nurhadi).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hardiman, Budi F., 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta:
Kanisius



***Integrasi Nasional:
Tolak Fatalisme,
Perkuat Etika Kebangsaan
(Catatan untuk Berbagai
Kerusuhan Bernuansa SARA)²⁵***

Fatalisme adalah cara pandang seorang atau sekelompok orang untuk menerima apa saja yang sudah terberi dan mengamini saja realitas kehidupannya dengan pasrah pasif, linear dan seragam. Secara laten maupun manifest, fatalisme sangat lekat dengan kehidupan masyarakat arkhais, tradisional, konvensional, primordialistik, dan irrasional. Karakter-karakter ini tereksplisitasi dalam pola pikir, pola laku dan pola

²⁵ SKH Pos Kupang, 03/08/2016.

tindakannya. Mereka menganggap apa yang sudah menjadi warisan budaya, etos, keadaan, kebiasaan, tradisi, dan dogma, ‘meski buruk sekalipun’, adalah sesuatu yang sudah baik, benar, legitim tidak bisa diperbaiki lagi. Segala hal yang berbau menggugat dan upaya keluar dari ‘apa yang sudah terberi’ tersebut dianggap sangat mustahil dan kesia-siaan belaka. Dari perspektif mashab fatalisme yang ekstrim, berbagai upaya untuk menyimpang dari linearitas dan keseragaman kehidupan dicurigai sebagai sebagai bentuk ‘kudeta’ untuk mengganggu stabilitas, keamanan dan kenyamanan. Dalam tataran filosofis, fatalisme sangat dekat dengan aliran determinisme yang melihat takdir sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Manusia hanya bisa menerima saja apa yang sudah dianugerahi, meskipun ketika ditelusuri dengan akal sehat, apa yang sudah ditakdirkan itu tidak cukup membangun kehidupannya secara lebih baik dan sejahtera.

Masyarakat fatalis sangat alergik dan defensif terhadap hal yang berbau perbedaan, multikultur, rasional, kritis, dialektik, kreatif, inovatif, kebaruan dan berpikir *out of box*. Mereka cenderung resisten terhadap keanekaragaman, perubahan, perbaikan dan kritik. Menurut mereka, perubahan, perbedaan atau perbaikan sebaik apapun dianggap sebagai mimpi yang menggerikan bagi kehidupannya; sebab akan merusak sistem dan kenyamanan yang sudah berlaku lama. Bahkan secara argumentatif mereka membuat dalil empirik bahwa tidak sedikit masyarakat yang hancur masa depannya, justru karena cepat tergoda dengan tawaran

perbedaan dan perubahan dan menganggap perubahan sebagai dewa penolong. Sejarah perang antara bangsa, konflik bernuansa SARA, degradasi moral, luntarnya nasionalisme, munculnya ambuigitas, anomali, *chaos*, desintegrasi, separatisme dan rasialisme, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pengembangan bangsa, sudah sangat faktis menggambarkan tentang dampak buruk dari perubahan. Bisa jadi, dugaan kaum fatalis dan determinis ini selaras dengan asumsi sisi buruk perubahan dan perbedaan yang dipernah dikemukakan antara lain oleh Fukuyama dan Huntington tentang benturan peradaban (*crush of civilization*) atau masyarakat yang tidak beridentitas atau tanpa nilai (*anomie*) menurut Emile Durhkeim.

Dalam konteks kekekinian Indonesia, bentuk krisis multidimensional di bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum, seolah-olah membenarkan dugaan kaum fatalis ini. Gejala dan fakta melunturnya nilai kesatuan dan keakraban, nilai-nilai agama, budaya dan ideologi serta pembangunan material dan spiritual bangsa tersendat, bisa jadi mengafirmasi asumsi kaum fatalis ini. Menurut saya, bila dugaan kaum fatalis ini benar, maka ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya situasi ini, antara lain: (1) penghayatan dan pengalaman kehidupan multikultur yang melemah, munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru, radikal dan fundamentalistik, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama; (2) kebijakan pembangunan bangsa yang tidak adil dan merata dan mengabaikan kepentingan

daerah sehingga menimbulkan fanatisme kedaerahan; (3) kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa, (4) terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan moralitas dan etika, (5) kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa, (6) tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah masyarakat, (7) adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar, dan (8) meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian serta pemakaian, peredaran dan penyelundupan obat-obat terlarang.

Perubahan dan perbedaan menjadi sebuah keniscayaan dalam diri bangsa Indonesia. Perubahan dan perbedaan dalam berbagai penampakannya selain memberikan berbagai kemudahan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan yang sulit dan rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia sangat membutuhkan sumber daya yang berkualitas, dan memiliki ketahanan diri, daya saing yang handal dan kesanggupan untuk hidup dalam suasana multikultur. Saat ini, Bangsa Indonesia memerlukan individu yang segi perilaku pengetahuan,

sikap maupun keterampilan, mampu melahirkan banyak gagasan atau alternatif pemecahan terhadap masalah akibat perubahan dan perbedaan yang dihadapinya. Selain itu, ia juga dapat menentukan dan menilai secara kritis tentang segala sesuatu yang melingkupi diri dan lingkungannya, sehingga tidak terjerembab dan lantas menjadi korban berbagai model perubahan dan perbedaan.

Dari perspektif integrasi nasional, kita wajib menolak secara kritis pandangan kaum fatalis yang terlalu aprioristik, *predijuce* dan *fobia* terhadap perubahan dan perbedaan serta dampaknya. Selain mengkritisi, kita perlu memberi pengetahuan dan pencerahan kepada kaum fatalis tentang pentingnya perubahan dan perbedaan dan manfaatnya bagi kehidupan yang lebih baik. Mereka perlu dinformasikan bahwa ada banyak masyarakat suatu bangsa berkembang justru karena mereka begitu terbuka pada perubahan dan perbedaan, sambil tetap intensif memberi penguatan pada karakter manusianya sehingga mereka tetap rasional, kritis, selektif dan konstruktif dalam menerima perubahan. Hal penting yang perlu ditekankan adalah elaborasi yang proposional antara aksesibilitas pada perubahan dan perbedaan, dibarengi dengan penguatan etika dan karakter kebangsaan melalui kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi politik dan budaya. Elaborasi yang seimbang ini menjadi imperative agar perubahan tidak mencelakakan dan menimbulkan benturan peradaban.

Untuk kepentingan bangsa Indonesia, upaya membawa masyarakat bangsa untuk keluar dari kerangkeng fatalisme bukan pekerjaan mudah. Pemerintah dan masyarakat sedapat mungkin membangun komitmen dan tanggung jawab untuk keluar dari pengaruh fatalism, baik dalam tataran konsep maupun praksis. Salah satu yang dibisa ditawarkan adalah dengan menentukan arah kebijakan pembangunan etika kehidupan berbangsa dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini: (1) Menginternalisasi sejak dini tentang pentingnya menghargai nilai-nilai perubahan dan perbedaan dalam konteks bangsa Indonesia yang multikultur; (2) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin Negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat; (3) Mengarahkan orientasi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual serta amal kebajikan; (4) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Bahan Bacaan:

Jaya, Andi Cahaya, 2018. “ Konsep *Nation State* dalam *Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam pada Abad Ke-19 M*” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. XVIII No.2, hal. 139.

“Politik Identitas dan Ancaman Bernegara”, *Kumparan*, 15 November 2018.

Pals, L. Daniel, 1996. *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama* (terjem. Inyia R. Muzir, dkk). Yogyakarta: IRCiSoD.



Kritik Fenomenologi Terhadap Karakter Politik Artifisial²⁶

Fenomenolog kritis, Edmund Husserl (1859-1938) pernah membahas tentang prinsip intensionalitas di mana manusia selalu terarah pada sesuatu yang lain selain dirinya. Untuk mengarahkan diri pada 'sesuatu yang lain' secara baik, seseorang perlu melakukan reduksi fenomenologis, yakni kerelaan untuk 'kembali kepada sesuatu itu sendiri' (back to the things themselves) dan biarkan 'sesuatu' itu berbicara berbicara apa adanya. Berikutnya, prosedur 'epoche' yakni menanggalkan semua asumsi tentang 'sesuatu' itu untuk

²⁶ SKH Pos Kupang, 19/08/2016.

memunculkan esensinya. Setelah menangkap esensinya, seseorang membuat abstraksi transendental untuk memaknai secara utuh hakekat dari 'sesuatu' itu sebagai realitas yang obyektif. Realitas obyektif inilah yang menjadi basis utama dalam membentuk kesadaran manusia. Proses fenomenologi kritis seperti ini mengajak setiap orang untuk tidak berhenti pada asumsi-asumsi, pengertian dan keputusan artifisial, tetapi membentuk kesadaran yang utuh, mendalam dan nyata tentang realitas kehidupan.

Selanjutnya fenomenolog ontologi, Martin Heidegger (1889-1976) mengedepankan konsep *Das Sein* tentang hakekat manusia sebagai yang terlahir 'ada dalam dunia', 'ada bersama dunia' dan 'ada di sana' (Bakker, 2000). Manusia dan pikirannya tidak terlepas dari alam dunia dan senantiasa berpikir dari dan untuk alam dunia. Dalam 'Ada dan Waktu' (Being and Time), manusia selalu berada dalam proses 'mengada' secara berkelanjutan (continuum) dari sejak masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Supaya manusia senantiasa menyadari dirinya dalam ruang dan waktu, maka perlu ada proses refleksi dan afirmasi diri dalam mencermati hubungannya dengan sesama dan alam. Hal ini penting karena ada fenomena, di mana modernitas dan politik demokrasi kurang menghargai alam dan manusia dengan 'menjajahnya' hanya untuk kepentingan sesaat. Manusia modern dengan otoritas pengetahuannya telah membuat 'kelupaan akan yang Ada' (forgetfulness of Being) dan menyebabkan terputusnya modus 'mengada' (modes of being uncontinued), serta terlepasnya keterikatan (uninvolvement) manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Secara faktis, fenomena ini telah menyebabkan

distansi, diskrepansi dan disparitas, yang berdampak pada kerusakan, kemiskinan, kemelaratn dan konflik.

Konstelasi politik mondial, nasional lokal telah memberi persepsi bahwa politik sebagai aktivitas yang bertujuan untuk menyejahterakan dunia dan manusianya sangat penting dan bermanfaat. Hampir semua keputusan strategis yang terpaut dengan hajat hidup orang banyak, sebagian besar sangat ditentukan oleh keputusan politik. Dalam kekinian politik Indonesia, determinasi keputusan politik sangat signifikan untuk tingkat pusat sampai daerah, baik pada konteks pembuatan perangkat peraturan perundang-undangan dan turunannya, pembentukan berbagai keputusan/kebijakan, maupun penyusunan berbagai program berikut penganggarnya. Bermutu, bermanfaat dan berdaya gunanya esensi dari semua perangkat perundang-undangan, keputusan/kebijakan dan program serta penganggaran sangat bergantung pada kualitas keputusan politiknya, berikut niat baik dari mereka yang terlibat di dalamnya.

Kecelakaan diduga bisa saja terjadi, bila dalam proses pembuatan, pembentukan dan penyusunannya, baik pemerintah pusat/daerah, partai politik dan para politikus terjebak pada ego sektoral. Indikasi prematur, parsial, *overlap*, dan mubazirnya beberapa perangkat perundang-undangan, keputusan/kebijakan, program dan penganggaran, menandakan bahwa beberapa keputusan politik masih sangat artifisial dan tidak esensial serta sarat dengan konflik kepentingan. Bisa juga alur dalam

membuatnya telah menafikan studi komprehensif tentang kebutuhan, kemendesakan, asas kebermanfaatan, kepatutan, kelayakan, keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan alam sosial. Konflik horisontal, kerusakan alam, kemiskinan dan kemelaratan merupakan akibat logis dari keputusan-keputusan politik yang tidak populis dan esensial. Kecelakaan ini bisa berlanjut ketika para politikus berjuang atas nama rakyat, tetapi tujuan adalah kepentingan diri dan kelompok (partai); atau di depan publik menunjukkan konsistensi perjuangannya, tetapi di belakang ruang sidang terlibat dalam kompromi, kamufase, aktivitas politik ‘dagang sapi’ dan tukar guling/barter kepentingan.

Menurut saya, ada beberapa hal yang menyebabkan bangsa terjerembab dalam karakter politik artifisial seperti ini. Pertama, kemampuan sebagian politikus untuk memahami realitas obyektif secara utuh dan menyeluruh, belum cukup diberdayakan. Apa yang menjadi substansi kebutuhan dan harapan masyarakat tidak teridentifikasi dengan baik karena mereka belum memiliki keberanian untuk ‘masuk’ dalam realitas yang utuh tentang kehidupan nyata masyarakat. Keberanian menjadi tumpul, selain karena tidak adanya kekuatan dan kesadaran dalam diri, juga karena terkooptasi oleh kepentingan politik kepartaian. Alhasil, perjuangan dan keputusan politik hanya berbasis asumsi saja dan sifatnya temporal, insidental maupun aksidental. Kedua, moralitas dan intelektualitas politik belum cukup mendukung perjuangan dan keputusan politik yang berdampak signifikan bagi kemaslahatan umum. Sebagian politikus memberdayakan kemampuan moral dan intelektualnya untuk sekedar membuat rasionalisasi terhadap keputusan

politik yang awalnya berpihak pada kepentingan umum, tetapi di balik itu, terimplisit reduksi kepentingan sektarian. Bahkan tidak jarang, keputusan politik sangat tidak menyentuh substansi, karena hanya merujuk pada pendapat pihak yang memiliki otoritas (*appeal to authority*), dan hanya berdasarkan *reason*, intuisi dan pengetahuan umum belaka. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efisiensi, efektivitas dan bahkan akuntabilitas ketika mengimplementasikan keputusan tersebut pada masyarakat.

Dalam terang pemikiran Husserl dan Heidegger, politik adalah fenomena di mana terjadi aktivitas pengalaman, perjumpaan dan sekaligus pertentangan seseorang dengan sesama dan dunianya. Berbagai aktivitas ini merupakan bentuk substansial dari penghayatan akan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan “yang ada di dalam dunia” (*Being in the world*). Politik sebagai fenomena juga dimaknai sebagai bentuk pengungkapan cara berada manusia yang selalu mengalir di antara keniscayaan dan kebebasan, bertahan di antara kesia-siaan dan kebermaknaan, bergumul di tapal batas antara tatanan (*order*) dan tanpa tatanan (*chaos*) (Miskawi, 2012). Mereka yang terlibat dalam politik wajib hukumnya untuk memahami apa yang menjadi keharusan dan kebebasan dalam berjuang, kerelaannya untuk berkorban, dan keberaniannya untuk membongkar tatanan yang membelenggu dunia dan sesamanya. Politik membentuk kepribadian seseorang untuk tidak berhenti pada asumsi dan artifisialitas saja, tetapi berani masuk pada inti terdalam dari hakekat diri sesama, dan mampu membaca esensi kebutuhan, kemendesakan, dan harapan masyarakat.

Politik mengafirmasi karakter manusia yang tetap mempertahankan kesejatian dirinya di tengah segala tawaran kepalsuan dunia dan kepentingan sesaat. Ia senantiasa berdiri kokoh ketika berpapar dengan ekstremitas dan kontingensi dunia, dan terampil mengurai perkara rasionalitas tentang yang benar dan yang salah dan perkara moralitas tentang yang baik dan yang buruk. Ia berani merefleksi tentang kerapuhan dan kesementaraan dirinya, keterbatasan intelektualitas dan moralitasnya, tetapi tetap berupaya memberdayakan diri sesuai dengan kapasitas/potensi dirinya. Politik membuat seseorang agar matang, handal dan beradab dalam memposisikan dirinya di tengah dunia dan berjuang untuk kebaikan umum. Pada akhirnya, politik merupakan fenomena tentang pembuktian kualitas dan integritas diri, yang akan divalidasi lewat konsistensi dan koherensi antara kata (*logon*) dan perbuatan (*ergon*). Konsistensi dan koherensi antara kata dan perbuatan tidak saja menggambarkan kualitas karakter manusia, melainkan juga merupakan modalitas dalam mengaktivasi dan melegitimasi seluruh mobilitas politik.

Bahan Bacaan:

- Hasbiansyah, O., 2008. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator (Journal of Communication)* Vol. 9 (1) hal. 163-180.
- Mohanty, J. N. 1982. *Edmund Husserl's Theory of Meaning*. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Kincheloe, J.L. 2008. *Knowledge and Critical Pedagogy. An Introduction*. 3rd. Springer Science and Business Media B.V.
- Kant, Immanuel, 2005. *Critique of Practical Reason, 1965* (*Kritik Atas Akal Budi Praktis* (terjem. Nurhadi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, Budi F., 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.



National Self Determination dan Literasi Politik²⁷

Mengentalnya kecenderungan isu SARA, munculnya ujaran kebencian, kampanye hitam, gerakan massa sektarian dan politik uang dalam proses Pilkada cukup memberi kesimpulan bahwa literasi politik di Indonesia mengalami stagnasi, bahkan mungkin mengalami degradasi. Pemerintah sudah berusaha menangkal kecederungan ini dengan UU ITE No. 11/2008 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, tetapi tampaknya belum cukup kuat untuk mengontrol dan mengawal ekspresi-ekspresi publik yang reaktif, eksplosif

²⁷ SKH Pos Kupang, 03/11/2016.

dan negative. Sistem perundangan-undangan dan segala bentuk turunannya tentu baru dapat berjalan efektif, efisien serta bermanfaat bila didukung oleh kesadaran politik yang matang dan kritis dalam diri masyarakat. Bila kesadaran politik masyarakat sudah matang dan kritis, instrumen-instrumen legal formal ini tidak hanya menyentuh aspek pencegahan, pengontrolan dan penyelesaian, namun bisa juga secara intensif menyentuh aspek edukatif dan membangun kesadaran baru. Pada negara-negara yang sudah maju politik demokrasinya, instrumen-instrumen legal formal bertugas hanya untuk mengawal jalannya prosesi politik. Masyarakat sendirilah yang secara bertanggung jawab, bebas dan otonom mengambil bagian dalam berbagai peristiwa politik. Mereka dengan sadar menjadikan peristiwa politik sebagai momentum untuk membuktikan komitmen dalam memajukan negara bangsa (nation state).

Kesadaran politik yang tinggi ini juga tercermin dari bebasnya masyarakat dari sekat-sekat primordial suku, ras dan agama. Tingkat kesadaran dan rasionalitas politik yang tinggi membuat masyarakat tidak cepat terpengaruh oleh ujaran kebencian, kampanye hitam dan politik uang. Masyarakat telah berangkat dari kesadaran historis yang memberi pelajaran bahwa sekat-sekat primordial dalam segala bentuk dan manifestasinya telah mencelakakan demokrasi dan telah terbukti meruntuhkan tatanan kehidupan serta membuat mereka tidak mandiri sebagai warga bangsa. Dalam catatan sejarah politik demokrasi, negara-negara yang masih kuat dan kental isu-isu primordialnya telah mengalami penurunan kualitas

demokrasi, yang berdampak signifikan pada perlambatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurunnya kualitas demokrasi ini berpengaruh pula secara simultan pada rendahnya kemampuan penentuan diri bangsa (National Self Determination). Mudah-mudahan masyarakat dikendalikan oleh organisasi massa tertentu, terprovokasi oleh isu-isu sektarian berbasis SARA, tersandera oleh paham dan ekstrim yang secara massif mengerogoti sendi-sendi karakter kebangsaan, dan terjajah oleh ideologi bangsa lain, menjadi beberapa indikator mengenai rendahnya determinasi diri suatu bangsa .

National Self-Determination (NSD) adalah konsep ideologi politik internasional yang muncul setelah perang dunia II, ketika negara-negara sekutu mundur dan melakukan dekolonisasi di negara imperium Asia dan Afrika. Kaum sekutu ini terpaksa menerima konsep NSD yang telah menjadi prinsip dasar dalam politik internasional dan melihat praktek kolonisasi sudah tidak relevan lagi (Scott, 2001). Berakhirnya imperium Eropa menyebabkan lahirnya banyak negara independen baru dan secara perlahan menerapkan NSD. Dalam piagam PBB, NSD diakui sebagai sistem politik yang berprinsip dasar bahwa setiap individu, masyarakat dan bangsa memiliki kebebasan dan otonomi dalam menentukan masa depannya. Woodrow Wilson menyebut NSD sebagai sebuah ide yang mencerahkan dan bersinonim dengan esensi politik demokrasi sebagai jalan menuju tatanan politik dunia yang lebih baik. Tatanan politik ini menjadikan suatu negara bangsa dapat

mengendalikan diri sendiri, memiliki identitas yang jelas, berkarakter kuat, memiliki otonomi dan kebebasan dalam membangun, melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan ideologi baik dari luar maupun dari dalam, bebas dari intimidasi dan provokasi dari pihak lain yang sengaja menghancurkan sendi-sendi kebangsaan, mengendalikan diri dan menentukan secara mandiri arah pembangunan bangsanya. NSD merupakan sebuah sistem politik yang mengelaborasi antara konsep ideologi dan praktik politik yang bertujuan semata-mata demi kepentingan warga bangsanya. Dalam pandangan humanistik, NSD muncul dari kesadaran diri warga masyarakat (*civics self consciousness*) untuk menentukan yang terbaik bagi diri dan bangsanya. Untuk kawasan Asia, Republik Korea, Jepang dan Singapura adalah contoh sempurna dari negara-negara yang menerapkan NSD secara baik, dan telah mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan pada masyarakatnya.

Menurut saya, dalam konteks kekinian Indonesia, NSD menjadi sangat mendesak untuk digalakan, bukan saja untuk menangkal berbagai bentuk ideologi bangsa lain yang berusaha menjajah bangsa, tetapi juga untuk mengeliminasi keterarahan primordial dan paham-paham sektarian yang tidak jera-jeranya berupaya memporakporandakan entitas kesatuan bangsa. Salah satu upaya untuk mendukung konstruksi determinasi diri bangsa adalah membangun kultur, sistem dan bangunan politik bangsa demi meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakatnya. Jika belajar dari bangsa yang sudah maju kesadaran politiknya, membangun kultur, sistem dan bangunan politik bangsa

untuk meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat tidak bisa terlepas dari peran sentral dan strategis literasi politik. Peran literasi dalam memberi kecerdasan politik dan berbagai dimensinya sangat vital sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat, baik dalam pola pikir dan pola laku politiknya. Literasi politik yang berwawasan demokratis mengarahkan masyarakat pada pembentukan kapasitas kritis, keingintahuan yang benar, dan otonomi yang bertanggung jawab. Literasi politik maju dan berkualitas tergambar dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat demokrasi tentang nilai-nilai universal, etis dan politis, serta penghargaan terhadap hak dan martabat manusia dalam memenuhi segala kebutuhan kodrati, meningkatkan derajat dan martabat diri, dan mendapatkan pengakuan terhadap milik pribadi.

Literasi politik menjadi faktor dan kekuatan politik yang utama. Secara negatif, literasi politik yang dikemas melalui pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan refleksi dari kekuatan-kekuatan politik dari rezim pemerintahan yang ada. Namun secara positif mesti dilihat sebagai bagian dari penjabaran ideologi politik bangsa yang bertujuan untuk membentuk identitas kebangsaan, pengakuan dari bangsa lain dan membantu kelancaran program-program pemerintah. Karena itu, tak dapat dihindari bahwa literasi politik menjadi komponen penting bagi terbentuknya sikap politik warga negara agar dapat mendukung jalannya sistem pemerintahan yang baik dan benar. Negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi sangat memerlukan literasi politik demi memberdayakan masyarakatnya, khususnya generasi muda

dalam memahami demokrasi. Dengan literasi politik yang mendalam, mereka dapat memahami dengan benar esensi kekuasaan, makna dari pilar-pilar demokrasi, variabel-variabel yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga politik, dan efek-efek dari kehadiran lembaga-lembaga politik bagi masyarakat. Kaum muda diberdayakan, dilatih dan dididik secara terencana, kontinu dan berkelanjutan agar memiliki kesadaran politik yang matang, kritis dan dinamis, dan kemudian dapat menjadi andalan dalam membangun bangsa.

Dalam membangun NSD, literasi politik selain berperan sebagai *maintenance* atau *persistence* untuk memelihara sebuah sistem politik bangsa, tetapi juga untuk *nation and character building* yang kuat. Literasi politik juga berperan untuk membangun budaya demokrasi yang berkarakteristik rasional, aktif, bekerja sama, solider, patuh pada sistem politik, percaya pada pemerintah dan pada sesama warga negara. Dalam perspektif literasi politik, budaya demokrasi yang dibangun mesti berbasiskan pada nilai-nilai egalitarian, pluralisme, keterbukaan, dialogis, persuasif, distribusi kekuasaan dan oposisi yang membangun. Dalam budaya demokrasi, literasi politik merupakan suatu proses dialogis antara pemerintah dan lembaga-lembaga politik (DPR dan Partai Politik) sebagai pemberi pesan dan masyarakat sebagai penerima pesan. Pesannya bisa dalam bentuk nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik, program dan kebijakan pembangunan. Melalui literasi politik ini, masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik, program dan kebijakan pembangunan dan secara kritis memberi penilaian

terhadapnya. Penilaian kritis masyarakat bermanfaat agar pemerintah dan lembaga-lembaga politik dapat mengevaluasi diri dan berbenah ke arah yang baik.

Bahan Bacaan:

Kusama, Bayu Mitra A. 2018. “Literasi Politik Menuju Tahun Demokrasi’, *STIA BLITZ*, Mei-Agustus.

Sutisna, Agung. 2018. “Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstekstual” www.Academia.edu.

Satibi, Iswanda, 2018. “Memahami Literasi Politik yang Mengelitik” . www.Academia.edu.

Winarno, Budi. 2001. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Zamroni, MA. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Supardan, Dadang, 2015. *Manusia, Kekerasaan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*. Bandung: Rizqi.



Pilkada, Kehendak Berkuasa dan Kepercayaan Publik²⁸

Dalam karyanya *Beyond Good and Evil, The Genealogy of Morals* dan *The Will to Power*, filsuf eksistensialisme Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) menegaskan bahwa untuk menandakan eksistensi seseorang di dunia, salah satunya adalah berkuasa. Berkuasa menjadikan seseorang bukan hanya sekedar ‘to live’ saja, tetapi juga ‘to exist’. Berkuasa membuat hidup lebih hidup, bermakna dan tidak mengambang. Berkuasa berarti memberi makna terhadap hakikat dan keberadaan dirinya, yang tereksplisitasi melalui keterampilan-keterampilan hidup yang sadar, cerdas, gesit,

²⁸ SKH Pos Kupang, 19/10/2016.

tangkas, tanggung jawab, percaya diri dan terbuka pada perkembangan. Nietzsche memberi tekanan, manusia yang sadar akan keberadaannya adalah manusia yang menghayati suistabilitas eksistensinya, dan terus menerus terarah pada cita-cita yang tinggi untuk menjadi “Manusia Super” (Über- Mensch). “Manusia Super” ini memiliki karakteristik seperti memiliki keterampilan akal, mental dan keterampilan menjadi pemimpin, berorientasi pada nilai keadilan, kebenaran dan kebaikan; membebaskan, mencerahkan, dan senantiasa membangun optimisme hidup, serta bertanggung jawab dan memiliki kepercayaan terhadap diri, sesama dan dunianya.

Secara positif, Nietzsche memandang dunia sebagai tempat yang sangat baik, polos dan strategis untuk mengaktualisasikan ‘kehendak berkuasa’ ini. Sebagai tempat yang baik dan strategis untuk dikuasai, seseorang disarankan untuk menyelami secara mendalam dimensi-dimensi terdalam dari dunia, termasuk apa saja yang menjadi ‘kebutuhan-kebutuhannya’. Dunia yang terbentuk dalam kepolosan, tidak memiliki awal, selalu terbuka untuk ditafsirkan, belum memiliki kebenaran, belum berpihak dan belum memiliki orientasi, sangat membutuhkan kreasi dan aktivasi gagasan manusia. Karena itu kehadiran manusia menjadi harapan agar dunia memiliki nilai yang bermakna dalam dirinya, memiliki potensi untuk berkembang, berorientasi dan berpihak pada kebaikan, kebenaran dan keadilan. Harapan ini tercapai bila manusia memiliki kehendak berkuasa dengan motivasi yang luhur dan tulus, penuh sukacita, optimis, senantiasa terarah pada nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan, baik yang dibutuhkan

oleh dunia maupun yang diinginkan oleh manusia sendiri. Manusia harus menyadari betul bahwa berkuasa atas dunia bukan kesempatan untuk mengalahkan, mengeksploitasi, dan memanfaatkan dunia untuk kepentingan egotarian, manipulatif dan pragmatis, tetapi menjadi momen afirmasi diri dan hidupnya secara lebih baik. Afirmasi yang penuh sukacita ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dunia atas manusia dan kepercayaan manusia atas dirinya. Kehendak untuk berkuasa memotivasi manusia untuk menjadi subyek yang aktif dan percaya diri dalam memberi makna dan menata dunia dengan baik dan manusiawi.

Disadari atau tidak disadari, ketika terjun dalam kontestasi Pilkada, pasangan calon sudah memiliki kehendak berkuasa/memimpin dalam dirinya. Secara positif kehendak berkuasa/memimpin ini didorong oleh berbagai motivasi untuk memberi makna pada dunia, yang dapat dibaca melalui paparan visi-misi dan program kerjanya. Menurut saya, dalam momentum Pilkada, kehendak (motivasi) berkuasa dapat menjadi sesuatu yang imperatif, inheren dan perlu diapresiasi. Karena justru dengan ‘libido’ berkuasa dan motivasi yang luhur di baliknya, pasangan calon sudah pasti akan memiliki semangat dan militansi untuk menjadi pemenang dalam kontestasi politik tersebut. Munculnya kehendak berkuasa dan berikut motivasinya dapat menjadikan Pilkada sebagai momentum strategis dan potensial demi mencari pemimpin ‘manusia super’. Dalam momentum ini, masyarakat akan menilai secara lugas dan

gamblang tentang calon pemimpinnya, baik yang sudah tergambar dalam visi misi dan program kerja, tetapi juga bertolak dari sosok, profil, rekam jejak dan ideologi yang dianut. Pada sisi lain, kontestasi Pilkada menjadi ajang untuk mengkonstruksi bentuk kepercayaan masyarakat bukan saja pada pasangan calon yang akan dipilih, tetapi juga membangun investasi kepercayaan dirinya akan suatu harapan dan optimisme hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dengan modal investasi kepercayaan ini, masyarakat kemudian akan secara adil, benar dan bijaksana dalam menilai dan menentukan pilihan politiknya.

Menurut saya, elaborasi antara variabel tingkat kepercayaan dan kehendak (motivasi) berkuasa dari pasangan calon dan tentunya partai pendukung, sudah tentu menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sangat bersinggungan dengan motivasi dari pasangan calon untuk berkuasa. Sudah dipastikan bahwa dalam konteks Pilkada, kepercayaan sebagai gambaran kualitas kemauan dan keyakinan mental psikologis masyarakat terhadap pasangan calon tertentu, menjadi begitu fundamental. Adapun ciri-ciri fundamental kepercayaan masyarakat dalam berpolitik, saya adaptasi dari pemikiran McKnight, dkk. (2002), yakni: Pertama, keyakinan masyarakat terhadap motivasi seseorang ketika ingin berkuasa/memimpin (*trusting belief*) yang diukur dari niat baik (*benevolence*), kejujuran dan ketulusan (*integrity*) dan kemampuan (*competence*). Kedua, maksud masyarakat percaya pada seseorang untuk memimpin (*trusting intention*) yang didasarkan pada kesediaan menerima konsekuensi dari kepercayaannya itu

(willingness to depend) dan kesediaan subyektif masyarakat untuk memberi informasi kepada pihak lain tentang orang yang dipercayainya (subjective probability of depending).

Selanjutnya, bangunan kepercayaan politik publik kepada calon pemimpinnya mestinya didukung oleh kajian yang kritis terhadap motivasinya untuk berkuasa. Menurut Coleman (2000), sekurangnya ada tiga jenis motivasi untuk berkuasa yang sangat berdampak pada perspektif dan model praktiknya, yakni: (1) Kognitif, di mana seseorang berkuasa karena ingin menerapkan konsep, teori, gagasan, ideologi seperti radikalisme, pluralisme, liberalisme, unitarisme, dll. (2) Motivasional, di mana seseorang mau berkuasa karena ingin mengafirmasi diri dan memuaskan diri (personalized power orientation) dan meningkatkan status sosial (socialized power orientation). (3) Moral, di mana seseorang berkuasa untuk menegakan egalitarianitas, utilitarianitas, partisipasi, kontrol dan pemberdayaan masyarakat. Bila motivasinya bersifat kognitif maka ada kecenderungan untuk menerapkan *Power Over*, yakni kekuasaan untuk memaksa masyarakat dalam mencapai tujuan, ideologi dan pemikiran tertentu. Kekuasaan ini kerap dipakai untuk meningkatkan kompetisi, prestasi, prestise dan determinasi diri bangsa (national self determination). Bila bersifat motivasional, maka akan menerapkan *Power Under*, yakni kekuasaan yang dapat membuat masyarakat tidak berdaya dan bergantung (powerlessness and dependence), dibelenggu, ditindas, kaku, irasional dan stagnan. Masyarakat dieksploitasi untuk kepentingan pemuasaan diri dan peningkatan status sosial dari penguasa serta kroni-kroninya. Sedangkan jika bersifat moral, maka kekuasaan yang diterapkan adalah *Power*

With yang menekankan tentang efektivitas aksi bersama/kooperatif. Kekuasaan ini dikembangkan secara bersama-sama, saling melayani dan tidak bersifat memaksa. Kekuasaan ini membuka pintu untuk berkembangnya perspektif dan praktik *Power To*, yaitu kekuasaan untuk memberdayakan dan membebaskan (empowered and independent) masyarakat dari situasi yang membelenggu dan membuatnya terbuka, bertindak bebas, serta memiliki rasa harga diri, efikasi diri, dan kepercayaan diri untuk berkembang.

Momentum pilkada adalah kesempatan memurnikan motivasi untuk berkuasa, merajut kepercayaan masyarakat dan memupuk kepercayaan dalam diri pasangan calon. Melalui informasi dan kajian kritis terhadap sosok, profil, rekam jejak, visi-misi, program kerja, ideologi, isu-isu yang dikedepankan, pergerakan tim sukses, partai dan ormas pendukung, publik dapat melihat dan memahami apa yang menjadi motivasi pasangan calon untuk memimpin. Penglihatan dan pemahaman itu menjadi basis dan pegangan dalam membangun kepercayaan ketika memilih calon pemimpinnya. Sebaliknya untuk pasangan calon, dengan memurnikan motivasi untuk berkuasa/memimpin mereka dapat semakin percaya diri, bersemangat dan elegan dalam berkontestasi. Dia akan menjadi ‘manusia super’ yang militan dan bertanggung jawab saat berjuang dalam meraih kemenangan. Kepercayaan diri yang baik membuat pasangan calon semakin mencintai perjuangan hidup dan melihat kemenangan dan kekalahan sebagai bagian yang harus dihargai pada segala bentuk kontestasi.

Bahan Bacaan:

- Arifin, Jainul. 2014. “Konsep Kehendak Manusia dalam Pemikiran Nietzsche dan Mu’tazilah (Studi Komparatif)” , *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Deleuze, Gilles, 2002. *Fislafat Nietzsche*. Ikon Teralitera: Yogyakarta.
- Sunardi, St. 1996. *Nietzsche*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Nietzsche, Freiderich. 1885. “Maka Berbicaralah Zarathustra” (terjem.Dami N. Toda). Ernst Schmeitzner, Germany.
- Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.



Mencermati Hate Speech dalam Pilkada²⁹

Dua ungkapan ini, benar adanya: ‘Anda adalah apa yang anda tuturkan’ dan ‘Mulutmu adalah harimaumu’. Identitas seseorang atau sekelompok masyarakat salah satunya dicirikan oleh bagaimana dia berujar/berbahasa. Bahkan ada pepatah Melayu berujar ‘bahasa menunjukkan bangsa’. Pepatah ini bermakna, konten bahasa dan cara menuturkannya sering mengkonfirmasi tentang tinggi-rendah, maju-mundurnya peradaban suatu bangsa. Bahasa adalah keniscayaan dalam berkomunikasi masyarakat bangsa tertentu. Bangsa yang sejahtera salah satunya didukung oleh kecerdasan berbahasa/berujar. Kecerdasan

²⁹ SKH Pos Kupang, 19/11/2015.

berbahasa/berujar menjadi sangat relevan, karena dengannya masyarakat bisa saling mengerti dan memahami saat berdialog, menyampaikan ide, gagasan, wacana, opini.

Menjelang Pilkada 9 Desember 2015, persoalan ‘ujaran/tuturan’ menjadi krusial, ketika berbagai upaya menyakinkan dan mempengaruhi konstituen kadang terjebak pada kecenderungan bertutur demi membangkitkan sentimen kebencian pada pasangan calon lain. Menurut saya, bertutur kebencian (*hate speech*) lebih merusak dibandingkan kampanye hitam dan negative (*negative and black campaign*), karena cenderung tidak etis, *out of control*, sporadik dan brutal, yang selain merugikan pasangan calon lain dan pendukungnya, juga meresahkan masyarakat umum. Bila tidak dicegah dan diatur, maka momen pilkada bisa berpotensi friksi, konflik, kegaduhan dan kekacauan sosial yang berbias suku, ras, golongan dan agama.

Rasional dalam Berujar (Berbahasa)

Ernest Cassirer (1874-1945) mengisyaratkan, manusia selain sebagai makhluk social (*animal sociale*), tetapi juga makhluk bersimbol (*animal symbolicum*). Simbol dimanfaatkan manusia dalam berinteraksi, berrelasi dan berinterdependensi. Salah satu bentuk simbolnya adalah bahasa sebagai fasilitas yang efektif, efisien dan bermakna dalam membangun peradaban manusia. Filsuf Bertrand Russel (1872-1970) dan Ludwig Wittgenstein (1889-1951) menegaskan, bahasa merupakan simbol yang logis dan jelas dalam memberi identitas terhadap fakta/peristiwa hidup manusia. Berbahasa yang logis, baik,

dan benar mencerminkan secara positif gambaran diri seseorang, masyarakat dan kehidupannya.

Secara teoritis, George L. Trage (1949) dalam *Studies in Linguistics: Occasional Papers* menuturkan tentang komponen penting dalam berbahasa, yakni: *Fonologi*, terkait ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadinya, fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. *Morfologi*, terkait struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara pembentukannya. *Semantik*, terkait makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. *Sintaksis*, terkait satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain, hubungan satu dengan lainnya, serta cara penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. *Leksikologi*, terkait kosa kata suatu bahasa dari berbagai aspeknya. Namun secara teknis praktis, ada berapa unsur dalam berbahasa/berujar yang perlu diperhatikan secara serius, yakni: *apa yang dikatakan, siapa yang mengatakan, kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana mengatakannya*. Unsur-unsur ini menjadi pendukung kuat dalam membuat format tutur dan isi dalam berkomunikasi. Perkara format tutur dan isi menjadi vital ketika masyarakat sudah memiliki teknologi tingkat tinggi dalam berkomunikasi dan berpengaruh signifikan pada perilaku berbahasa.

Cara bertutur/berbahasa modern yang langsung, vulgar, tanpa neko-neko, penuh singkatan, gaul dan berbias/bersayap sering menghilangkan esensi martabat, sopan satun, kehormatan, keadilan, dan perasaan personal dan sosial. Bahkan ada cara berujar yang begitu ‘telanjang’, ekspresif, impresif, reaktif, provokatif, dan agitatif dalam mengumbar kebencian, ketidaksukaan, dan kemarahan

pada seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki identitas suku, rasa, agama, golongan dan agama tertentu. Norma dan nilai dalam berbahasa mengalami degradasi yang menjadi pemicu maraknya berbagai ekse negatif dan mengusik kenyamanan umum.

Upaya normalisasi, standarisasi, revitalisasi dan reklamasi bahasa menjadi sangat mendesak untuk diprogramkan agar kemampuan, keterampilan dan kecerdasan berbahasa tetap terpelihara. Unsur-unsur cerdas dalam berbahasa diedukasi secara kontinyu untuk membangun masyarakat Indonesia yang rasional-komunikatif.

SE tentang Hate Speech dalam Ber-Pilkada

Pada 8 Oktober 2015, telah terbit Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech). SE ini merujuk pada KUHAP, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Masyarakat Indonesia mengapresiasi munculnya SE ini. Ekspektasinya, SE ini akan mengantisipasi berbagai potensi ‘kerusakan’ sosial akibat cara-cara bertutur yang destruktif pada eskalasi politik sebelum dan sesudah pilkada.

Dalam SE nomor 2 huruf (f) dan (g), dinyatakan bahwa bentuk dan manifestasi ujaran kebencian adalah

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual. Sementara pada huruf (h) dinyatakan tentang media yang digunakan untuk memfasilitasi ujaran kebencian seperti orasi kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, pamflet.

Mencermati tiga poin penting ini, maka yang mesti diperhatikan pasangan calon, pendukung, partai politik, dan konstituen, adalah tetap menjaga iklim yang kondusif dalam ber-pilkada. Sangat positif dan konstruktif, bila setiap elemen terkait, memahami, memaknai dan menindaklanjuti SE ini dalam pola pikir dan pola laku politik yang baik dan benar. Upaya mawas, kontrol dan kendali diri dalam ‘berbahasa/berujar’ menjadi imperatif moral-sosial untuk mencegah berbagai eksese buruk, demi menjaga stabilitas lokal dan nasional. Bertarung secara elegan, cerdas, dan santun menjadi nilai yang paling terhormat dan terpuji. Mari kita buktikan, pilkada akan menjadi momen potensial untuk pendewasaan demokrasi menuju masyarakat yang komunikatif, bermartabat dan sejahtera.

Bahan Bacaan:

- Fukundus, Yohanes, 2015. “Animal Symbolicum Menurut Ernest Cassirer”, *Skripsi*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Monk, Ray. 1990. *Ludwig Wittgenstein the Duty of Genius*. Jonathan Cape.
- Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Philosophy*, (terjem.) . Columbus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Thahjadi, S.P.L., 2004. *Pertualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (hate speech).
- KUHAP, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,
- UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
- UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Masyarakat Indonesia



Tantangan “GG” 2030 Bagi NTT

Selaras dengan gagasan *Sustainable Development Goals* (SDGs), muncul gagasan turunan yang mengemuka saat ini, yakni *Global Goals* (GG). Gagasan GG menjadi semakin menguat ketika 193 pemimpin dunia termasuk Indonesia pada 25 September 2015 ‘meratifikasi’ komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai 17 tujuan dunia dengan penekanan pada 3 isu fundamental. Tiga isu mendasar yang harus dicapai pada 2030, yakni upaya mengakhiri kemiskinan yang ekstrim, melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan memperbaiki perubahan iklim.

Menindaklanjuti komitmen untuk menyukseskan GG pada 2030, maka pemerintah maupun masyarakat

Indonesia harus menanggapi secara serius dan konsern dengan langkah-langkah progresif dan nyata. Pemerintah didesak segera membuat kajian yang komprehensif, holistik dan lintas sektoral tentang GG ini, dengan mengintegrasikan pemikiran dari berbagai *stakeholders* bangsa. Hasil kajian ini kemudian dikonversi secara praksis dan riil dalam penyusunan kebijakan, program dan langkah strategis. Berikutnya, pemerintah pusat membangun jalinan kerja sama secara sinergik dan simultan dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat tentang gagasan GG, yang diaksentuasikan pada tiga isu mendasar di atas.

Bagaimana dengan NTT?

Berdasarkan data BPS 2010, NTT berpenduduk sejumlah 4.953.967 jiwa. Sementara laju pertumbuhan penduduknya kira-kira sebesar 2,07%, dengan proyeksi penduduk baik laki-laki maupun perempuan pada 2020 sebesar 5.541.394.00. Selain itu, perkiraan kepadatan penduduk di NTT sebesar 96 jiwa/km², dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan.

Secara normatif dari perspektif *Bonus Demografi*, potensi jumlah penduduk ini *das sollen* berkontribusi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan NTT, dengan pengandaian adanya dukungan dari sektor atau kondisi-kondisi lain. Namun, menurut kami, catatan informasi data kualitatif dan kuantitatif di bawah ini memberi *trend* negatif, dengan pemaknaan bahwa *das sein*, belum cukup

kuatnya dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik bagi NTT ke depan.

Pos Kupang online, edisi Jumat 24 Januari 2014 memberitakan Bappenas yang merilis data tentang rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Menurut Bappenas, IPM NTT berkisar 68,77, jauh di bawah rata-rata IPM Nasional yang berkutat di 72,77. Statusnya berada pada urutan ke-3 terbawah sebelum Propinsi Papua dan NTB. Hal ini berarti indikator pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum cukup optimal dan memadai, baik dari segi infrastruktur (sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya), maupun suprastruktur (sumber daya manusia).

Dalam bidang pendidikan secara kasat mata menggambarkan bahwa masih cukup rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya prosentase putus sekolah. Banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah selain karena tidak adanya biaya, tetapi juga sarana prasarana pendidikan yang belum memadai. Banyak kegiatan pembelajaran dijalankan dengan fasilitas yang minim dan seadanya. Sementara di pihak lain, banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi seperti yang telah disyaratkan undang-undang, serta tingkat kesejahteraan guru masih memprihatinkan.

Bidang kesehatan juga mengalami situasi yang tidak kalah mencemaskan. Grafik kematian ibu dan bayi belum cukup signifikan bergerak menurun. Sementara fakta gizi buruk masih akrab dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan NTT. Makan empat sehat lima sempurna dan makan tiga kali sehari hanya merupakan retorika ekonomi

yang sangat utopis bagi kebanyakan masyarakat NTT. Sementara itu perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya rumah tangga yang belum memiliki kamar mandi, cuci dan kakus yang higienis. Selain itu, tingkat pelayanan kesehatan oleh paramedik juga belum optimal. Hal ini terkendala dengan jumlah tenaga paramedik yang masih minim, berikut tingkat pengalaman dan kualifikasinya yang banyak belum memenuhi standar/syarat undang-undang.

Data kualitatif berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kepulauan NTT menggariskan masih banyak rumah tangga miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan). Kondisi ini terkonfirmasi secara kuantitatif melalui data BPS (per Maret 2015), di mana jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2014 berjumlah 991,88 ribu orang (19.60 %) menjadi sebesar 1.159,84 ribu orang (22,61%) pada 2015. Ada peningkatan sekitar 168 ribu orang.

Realitas ini berlanjut pada kondisi minimnya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi. Minimnya biaya berdampak pada kurangnya jaminan masa depan, sebab tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga. Kebanyakan masyarakat NTT juga belum memiliki akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Menggejala dan meningkatnya angka pengangguran, urbanisasi, TKI ilegal, penjualan manusia (*human trafficking*), kekerasan rumah tangga, perceraian,

anak-anak terlantar, kriminalitas, penyakit sosial, disparitas sosial, sporadisasi kerusakan alam, dan menjadi konsekuensi logis dari kondisi di atas.

NTT Mesti Bangkit!

Fakta dan data empirik ini bisa saja memunculkan pesimisme untuk merdeka dari kerangkeng kemiskinan dengan berbagai dampak sistemik dan pengaruh gandanya (multiplier effect). Namun, kita tidak mungkin mau terjebak dalam fatalisme! NTT harus bangkit! Kita harus mampu menegaskan fakta ini! Pemerintah dan masyarakat harus responsif dan progresif membangun komitmen untuk menjawab tantangan GG ini. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota sampai kepada pemerintahan lurah/desa/RT-RW perlu menjalin koordinasi dan konsolidasi untuk merancang program-program yang berkelanjutan (sustainable living programme) dengan berbasiskan pada masalah kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup.

Partisipasi secara sinergis para tokoh masyarakat agama/adat, akademisi/peguruan tinggi, politisi, pegiat LSM, kaum muda/mahasiswa, dalam menyusun program tindak lanjut yang strategis dan praktis, menjadi suatu kemendesakan. Keikutsertaan berbagai komponen masyarakat ini bersinambung pada aktivitas informasi/sosialisasi, edukasi/advokasi, pemberdayaan/penguatan kepada masyarakat. Bila semua kegiatan ini berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, maka bukan tidak mungkin propinsi NTT mulai lepas bebas dari kungkungan

kemiskinan, ketidaksetaraan/ketidakadilan dan kerusakan alam. Kita harus bisa buktikan kepada Indonesia dan kepada dunia, 2030 pasti ada perubahan yang signifikan dari NTT!

Bahan Bacaan:

Ishartono & Santoso Tri Raharjo, 2016. “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan” *Share: Social Work Journal*, Vol. 6, No. 2, hal. 154-272.

Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Today*. London: Addison-Wesley Publishing Company.

Marsh, Colin, 2008. *Studies of Social and Environment*. Pearson: Practice Hall.

Zevin, J. (2007). *Social Studies for The Twenty-First Century, Methods and Materials for Teaching in Middle and Secondary schools, (Third Edition)*. New York: Routledge Taylor and Francis Group

Forsyth T. 2003. *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge: London.



Mengenal Dimensi-Dimensi Revolusi Mental³⁰

Pada opini SKH Pos Kupang edisi 14 Agustus 2015 dengan judul: *HUT Kemerdekaan RI: Kemanakah Revolusi Mental Jokowi-JK?*, saya telah membahas tentang urgensi dari sosialisasi dan edukasi konsep dan praksis revolusi mental, yang sudah menjadi semangat dasar roda pemerintahan Jokowi-JK. Sosialisasi dan edukasi bertujuan agar adanya keberlanjutan dan internalisasi konsep maupun praksis revolusi mental. Revolusi mental mesti menjadi *branding* dan *ikon* yang inheren dengan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

³⁰ SKH Pos Kupang, /09/2015.

Revolusi mental dapat diartikan sebagai gerakan radikal dan progresif yang menuntut setiap orang untuk merubah dan memperbaiki mental dalam menghayati kehidupannya. Sebagai gerakan yang radikal dan progresif, perubahan dan perbaikan tersebut seharusnya secara signifikan dan implikatif mengemuka dalam mental cara berpikir, berperilaku dan berkemampuan hidup. Menurut ideal saya, perbaikan dan perubahan mental berpikir, berperilaku, berketerampilan hidup dapat menyangkut sekurang-kurangnya tiga dimensi, yakni: personal, sosial dan budaya.

Dimensi Personal

Revolusi mental sangat berhubungan dengan eksistensi seseorang. Revolusi mental sejatinya harus menegaskan personalitas seseorang dalam memiliki karakter-karakter manusiawi. Revolusi mental merubah hakikat manusia dari hanya sekedar bertindak manusia (*actus hominis*), menuju pada pribadi manusia yang mampu bertindak manusiawi (*actus humanus*). Revolusi mental perlu merubah personalitas manusia Indonesia pada berbagai tindakan-tindakan manusiawi yang berdampak pada kondisi dan situasi bersama yang lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat.

Tindakan-tindakan manusiawi ini termanifestasi dalam beberapa modus: *Pertama*, modus berpikir, yakni perubahan pola konvensional, tradisionalistik, fundamentalistik, monolitik dan monokulturalis yang cenderung destruktif menuju pola berpikir yang lebih

modern, moderat, multikulturalis yang mengarah pada hal-hal yang konstruktif. Modus ini membentuk pribadi yang mampu berpikir positif (*positive thinking*) terhadap orang lain dan terhadap perubahan. Cara berpikir ini juga berkaitan dengan keberanian berpikir alternatif, *out of box*, kritis dan selektif; berani keluar dari kegelapan budi; ketidaktahuan menuju keadaan berpengetahuan. Karakter-karakter cara berpikir ini menjadikan manusia Indonesia lebih berdaya dan diperhitungkan oleh manusia lain.

Kedua, modus bersikap yang terbentuk dalam perubahan dari sikap egosentris, egosektoral, arogan, antikritik, eksklusif, defensif, ambigu menuju pola laku yang mementingkan kebaikan umum (*bonum commune*), rendah hati, mampu menerima kritik, inklusif, bermoral, beretika, dan terbuka pada masukan dan mampu mengambil keputusan secara arif dan bijaksana. Banyak masalah yang terjadi dewasa ini, antara lain: pelecehan, pembunuhan, perang, dan korupsi, bukan karena masalah pola pikir, tetapi lebih karena pola sikap yang tidak cukup berkualitas. Banyak orang Indonesia yang memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi karena tidak didukung oleh sikap yang baik, tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama, melawan norma dan hukum yang berlaku.

Ketiga, modus berterampil atau berkemampuan hidup (*life skill*) yang terpapar dalam kemampuan untuk bertahan, berjuang dan meningkatnya kualitas hidup. Pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang,

diafirmasi dengan berbagai keterampilan hidup yang berkualitas secara jasmani maupun rohani dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan politik. Revolusi mental berorientasi pada terbentuknya pribadi yang mampu bekerja keras, menghindari mental instan, pragmatis dan *easy going*, lebih mementingkan proses, dan menghindari kerja yang menghalalkan segala macam cara.

Dimensi Sosial

Revolusi mental juga menyangkut hubungan relasional dalam suatu masyarakat bangsa. Idealnya revolusi mental mampu membangun dan membentuk relasi sosial yang konstruktif dan mengandung rasa adil, setara, nyaman dan sejahtera. Revolusi mental mesti menjadi proses untuk memfasilitasi perubahan kondisi masyarakat dari yang berkarater arkais-brutal, yang melihat sesama sebagai lawan (*homo homini lupus*), kepada kondisi masyarakat yang melihat sesama sebagai sesama manusia (*homo homini socius*), dimana harkat dan martabatnya dihargai; atau ke tingkat taraf masyarakat bangsa yang lebih madanis-religius, yakni melihat sesama sebagai gambaran Tuhan yang menciptakannya (*homo homini Deus*). Revolusi mental menjadi basis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia secara lebih bermartabat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kebaikan dan kebenaran umum.

Indonesia terkenal dengan keramahan, kesantunan, tolong menolong, dalam bermasyarakat. Revolusi mental semestinya menegaskan karakter-karakter sosial ini agar

tidak kemudian hilang, tetapi justru dapat diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya dengan kurikulum pewarisan yang berdesain jelas, sistematis dan terstruktur.

Dimensi Kultural

Revolusi mental berkaitan dengan kemampuan manusia dalam suatu masyarakat bangsa untuk memperjuangkan, mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan serta memberdayakan kehidupannya pada kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Revolusi mental ini berkaitan dengan dimensi kultural, di mana berlangsungnya pembudayaan (kulturas) dalam membentuk karakter manusia dalam memahami dan menghayati budaya sebagai bagian dari kesehariannya. Revolusi mental menjadi wahana agar entitas, identitas dan integritas budaya masyarakat Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat berbudaya lain. Revolusi mental memformasi pribadi-pribadi manusia Indonesia yang arif, bijaksana, berintegritas, inklusif dan demokratis.

Kulturas yang bermakna terkonfirmasi dari menguatnya sistem pengetahuan, mampu berteknologi tingkat tinggi, berbahasa secara baik, benar, dan santun, membangun sistem ekonomi berbasis kerakyatan dan kemaslahatan umum, membangun sistem sosial politik yang demokratis, membangun kearifan lokal, menjaga lingkungan alam, membangun kehidupan yang bersih dan sehat, membangun kerja sama dan jaringan kerja yang luas dan bermanfaat.

Bahan bacaan:

- Indriyanto, Bambang, 2014. “Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 20, No. 4, Desember.
- Yusuf, Ahmad Mukhlis, 2018. *Revolusi Mental Pelayanan Publik; Praktik Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik*. Gramedia: Jakarta.
- Fromm, Erich, 1988. *Manusia Bagi Dirinya; Suatu Telaah Psikologis-Filosofis tentang Tingkahlaku Manusia*. Jakarta: Akademika.
- George, C. Boeree. 2004. *Personality Theories*. Yogyakarta: Primasophie.
- Fromm, Erich, 1988. *Manusia Bagi Dirinya; Suatu Telaah Psikologis-Filosofis tentang Tingkahlaku Manusia*. Jakarta: Akademika.



Cerdas dan Etis dalam Pilkada³¹

Pilkada serentak 9 Desember 2015 merupakan wahana demokrasi, agar masyarakat daerah dapat secara langsung memilih pemimpinnya. Ada 269 kepala daerah yang akan dipilih, 9 provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur, 36 kota untuk wali kota dan wakil walikota, dan 224 kabupaten untuk bupati dan wakil Bupati. Terdapat 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia atau 53 persen wilayah di Indonesia yang menggelar pesta rakyat ini. Sementara itu, ada 852 pasangan calon yang terdiri dari 21 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 untuk pemilihan bupati/wakil bupati, serta

³¹ Tidak dipublikasikan.

117 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Sedangkan pemilih untuk pilkada serentak ada sekitar 100 juta.

Menilik dari besarnya persentase wilayah, maka suksesnya pilkada serentak di beberapa daerah ini menjadi parameter bagi tatanan demokrasi nasional.

Pilkada serentak merupakan yang pertama kali dalam sejarah bangsa, yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 201 (ayat) UU No. 1 tahun 2014, UU No. 1 tahun 2015, dan UU No. 8 tahun 2015. Sebagai yang pertama, pilkada serentak ini menjadi barometer untuk pelaksanaan demokrasi pada masa-masa mendatang. Bila berdasarkan evaluasi, Pilkada serentak ini sangat konstruktif untuk membangun kedewasaan demokrasi khususnya, dan membantu pembangunan bangsa pada umumnya, maka pendekatan atau model demokrasi seperti ini tetap menjadi pilihan yang terbaik bagi negara dan masyarakatnya. Asumsinya, proses demokrasi yang dijalankan secara baik, benar, dan bermanfaat, maka akan berdampak positif bagi kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

Masyarakat Pemilih yang Cerdas

Banyak pihak berharap penuh bahwa selain pilkada serentak menjadi momentum pemenuhan hak-hak politik masyarakat secara langsung, inklusif dan demokratis, tetapi juga menjadi ruang untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karenanya, demi

memunculkan pemimpin yang berkualitas pada lima tahun mendatang, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan menggunakan hak suaranya secara cerdas. Masyarakat harus bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah pemilik (subyek) dari pesta demokrasi ini untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi dirinya. Selain itu, tingginya keterlibatan masyarakat berkontribusi baik terhadap kuatnya struktur fondasi demokrasi bangsa.

Sebagaimana pesta demokrasi sebelumnya, pilkada serentak ini berpotensi timbulnya masalah dan konflik. Masalah dan konflik yang bisa saja muncul dalam tataran teknis berikut proses penyelenggaraannya, menuntut sikap cerdas dari masyarakat. Menurut saya, kecerdasan masyarakat terletak pada: *Pertama*, mendalamnya pemahaman terhadap visi, misi serta program kerja Pasangan calon (Paslon) yang sudah didiseminasikan melalui sosialisasi dan kampanye. Masyarakat yang cerdas dalam memilih kepala daerahnya, pasti rasional dan dapat menghindari unsur irasional, emosional dan primordial. *Kedua*, memilih secara jujur, adil, terbuka dan tidak terjebak dalam permainan politik busuk dan uang dalam segala bentuknya, yang secara yuridis menciderai amanat pasal 47 UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada, tetapi juga secara fundamental merusak citra nurani sebagai manusia.

Ketiga, mampu mengelola isu-isu, berbagai provokasi/agitasi dan upaya-upaya lain untuk memecah belah masyarakat sebelum dan sesudah pemilihan. Tingginya eskalasi iklim politik akan menyebabkan panasnya atmosfer relasi sosial.

Dalam rangka ini, masyarakat perlu mengendalikan pikiran, sikap dan perkataan (ujaran), yang berpotensi menciptakan konflik horizontal dan gejala separatis, sesuai dengan isi Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang *Hate Speech* (Opini Pos Kupang, 19/11/2015).

Keempat, mampu mengawal independensi para penyelenggara Pilkada (KPU, Panwas) sesuai UU No. 15/2011, UU No. 1/2015, Peraturan KPU No. 2/15; dan netralitas PNS, TNI/Polri sesuai UU ASN No. 5/2015 dan Surat Edaran Menteri PANRB No. B/2355/M. PANRB/07/2015. Masyarakat yang cerdas berhak melapor kepada pihak-pihak yang berwajib bila ada oknum Lembaga penyelenggara pilkada dan PNS, TNI/Polri yang tidak independen dan tidak netral.

Pasangan Calon yang Etis/moral

Selain KPU, pemerintah, masyarakat pemilih dan partai politik; pasangan calon juga adalah pelaku utama dalam pilkada serentak. Sebagai pelaku utama, Paslon berperan sentral karena sudah menjadi figur umum, yang pikiran, sikap dan perkataannya sangat berpengaruh terhadap suasana kebatinan masyarakat. Karenanya, mereka harus mengedepankan integritas dan akuntabilitas etis/moral politiknya, dan mampu mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan/keriangan, termasuk menerima fakta kekalahan. Selain memiliki *hard skills* dalam menyakinkan visi, misi dan program kerjanya, para Paslon mesti memiliki *soft skills* seperti bersaing sehat,

elegan, jujur, santun, ikhlas, dan siap kalah. Dalam pilkada, kemenangan memang menjadi target, tetapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Hindari permainan politik yang kasar, saling gesek, dan cenderung anarkis. Ibarat bermain sepakbola, Pilkada adalah *friendly match*, dengan spirit *fair play*, dan menjauhi peran sebagai *match fixer* yang melakukan mufakat/sekongkol dengan pihak tertentu untuk pengaturan skors/hasil pemilihan demi suatu kemenangan.

Salah satu imperatif etis/moral pilkada adalah menghindari politik busuk (uang). Praksis politik uang dalam segala manifestasinya secara substansial menganggangi spirit pilkada sebagai yang jujur dan adil. Lebih penting dari itu, sangat merusak hati nurani Paslon itu sendiri dan mental masyarakat. Ungkapan Latin mengatakan: *crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit*, yang berarti bahwa bertambahnya cinta akan uang, sebesar itu pula nafsu untuk mengeruk uang. Politik uang selain akan menciderai demokrasi, tetapi juga akan menciptakan impresi, persepsi dan gambaran negatif masyarakat umum tentang sosok pemimpinnya nanti. Merancang permainan busuk (uang) demi kemenangan politik, sama hal dengan merancang kegagalan. Kegagalan itu adalah kegagalan moral. Ingatlah ungkapan Seneca (4 SM-65 M) ini: “Yang memperoleh imbalan dari sebuah kejahatan adalah dia yang melakukannya (*cui prodest scelus, is fecit*).

Bahan Bacaan:

Suseno, Franz Magnis, 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Hariantanti, Runi, 2003. “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II, No. 1.

Hasanuddin, Iqbal, 2018. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, Oktober

Ulumuddin, 2006. “Jurgen Habermas dan Hermeneutika Kritis; Sebuah Gerakan Revolusi Sosial”. STAIN Datokarama Palu, *Jurnal Hunafa*, Vol. 3 No. 1 Maret.

Fukuyama, Francis & Samuel P. Huntington, 2005. *The Future of The World Order (Masa Depan Peradaban dalam Cengkeraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme)*, Yogyakarta:IRCiSod,

UU No. 15/2011, UU No. 1/2015,

Peraturan KPU No. 2/15;

UU ASN No. 5/2015

Surat Edaran Menteri PANRB No. B/2355/M. PANRB/07/2015.



Mahar Politik: Pertarungan Uang dan Kualitas Diri³²

Terminologi ‘mahar’ menjadi sangat fenomenal di tengah hiruk pikuk pencalonan para kandidat kepala daerah pada pilkada serentak 9 Desember 2015. Mahar secara umum dapat dipahami sebagai sejumlah materi (uang, perhiasan, dll) yang diberikan oleh seseorang laki-laki dan keluarganya kepada seorang perempuan dan keluarganya ketika meminang perempuan tersebut untuk dijadikan isteri atau anggota keluarga dari pihak laki-laki. Dalam sistem perkawinan patrilineal ‘mahar’ selain sebagai bentuk kerelaan (tidak harus), tetapi juga pada sisi tertentu merupakan suatu yang imperatif (keharusan) dari pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan.

³² SKH Flores Pos, 03/08/2015.

Besarnya kecilnya mahar sudah pasti sangat tergantung pada kualitas-kualitas tertentu yang melekat pada diri perempuan dan keluarganya dan dalam diri laki-laki dan keluarganya. Kualitas-kualitas itu antara lain, strata, status atau posisi sosial, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Pada umumnya kualitas-kualitas ini berpengaruh secara signifikan dan berkorelasi secara positif terhadap besar kecilnya mahar yang diberikan atau diwajibkan. Namun, selain kualitas-kualitas di atas yang berpengaruh pada besar kecilnya mahar, juga tergantung pada lobi-lobi yang biasa dilakukan pihak keluarga yang difasilitasi oleh seorang utusan dari masing-masing pihak keluarga. Kemampuan-kemampuan dari lobi dari wakil keluarga cukup menentukan berhasil tidaknya kesepakatan dua keluarga tentang mahar tersebut.

Dalam perspektif sosiologi perkawinan mahar diartikan sebagai bentuk tanda jadinya hubungan perkawinan antara dua sejoli. Mahar menjadi menjadi manifestasi material tentang sahnya hubungan suami isteri. Bila urusan mahar ini sudah selesai, maka sangat terbuka lancarnya urusan selanjutnya seperti akad nikah baik secara keagamaan dan juga dalam bentuk resepsi dan keramaian lainnya. Dalam sistem kekerabatan di beberapa tempat di nusa tenggara, mahar sering diistilahkan dengan ‘belis’. Belis atau mahar ini secara legal, yuridis, dan formal tidak pernah diatur. Semuanya tidak didasarkan pada hitam di atas putih (tertulis), tetapi lebih berdasarkan pada kepercayaan, yang berujung pada kesepakatan dan komitmen. Peningkaran

dan penyelewengan terhadap kepercayaan, komitmen dan kesepakatan tidak secara signifikan berdampak pada sanksi hukum formal.

Secara teoritik istilah mahar tidak pernah dikenal dalam dunia perpolitikan. Istilah umum yang mungkin mendekati istilah mahar adalah biaya politik (*political cost*) dan politik uang (*money politic*). Menurut para pakar dan praktisi politik, biaya politik lebih dilihat secara positif sebagai sesuatu yang inheren dalam kegiatan ideal politik, tetapi politik uang merupakan konsep dan praktik negatif, yang mencederai makna ideal politik. Namun sampai saat ini secara faktual empiris, baik biaya politik dan politik uang sulit didistingksi secara jelas. Seringkali orang beralih melakukan politik uang dengan menyebutnya sebagai biaya politik. Selanjutnya, apakah istilah ‘mahar politik’, meski tidak memiliki teori, dan diatur secara ekspilist dalam undang-undang, dapat menjadi terminologi baru dalam konsep dan praksis politik?

Istilah mahar rupanya dengan mudah diadopsi dan diadaptasi dan bahkan dikawinkan dengan istilah politik sehingga muncullah frasa ‘mahar politik’. Dengan merujuk pada ulasan tentang mahar di atas tadi, maka saya dapat mengartikan ‘mahar politik’ sebagai salah satu manifestasi material dalam urusan politik. Dalam hal ini urusan tentang pinang meminang antara para pasangan bakal calon dengan pihak partai yang menurut UU Pemilu memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat suatu kabupaten/kota. Dalam konteks politik, pihak perempuan adalah partai atau gabungan partai yang memiliki

keterwakilan di DPR; sedangkan pihak laki-laki adalah para bakal calon yang melamar pada partai atau gabungan partai. Tentang besar kecilnya mahar politik, sama seperti urusan adat perkawinan, sangat tergantung pada pertimbangan ‘kualitas’ yang melekat pada bakal calon kepala daerah dan partai yang calon pengusung.

Pertimbangan ‘kualitas’ ini sudah pasti merujuk pada rekam jejak nasional partai tersebut pada perolehan suara pemilu legislatif 2014 lalu. Partai-partai besar yang meraup suara besar, sudah tentu menjadi incaran dari banyak paket bakal calon kepala daerah. Logika pasar mengatakan bahwa ketika permintaan banyak, maka harga pasti naik. Dalam hal ini menjadi jelas, mahar politik partai besar, pasti besar pula. Selanjutnya semakin besar kredibilitas satu partai, maka semakin banyak banyak pula yang berminat padanya.

Selain calon partai pengusung berkualitas dan kredibel secara nasional, tentu juga berkualitas dan kredibel secara lokal. Partai pengusung harus memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi, dibuktikan dengan prosentase keterwakilan yang potensial dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian, semakin berkualitas dan kredibel partai pengusung dan semakin banyak keterwakilannya di DPR, maka bisa diproyeksi, semakin besar pula mahar yang diminta dan diberikan oleh pelamar. Dengan demikian, bakal calon kepala daerah yang memiliki pundi-pundi tebal saja yang berpeluang mendapatkan kendaraan partai besar dan memenuhi syarat minimal mendaftar sebagai paket calon kepala daerah.

Pada sisi lain, kualitas peminang juga turut berpengaruh pada kesepakatan mahar. Persisnya, kesepakatan mahar semakin lancar, bila paket bakal calon dianggap bisa ‘dijual’ dalam pertarungan pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Kualitas itu tampak pada tingkat popularitas dan elektabilitas paket bakal calon. Paket bakal calon yang memiliki popularitas sekaligus elektabilitas yang tinggi sudah barang tentu menjadi salah satu input dalam kesepakatan mahar politik. Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dan pemaparan visi dan misi dari para bakal calon dalam berbagai tingkatannya bisa ditafsirkan sebagai mekanisme formal untuk membuat kesepakatan tentang mahar politik ini.

Dalam mekanisme ini partai bisa melihat kredibilitas, kualitas, rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi-kompetensi yang dimiliki bakal calon kepala daerah. Paket bakal calon kepala daerah yang visioner, kapabel dan kompeten dapat menjadi bahan pertimbangan partai untuk diterima lamarannya, yang berarti memberi ruang pada kesepakatan mahar. Pada sisi ini, mahar politik bisa jadi memiliki makna baru, bukan lagi hanya sebagai manifestasi material saja, tetapi juga manifestasi kualitas. Dalam hal ini mahar politik adalah frasa mahar politik yang dapat dimaknai manifestasi kualitas dan kredibilitas dari bakal calon kepala daerah maupun manifestasi kualitas dan kredibilitas dari partai pengusung.

Selain itu, variabel kualitas dan kredibilitas bakal calon dan calon partai pengusung, persoalan kesepakatan besar kecilnya mahar, juga tergantung pada variabel intervensi,

yakni kemampuan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala daerah, berikut timnya. Para bakal calon yang memiliki kemampuan lobi yang efektif, baik dalam dirinya sendiri maupun timnya, bisa saja mendapatkan tanda tangan partai tertentu dengan mahar yang kecil bahkan gratis. Dalam hal ini, kecerdasan sosial atau jaringan politik dari bakal calon menjadi kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Ada banyak paket atau orang yang memenangkan pertarungan politik di beberapa tempat, bukan karena faktor uang, tetapi karena memiliki kemampuan lobi, kemampuan sosial, dan jaringan yang luas.

Bila kesepakatan mahar politik ini sudah terjadi antara pihak partai atau gabungan partai dan bakal calon, maka keduanya bisa berpeluang masuk pada tahap pencalonan kepala daerah. Sesuatu yang harus diingat bahwa meskipun politik dan kegiatannya diatur secara yuridis formal di Negara ini, tetapi urusan ‘mahar politik’ ini tidak pernah diatur secara yuridis formal. Karena itu, pengingkaran, penyimpangan dan inkonsistensi dalam kesepakatan tidak akan pernah dapat diselesaikan melalui domain hukum. Dengan demikian, bila ada kasus di mana satu partai atau gabungan partai ternyata telah menerima mahar dari bakal calon lain, maka akan sangat sulit menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Dari hasil telusuran di atas, terdapat beberapa poin yang bisa mengemuka. *Pertama*, meskipun mahar politik tidak pernah dikonsepsikan dalam teori politik, undang-undang dan AD/ART Partai, tetapi secara faktual-empirik

terjadi dalam konstelasi politik jelang pilkada. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi. Kenyataan ini menegaskan hipotesis bahwa politik itu mahal, tidak murah dan tidak gratis. Berdasarkan hipotesis di atas, siapa saja yang ingin terlibat dalam dunia politik, tentunya harus mempersiapkan pundi-pundi yang tebal. Meskipun ada orang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni, tetapi tidak didukung dengan pundi-pundi yang tebal, maka akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi partai.

Kedua, mahar politik dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai manifestasi material semata-mata, tetapi juga menjadi manifestasi kualitas. Manifestasi kualitas yang ada dalam diri paket bakal calon kepala daerah dan dalam diri partai pengusung. Bila ada bakal calon yang sakunya tebal tetapi bila tidak didukung oleh kemampuan-kemampuan sebagai seorang pemimpin, maka pasti partai akan mempertimbangkan untuk tidak mengusungnya. Meskipun dalam kasus tertentu, ada partai yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan kualitas tersebut. Partai yang kredibel dan konsisten pasti menjadikan pertimbangan kualitas sebagai yang utama dalam membuat kesepakatan mahar politiknya. Hal ini akan berlanjut pada tanggung jawab politik dari partai pengusung untuk memenangkan paket yang diusungnya.

Konsep dan praksis mahar politik, dalam konteks pembelajaran politik menjadi sangat relevan dan implikatif. Relevansi dan implikasinya mungkin terletak pada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi negatif, di mana politik diidentikan dengan uang dan kemahalan. Selain itu itu, fenomena mahar

politik sebenarnya perwujudan dari mental instan dan pragmatis. Mental instan dan pragmatis ini terkonfirmasi dari gaya-gaya hidup modern yang serba mau cepat selesai dan menyepelekan proses. Implikasinya adalah orang bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, termasuk dengan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Keadaan ini mengartikulasikan tentang diri yang memiliki nafsu untuk berkuasa (*desire to power*) yang tidak terbandung lagi. Nafsu berkuasa yang sangat tinggi menjadikan kekuasaan sebagai obyek yang bisa dibeli dan digadaikan. Dengan uang kekuasaan dan jabatan dapat dibeli; selanjutnya kekuasaan dan jabatan dapat ‘membeli’ (mendatangkan kembali) uang yang sudah dikeluarkan; bahkan lebih banyak dari yang sudah dikeluarkan dulu untuk membeli kekuasaan dan jabatan.

Sisi kedua adalah sisi positif, di mana kualitas menjadi garansi yang mengedepan dewasa ini. Setiap pribadi dan pasangan yang mau bertarung dalam kancah apa saja, termasuk politik, mesti memupuk dan memelihara kualitas-kualitas tertentu dalam dirinya. Era sekarang adalah era kompetensi dan profesionalitas. Oleh karena itu, kesiapan diri dengan berbagai kecerdasan, baik personal maupun sosial (jaringan), menjadi suatu yang tidak boleh tidak (*condition sine qua non*). Dewasa ini, masih banyak institusi politik yang kredibel dan bonafit, secara konsisten menegakan prinsip kualitas dalam merekrut anggota atau paket yang hendak diusungnya. Untuk institusi politik seperti ini, uang menjadi pertimbangan kesekian. Bahkan ada partai tertentu yang memiliki tanggung jawab politik dengan mem-*back up*, memfasilitasi, dan bahkan membantu secara

finansial proses pemenangan paket tertentu, yang dianggap berkualitas, populer dan memiliki kemampuan elektoral yang baik dalam pertarungan politik pemilihan kepala daerah. Bentuk tanggung jawab politik ini merupakan eksplisitasi dari komitmen dalam membuat kesepakatan mahar politik.

Bahan Bacaan:

Yunus, Rohim Nur, 2018. “Mahar Politik Calon Kepala Daerah” Buletin Hukum & Keadilan “Adalah”, Vol. 2 No. 1e.

Runi, 2003. “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II, No. 1.

Hasanuddin, Iqbal, 2018. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, Oktober



Kapasitas, popularitas dan Elektabilitas dalam Pilkada Serentak³³

Pilkada serentak yang dipentaskan pada 9 Desember 2015 mendatang sudah pasti mengisyaratkan tentang bagaimana seharusnya para paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempersiapkan diri. Menurut saya, beberapa variabel di bawah ini mesti dipertimbangkan secara matang dan komprehensif oleh para paket dan tim suksesnya bila ingin menang dalam kontestasi pilkada serentak nanti. Variabel-variabel tersebut, yakni: kapasitas, popularitas, dan elektabilitas.

³³ SKH Flores Pos, 07/09/2015.

Kapasitas Diri

Variabel kapasitas yang dimaksudkan adalah kesiapan diri. Variabel ini menjadi penting ketika seseorang hendak menang dalam suatu pertarungan atau kompetisi. Suatu kemenangan ditentukan sejauh mana kesiapan seseorang atau tim dalam berkontestasi. Dalam konteks pilkada, kapasitas kesiapan paket berkaitan dengan biaya dan material politik. Dalam politik uang bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatu sudah pasti membutuhkan biaya; dari biaya alat peraga sampai sosialisasi dan saksi; dari biaya untuk ‘serangan udara’ (iklan televisi, radio, SMS, media sosial), maupun ‘serangan darat’ melalui pemasangan baliho, leaflet, stiker, dan atribut lainnya).

Kesiapan yang berikut adalah fisik dan mental. Fisik dari para calon harus kuat ketika harus mensosialisasikan visi, misi dan program kerja secara intens dan kontinu. Mental paket juga akan ditempa ketika berhadapan dengan berbagai bentuk kampanye negatif, kampanye hitam, atau permainan politik uang dan politik busuk. Yang juga penting adalah kesiapan mental dalam menerima fakta kekalahan. Hal ini perlu disadari untuk mengantisipasi gejala-gejala horizontal, dikarenakan ada paket yang tidak siap menerima kekalahan, lantas melakukan protes, provokasi, destruksi tanpa memperhatikan prosedur hukum.

Popularitas

Dalam domain politik, popularitas dapat dipahami sebagai kondisi ‘terkenalnya’ satu paket oleh masyarakat publik. Semakin satu paket dikenal atau terkenal, maka

tingkat popularitasnya juga semakin tinggi. Jelasnya, popularitas paket dapat dicapai melalui strategi sosialisasi dan promosi secara manifest maupun laten. Dalam perspektif psikologi politik, variabel popularitas lebih mengarah pada level ketertarikan yang sifatnya simpatik, artifisial, atau pada faktor ‘luar’, seperti sering muncul di media massa, penampilan fisik yang gagah, kemampuan retorika yang mumpuni, dll. Karena pemahaman inilah, maka ada yang menganggap variabel popularitas hanyalah sebagai pendukung atau komplementer sifatnya. Tingkat popularitas tidak serta merta menjadi penentu kemenangan paket, karena popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas.

Meskipun demikian, tidak berarti paket dan timnya menganggap sepele variabel ini. Variabel ini perlu dieksplorasi untuk mendapat penguatan dan pengayaan yang pada gilirannya dapat mendukung tingkat elektabilitas. Oleh karena itu, upaya-upaya yang lebih intens dan efektif dalam mensosialisasikan paket menjadi tugas nan berat. Visi, misi, program kerja yang bagus dari satu paket tidak akan dikenal, jika tidak disosialisasi dan dipromosi secara sporadik dan berkelanjutan.

Elektabilitas (Elektoralitas)

Semenetara itu, elektabilitas dipahami sebagai atribut dalam diri satu paket yang membuat masyarakat politik tertarik untuk memilihnya. Kalau variabel popularitas dipahami sebagai faktor ‘luar’ (simpati), maka variabel elektabilitas merupakan faktor ‘dalam’ (empati) yang

mendeterminasi tingkat penerimaan (akseptabilitas) dan keterpilihan (elektoralitas). Dalam hal ini, masyarakat politik menerima dan memilih satu paket bukan karena melihat kemasan luar, tetapi lebih dari itu, melihat apa yang menjadi konten (substansi dan esensi) visi, misi, program kerja dan tindakan-tindakan serta pengalaman-pengalaman nyata dari paket tersebut. Paket yang memiliki visi, misi, program kerja, tindakan-tindakan serta pengalaman-pengalaman nyata, yang menyentuh jantung kehidupan masyarakat, maka paket itulah yang akan dipilih. Masyarakat memilih paket yang bersangkutan karena menganggap visi, misi, program kerja dan tindakan-tindakan serta pengalaman-pengalaman nyata adalah bagian dari kehidupannya.

Pertimbangan elektabilitas paket menjadi sesuatu yang sangat mendasar karena berpengaruh signifikan, dominan dan determinan pada kemenangan dalam pilkada. Karena itu, selain upaya mengelaborasi elektabilitas dengan dukungan popularitas, yang tidak kalah pentingnya adalah membuat pergerakan-pergerakan praktis, nyata dan persuasif untuk semakin mendekatkan ‘diri’ paket dengan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi dan menguatkan pilihan politik masyarakat terhadap paketnya.

Interdependensi Ketiga Variabel

Variabel kapasitas, popularitas dan elektabilitas menjadi tiga kekuatan penentu (driving force) dalam meraih kemenangan pilkada. Ketiga variabel ini bersenyawa secara kohesif sehingga satu menggandaikan yang lainnya.

Kapasitas yang tidak didukung oleh elektabilitas dan popularitas akan menjadi konyol, sama seperti popularitas yang tidak dikonfirmasi dengan tingkat elektabilitas dan kapasitas akan sia-sia; atau elektabilitas yang tidak diafirmasi oleh kapasitas dan popularitas akan menjadi gagal total.

Menurut saya, dalam peristiwa politik kapan, di mana saja, dalam bentuk apa saja, tiga variabel dapat bersenyawa secara kuat bila di dalamnya mengandung anasir-anasir di bawah ini. *Pertama*, Kapasitas diri atau kesiapan diri dalam bentuk uang, material dan mental. *Kedua*, Kapabilitas atau kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan, ketrampilan dan ketangkasan dalam memimpin, menguasai peluang, tantangan dan masalah dalam masyarakat. *Ketiga*, akseptabilitas. Suatu kondisi keterterimaan, kecocokkan dan kepantasan seseorang menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati masyarakat karena memiliki karakter pengayom, pemecah masalah dan pemberi harapan bagi hidup masa depan yang lebih baik.

Bahan Bacaan:

- Muradi, Putri Dyah Tantri E., 2017. “Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogon*, Vol. 3 No. 1.
- Sobari, Wawan, 2013. “Elektabilitas Mitos Pemilih Rasional: Debat Hasil-Hasil Riset Opini Menjelang Pemilu 2014”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1, Juni.
- Yunus, Rohim Nur, 2018. “Mahar Politik Calon Kepala Daerah” *Buletin Hukum & Keadilan “Adalah”*, Vol. 2 No. 1e.

Runi, 2003. “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II, No. 1.

Hasanuddin, Iqbal, 2018. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 2, Oktober



Melawan Terorisme dengan Social Critical Skills³⁴

Serangan bom di Sarinah Jakarta (14/01/2016) kembali merusak suasana kebatinan masyarakat bangsa Indonesia, setelah Bom Bali (01/10/2005) dan Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta (17/07/ 2009). Sebagai masyarakat awam, kita sendiri tidak akan pernah tahu (kecuali pihak inteligen) kapan, di mana, bagaimana teror bom terjadi, dan siapa pelakunya. Yang mungkin dapat kita lakukan adalah tetap menjaga kewaspadaan yang rasional dan mendukung serta terlibat dalam upaya deradikalisasi. Menurut saya, kewaspadaan rasional dan upaya-upaya deradikalisasi bisa dibangun melalui pengembangan dan

³⁴ SKH Pos Kupang, /04/2016.

penguatan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak kritis dalam menjalani keseharian sebagai warga masyarakat. Berpikir, bersikap dan bertindak kritis adalah kemampuan-kemampuan sosial (*Social Critical Skills/SCS*), yang dapat menjadi salah satu strategi fundamental untuk mencegah dan memecahkan masalah radikalisasi dan terorisme.

Negara-negara maju di Asia, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan China, sudah menjadikan pola-pola SCS sebagai bagian dari kehidupan masyarakatnya. Kebiasaan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial sudah menjadi *inheren* dalam kehidupan, terutama ketika mereka berhadapan dengan berbagai ancaman yang akan merusak tatanan hidup sosialnya. Terbukti, kecenderungan terorisme dan radikalisme pada negara-negara ini berkurang, yang berdampak sangat pesatnya pembangunan dan pengembangan kehidupan bangsanya.

Melawan Irasionalitas Terorisme dan Radikalisme

Mengapa SCS ini perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat? Saya bertolak dari pemahaman bahwa terorisme dan radikalisme selain sebagai fenomena lokal, tetapi juga merupakan fenomena global, yang dapat muncul karena berbagai sebab berikut ini: (1) Sentimen kesukuan dan nasionalisme yang berlebihan. Teror ini bertujuan untuk menghilangkan etnis atau bangsa tertentu; (2) Kemiskinan dan kesenjangan. Teror dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang tidak adil atau gap yang besar antara kaum kaya dan kaum miskin;

(3) Otoritarianisme pemerintahan suatu negara. Teror dibuat untuk mengugat sistem yang mengekang kebebasan hidup dari masyarakat sipil. (4) Teror sebagai bentuk protes terhadap berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan suatu negara atau kelompok masyarakat; (5) Radikalisme agama. Teror dibuat karena indoktrinasi ajaran-ajaran agama yang radikal dan cara pandang para pelaku yang menganggap penganut atau kelompok masyarakat lain sebagai ‘pengganggu’ rasa keagamaannya; dan (6) Marjinalisasi pengetahuan. Teror dilakukan oleh orang-orang yang lemah dalam berpengetahuan, setelah kaum yang kuat dalam pengetahuan mencuci otaknya. Kaum berpengetahuan dengan gampang menggiring mereka untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan demi untuk mencapai keinginannya. Mereka layaknya manusia robot yang dikendalikan dengan kontrol otak manusia lain.

Menurut Rubenstein (1987:xvii) dalam artikelnya: *A primary Internal Cause of Terrorism, Dictating to A Degree Its Philosophy, Tactics and Consequences*, penyebab utama dari adanya terorisme adalah ‘pengetahuan marjinal’ (*Disaffected intelligentsia*) atau kondisi minimnya pengetahuan dari seseorang atau sekelompok masyarakat. Nah, ketika suatu bangsa mengalami konflik sosial, politik, ekonomi, atau yang berbau SARA, maka mereka yang memiliki ‘pengetahuan marginal’ ini menjadi sangat potensial untuk dieksploitasi elit intelektual politik, ekonomi atau agama. Mereka diperdaya untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim, anarkis, bahkan susaidal demi kepentingan

terselubung dari elit intaelektual politik, ekonomi atau agama tersebut. Tidak cukupnya pengetahuan menyebabkan kaum ini ‘gagal paham’ dan ‘gagal mengerti’ terhadap bentuk provokasi, agitasi dan indoktrinasi yang sesat. Berikutnya, kaum elit intelektual tadi, secara masif, terstruktur dan sistematis menanamkan sentimen-sentimen yang berbau suku, ras, agama dan bangsa demi membangkitkan militansi ‘berani mati’ dari kaum ini.

Menurut saya, istilah ‘pengetahuan marjinal’ dari Rubenstein sangat identik dengan istilah ‘irasionalitas’ Jurgen Habermas (2002:19) dalam bukunya *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*. Menurutnya, irasionalitas adalah suatu kondisi dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki cukup informasi dan pengetahuan tentang perkembangan yang sedang terjadi di dunia. Hal ini membuat mereka menganggap apa yang sudah dijalankan selama ini sudah benar, tetapi pada pihak lain, mereka dengan mudah menjadi korban dari informasi dan perkembangan yang ada. Mereka mudah distir dan digiring oleh kaum berpengetahuan untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Jadi, radikalisme dan terorisme merupakan bentuk-bentuk irasionalitas, yang sering dimanfaatkan oleh kekuatan intelektual elit-elit tertentu.

Mengembangkan Konsep *Social Critical Skills*

Masalah terorisme dan radikalisme menjadi tanggung jawab bersama dalam mencegahnya. Merujuk pada

pemikiran Rubenstein dan Habermas tadi, maka salah satu yang harus ditumbuhkembangkan secara simultan dan komprehensif adalah SCS. SCS bisa dilakukan melalui kegiatan edukasi, advokasi, pencerahan dan diskursus, demi penguatan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial. Ketika mampu berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial, warga masyarakat bisa merasionalisasi berbagai isu, gerakan, agitasi, provokasi dan indoktrinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan itu, masyarakat tidak mudah terpengaruh dan tergiring untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif.

Pengembangan SCS ini secara strategis dapat diintegrasikan dalam pendidikan seperti kegiatan-kegiatan formal di sekolah-sekolah, informal di masyarakat (agama dan keluarga) dan non formal di tempat-tempat pelatihan/kursus. Pendidikan berbasis SCS ini akan meningkatkan *hard skills* warga masyarakat untuk mampu menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, membuat keputusan dan menemukan solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk persoalan terorisme. Selain itu, dapat juga meningkatkan *soft skills* dalam hal kerukunan, kesantunan, keterbukaan, saling menghargai, toleransi, bekerjasama, dll. Bertrand Russel dalam artikelnya *Education for Democracy* (1939:530) mengafirmasi, bangsa yang kuat tatanan sosialnya tidak terlepas dari upaya pendidikan dalam membangun karakter kritis sosial dalam diri warganya. Masyarakat yang rasional dan kritis memiliki dasar yang kuat dalam membangun tatanan sosial termasuk mencegah dan melawan berbagai bentuk terorisme dan radikalisme.

Bahan Bacaan:

- Wattimena, Reza AA, 2018. “Melampaui Terorisme: Pendekatan Komprehensif untuk Memahami dan Menangkal Terorisme”, *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, Januari-Juni.
- Pals, L. Daniel, 1996. *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujub Teori Agama* (terjem. Inyik R. Muzir, dkk). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yqodir, Zuly. 2012. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Fananie, dkk. 2015. *Radikalisme dan Perubahan Sosial*. Kerjasama dengan The Asian Foundation.
- Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.



‘Ancaman’ Mental Mekanik Pejabat Bagi Kepala Daerah³⁵

Parade pelantikan para Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada 9 Desember 2015 yang lalu, sudah berlangsung. Sebagai Kepala Daerah, tentu banyak agenda yang harus segera diimplementasikan sesuai amanah visi misi dan janji-janji kampanye. Dengan itu, euforia dan sukacita pelantikan sebaiknya tidak berlama-lama. Konsolidasi, koordinasi dan (re)strukturisasi kerja dengan pihak-pihak terkait di daerah menjadi sebuah kemendesakan, dan penting untuk segera dilakukan. Salah satu bentuk konsolidasi, koordinasi dan (re)strukturisasi yang perlu dilakukan oleh Kepala Daerah adalah penataan dan proses ‘recovery’ birokrasi

³⁵ SKH Pos Kupang, 26/02/2016.

pemerintahan yang sudah mengalami ‘porak poranda’ pada masa-masa Pilkada.

Salah salah satu bentuk penataan birokrasi bisa saja dimulai dari penunjukan dan penempatan pejabat-pejabat pemerintah yang kompeten dan profesional di bidangnya untuk menduduki jabatan strategis di instansi/unit kerja tertentu. Dalam perspektif konstruksi pemerintahan modern dan sesuai tuntutan *good and clean governance*, penunjukan dan penempatan pejabat dengan pertimbangan *the right man on the right place*, yang dapat dijaring melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), merupakan *conditio sine qua non*. Untuk beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di DKI Jakarta, penunjukan dan penempatan pejabat pemerintahan dibuat secara ketat melalui sistem lelang jabatan dengan menguji tingkat kompetensi dan profesionalitas (kapasitas dan kapabilitas) dan kinerja sebelumnya dari para calon pejabat. Bahkan, pada negara-negara tertentu sudah menerapkan sistem *meritokrasi*, di mana seseorang dipercayakan untuk menduduki sebuah jabatan, murni karena prestasi (kinerja) yang pernah dicapai dalam bidangnya.

Urgensi Birokrasi Berbasis Kompetensi, Profesionalitas dan Kinerja

Pendekatan penataan birokrasi dengan berbasis pada kompetensi, profesionalitas dan kinerja, sudah sangat umum dan modern dilakukan di negara-negara yang sudah berkembang wawasan pemerintahan dan politiknya.

Berdasarkan studi teoritik dan faktual, penerapan model penataan birokrasi pemerintah seperti ini dapat bertujuan untuk: *Pertama*, membangun sistem birokrasi yang kuat, kompeten, dan profesional sesuai dengan tuntutan pola-pola pemerintahan modern. *Kedua*, membangun postur birokrasi ramping tetapi efektif dan efisien; miskin struktur tetapi kaya kinerja. *Ketiga*, membangun sistem kerja pemerintahan yang bersih, baik dan etis (*good, clean, and ethical governance*) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. *Keempat*, membangun etos kerja organik, di mana para pejabat pemerintahan bekerja karena totalitas, dedikasi, dan *passion* yang tinggi terhadap pembangunan masyarakat daerah. Para pejabat bekerja selain karena tuntutan jabatannya, tetapi lebih dari itu, sebagai bentuk aktualisasi diri yang total untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat. Pejabat bermental kerja organik adalah mereka yang memiliki integritas kepribadian dan kredibilitas dalam mengemban jabatannya.

Pentingnya menerapkan sistem birokrasi yang merujuk pada kompetensi, profesionalitas dan kinerja ini, selain untuk tujuan-tujuan di atas, sebenarnya bermanfaat secara personal bagi para Kepala Daerah. Menurut saya manfaat yang pertama adalah menghilangkan beban ‘janji politik’ yang sudah dilontarkan secara sengaja atau tidak sengaja pada masa-masa kampanye kepada pribadi-pribadi untuk menduduki jabatan tertentu. Beban ‘janji politik’ ini sangat berat, bahkan bisa menjadi buah simalakama bagi Kepala Daerah. Banyak pemerintahan yang tidak berjalan

dengan baik, hanya karena terjerembab dalam politik balas budi dalam membangun sistem birokrasi pemerintahannya. Secara faktual empirik, sistem politik birokrasi pemerintahan yang dibangun dengan semangat ‘saya memberi supaya engkau memberi’ (*do ut des*) akan menjadi pedang bermata dua bagi Kepala Daerah dan masyarakat yang dipimpinnnya.

Selanjutnya, bila dikaji dari perspektif revolusi mental ala pemerintahan Jokowi-JK, manfaat dari penerapan sistem birokrasi yang berbasis kompetensi, profesionalitas dan kinerja ini adalah bagian dari upaya mengeliminasi mental mekanik yang lagi mewabah dalam diri para pejabat pemerintahan saat ini. Mental mekanik adalah mental yang terkondisi oleh *automatically system* dari sebuah sistem pemerintahan. Ada pejabat yang melakukan tugas utama, pokok dan fungsinya hanya karena jabatan yang melekat padanya. Kreativitas, inisiasi, kemandirian, dan dedikasi sering mengalami proses degradasi dan hibridisasi (kebiri) oleh mental mekanik ini. Mental mekanik ini secara masif membangun kultur senang membuat ‘asal bapak senang’; bahkan secara struktural dan sistematis membangun ‘kerajaan kecil’ di instansinya. Selain itu, mental ini secara laten membentuk egosektoral dan arogansi pada pribadi pejabat yang tergambar dalam perilaku mati-matian mempertahankan jabatan, meskipun mengalami ‘gagal kinerja’, terindikasi korup dan berperilaku amoral. Bentuk-bentuk lain sebagai polarisasi dari mental ini adalah mental proyek, mental studi banding, mental SPPD, mental konsultasi, mental reses, yang lebih berorientasi uang dari pada asas manfaatnya.

Mental Mekanik: Momok Bagi Masyarakat

Tentang mental mekanik ini, saya mengelaborasinya dari pandangan Antonio Gramsci (1891-1937). Menurutnya mental mekanik adalah cerminan dari pribadi oportunistis, pragmatis, yang menggunakan segala macam cara, taktik, dan strategi untuk mengekalkan posisi, jabatan dan kekuasaan pada instansi negara dan masyarakat. Mereka mengeksploitasi pengaruh dirinya untuk kepentingan jabatannya sehingga cenderung terlibat dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*). Menurut Nietzsche (1844-1900) mental mekanik merupakan manifestasi dari nafsu yang besar untuk berkuasa (*will to power*). Secara sosiologis, mental ini merupakan hasil dari bentukan sosial budaya dari suatu masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan gejala pragmatisme, instantisme, hedonisme dan konsumerisme.

Mental mekanik ini mendaraskan bahwa jabatannya merupakan sesuatu yang ‘sakral’ meskipun indikator sakralitasnya sangat subyektif, merujuk hanya pada perspektif pejabatnya. Masyarakat ‘dipaksa’ untuk mengakui saja apa yang sudah terberi dalam diri pejabat tersebut. Mereka cenderung menyakinkan masyarakat dengan berbagai dalil/argumentasi yang sebenarnya merupakan bentuk rasionalisasi, justifikasi dan legitimasi terhadap jabatannya. Bila mereka terbukti melanggar hukum dan moral, maka pejabat bermental mekanik tersebut berusaha dengan segala cara membebaskan diri. Mental mekanik begitu resisten dan indiferen (masa bodoh) terhadap kritik dan masukan yang rasional dari pihak lain terkait kinerjanya.

Segala bentuk masukan kritis dan rasional dinilai sebagai bentuk fitnah, pencemaran nama baik dan merongrong jabatannya.

Bahan Bacaan:

Indriyanto, Bambang, 2014. “Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 20, No. 4, Desember.

Hakim. Abdul, 2009. “Negara dalam Perspektif Plato” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Januari 2010, Vol. 9, No. 1, hal, 59-74.

Suseno, Franz Magnis, 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.



Politik Kesehatan dan Problem yang Belum Usai³⁶

Menurut laporan *The Legatum Prosperity Index* 2017, indeks kesehatan Indonesia berada di posisi ke-101 dari 149 negara (Debora, Tirto.id., 17/12/2017). Bila dibandingkan dengan Singapura, Indeks Kesehatan Indonesia masih tertinggal jauh. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa ini memiliki indeks kesehatan terbaik nomor dua di dunia di bawah Luksemburg, kemudian menyusul Jepang, Swiss dan Austria. Indeks kesehatan Indonesia yang rendah ini juga terpotret dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) terhadap beberapa masalah kesehatan

³⁶ Bagian dari prolog buku : “Asuhan Keperawatan: Diabetes Mellitus dan Diabetes Self-Management Education” karya Ns. Oliva Suyen Ningsih, M. Kep. (PKBM Sambi Poleng).

seperti status gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit mental. Potret masalah kesehatan ini diambil dari rentang 5 tahun terakhir (2013 s/d 2018).

Dalam rentang 5 tahun tersebut, ada beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan status gizi, antara lain: Stunting, Gizi Buruk dan Obesitas. Prevalensi stunting pada 2013 menyentuh 37,2% dan pada 2018 menurun menjadi 30,8%. Ada penurunan sekitar 6,4%; Tahun 2013, gizi Buruk mencapai 19,6%, dan pada 2018 menurun menjadi 17,6%. Ada penurunan 2%. Sedangkan pada kasus obesitas, justru mengalami 7%, di mana pada 2013 hanya 14,8% menjadi 21,8% pada 2018. Secara umum rerata presentasi untuk masalah kesehatan terkait status gizi di 2013 sekitar 23,87%. Sementara rerata presentasi masalah kesehatan terkait status gizi di tahun 2018 sekitar 23,4%. Dengan demikian, untuk masalah kesehatan terkait status gizi ini mengalami penurunan sekitar 0,47%.

Pada sisi Penyakit Menular (PM) terdapat beberapa masalah kesehatan yang kerap menjangkiti masyarakat Indonesia, yakni: Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Malaria, Diare dan *Tuberculosis* (TBC). ISPA di tahun 2013 berada pada level 13,8%, dan di tahun 2018 menurun 9,4% menjadi 4,4%. Malaria mengalami penurunan 1%, di mana di tahun 2013 sekitar 1,4% menjadi 0,4% di tahun 2018. Sedangkan Diare menurun 6,2%, di mana di tahun 2013 sekitar 18,5% menjadi 12,3% di tahun 2018. Sedangkan penyakit menular TBC masih mengalami stagnasi dalam prevalensinya, di mana tahun 2013 dan 2018 masih sekitar 0,4%. Terkait penyakit menular ini, rerata prevalensi di

tahun 2013 sebesar 8,5%; sementara tahun 2018 rerata prevelansinya 4,4%. Dengan demikian, prevalensi penyakit menular selama 5 tahun mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni sekitar 4,1%.

Penyakit Tidak Menular (PTM) yang sering menimpa masyarakat Indonesia, adalah kanker, stroke, gangguan ginjal kronis, diabetes dan hipertensi. Penyakit kanker mengalami kenaikan sekitar 0,4%, di mana pada 2013 hanya 1,4% menjadi 1,8% pada 2018. Penyakit stroke mengalami kenaikan yang signifikan, di mana pada 2013 hanya 1,4% menjadi 7% pada 2018. Terjadi kenaikan yang besar sekitar 5,6%. Kanker meningkat dari 1,4% di tahun 2013, meningkat menjadi 1,8% pada 2018. Terjadi kenaikan 0,4%. Gangguan ginjal kronis terjadi kenaikan 1,8%, di mana pada 2013 sekitar 2%, meningkat menjadi 3,8% di tahun 2018. Penyakit diabetes juga mengalami peningkatan. Tahun 2013 penyakit ini masih berada pada kisaran yang cukup besar, yakni 6,9%, dan di tahun 2018 berada pada kisaran 8,5%. Terdapat kenaikan 1.6%. Meskipun kenaikan masih satu digit, tetapi penyakit ini dipandang sangat potensial untuk berkembang cepat seiring dengan modifikasi gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat, yang dinilai sangat negatif bagi kesehatan. Sedangkan hipertensi menjadi penyakit yang dinilai paling berbahaya pada masyarakat Indonesia. Penyakit ini sangat potensial mengganggu dan bahkan bisa mengakhiri hidup seseorang, karenanya sering disebut sebagai ‘pembunuh senyap’ (*silent killer*). Pada 2013 penyakit ini berada di kisaran 25,8%, menanjak tajam pada 2018 menjadi 34,1%. Terjadi kenaikan yang sangat besar, yakni 8.3%. Selain sebagai pembunuh senyap, hipertensi

bisa menjadi pintu masuk bagi berapa jenis penyakit berat, seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan kebutaan (Arlinta, Kompas, 17/05/2019). Dengan presentasi di angka tiga digit ini, sebenarnya memberi sinyal tentang trend berbahaya dari perkembangan penyakit ini. Secara keseluruhan, rerata perkembangan PTM yang melanda masyarakat Indonesia di tahun 2013, sekitar 7,5%, dan rerata pada tahun 2018 sebesar 11,04%. Jadi, dalam 5 tahun rerata kenaikannya sekitar 3.54%.

Penyakit Mental yang melanda masyarakat Indonesia selama 5 tahun ini, juga mengalami peningkatan. Pada 2013 berada pada kisaran 1,7%, mengalami peningkatan 5,3% menjadi 7% di 2018. Selain disebabkan oleh faktor genealogis, psikologis dan sosial, pada era ini teknologi dan informasi, penyakit mental bisa juga disebabkan karena kuatnya penetrasi digital terhadap kondisi mental seseorang. Kecanduan terhadap perangkat digital diduga berkontribusi pada penyimpangan mental masyarakat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia (Tapung, Pos Kupang, 11/03/2019).

Dari sejumlah data di atas, terdapat 2 poin bersebelahan. *Pertama*, poin positif. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, adanya penurunan prevalensi untuk masalah kesehatan yang disebabkan oleh rendahnya status gizi dan penyakit menular. Penurunan ini bisa sebabkan berberapa faktor: (1) gencarnya ikhtiar pemerintah Indonesia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai program yang ber-*platform* promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi. Platform program ini juga

didukung dengan berupa perbaikan terhadap fasilitas dan infrastruktur kesehatan, layanan dan tata kelola kesehatan, dan kemudahan akses kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dll. Selain itu, terdapat program untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin. Program seperti ini penting demi mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sebab 40% kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan. (2) Seiring dengan gencarnya program yang ber-*platform* promosi, prevensi dan kurasi, serta sosialisasi dan edukasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin terlihat. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat semakin baik tentang kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola konsumsi yang baik, dan pola hidup yang sehat. Salah satu pengaruh konstruktif dari semakin meningkatnya derajat kesehatan adalah naiknya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Indonesia. Menurut Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bapenas 2018), AHH penduduk Indonesia mengalami kenaikan signifikan di angka 69,81 pada 2010 meningkat menjadi 71,91 di tahun 2017. Memang, AHH ini lebih berhubungan erat dengan angka kematian bayi, tetapi di sisi lain juga sangat terkait dengan soal umur panjang, hidup sehat dan produktivitas (DetikHealth, 30/01/2018).

Kedua, poin negatif. Selama kurun 5 tahun terakhir, Penyakit Tidak Menular (PTM) mengalami peningkatan yang signifikan. Asumsi dasar penyebab menanjaknya PTM ini sekitar 60% faktor *human error*, terkait dengan pola hidup yang tidak sehat. Hasil studi *Global Burden of Disease* (GBD) yang dirilis lembaga *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME) University of Washington (KumparanSAINS, 30/06/2018), menunjukkan bahwa meningkatnya beban PTM di Indonesia sebagian besar karena pola hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat. Menurut hasil studi ini, terdapat 28,9% penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun menderita kegemukan karena pola konsumsi yang tidak sehat; 93,5% yang berusia di atas 10 tahun, kurang suka mengonsumsi buah dan sayur-sayuran; 33,8% yang berusia di atas 15 menjadi menjadi perokok aktif (62,9% perokok laki-laki dan 4,8% perokok perempuan). Data Survei Indikator Kesehatan Nasional (2016) menggambarkan, sejak 2013 kecanduan merokok pada usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2% menjadi 8,8% dan kembali naik menjadi 9,1% (Risikesdas 2018). Sementara rata-rata konsumsi alkohol masyarakat Indonesia (2014) hanya sekitar 0,2%. Namun, bila dilihat dari proporsi konsumsi alkohol, terjadi peningkatan dari 3% menjadi 3,3% (Republik, Co. Id, 02/11/2018). Meskipun laporan Bank Dunia (2015) mengatakan, masyarakat Indonesia hanya mengonsumsi 0,6 liter alkohol per tahunnya, dan masih yang terendah di kawasan Asia Tenggara (Law-justice.co., 16/02/2018), tetapi perlu tetap diwaspadai sebagai pemicu munculnya berbagai bentuk komplikasi PTM. Selain menjadi pemicu munculnya PTM, kebiasaan mengonsumsi alkohol kerap juga menjadi biang lahirnya kejadian tawuran, pemerkosaan, persekusi, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain pola konsumsi, pola aktivitas fisik juga sangat berpengaruh pada meningkatnya prevalensi PTM. Data Riskesdas (2018) menginformasikan, aktivitas fisik sebagian masyarakat Indonesia masih terlihat kurang. Baru mengalami peningkatan dari 26,1% menjadi 33,5%. Peningkatan ini tentu tidak sebanding dengan aktivitas fisik yang dilakukan oleh lebih dari 60% masyarakat di Jepang atau 70% masyarakat di Belanda (Republik, Co. Id, 02/11/2018).

Ketiga, dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi peningkatan terhadap penyakit mental pada masyarakat Indonesia. Menurut hasil riset dari *Institute for Clinical Evaluative Sciences* (ICES) dan *Public Health Ontario* pada situs *publichealthontario.ca* menjelaskan, rerata beban penyakit mental 1,5 kali lebih berat daripada kanker dan 7 kali lebih besar daripada penyakit infeksi. Selain bebannya berat penyakit mental ini sulit untuk disembuhkan. Secara klinis, pada penyakit lain rata-rata setelah didiagnosa dan diprognoza, maka bisa dilakukan intervensi yang tepat dan sesuai. Namun, pada kasus penyakit mental, pengobatannya tidak hanya bersifat klinis saja, tetapi juga banyak melibatkan tindakan-tindakan non klinis. Hal inilah yang menyebabkan penyakit mental sering sulit dan kompleks dalam tindakan pengobatan.

Dari sudut pandang politik kesehatan, penanganan berbagai bentuk prevalensi penyakit di atas masih mengalami hambatan di Indonesia karena pemerintah masih memberi perhatian pada upaya mengurangi angka kematian bayi/anak dan berbagai jenis penyakit menular, dan belum cukup seimbang memberi perhatian pada masalah penyakit kronis, terutama yang disebabkan karena pola dan gaya hidup. Riset dan kebijakan kesehatan di Indonesia, masih

berkutat dengan penyakit biomedis dan penyakit yang menggejala secara umum, seperti malaria, TBC, dan diare. Sementara di negara maju, riset dan kebijakan kesehatan sudah fokus pada promosi dan edukasi perbaikan perilaku untuk menghindari kebiasaan merokok, minum alkohol, makan yang tidak beraturan, dll. Pada negara maju, investasi dalam bentuk asuransi kesehatan sudah memiliki porsi yang sangat besar dari rancangan kebijakan kehidupannya. Sementara di Indonesia, penanganan kesehatan masih terhambat dengan sumber daya dan investasi kesehatan yang minim. Sebagian besar masyarakat dan pemerintah masih fokus untuk pemenuhan kebutuhan primer, seperti pangan, sandang dan papan.

Bahan Bacaan:

Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester 1 2018.

Buletin Stunting Kemenkes 2018.

Chomsky, N. 1978. *Human Rights and American Foreign Policy*. New York: Oxford University.

Kartono, Kartini, 2014. *Patologi Sosial* (Jilid 1). Rajawali Pers: Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2017: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2017 Diakses dari: <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf> pada tanggal 12 Agustus 2018.

Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas), Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017.



Politik Pendidikan yang Visioner di Abad 21³⁷

Pengantar

Membuat kata pengantar untuk buku Adinda Rahmad menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Tantangannya tidak terletak pada masalah teknis sistematika, tetapi lebih pada substansi isi bukunya. Buku ini secara substansial memiliki konten yang sangat mendalam terkait dengan dialektika antara politik dan pendidikan. Dialektika ini menjadi semakin menarik, persis ketika penulisnya menarasikan beberapa persoalan nyata yang memamerkan adanya hubungan yang berkelindan antara politik dan pendidikan. Ketika membaca

³⁷ Tulisan ini merupakan prolog untuk buku “Pendidikan dan Politik Dalam 1 Narasi” karya Rahmad Nasir, M. Pd. (Perennial Institute, 2019).

isi buku ini, saya pun mengamini beberapa hipotesis yang menegaskan bahwa politik menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Banyak hal pada ruang pendidikan, justru digerakan dan diramaikan oleh politik.

Politik sudah menjadi semacam lokomotif yang enerjik dalam menarik gerbong pendidikan sehingga dapat bergerak maju. Bentuk karakter politik yang hidup dan berkembang di sebuah negara bangsa, sudah pasti turut menentukan tipikalitas arah perkembangan dan pertumbuhan pendidikannya. Sebaliknya juga, pendidikan menjadikan politik mendapat warna yang berbeda dari domain lainnya. Standar politik yang cerdas dalam satu negara bangsa menjadi tugas dan tanggung jawab dari pendidikan. Edukasi dan literasi politik merupakan bagian dari aktivitas pendidikan, dengan satu tujuan membentuk manusia berkeadaban dan bermartabat. Politik yang berkeadaban dan bermartabat merupakan salah satu luaran penting dari proses pembelajaran atau pendidikan (*learning outcomes*).

Problematika Pendidikan yang Belum Usai

Asumsi mengenai politik yang visioner menjadi penentu pendidikan visioner menjadi semakin menguat pada negara berkembang seperti Indonesia, ketika adanya tuntutan untuk bisa keluar dari silang sengkarutnya berbagai permasalahan sosial. Bertolak dari munculnya berjamak permasalahan yang diduga turut menghambat perkembangan bangsa dan fenomena degradasi kemanusiaan, maka urgensi politik pendidikan yang

visioner menjadi mengedepan. Politik pendidikan visioner ini keharusan untuk membantu mengurai kompleksitas permasalahan yang kerap melanda bangsa dan negara.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan kebangsaan, seperti degradasi lingkungan hidup, kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal, bunuh diri, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, kapitalisme ekonomi, desintegrasi, radikalisme, terorisme, hedonisme dan konsumerisme, maka perlu ada upaya untuk menyelesaikan semuanya. Setidaknya, ketika dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, sudah pasti persoalan-persoalan ini secara langsung atau tidak langsung berimbas pada melemahnya upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Bila ditilik dari perspektif ‘akibat’, kualitas pendidikan dapat mengalami kemunduran, berikut upaya pengembangan dan peningkatnya mengalami kendala. Sebab energi pendidikan harus membagi konsentrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Sementara pada negara-negara yang sudah maju, fokus dan modus kegiatan pendidikan tidak lagi berkuat dengan permasalahan-permasalahan sosial seperti ini. Masalah-masalah itu sudah berkurang bahkan tidak ada. Pendidikan negara-negara maju sudah fokus pada upaya membentuk karakter dan keterampilan yang mumpuni dalam menyambut perubahan-perubahan besar (*sudden shift*) pada abad 21. Negara-negara maju tersebut melihat bahwa karakter yang kuat dan keterampilan yang handal menjadi garansi utama dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat (*speed*), tiba-tiba (*sudden*), dan mengejutkan (*surprise*).

Dengan demikian, dalam pendidikan kritis, yang perlu dihilangkan dari masyarakat bangsa adalah sikap dan perilaku yang kurang kritis, kurang optimis, apatis, pasif, acuh tak acuh, daya saing lemah. Sikap dan perilaku seperti ini harus terus direduksi. Setiap warga perlu menyadari bahwa berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya berada dalam aliran angin berhembus, tanpa ada pemaknaan, perjuangan, simpati dan empati. Dengan semakin kuatnya gelombang perkembangan dan tuntutan akan perubahan sebenarnya memaksa warga masyarakat agar berusaha memberi pemaknaan yang lebih tinggi terhadap kehidupannya. Dalam konteks menguatnya kompleksitas persoalan kebangsaan saat ini, sudah barang tentu yang ditagih adalah sikap simpati, empati dan tanggung jawab kebangsaan yang lebih radikal, namun tentunya tetap membalutnya dengan kekuatan kritis, selektif, kreatif dan optimis.

Sementara bila dilihat dari perspektif ‘sebab’, justru rendahnya mutu pendidikan dapat menjadi salah satu faktor munculnya berbagai permasalahan kebangsaan. Namun, keadaan rendahnya mutu pendidikan, tentu tidak berdiri sendiri. Menurut saya, ada beberapa faktor tidak langsung yang turut memberi pengaruh, antara lain: (1) Rendahnya perhatian dan bimbingan dari orang tua, guru dan masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. (2) Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan) yang masih cukup rendah. (3) Fenomena tergerusnya identitas adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal dan agama. Fenomena ini berdampak pada berkembangnya sikap ignoran, indifferens dan permisif terhadap bentuk-bentuk penyimpangan sosial

dan penyakit sosial. Rendahnya antusiasme masyarakat dalam ritus-ritus agama dan adat serta minimnya partisipasi dalam melihara budaya, memberi gambaran mengenai kecenderungan menghilangnya identitas religus dan kultural. (4) Adanya gejala disorientasi praksis pendidikan sebagai satu tonggak kehidupan yang seharusnya bertanggung jawab dalam membentuk kecerdasan anak bangsa. Orientasi pada penguasaan konten materi (*hard skills*) yang tinggi dan lantas menyepelekan karakter diri (*soft skill*) seperti berpikir kritis, rasional, selektif dan analitis, menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam pola pikir dan tindakan yang merusak dan menyimpang. Padahal, pendidikan baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis bertujuan untuk menjadikan manusia memahami tentang keberadaannya di tengah dunia. Pendidikan seharusnya membantu mengemansipasi manusia tentang cara berada dan mengada di tengah dunia dan bagaimana mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan hidupnya.

Faktor ‘penyebab tidak langsung’ seperti krisis identitas dalam diri generasi muda, rendahnya perhatian orang tua, masyarakat, lembaga adat dan agama, dan kondisi IPM yang rendah, mungkin tidak bersentuhan langsung dengan realitas keharian dunia pendidikan. Faktor-faktor tersebut hadir sebagai pemicu, tetapi tetap berkontribusi bagi munculnya berbagai permasalahan sosial. Sedangkan yang menjadi faktor ‘penyebab langsung’ adalah masih rendahnya kualitas pendidikan, yang berujung pada rendahnya prestasi keilmuan dan penghayatannya dalam keseharian. Padahal yang diharapkan dari dunia pendidikan adalah terbentuknya generasi yang siap untuk menghadapi masalah, memecahkan

dan menyelesaikannya. Ini berarti, pendidikan nasional masih harus tetap memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam membentuk dan memberdayakan generasi bangsa sehingga dapat menghadapi, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan, baik yang terjadi di tingkat lokal, nasional maupun global. Salah satu tanggung jawabnya adalah membentuk dan membangun kualitas manusia yang mesti seimbang dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Di sisi lain, secara konseptual kritis, pendidikan kita masih terjebak untuk menggunakan pendekatan konvensional dan monologis dalam pembelajaran. Pendekatan ini dengan sendirinya mengekang aktivitas, kreativitas, inovasi dan kritisitas. Kegiatan pembelajaran kita kurang menantang, kurang bermakna dan berdaya kuat sehingga berdampak pada mengendurnya kuriositas dan inkuirisitas dalam diri masyarakat sekolah. Model, pendekatan, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan masih berorientasi pada penguasaan materi, dan belum cukup kuat dalam mengeksplorasi hubungan konten materi dengan permasalahan riil kehidupan masyarakat. Padahal, keadaan lingkungan dan kondisi bangsa yang riil sudah dapat menjadi ‘laboratorium’ yang strategis dalam mengembangkan pembelajaran kritis (*critical learning*) dan hadap masalah (*problem posing*). Kegiatan pendidikan dan pembelajaran kita belum cukup ideal dalam memberdayakan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan interdisipliner serta mampu mengendalikan atau memecahkan berbagai persoalan yang melanda diri dan masyarakatnya. Pengelolaan kelas yang kurang demokratis

dan dialogis, membuat siswa kurang berani untuk berbicara terbuka, kritis dan mandiri, memiliki rasa ingin tahu, mengambil keputusan, dan kemampuan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar, sementara lingkungan dengan berbagai permasalahannya kurang dimanfaatkan. Lingkungan dan masyarakat sosial belum dipandang sebagai sumber belajar yang mudah dan murah bagi pengembangan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun sikap peduli dan rasa tanggung jawab masyarakat didik terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan.

Urgensi Politik dan Pendidikan Visioner

Problematika riil nan klasik mengenai pendidikan kita seperti yang digambarkan di atas, sudah pasti mengundang kegelisahan semua pihak. Kegelisahan yang baik dan positif akan mengarah pada upaya membangun diskursus konstruktif tentang bagaimana bisa keluar dari permasalahan yang mendera. Demi menghidupkan kegelisahan yang positif ini dan berujung pada pemecahan masalah, salah satu tema yang bisa menjadi rujukan konseptual dan bahkan praksis adalah perspektif politik pendidikan visioner. Dalam perspektif politik visioner, pendidikan merupakan proses berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan keluhuran martabat manusia. Dengan pendidikan, manusia semakin menyadari hakikat dan martabat personal, sosial-politik, kultural, ekologis dan ekonominya. Dari kesadarannya itu manusia mampu memperbaharui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya (bdk. Renstra Kemendikbud 2015-2019).

Upaya pengarusutamaan pendidikan bertolak dari kesadaran kritis bahwa pendidikan menjadi dimensi yang sangat strategis bagi pengembangan kualitas manusia di suatu negara (Nugroho, 2008). Kesadaran kritis tersebut berdimensi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kesadaran sosial merupakan basis untuk menumbuhkembangkan jiwa-jiwa terpelajar dan kritis (*critical mass*) guna berperan dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat (Jena, 2012). Kesadaran kultural merupakan piranta atau medium yang efektif untuk membelajarkan norma, nilai dan etos dalam berkehidupan di kalangan warga masyarakat. Kesadaran ekonomi pembangunan menjadi ruang pembentukan sumber daya manusia yang memiliki visi dan idealisme ekonomi masa depan, memiliki jiwa wirausaha, kompetitif dan komparatif dalam membangun kualitas hidup. Kesadaran politik berupaya mengembangkan pendidikan sebagai aktivitas penguatan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam bermasyarakat dan bernegara bangsa (Calhoun, 1995).

Namun kesadaran kritis ini tidak tumbuh begitu saja. Perlu ada upaya lecut yang kuat dari semua pihak sehingga kesadaran kritis ini menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kritis-kolektif ini sangat dibutuhkan agar tidak ada yang dipersalahkan secara sepihak bila tujuan dan manfaat pendidikan jauh api dari panggangnya (Brubacher, 1947). Kesadaran kritis-kolektif perlu dibangun dalam diri setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, mengingat sejumlah tantangan serius yang akan dihadapi oleh warga masyarakat (bdk. Delors, 1996; Fukuyama, 2005), antara lain: (1)

Kemajuan teknologi informasi yang melampaui rata-rata kecepatan berpikir kritis masyarakat berkembang; (2) Loncatan perkembangan masyarakat Industri 4.0 menuju masyarakat post humanis 5.0, serta ekonomi global berbasis digital, (3) Kecenderungan relativisme dan permisivisme norma dan budaya; (4) Era *post truth* yang menggugat berbagai bentuk kebenaran dan keyakinan, (5) Loncatan komunikasi dari yang konvensional (oral, literal) menuju virtual dan digital.

Sementara, dalam dekade terakhir, narasi politik pendidikan Indonesia masih berhadapan dengan berbagai tantangan serius (Suryana, 2007), yakni: (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; (d) peningkatan pembiayaan; (e) peningkatan layanan pendidikan (berbasis digital). Berbagai tantangan ini tentu membutuhkan kajian kritis yang mengarah pada tindakan-tindakan praktis dalam membereskannya. Jelas, butuh proses dan kemauan baik (*good will*) dari semua pihak yang ‘merasa diri’ harus bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam tataran refleksi pedagogik yang visioner, saya membuat beberapa sintesis sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap langkah dan niat baik pemerintah dalam membebaskan masyarakat bangsa Indonesia dari situasi ‘tidak menyenangkan’, seperti hasil potret empirik di atas. Sintesis ini terangkum dalam tiga poin berikut ini (Tapung, 2016): *Pertama*, semua pengambil kebijakan dan pembuat keputusan pendidikan dari tingkat pusat sampai

daerah, bahkan sampai tingkat sekolah untuk berani keluar dari kerangkeng tata kelola pendidikan yang buruk (*poor education governance*). Dewasa ini, berbagai informasi tentang penerapan tata kelola pendidikan yang baik dan benar dari negara-negara yang sudah maju pendidikannya bisa menjadi model penerapan tata kelola pendidikan di negara kita dalam berbagai tingkatannya. Pada tingkat pusat, tata kelola pendidikan yang terintegrasi dan representatif (*integrated and representative education governance*) dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kondisi riil tiap wilayah NKRI, perlu dipertimbangkan untuk dirancang dan diimplementasikan. Sementara itu, pada tingkat daerah dan sekolah, tata kelola pendidikan yang berbasis sekolah seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan melibatkan *stakeholders* pendidikan, sebaiknya diterapkan secara komprehensif dan bila sudah menerapkannya, perlu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya.

Dalam perspektif pedagogik visioner, dengan adanya perubahan tata kelola pendidikan yang terintegrasi, representatif, dan berbasis sekolah, maka akan menghindari kecenderungan tata kelola yang sentralistik, formalistik, sektarianistik, tidak transparan dan akuntabel (Nugroho, 2008). Tipikalitas tata kelola yang destruktif seperti ini bisa diduga menjadi salah satu penyebab terjun bebasnya mutu pendidikan kita. Karenanya, perubahan tata kelola pendidikan begitu mendesak untuk dilakukan. Dari sudut piramidak normal, baik buruknya tata kelola pendidikan nasional ini sangat berpengaruh signifikan dan sistemik terhadap tata kelola di tingkat daerah, tingkat sekolah,

dan praksis pembelajaran di kelas. Sementara dari segi piramidak terbalik, kualitas pembelajaran di kelas secara sangat signifikan dan sistemik menentukan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, tingkat daerah dan tingkat nasional. Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang transparan, akuntabel, dan fleksibel akan mengkontruksi tata kelola pendidikan yang bebas dari konflik kepentingan dan keterjerumusan perilaku koruptif, di mana akhir-akhir ini begitu menggejala dalam dunia pendidikan kita.

Kedua, sudah saatnya pendidikan kita dibebaskan dari intervensi politik dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik baik oleh negara, partai politik ataupun oknum-oknum elitis tertentu. Bahaya laten dari intervensi politik dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik bisa berakibat pada dua hal, yakni: (1) Pendidikan akan menjadi zona perang kepentingan pragmatis kaum elitis, yang menyebabkan terkooptasinya nilai-nilai luhur visi-misi pendidikan. Dampak turunannya, pendidikan menjadi mainan politik bagi segelintir oknum untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk proyek dan kepentingan melanggengkan kekuasaan. Politisasi pendidikan kerap membuat masyarakat pada umumnya dan masyarakat didik khususnya, dieksploitasi dan dikamufase melalui sistem, kebijakan kurikulum dan berbagai regulasi. (2) Dalam banyak dimensi, perilaku pragmatis, instan dan bahkan tindakan koruptif dari para praktisi pendidikan, menjadi akibat langsung atau tidak langsung dari gejala dan fakta ‘pendidikan sebagai komoditas politik’. Cukup banyak para praktisi pendidikan yang terjungkal pada pelanggaran

hukum dan moral, karena ‘mencontoh’, ‘meniru’ dan bahkan ‘mempraktekan’ cara pikir dan bertindak dari kaum yang memanfaatkan pendidikan sebagai komoditas politik.

Ketiga, bila ada kemauan politik dan niat yang tulus dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui pendidikan, maka seharusnya bebas dari cara pandang dikotomis dan diskriminatif. Pemerintah perlu dengan arif untuk memperhatikan kesamaan, kesetaraan dan keadilan akses kebijakan, regulasi, informasi dan kesejahteraan antara sekolah di kota dan di desa, sekolah negeri dan swasta, guru negeri dan guru swasta. Dalam kerangka perbaikan kualitas masyarakat melalui pendidikan, sekat-sekat dikotomis dan diskriminatif tidak relevan dan seyogyanya dihilangkan, baik dalam tataran regulasi maupun praksis. Dikotomi dan diskriminasi dalam pendidikan justru tetap akan mengekalkan penindasan dan pembelengguan dalam diri masyarakat, dan sudah pasti menghambat upaya luhur pendidikan untuk membebaskan manusia sebagai manusia.

Politik Pendidikan Visioner di Abad 21

Pendidikan Indonesia menjadi bagian dari perkembangan peradaban dunia. Ketika peradaban dunia sudah berada dalam fase-fase penanjakan, maka serta merta pula konsep berikut praksis pendidikan nasional mengikuti sembari beradaptasi. Sebab jika tidak beradaptasi, maka pendidikan kita akan mengalami kecenderungan downgrade, yang berdampak pada rendahnya daya tarik, daya saing dan daya tahan dari sumber daya manusia. Dengan demikian, berbagai upaya membuka wawasan pendidikan yang

progresif visioner merupakan kemendesakan dan sangat imperatif.

Perspektif pedagogik visioner selaras dengan adanya tuntutan keterampilan yang wajib dimiliki masyarakat di abad 21 (Sullivan, 2007), yakni: (1) *Learning skills* dengan sub keterampilan: *communicating, critical thinking, creative thinking, collaborating*; (2) *Literacy skills* dengan sub keterampilan: *information literacy, media literacy, technology literacy*; (3) *Life skills* dengan sub keterampilan: *flexibility, initiative, social skills, productivity, leadership*. Ketiga keterampilan dengan sub-sub turunannya ini merupakan bagian dari konstruksi kesadaran visioner, di mana satu dengan yang lain saling mendukung dalam pengembangannya, terutama dalam membangun peradaban dunia yang lebih manusiawi pada masa mendatang. Tiga keterampilan ini didukung oleh tiga tujuan pembelajaran abad 21 (Zevin, 2011), yakni: (1) Tujuan didaktif berkaitan dengan pencapaian dan penguasaan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan; (2) Tujuan afektif berkaitan dengan pemberdayaan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang tepat terkait isu-isu strategis dan kontroversial, serta sikap yang tepat terkait norma, moral dan etika dalam relasi manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam. (3) Tujuan reflektif berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, sintetis, analogis, berdasarkan data/fakta, serta kemampuan memproyeksi masa depan berdasarkan kekuatan penentu yang ada pada masa sekarang. Ketiga tujuan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kompetensi pembelajaran yang visioner dan responsif terhadap berbagai bentuk perkembangan dan perubahan.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, perspektif politik visioner mengarah pada tiga ikhtiar berikut: (1) Menghilangkan segala bentuk ‘zona nyaman’ yang telah membenamkan cara berpikir kritis, kreatif dan alternatif. Pendidik harus berani berpikir kritis, alternatif dan kreatif agar membuka ruang pembaharuan dan perubahan. Pendidikan adalah dunia pengembangan di mana segala upaya membangun manusia berawal dari inisiasi kreatif dan konstruktif yang tidak ada hentinya. Mengikuti saja sistem kurikulum pendidikan yang sudah berlaku umum menjadi pilihan yang baik, tetapi ‘tidak cukup baik’ dalam konteks pengembangan pendidikan yang kontekstual, selaras tuntutan global dan kebutuhan lokal. Kurikulum tentu dibutuhkan agar pengembangan pendidikan tetap ‘on the track’ dan terarah, namun tidak berarti memasung bentuk-bentuk inisiasi dan kreativitas. Karenanya, berpikir dan bertindak ‘out of the box’ seorang pendidik dapat menjadi pilihan agar suasana pendidikan semakin dinamis dan memberikan kepuasan jiwa (katarsis) bagi yang terlibat di dalamnya. Memanfaatkan dan memberdayakan lingkungan dan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara kreatif akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna (*meaningful*) dan berdaya kuat (*powerful*), dan membuat materi terkoneksi secara integratif dengan dunia nyata (*real world*).

(2) Memberangus tendensi yang memaksa pendidikan untuk diabdikan pada kebutuhan pasar dan kepentingan ideologi-ideologi tertentu. Politik pendidikan mesti terus ‘dimandikan’ agar bersih dari upaya penjajahan terselubung dari kelompok, golongan dan rezim budaya, yang secara laten telah mereduksi makna dan nilai luhur pendidikan. Saya

sangat setuju bila negara memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen untuk melestarikan ideologi pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan, persatuan dan kesatuan negara bangsa. Namun, saya sangat tidak merasa ‘sreg’ bila negara membiarkan pendidikan dijadikan sebagai ajang melancarkan proyek-proyek ekonomi dengan menggusur program-program kemanusiaan yang merupakan substansi pendidikan. Pengadaan fasilitas pendidikan seperti buku pelajaran, alat tulis, sarana prasarana teknologi, perangkat evaluasi nasional, dana operasional sekolah, dana untuk siswa dan guru, menjadi sasaran dan target proyek ekonomi dari tingkat pusat sampai daerah. Pada titik tertentu proyek ekonomi ini akan menggeser substansi makna pendidikan ketika tidak dikontrol dan diawasi dengan ketat dalam pelaksanaannya. Beberapa penyimpangan yang pernah terjadi dalam menjalankan proyek-proyek ini telah mencoreng makna sejati dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam sudut pandang pedagogik visioner, kemauan dan kehendak politik yang baik dari pemerintah sangat menentukan kemajuan pendidikan. Kehendak politik ini bukan saja pada skala kebijakan kurikulum dan perangkat-perangkat turunannya, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan pendidikan. Keadilan dan pemerataan pendidikan, selain pada pada distribusi dan alokasi, tetapi juga berkorelasi dengan rasionalitas tingkat kesejahteraan dari para pendidiknya. Rasio kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta di daerah terpencil menjadi agenda yang belum terselesaikan oleh pemerintah sampai saat ini. Sudah pasti ketika berbicara tentang kesadaran visioner, maka kita akan berurusan dengan kesadaran

material (kesejahteraan) dari para pendidikan. Kesadaran visioner tidak muncul begitu saja tanpa dibangun di atas kesadaran material yang matang dan mapan. Kesadaran visioner ini akan terbangun dengan sendirinya bila pemerintah bisa menyudahi urusan-urusan material para pendidik secara adil dan merata. Pada negara-negara yang sudah maju peradaban pendidikannya, kesadaran visioner ini bertumbuh dengan baik ketika urusan-urusan material pendidikannya sudah diselesaikan dengan tuntas.

(3) Keberlanjutan kosmos harus menjadi tema/topik utama dalam aktivitas pendidikan, ketika fenomena kerusakan alam sangat nyata sekaligus mengancam sistem kehidupan global. Sungguh tidak mungkin berbicara tentang keadaan lingkungan pada masa sekarang tanpa membayangkan profil keadaannya pada masa mendatang. Pendidikan dan perangkat-perangkat yang terkait padanya harus berperspektif ekologis dan *sustainable*. Isu-isu ekologis dan keberlanjutan sangat menggeliat pada kegiatan pendidikan negara-negara yang maju pendidikannya. Mereka ‘sudah selesai dengan dirinya’, lantas berkomitmen memikirkan keadaan lingkungan bangsa lain karena bertolak dari asumsi bahwa persoalan lingkungan negara lain adalah bagian dari persoalannya. Perspektif pendidikan visioner yang berbasis ekologis ini sangat ramah dengan konsep pemberdayaan dan rekonstruksi potensi dan kearifan lokal yang ‘memanusiakan alam’ dan ‘mengalami manusia’ (*eco-humanism*). Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan alam dunia senantiasa diwacanakan sebagai bagian dari kematangan kesadaran visioner tersebut. Karena itu, membentuk perilaku kognitif,

afektif dan psikomotor yang berkarakter ekologis dan sustainable hendaknya menjadi bagian dari rumusan tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran dari jenjang usia dini sampai perguruan tinggi.

Penutup

Relasi erat antara politik dan pendidikan menjadi keniscayaan pada abad 21. Saling mendukung yang elaboratif dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang lateral, kompeten dan berpikir kritis, serta memiliki daya saing yang tinggi, menjadikan politik dan pendidikan seumpama dua sisi dari satu mata uang. Elaborasi yang dialektis antara keduanya akan semakin memiliki daya ungkit bila berada dalam platform yang sedikit lebih progresif nan visioner. Platform progresif-visioner ini merupakan bagian dari tuntutan, bahwa kompleksitas permasalahan yang sedang dan akan terjadi di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan hanya cara pandang pendidikan yang lazim dan konvensional. Keluar dari kegelisahan intelektual yang konvensional inilah, yang juga menjadi konsentrasi isi buku saudara Rahmad ini. Sebagaimana dalam beberapa fragmennya, buku Saudara Rahmad ini telah berikhtiar menawarkan cara pandang yang cukup progresif-visioner dalam meleraikan bermacam masalah pendidikan kita. Untuk lebih memahami pemikiran penulis mengenai dialektika politik dan pendidikan dan bagaimana elaborasi keduanya dalam membahas permasalahan pendidikan, maka mari membaca buku ini! Di atas segalanya, profisiat adinda Rahmad. Mari melawan hegemoni irasionalitas dengan membangun gagasan rasional dan masuk akal.

Bahan Bacaan:

- Sindhunata, dkk (ed.), 2001. *Mencari Visi Dasar Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Zevin, J. (2007). *Social Studies for The Twenty-First Century, Methods and Materials for Teaching in Middle and Scondary schools, (Third Edition)*. New York: Routledge Taylor and Francis Group
- Morrison, K., 1995. , 2003. “Jurgen Habermas”, dalam Joy A. Palmer (ed), *50 Pemikir Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. (Alih bahasa: Farid Assifa) Yogyakarta:Jendela.
- Suseno, F. Magnis, , 1992. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta, Gramedia,
- Suseno, F. Magnis,, 1993. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F. Magnis,,2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suparno, Paul, 2005. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.



Literasi Marxis, Lawan Pemberangusan!³⁸

Pemikiran Marx menjadi dasar pergulatan intelektual saya sejak studi Filsafat di STFK Ledalero-Maumere. Skripsi saya yang berjudul: “Kerja Menurut Karl Marx dan Relevansinya Bagi Peningkatan Mutu Kemanusiaan” (1999), sebagian besar terpengaruh oleh konsep-konsep dasar Marxis. Dengan pembimbing yang memiliki basis filsafat yang mumpuni, Prof. Dr. Konrad Keboang, SVD dan Dr. Leo Kleden, SVD serta pengujinya, Dr. Amatus Woi, SVD (almarhum), menambah kecintaan saya terhadap Marx dan pemikirannya. Ketika menyusun tesis (2007), pemikiran Marx terkait lingkungan hidup menjadi tonggak

³⁸ Harian Umum Pos Kupang, 08/08/2019.

pengembangan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar yang berperspektif ekologis. Selanjutnya pemikiran Marx ini menjadi gerbong lokomotif pergulatan kasta intelektual yang tertinggi, strata doktoral. Dalam terang pemikiran neo-Marxis saya mengonstruksi disertasi (2018) dengan judul: “Emancipatory Learning (Jurgen Habermas) untuk meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMP (Studi Pengembangan di SMP se- Kota Ruteng)”. Dalam disertasi ini, Habermas tampil sebagai seorang neo-Marxis. Dia membawahi dua hal: Di satu pihak sangat mengagungkan pemikiran Marx, tetapi pada pihak lain, membuat beberapa kritik (antitese) yang serius terhadapnya. Namun, dalam pencahayaan dialektika emansipatoris, kritik Habermas justru menjadikan pemikiran Marx mendapat ruang dan tempat pemaknaan di peradaban intelektual modern. Gagasan mengenai critical pedagogy dan 21st thinking skills yang menekankan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif, merupakan serpihan breakdown dari dialektika pemikiran Marx dan para neo-Marxis. Tidak ketinggalan, sebagai seorang Marx Muda dalam kadar yang sederhana, saya menuangkan beberapa format dialektikanya dalam dua judul karya: “Dialektika Filsafat Pendidikan; Telaah Konsep dan Praksis Pendidikan” (Pharresia Institute, 2013) dan “Narasi Bangsa yang Tercecer: Elaborasi Pedagogik, Sosial dan Politik (Cendikia, 2018). Pada dua buku ini, saya mengelaborasi secara dialektis pemikiran Marx dengan berbagai bentuk pengembangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi publik rasional.

Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis dan sosialis

revolusioner asal Jerman. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Jerman; kemudian meninggal pada 14 Maret 1883 di London, Britania Raya. Dia berasal dari keluarga kelas menengah. Semasa hidup pernah mengenyam pendidikan hukum dan filsafat Hegelian. Kehadiran Marx pada pentas peradaban sejarah sangat polemis sekaligus kontroversial. Bagi mereka yang tidak paham dan ignoran dengan pemikiran Marxis, akan menghiraukannya sebagai pembawa malapetaka. Kebanyakan yang anti Marx dan pemikirannya, adalah para anti perubahan (pro status quo). Mereka begitu alergi dengan pemikiran kritis terkait berbagai bentuk ‘penjajahan’ sosial, kemanusiaan dan religius yang dibidani para pihak, seperti lembaga negara, agama, kelompok maupun perorangan. Mereka yang ingin mengekalkan kemapanan berpikir dan berpraksis konvensional selalu memandang Marx sebagai hantu yang harus diberangus dan dibersihkan (sweeping). Kaum ortodoks, tradisional dan fundamentalis dalam bidang (lembaga) negara, agama, politik, sosial dan pendidikan, merupakan kelompok yang dikenal sangat antipatik dengan dengan alur pikir Marx ini. Seruan revolusi proletaris dan penyebutan agama sebagai candu bagi masyarakat, sudah pasti membuat tersinggung para feodalis dan hirarkis. Ketersinggungan ini pun kerap menjadi alasan dalam mengampanyekan sekaligus mempropagandakan penolakan terhadap berjamak hal berbau marxis.

Sementara pada pihak kaum oportunist-ideologis di bidang politik dan agama, kerap menjadikan isu Marxis sebagai komoditas untuk menyerang lawan. Kaum oportunist ideologis, secara sengaja mengulang sejarah

kelam perjuangan Marxis demi membangun persepsi/opini buruk di masyarakat. Cerita sejarah buruk ini selalu direpetisi, lalu dikemas untuk menciptakan kecemasan dan ketakutan publik tentang adanya bahaya reinkarnasi ideologi Marxis. Pada era postmodern, upaya ini sudah pasti menjadi bagian dari ekspresi paranoid terhadap dialektika kritis. Pada galibnya, kaum ini tidak terbuka pada kritik dan mengultuskan pemikiran sendiri. Ketika berhadapan dengan pemikiran kritis, mereka begitu defensif lalu ofensif demi klaim ‘ghetto’ kebenaran. Asumsinya, di luar kelompok dan imannya tidak ada kebenaran. Kaum ini menyakini kebenaran barunya dapat meruntuhkan dalil kebenaran lama (post truth approach), yang sebenarnya merupakan hasil temuan dari metode dan pendekatan yang sudah sah secara saintifik. Mereka mengisolasi diri dan berrelasi secara eksklusif-elitis. Mereka selalu berada dalam ‘ketakutan’ bergaul dengan pihak yang dianggap membawa penistaan bagi lingkungannya. Karena itu, sering ada propaganda untuk menghilangkan atau menyingkirkan eksistensi orang lain, dengan cara-cara yang tidak manusiawi sekalipun. Bila ini dilakukan oleh agamawan, maka Henry Bergson menyebutnya sebagai morale close, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi arena saling mencakar, yang dipicu oleh eskalasinya kebencian dan paranoia pada sebuah bentuk keyakinan (Tempo, 23/12/2018).

Pada dekade terakhir, diskursus selalu dirintis oleh cendekiawan untuk sekadar menjernihkan konstruksi persepsi yang salah terhadap Marxis. Kaum cendikia ini sering memulainya dari rekontruksi sejarah dengan tujuan utama: pelurusan sejarah. Dari berbagai upaya rekonstruksi,

muncul temuan: (1) Pemikiran Marx sering dikomodifikasi secara ideologis untuk kepentingan kekuasaan. Berapa premis Marxis sering dieksploitasi demi menjustifikasi perjuangan merebut kekuasaan secara tidak sah. Pada sisi lain, justru ada pihak lain yang juga ingin merebut kekuasaan dengan membentuk kontra ideologi. Kaum ideologis ini sengaja menciptakan ideologi hantu (ghost ideology) dengan membubuhi bermacam stigma keburukan. Selanjutnya, mereka menabuh genderang perang dengan melibatkan emosi kolektif masyarakat untuk melawan secara masif ideologi hantu bentukannya sendiri. Tujuan utama perang kepada ideologi hantu ini adalah merebut simpati populis, lalu menggunakan sebagai senjata merebut kekuasaan (Bdk. Parekh, *Marx's Theory of Ideology*, 2015). (2) Kejujuran kajian intelektual menarasikan, tidak sedikit para pemikir yang salah kaprah dalam memahami dan menafsirkan gagasan Marx. Salah kaprah ini kemudian menjadi embrio dari berjenis perang periodik yang pernah terjadi di antara bangsa-bangsa. Penyimpangan interpretasi, bisa saja disebabkan kedangkalan akademik dari para penafsir, tetapi bisa juga karena kooptasi kepentingan politik dan agama. Adanya konflik kepentingan seringkali membuat pemikiran orisinal Marx menjadi kabur substansi. Hal ini tentu menyebabkan bias pemahaman tentang pemikiran Marx. Penghilangan status esensial dari sesuatu karena kedangkalan pemahaman disebut Nichols dalam *The Death of Expertise* (2017) sebagai fenomena *Intellectual Discolation*.

Pada pihak pencinta yang fanatik dan posesif, Marx adalah santo. Santo dalam hal mengumandang perjuangan kelas, kesetaraan, keadilan, perubahan sosial serta pemurnian

dalam menjalankan keagamaan. Beberapa karyanya, seperti Das Kapital (1867), Manifesto Komunis (1848), Critique of Political Economy (1859), Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (1932), Thesis on Feuerbach (1845), The Poverty of Philosophy (1847), Wage-Labour and Capital (1847), Germany Ideology (1988), Critique of Hegel’s ‘Philosophy of Right (1844), Das Kapital I, Kapital II, Kapital III (1867-1894), dimistifikasi sebagai kitab suci perubahan sosial dan pola pikir. Mistifikasinya tidak saja terletak pada konten yang relatif radikal dan revolutif, tetapi lebih pada dialetika yang muncul setelah karyanya dicela para pengeritik. Mistifikasi juga muncul, takala ada pihak irasional yang sangat keras berikhtiar menghilangkan jejak-jejak pemikirannya dari muka bumi. Namun, sepertinya para pencinta sejati, berkukuh dalam keimanan: semakin kuat upaya pemberangusan, sekuat itu pula kecintaannya terhadap pemikiran Marx.

Kritik adalah bagian integral dari literasi Marxis. Pemikiran Marx berkembang begitu pesat, justru ketika kritik menghidupkannya. Seorang pembenci sejati Marxis sekalipun, tidak akan pernah bertahan dalam kebenciannya. Sebab, ketika seorang membenci buah-buah pemikirannya, maka sebenarnya pada saat yang sama, orang itu sudah menasbihkan dirinya sebagai neo-marxis. Secara tidak sadar, kegiatan menggulati pemikiran Marx untuk mendapat celah kritik, merupakan bagian dari proses mencintai Marx. Pemikirannya tidak saja menjadi gonjang-ganjing kritik sosial, tetapi juga menjadi sitasi dari hampir semua gerakan perubahan sosial dari sejak abad pertengahan. Beberapa bentuk revolusi di sejumlah negara berkembang, justru

kental dengan inspirasi Marxis. Sepertinya, setiap perjuangan dan pergumulan perubahan, dengan sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, kerap menyantolkan pemikiran Marxis pada aras gerakan. Karena itu, jangan pernah menafikan, setiap gerakan perubahan hampir tidak bisa dipisahkan dari platform Marxis ini. Bahkan, pada negara-negara berdiskursus politik demokrasi, tetap menjadikan pemikiran Marx sebagai basis kajian. Beberapa partai politik besar di Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia memiliki payung perjuangan yang kental dengan konsep dan praksis Marxis. Dari sisi perjalanan Gereja Katolik sejagat, kontribusi pemikiran Marx menjadi singgahan dari sebagian prinsip Teologi Pembebasan pada abad 20 di Amerika Latin, yang dipelopori Gustavo Gutierrez (Prastowo, 2017).

Bahan Bacaan:

- Zid, Muhammad, 2010. “Menelusuri Pemikiran Habermas tentang Gerakan Lingkungan ; Dari pemikiran Jurgen Habermas dan Karl Marx serta Dilema Pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan di Indonesia, Vol. 2 No. 3 Maret. UNJ.
- Morrison, K., 1995. , 2003. “Jurgen Habermas”, dalam Joy A. Palmer (ed), *50 Pemikir Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. (Alih bahasa: Farid Assifa) Yogyakarta:Jendela.
- Prastowo, Yustinus, 2017. “Teologi Pembebasan, Marxisme, dan Ajaran Sosial Gereja (Sebuah Rekonstruksi Historis)”. Diskusi Meja Bundar: Saling Silang Cerita Dua Daratan. LIFEs.

- Suseno, F. Magnis, , 1992. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta, Gramedia,
- Suseno, F. Magnis,, 1993. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F. Magnis,,2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tapung, Marianus Mantovanny, 2018. *Narasi Bangsa yang Tercecer: Elaborasi Filosofis, Pedagogik, dan Politik*. Cendikia: Bandung.
- Tapung, Marianus Mantovanny, 2014. *Dialektika Pendidikan: Telaah Filosofis Konsep dan Praksis Pendidikan*. Pharesia Institute: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2001. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Veeger, K.J. 1984. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta:Gramedia.
- Kant, Immanuel, 2005. *Critique of Practical Reason, 1965 (Kritik Atas Akal Budi Praktis* (terjem. Nurhadi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.